



**BELANJA JASA KONSULTASI BERORIENTASI LAYANAN — JASA STUDI
PENELITIAN DAN BANTUAN TEKNIK (JASA KONSULTASI PENYUSUNAN
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL)**

LAPORAN AKHIR



TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya, Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Jambi dapat diselesaikan tepat waktu. Dokumen ini disusun sebagai landasan akademik dan teknokratis untuk memperkuat arah kebijakan penanaman modal Kota Jambi periode 2025–2045, sekaligus menjawab kebutuhan sinkronisasi perencanaan investasi lintas sektor di tingkat kota, provinsi, dan nasional. RUPM Kota Jambi berpegang pada prinsip kepastian hukum, kemudahan berusaha, inklusivitas ekonomi, keberlanjutan lingkungan, serta penguatan daya saing daerah, dengan perhatian khusus pada pemberdayaan UMKMK agar terintegrasi dalam rantai nilai investasi.

Sejalan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Jambi, RPJMD Kota Jambi 2025-2029 dan dokumen RPJPD Kota Jambi 2025-2045 menjadi acuan perumusan strategi peningkatan iklim investasi, persebaran penanaman modal yang berkeadilan, fokus sektor prioritas, fasilitasi dan insentif, promosi investasi, hingga tata kelola pelayanan perizinan yang transparan dan akuntabel. Rumusan dalam buku ini memetakan potensi unggulan daerah, merumuskan sasaran dan indikator kinerja, menyusun peta jalan (*roadmap*) implementasi, serta menyiapkan daftar proyek siap tawar (*investment project ready to offer*) yang selaras dengan agenda transformasi ekonomi, digitalisasi layanan, dan penguatan infrastruktur dasar.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada pimpinan daerah, perangkat daerah terkait, lembaga statistik dan perencanaan, pelaku usaha dan asosiasi, perguruan tinggi, serta para pakar dan pemangku kepentingan yang telah memberikan data, masukan, dan validasi. Apresiasi juga diberikan kepada tim penyusun atas kerja keras dalam pengumpulan data, analisis, harmonisasi regulasi, dan perumusan kebijakan. Menyadari masih adanya keterbatasan, saran konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan dokumen ini di tahap pelaksanaan dan pemantauan. Semoga RUPM Kota Jambi menjadi pijakan yang kokoh untuk mengakselerasi investasi yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan; mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan asli daerah, serta kesejahteraan masyarakat Kota Jambi pada periode 2025–2045 dan seterusnya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kota Jambi, November 2025
Kepala DPMPPTSP Kota Jambi

H. Abu Bakar, SH
NIP. 19700525 200012 1 004



RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Jambi 2025–2045 disusun sebagai instrumen strategis untuk memperkuat daya saing investasi daerah melalui transformasi ekonomi berbasis jasa modern, penguatan tata kelola, dan optimalisasi pemanfaatan ruang kota. Dengan visi “Pusat Investasi Hijau, Inklusif, dan Berdaya Saing”, RUPM menempatkan sektor jasa tersier unggulan khususnya Jasa Kesehatan, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), serta Pariwisata sebagai penggerak utama pertumbuhan jangka panjang. Fokus pada ketiga sektor ini didasarkan pada pertumbuhan permintaan regional, ketersediaan infrastruktur pendukung, serta potensi Kota Jambi untuk memperkuat perannya sebagai pusat layanan publik dan ekonomi kreatif di wilayah Sumatera bagian tengah.

Analisis SWOT dan PESTEL menunjukkan bahwa Kota Jambi memiliki posisi strategis berkat konektivitas Tol Trans-Sumatera, pertumbuhan ekonomi digital, dan meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan. Namun, kota ini juga menghadapi tantangan berupa utilitas dasar yang belum optimal, regulasi yang kurang efisien, tekanan lingkungan, serta tuntutan penerapan prinsip ESG. Untuk menjawab peluang dan tantangan tersebut, strategi RUPM diarahkan untuk memperkuat sektor jasa melalui pengembangan Kota Cerdas dan Pusat Logistik Terpadu, sekaligus memperbaiki kelemahan utilitas dan tata kelola melalui skema KPBU dan pembenahan sistem perizinan OSS-RBA agar iklim investasi lebih cepat, transparan, dan berkelanjutan.

Pengembangan investasi Kota Jambi diarahkan melalui klusterisasi Orde Kegiatan: Orde I (Telanaipura dan Pasar Jambi) sebagai Pusat Jasa Premier/CBD; Orde II (Kota Baru dan Jambi Timur) sebagai Zona Ekspansi ekonomi kreatif, industri digital, dan pendidikan vokasi; serta Orde III (Pelayangan dan Jambi Selatan) sebagai kluster pariwisata heritage dan ketahanan lingkungan. Pendekatan ini menjaga keseimbangan pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan, dan pemerataan peluang investasi.

RUPM menyiapkan daftar proyek siap tawar yang memuat kebutuhan lahan, potensi lokasi, infrastruktur, regulasi, dan opsi pembiayaan, memudahkan pemerintah, investor, dan lembaga keuangan menyelaraskan proyek. Penerapan OSS-RBA, prinsip ESG, dan peningkatan kapasitas aparatur menjadi dasar tata kelola investasi yang transparan, cepat, dan akuntabel.



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1-1
1.1. Latar Belakang	1-1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	1-4
1.2.1. Maksud RUPM Kota Jambi.....	1-4
1.2.2. Tujuan RUPM Kota Jambi	1-4
1.3. Sasaran	1-5
1.4. Landasan Hukum	1-5
1.5. Ruang Lingkup.....	1-7
1.6. Produk yang dihasilkan.....	1-7
1.7. Sistematika Penulisan	1-8
1.8. Waktu Pelaksanaan	1-8
BAB 2 POTENSI DAN REALITAS.....	2-1
2.1. Keadaan Geografis dan Administratif.....	2-1
2.1.1. Keadaan Geografis.....	2-1
2.1.2. Keadaan Administratif.....	2-11
2.2. Demografi	2-13
2.3. Ketenagakerjaan.....	2-18
2.4. Indeks Pembangunan Manusia	2-24
2.4.1. Pendidikan	2-27
2.4.2. Kesehatan.....	2-51
2.4.3. Indikator HLS, RLS dan UHH	2-65
2.5. Perekonomian	2-67
2.5.1. Pertumbuhan Ekonomi	2-68



2.5.2. Struktur Ekonomi.....	2-92
2.5.3. Inflasi	2-98
2.6. Infrastruktur	2-102
2.7. Potensi Penanaman Modal Kota Jambi	2-109
2.7.1. NIB (Nomor Induk Berusaha)	2-109
2.7.2. Sektor Usaha	2-113
2.7.3. Pengajuan Proyek Berdasarkan Tingkat Resiko	2-117
2.7.4. Penerbitan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha	2-120
2.7.5. TOP 5 KBLI.....	2-122
2.7.6. Penerbitan Izin Praktek Tenaga Kesehatan	2-124
2.8. Pola Perkembangan Kota Jambi	2-127
2.9. Kontribusi Penanaman Modal Bagi Pembangunan Kota Jambi (Ekonomi dan Sosial Budaya)	2-135
2.10. Isu Strategis Terkait Penanaman Modal di Kota Jambi	2-136
2.11. Kelembagaan Penanaman Modal di Kota Jambi.....	2-140
BAB 3 ANALISIS DATA.....	3-1
3.1. Analisis SWOT	3-1
3.1.1. Kekuatan	3-3
3.1.2. Kelemahan	3-3
3.1.3. Peluang.....	3-4
3.1.4. Tantangan.....	3-6
3.2. Analisis PESTEL	3-7
BAB 4 VISI DAN MISI RUPM KOTA JAMBI 2025-2045	4-1
4.1. Visi RUPM Kota Jambi Periode 2025-2045.....	4-4
4.2. Misi RUPM Kota Jambi Periode 2025-2045	4-6
BAB 5 ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL KOTA JAMBI	5-1
5.1. Logistik dan Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK)	5-4
5.2. Industri Hilir (Makanan dan Minuman).....	5-5
5.3. Pariwisata (MICE dan Budaya Sungai).....	5-6
BAB 6 KEBIJAKAN DAN STRATEGI	6-1
6.1. Kebijakan	6-1



6.2. Strategi Kebijakan.....	6-25
BAB 7 SASARAN PEMBANGUNAN RUPM KOTA JAMBI 2025-2045	7-1
BAB 8 PENUTUP	8-1
8.1. Kesimpulan	8-1
8.2. Rekomendasi.....	8-2
DAFTAR PUSTAKA.....	9-1
LAMPIRAN	10-1



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Jarak ke Kota Jambi (Kota baru)	2-2
Tabel 2.2. Kelerengan Lahan di Kota Jambi	2-4
Tabel 2.3. Formasi Geologi Kota Jambi	2-6
Tabel 2.4. Daerah Aliran Sungai yang Melintasi Wilayah Kota Jambi.....	2-8
Tabel 2.5. Luas Wilayah Administrasi Kota Jambi	2-12
Tabel 2.6. Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk per km ² menurut Kecamatan di Kota Jambi	2-14
Tabel 2.7. Jumlah, Penyebaran Penduduk dan Luas Wilayah Menurut Kecamatan dalam Kota Jambi Tahun 2025.....	2-15
Tabel 2.8. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi (ribu jiwa), Periode 2021–2025.	2-17
Tabel 2.9. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kota Jambi, 2024	2-19
Tabel 2.10. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Terakhir dan Jenis Kelamin di Kota jambi, 2024	2-20
Tabel 2.11. Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu Terakhir di Kota Jambi, Tahun 2024.....	2-21
Tabel 2.12. Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu Terakhir di Kota Jambi, Tahun 2024.....	2-22
Tabel 2.13. Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja Seminggu Terakhir Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Jambi.....	2-23
Tabel 2.14. Jumlah Sekolah dasar (SD) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menurut Kecamatan di Kota Jambi, Periode 2023/2024 dan 2024/2025	2-28
Tabel 2.15. Jumlah Guru SD Menurut Kecamatan di Kota Jambi periode 2023/2024–2024/2025	2-29
Tabel 2.16. Jumlah Murid SD Menurut Kecamatan di Kota Jambi Periode 2023/2024–2024/2025	2-30



Tabel 2.17. Jumlah SMP Negeri dan Swasta Menurut Kecamatan di Kota Jambi, Periode 2023/2024–2024/2025	2-31
Tabel 2.18. Jumlah SMA Negeri dan Swasta Menurut Kecamatan di Kota Jambi, 2023/2024–2024/2025	2-32
Tabel 2.19. Jumlah Guru (SMA) Negeri dan Swasta Menurut Kecamatan di Kota Jambi, 2023/2024–2024/2025	2-33
Tabel 2.20. Jumlah Murid (SMA) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menurut Kecamatan di Kota Jambi, 2023/2024 dan 2024/2025	2-34
Tabel 2.21. Jumlah Sekolah SMK di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menurut Kecamatan di Kota Jambi, 2023/2024 dan 2024/2025	2-35
Tabel 2.22. Guru (SMK) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menurut Kecamatan di Kota Jambi, 2023/2024 dan 2024/2025	2-36
Tabel 2.23. Murid (SMK) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menurut Kecamatan di Kota Jambi, 2023/2024 dan 2024/2025	2-37
Tabel 2.24. Sekolah (MA) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menurut Kecamatan di Kota Jambi, 2023/2024 dan 2024/2025.	2-38
Tabel 2.25. Guru (MA) Menurut Kecamatan di Kota Jambi, Periode 2023/2024	2-39
Tabel 2.26. Murid (MA) Menurut Kecamatan di Kota Jambi, Periode 2023/2024	2-40
Tabel 2.27. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Jambi, 2023 dan 2024	2-41
Tabel 2.28. Angka Melek Aksara Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kota Jambi, 2023 dan 2024	2-42
Tabel 2.29. Jumlah Sekolah Dasar (SD) di Kota Jambi, 2020-2024	2-43
Tabel 2.30. Jumlah SMP di Kota Jambi Tahun 2020-2024	2-44
Tabel 2.31. Jumlah SMA di Kota Jambi Tahun 2020-2024	2-45
Tabel 2.32. Jumlah SD per kecamatan (unit sekolah) Desa/Kelurahan yang Memiliki Fasilitas Sekolah Menurut Kecamatan dan Tingkat Pendidikan di Kota Jambi, 2020–2024	2-46



Tabel 2.33. Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Fasilitas Sekolah SMP di Kota Jambi, Periode 2020–2024	2-47
Tabel 2.34. Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Fasilitas Sekolah SMA di Kota Jambi, 2020–2024	2-48
Tabel 2.35. Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Fasilitas Sekolah SMK di Kota Jambi, 2020–2024	2-49
Tabel 2.36. Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Fasilitas Perguruan Tinggi di Kota Jambi, 2020–2024	2-50
Tabel 2.37. Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sarana Kesehatan: Rumah Sakit di Kota Jambi, 2020–2024	2-51
Tabel 2.38. Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sarana Kesehatan: Poliklinik di Kota Jambi, 2020–2024	2-52
Tabel 2.39. Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sarana Kesehatan: Puskesmas di Kota Jambi, 2020–2024	2-53
Tabel 2.40. Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sarana Kesehatan: Puskesmas Pembantu di Kota Jambi, 2020–2024	2-54
Tabel 2.41. Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sarana Kesehatan: Apotek di Kota Jambi, 2020–2024	2-55
Tabel 2.42. Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kota Jambi, 2024	2-56
Tabel 2.43. Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kota Jambi, 2024	2-57
Tabel 2.44. Jumlah Tenaga Keteknisan Medis, Teknik Biomedika, dan Kesehatan Tradisional Menurut Kecamatan di Kota Jambi, 2024	2-58
Tabel 2.45. Jumlah Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus Menurut Kecamatan di Kota Jambi, 2023–2024	2-59
Tabel 2.46. Jumlah Puskesmas Rawat Inap dan Non Rawat Inap Menurut Kecamatan di Kota Jambi, 2023–2024	2-60
Tabel 2.47. Jumlah Tenaga Kesehatan per Puskesmas di Kota Jambi Tahun 2025 ...	2-61
Tabel 2.48. Tenaga Kesehatan per Puskesmas di Kota Jambi, 2024	2-62
Tabel 2.49. Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Rumah Sakit di Kota Jambi, 2024 Tenaga Kesehatan per rumah sakit	2-63
Tabel 2.50. Tenaga Kesehatan lainnya per RS Menurut Kecamatan di Kota Jambi ...	2-64
Tabel 2.51. Indikator HLS, RLS dan UHH Kota Jambi Periode 2020-2024	2-66



Tabel 2.52. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi	2-68
Tabel 2.53. Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Jambi (miliar)	2-70
Tabel 2.54. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Jambi (persen).	2-72
Tabel 2.55. Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Kota Jambi Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, 2020–2024.....	2-73
Tabel 2.56. Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan (rupiah), 2023 dan 2024	2-77
Tabel 2.57. Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompok pengeluaran, Tahun 2024 (rupiah).....	2-78
Tabel 2.58. Jumlah wisatawan di Kota Jambi Tahun 2022–2024	2-83
Tabel 2.59. Klasifikasi Prioritas Sektor Ekonomi Kota Jambi Berdasarkan Overlay SLQ, DLQ, Shift–Share, dan Dekomposisi Daya Saing	2-88
Tabel 2.60. Investasi Sektor Perdagangan dan Jasa di Kota Jambi Triwulan I	2-93
Tabel 2.61. Investasi Sektor Perdagangan dan Jasa di Kota Jambi Triwulan II.....	2-94
Tabel 2.62. Investasi Sektor Perdagangan dan Jasa di Kota Jambi Triwulan II.....	2-95
Tabel 2.63. Investasi Sektor Perdagangan dan Jasa di Kota Jambi Triwulan IV	2-96
Tabel 2.64. Investasi Sektor Perdagangan dan Jasa di Kota Jambi Tahun 2023	2-97
Tabel 2.65. Laju inflasi bulanan per kelompok di Kota Jambi Tahun 2024 (%).....	2-98
Tabel 2.66. Lanjutan Laju inflasi bulanan per kelompok di Kota Jambi.....	2-99
Tabel 2.67. Inflasi bulanan transportasi, info-keuangan, rekreasi-budaya di Kota Jambi Tahun 2024 (%).....	2-100
Tabel 2.68. Inflasi pendidikan, restoran, dan jasa pribadi di Kota Jambi.....	2-101
Tabel 2.69. Panjang jalan per kewenangan (km).....	2-103
Tabel 2.70. Panjang jalan di Kota Jambi, Tahun 2022–2024 (km)	2-103
Tabel 2.71. Panjang jalan menurut kondisi di Kota Jambi, Tahun 2022–2024.....	2-104
Tabel 2.72. Jenis Sarana perdagangan di Kota Jambi, Tahun 2021–2024	2-105
Tabel 2.73. Ruko, toko, kios, lapak, dan pedagang di pasar milik Pemerintah Kota Jambi, Tahun 2024.....	2-106
Tabel 2.74. Pelanggan, listrik terjual, dan nilai penjualan (2024)	2-107
Tabel 2.75. Produksi dan distribusi air bersih per bulan, 2024	2-108



Tabel 2.76. Tabel Induk Berusaha (NIB) Berdasarkan Kecamatan Di Kota Jambi (Bulan Juli -Oktober Tahun 2025)	2-111
Tabel 2.77. NIB Berdasarkan Status Penanaman Modal di Kota Jambi	2-112
Tabel 2.78. Tabel NIB Berdasarkan Kategori Pelaku usaha	2-113
Tabel 2.79. Proyek Persektor Kota Jambi (Bulan Juli- Oktober Tahun 2025).....	2-114
Tabel 2.80. Proyek Perkategori Usaha Berdasarkan Kecamatan di Kota Jambi (Bulan Juli Oktober Tahun 2025)	2-116
Tabel 2.81. Proyek Berdasarkan Resiko di Kota Jambi (Bulan Juli-Oktober Tahun 2025)	2-119
Tabel 2.82. Penerbitan Persyaratan Dasar di Kota Jambi (Bulan Juli-Oktober Tahun 2025)	2-121
Tabel 2.83. TOP 5 KBLI di Kota Jambi (Bulan Juli-Oktober Tahun 2025)	2-123
Tabel 2.84. Tenaga Kesehatan / Dokter Spesialis di Kota Jambi	2-126
Tabel 2.85. Pola Perkembangan Internal dan eksternal Kota Jambi	2-128
Tabel 2.86. Perkembangan Kawasan Peri-Urban	2-129
Tabel 2.87. Program Komprehensif Pengembangan Investasi Kota Jambi	2-131
Tabel 2.88. Kondisi Kelembagaan Penanaman Modal Kota Jambi	2-135
Tabel 2.89. Isu Strategis dan Keterkaitan dengan RUPM 2025–2045	2-138
Tabel 3.1. Komponen SWOT	3-2
Tabel 3.2. Kekuatan	3-3
Tabel 3.3. Kelemahan	3-4
Tabel 3.4. Peluang	3-5
Tabel 3.5. Tantangan	3-6
Tabel 3.6. Analisis PESTEL	3-8
Tabel 4.1. Arah Kebijakan Inklusif dan Penguatan Modal Manusia.....	4-10
Tabel 4.2. Arah Kebijakan Iklim Usaha dan Tata Ruang.....	4-11
Tabel 5.1. Analisis & Strategi RUPM Berbasis Sektor Unggulan Utama Kota Jambi Periode 2025–2045	5-2
Tabel 5.2. Arah Kebijakan dan Strategi RUPM Kota Jambi 2025–2045 (Fokus 4 Sektor Unggulan).....	5-3
Tabel 5.3. Arah Program Kebijakan dan Regulasi TIK.....	5-5
Tabel 5.4. Arah Program Kebijakan dan Regulasi Industri Hilir	5-6
Tabel 5.5. Arah Program Kebijakan dan Regulasi Pariwisata.....	5-7



Tabel 5.6. Arah Program Kebijakan dan Regulasi	5-8
Tabel 5.7. Arah Kebijakan Infrastruktur dan Utilitas Dasar	5-9
Tabel 6.1. Arah Kebijakan Iklim investasi kondusif & berdaya saing	6-5
Tabel 6.2. Arah Kebijakan Pemerataan dan Keadilan Investasi Antar Wilayah	6-9
Tabel 6.3. Arah Kebijakan Investasi Hijau dan Ekonomi Berkelanjutan	6-13
Tabel 6.4. Arah Kebijakan Sektor Unggulan dan Ekonomi Kreatif	6-16
Tabel 6.5. Arah Kebijakan Sektor Kota Cerdas (<i>Smart City</i>) dan Pusat Layanan Investasi Digital.....	6-18
Tabel 6.6. Arah Kebijakan Kolaborasi dan Promosi Investasi Daerah	6-21
Tabel 6.7. Strategi Iklim investasi kondusif & berdaya saing	6-26
Tabel 6.8. Strategi Pemerataan dan Keadilan Investasi Antar Wilayah	6-31
Tabel 6.9. Strategi Investasi Hijau dan Ekonomi Berkelanjutan	6-35
Tabel 6.10. Strategi Sektor Unggulan dan Ekonomi Kreatif	6-39
Tabel 6.11. Strategi Kota Jambi sebagai Kota Cerdas (<i>Smart City</i>) dan Pusat Layanan Investasi Digital	6-44
Tabel 6.12. Strategi Kolaborasi dan Promosi Investasi Daerah	6-48
Tabel 7.1. Target Sasaran Pokok Pembangunan Tahun 2029-2045	7-1
Tabel 7.2. Sasaran Iklim investasi kondusif & berdaya saing (Misi 1)	7-1
Tabel 7.3. Sasaran Pemerataan dan Keadilan Investasi Antar Wilayah (Misi 2)	7-2
Tabel 7.4. Sasaran Investasi Hijau dan Ekonomi Berkelanjutan (Misi 3)	7-5
Tabel 7.5. Sasaran Sektor Unggulan dan Ekonomi Kreatif (Misi 4)	7-7
Tabel 7.6. Sasaran sebagai Kota Cerdas (<i>Smart City</i>) dan Pusat Layanan Investasi Digital (Misi 5)	7-9
Tabel 7.7. Sasaran Kolaborasi dan Promosi Investasi Daerah (Misi 6)	7-12



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Peta Topografi Kota Jambi	2-5
Gambar 2.2. Peta Geologi Kota Jambi	2-7
Gambar 2. 3. Peta Hidrologi	2-10
Gambar 2.4. Piramida Penduduk Kota Jambi, 2025	2-16
Gambar 2.5. Indeks Pembangunan Manusia Kota Jambi dan Provinsi Jambi,	2-25
Gambar 2.6. Jumlah Kelurahan yang Memiliki Fasilitas Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Jambi, 2024.....	2-26
Gambar 2. 7. Jumlah Tempat Peribadatan di Kota Jambi, 2024	2-27
Gambar 2. 8. Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK (miliar)	2-69
Gambar 2. 9. Pengeluaran per kapita per bulan (rupiah) di Kota Jambi.....	2-74
Gambar 2. 10. Sektor PDRB Kota Jambi 2023-2025	2-75
Gambar 2. 11. Jumlah Unit Hotel Kota Jambi 2024.....	2-82
Gambar 2. 12. Jumlah restoran menurut Kecamatan di Kota Jambi 2024	2-84
Gambar 2. 13. Jumlah hotel menurut Kecamatan di Kota Jambi 2024	2-85
Gambar 2. 14. Jumlah hotel menurut jenis di Kota Jambi 2024.....	2-86
Gambar 2. 15. Kuadran Sektor Gabungan SLQ dan DLQ di Kota Jambi.....	2-89
Gambar 2. 16. Realisasi Investasi Kota Jambi Periode 2018-2025 (Juta).....	2-90
Gambar 2. 17. Nomor Induk Berusaha (NIB) Di Kota Jambi Tahun 2025	2-110
Gambar 2. 18. Proyek Berdasarkan Tingkat Resiko di Kota Jambi Tahun 2025	2-118
Gambar 2. 19. Penerbitan Persyaratan Dasar di Kota Jambi (Tahun 2025)	2-120
Gambar 2. 20. Alur Hirarki Dokumen RUPM Kota Jambi Periode 2025-2045.....	2-137
Gambar 2. 21. Alur Pembuatan SILANCAR	2-142
Gambar 4. 1. Indikator iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing.....	4-7
Gambar 4. 2. Indikator pemerataan dan keadilan investasi antar wilayah	4-8
Gambar 4. 3. Indikator investasi hijau dan ekonomi berkelanjutan	4-9
Gambar 4. 4. Indikator sektor unggulan dan ekonomi kreatif.....	4-10
Gambar 4. 5. Indikator Kota Cerdas (<i>Smart City</i>)	4-11
Gambar 4. 6. Indikator kolaborasi dan promosi investasi daerah.....	4-13



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Misi RUPM Kota Jambi 2025-2045.....	10-2
Lampiran 2. Peta Kepadatan Penduduk.....	10-3
Lampiran 3. Peta Administrasi	10-4
Lampiran 2. Realisasi Investasi Kota Jambi Periode 2018-2025 (Juta)	10-5



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kota Jambi, sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi, telah menunjukkan dinamika pembangunan yang signifikan dalam dekade terakhir. Pertumbuhan ekonomi yang pesat di kota ini didorong oleh potensi investasi yang substansial dan terus berkembang, mencerminkan peluang bisnis yang menarik baik bagi investor domestik maupun asing. Posisi geografis yang strategis di Jambi, dipadukan dengan ketersediaan sumber daya yang memadai, menjadikannya magnet bagi investor baik domestik maupun asing. Investasi ini berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan kapasitas produksi dan penguatan struktur ekonomi daerah (Mahendra & Hanifa, 2022; Wahyudi & Zapita, 2022).

Investasi merupakan katalis utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dengan mekanisme penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan dan peningkatan produktivitas sektor-sektor ekonomi, sehingga secara substantif berkontribusi pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Jambi. Penelitian menunjukkan bahwa tingginya aliran investasi signifikan dalam meningkatkan pendapatan daerah dan dapat memfasilitasi penciptaan pekerjaan bagi tenaga kerja lokal (Paramita & Christianingrum, 2022). Pengeluaran modal dari sektor publik juga memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan alokasi yang tepat, investasi publik dapat mendorong sektor swasta dan menciptakan dampak ekonomi yang lebih besar (Mahendra & Hanifa, 2022; Wahyudi & Zapita, 2022).

Pentingnya perencanaan investasi yang komprehensif semakin ditegaskan oleh penelitian yang menyoroti kontribusi pengembangan infrastruktur. Infrastruktur yang baik, seperti jaringan transportasi, sanitasi, dan energi, sangat diperlukan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. (Mahendra & Hanifa, 2022; Paramita & Christianingrum, 2022; Wahyudi & Zapita, 2022) mencatat bahwa kebijakan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur merupakan faktor kunci dalam menarik minat investor. Penelitian empiris menegaskan bahwa penanaman modal harus dipahami tidak semata-mata dari perspektif manfaat jangka pendek, melainkan juga dari dampak jangka panjang berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan melalui penciptaan



lapangan kerja berkualitas dan peningkatan pendapatan rumah tangga (Paramita & Christianingrum, 2022).

Pemerintah Daerah Kota Jambi diharapkan merancang rencana investasi yang sistematis dan selaras dengan visi pembangunan jangka panjang. Langkah strategis ini dapat dicapai melalui analisis potensi wilayah serta pengembangan sektor-sektor unggulan yang berbasis pada sumber daya lokal. Penelitian oleh (Sugiatni, 2022) mendukung ide bahwa kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi faktor mendasar untuk mendorong ekosistem investasi yang lebih baik. Semua upaya ini diharapkan dapat menjadikan Kota Jambi lebih kompetitif sebagai daerah investasi di masa depan.

Naskah Akademik ini diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat dalam perumusan kebijakan, memperbaiki iklim investasi, menarik investasi yang berkualitas, serta pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Jambi dan mendukung RPJPD Kota Jambi 2025-2045 sebagai **"Kota Jambi Maju, Adil, Berkelanjutan dengan Masyarakat yang Sejahtera, Agamis dan Berbudaya"**. Selain itu, dokumen ini juga menjadi referensi penting bagi para pemangku kepentingan dalam menyelaraskan program dan kegiatan mereka dengan arah pembangunan daerah.

Salah satu kebijakan strategis untuk mendorong transformasi ekonomi daerah adalah memperkuat arus penanaman modal swasta (private investment), baik dari dalam negeri (*domestic investment*) maupun luar negeri (*foreign investment*), yang terarah pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, penguasaan teknologi, serta perluasan basis pajak dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mengingat pentingnya dokumen ini, penyusunannya dilakukan secara kolaboratif, partisipatif, dan sistematis, yang juga melibatkan tenaga ahli berkompeten di bidang penanaman modal. Tenaga ahli ini akan berkontribusi secara strategis dalam : (i) memberikan masukan dan analisis berbasis data terkait kebijakan investasi yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah, (ii) mengidentifikasi sektor-sektor potensial untuk pengembangan investasi di kota jambi baik sektor tradisional maupun sektor baru.

Pemerintah Kota Jambi secara konsisten meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif dengan mengembangkan kegiatan ekonomi yang mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif. Upaya ini ditempuh melalui penataan ruang dan infrastruktur pendukung investasi, penyederhanaan perizinan berbasis risiko, digitalisasi layanan melalui sistem perizinan terpadu, pemberdayaan usaha mikro, kecil,



menengah, dan koperasi (UMKMK) agar terintegrasi dalam rantai nilai, serta perbaikan kualitas sumber daya manusia dan ekosistem inovasi. Untuk itu, diperlukan arah perencanaan penanaman modal yang jelas, terukur, dan adaptif terhadap dinamika global termasuk percepatan ekonomi hijau, ekonomi digital, dan penguatan ketahanan pangan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan ketangguhan sosial.

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) merupakan dokumen perencanaan jangka panjang yang menjadi acuan penyusunan kebijakan penanaman modal lintas sektor dan lintas perangkat daerah. RUPM menegaskan prinsip kesetaraan perlakuan bagi penanam modal, kepastian hukum, kemudahan berusaha, dan promosi investasi yang terarah. Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, RUPM berfungsi sebagai pedoman nasional yang diturunkan ke dalam RUPM daerah guna menjamin sinkronisasi perencanaan pusat–daerah hingga tahun 2025, serta menjadi referensi kementerian/lembaga dalam kebijakan yang berkaitan dengan penanaman modal. Dalam konteks pembaruan pasca-2025, RUPM Kota Jambi periode 2025–2045 disusun sebagai jembatan transisi yang mengakomodasi agenda prioritas RPJMD baru, penguatan proyek siap tawar (*investment project ready to offer*), serta mekanisme monitoring–evaluasi berbasis indikator kinerja utama (IKU) investasi. Kebijakan dasar penanaman modal Kota Jambi diarahkan untuk: (i) memperkuat iklim usaha melalui reformasi regulasi dan kepastian pelayanan; (ii) mempercepat peningkatan investasi melalui hilirisasi dan substitusi impor pada sektor strategis (pangan, perikanan, manufaktur pengolahan, logistik, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta energi terbarukan); (iii) memperluas persebaran investasi yang berkeadilan antar-kawasan kota; (iv) meningkatkan kemitraan dan pembiayaan inovatif termasuk skema KPBU/PPP dan *green financing*; serta (v) memberdayakan UMKMK dan kewirausahaan pemula agar naik kelas melalui standardisasi, sertifikasi, digitalisasi, dan akses pasar.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penyusunan dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Jambi 2025-2045 menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Jambi dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui penetapan prioritas investasi yang tepat dan strategi yang jelas, pemerintah daerah berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi tidak hanya pada sektor-sektor konvensional, tetapi juga pada sektor-sektor baru yang berpotensi, sehingga ekonomi daerah menjadi lebih beragam dan tangguh. Selain itu . Dalam menetapkan kebijakan

dasar penanaman modal pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada penanam modal, menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi

1.2. Maksud dan Tujuan

1.2.1. Maksud RUPM Kota Jambi

Adapun maksud dari penyusunan buku Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Jambi Tahun 2025-2045 terkait dengan:

1. Menyusun pembaruan RUPM sebagai pedoman strategis yang lebih relevan terhadap dinamika ekonomi, teknologi, serta kebijakan nasional–provinsi, sehingga arah investasi daerah tetap sinkron dan adaptif.
2. Menyediakan basis proyek investasi siap tawar beserta kebutuhan lahan, infrastruktur, regulasi, dan skema pembiayaan, untuk mempercepat match making antara investor dan peluang daerah.
3. Mengarahkan pembangunan dan kebijakan investasi secara terencana, terintegrasi, serta selaras dengan kebijakan nasional untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
4. Mengoptimalkan potensi sumber daya alam, manusia, dan ekonomi lokal dengan tetap menjaga keseimbangan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, sehingga daya saing daerah meningkat dan pembangunan berlangsung adil serta berkelanjutan.

1.2.2. Tujuan RUPM Kota Jambi

Tujuan dari penyusunan buku Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Jambi Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat iklim investasi yang pasti dan kompetitif melalui penyempurnaan regulasi, layanan perizinan berbasis risiko, digitalisasi, serta SLA pelayanan yang jelas.
2. Meningkatkan realisasi investasi berkualitas pada sektor prioritas dengan fokus nilai tambah, penciptaan kerja layak, alih teknologi, dan kontribusi terhadap PAD serta PDRB.
3. Memeratakan persebaran investasi antarkawasan sesuai rencana tata ruang, daya dukung lingkungan, dan kapasitas infrastruktur agar manfaat ekonomi lebih inklusif.

4. Mengarusutamakan ekonomi hijau dan ketahanan iklim melalui standar lingkungan, efisiensi sumber daya, pengurangan emisi, dan dorongan pada proyek energi terbarukan.
5. Mengintegrasikan UMKMK ke rantai pasok investasi melalui kemitraan, standardisasi–sertifikasi, pembiayaan inklusif, onboarding digital, dan akses pasar.
6. Memperluas sumber pembiayaan investasi (KPBU/PPP, *green financing*, *blended finance*) dan memperkuat promosi berbasis data untuk menarik investor yang tepat sasaran.
7. Menetapkan indikator kinerja utama (IKU) dan sistem monitoring evaluasi berbasis data untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan berkelanjutan kebijakan investasi.
8. Menyusun dasar kebijakan dan strategi RUPM melalui identifikasi potensi, peluang, dan tantangan investasi serta analisis kondisi perekonomian daerah agar tergambar faktor pendorong dan penghambat investasi secara komprehensif.
9. Merumuskan arah kebijakan dan strategi pengembangan penanaman modal yang selaras dengan visi pembangunan Kota Jambi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

1.3. Sasaran

Target utama kegiatan ini adalah tersusunnya Buku Adapun sasaran kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Jambi Tahun 2025-2045 yang dapat diimplementasikan, lengkap dengan: (a) peta jalan investasi 2025–2045, (b) daftar proyek siap tawar per koridor/kawasan, (c) standar layanan investasi dan SLA waktu proses perizinan berbasis risiko, serta (d) kerangka monitoring evaluasi dengan indikator kinerja utama (IKU) realisasi investasi, serapan tenaga kerja, kontribusi PAD/PDRB, dan dampak keberlanjutan lingkungan.

1.4. Landasan Hukum

Landasan hukum kegiatan penyusunan RUPM Kota Jambi 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional.



2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal.
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota.
6. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013–2033.
7. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2013–2018.
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menjadi dasar umum penyelenggaraan penanaman modal di semua sektor di wilayah Indonesia, meliputi asas, tujuan, kebijakan dasar, perlakuan terhadap penanam modal, bidang usaha, hak dan kewajiban, fasilitas, serta koordinasi dan pengawasan investasi.
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Penetapan Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja) menguatkan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha; menjadi landasan perubahan perizinan berbasis risiko, penyederhanaan persyaratan dasar perizinan (KKPR, persetujuan lingkungan, PBG), dan reformasi pelayanan penanaman modal.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang mengatur OSS-RBA, klasifikasi risiko (rendah, menengah-rendah, menengah-tinggi, tinggi), bentuk perizinan (NIB, Sertifikat Standar, Izin), pengawasan, evaluasi, dan reformasi kebijakan perizinan berusaha.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Yang menjadi rujukan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) dengan RTRW/RDTR; mengatur perencanaan, pemanfaatan, pengendalian pemanfaatan ruang, insentif–disinsentif, dan sanksi; memastikan setiap proyek RUPM clear and clean secara spasial.
12. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Daftar Bidang Usaha Penanaman Modal (DBUPM) yang menetapkan keterbukaan bidang usaha bagi investasi, termasuk daftar prioritas, persyaratan khusus, dan pembatasan tertentu; menjadi acuan seleksi sektor proyek dalam pipeline RUPM.



13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal yang menetapkan RUPM sebagai dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang yang berlaku sampai dengan tahun 2025; memuat asas-tujuan, visi-misi, arah kebijakan (perbaikan iklim investasi, persebaran, fokus pangan-infrastruktur-energi, green investment, pemberdayaan UMKMK, fasilitas/insentif, promosi), peta panduan implementasi, serta mandat penyusunan RUPM provinsi/kabupaten/kota yang mengacu pada RUPM nasional.
14. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 64 Tahun 2018 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jambi Tahun 2018–2025; menetapkan visi, sasaran, arah kebijakan, dan program penanaman modal tingkat provinsi sebagai acuan penyelarasan RUPM kabupaten/kota, termasuk Kota Jambi.
15. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2025–2045.

1.5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Jambi mencakup antara lain:

1. Dokumen kebijakan jangka menengah/panjang bidang investasi daerah
2. Menyusun dasar kebijakan dan strategi RUPM Kota Jambi 2025-2045 melalui identifikasi potensi, peluang, dan tantangan investasi serta analisis kondisi perekonomian daerah agar tergambar faktor pendorong dan penghambat investasi secara komprehensif.
3. Merumuskan arah kebijakan dan strategi pengembangan penanaman modal yang selaras dengan visi pembangunan Kota Jambi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.
4. Penyusunan roadmap, prioritas sektor, dan sinkronisasi dengan RPJMD/RTRW

1.6. Produk yang dihasilkan

Sejalan dengan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Jambi Tahun 2025-2045 dengan produk yang dihasilkan sebagai berikut:

1. **Laporan Pendahuluan**, berisi Rencana Kerja yang akan dilaksanakan dan hasil orientasi lapangan serta kerangka kegiatan yang harus dijelaskan seperti kegiatan



persiapan, pengurusan perijinan, mobilisasi tenaga dan peralatan, jadwal pelaksanaan dan jadwal penugasan personil atau tenaga ahli serta program kerja berikutnya diserahkan 15 (Lima Belas) hari setelah SPMK. Laporan Pendahuluan diserahkan kepada pemilik pekerjaan sebanyak 10 (sepuluh) Buku.

2. **Laporan Akhir**, yang berisi bagian akhir dari kajian penyusunan rencana umum penanaman modal yang telah dibahas bersama OPD terkait. Laporan Akhir tersebut diserahkan selambat-lambatnya 45 (Empat Puluh Lima) hari kalender sejak tanggal Surat Perintah. Laporan Pendahuluan diserahkan kepada pemilik pekerjaan sebanyak 20 (dua puluh) Buku.

1.7. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Jambi Periode 2025–2045 terdiri atas:

BAB 1. PENDAHULUAN

BAB 2. POTENSI DAN REALITAS

BAB 3. ANALISIS DATA

BAB 4. VISI DAN MISI RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA
JAMBI

BAB 5. ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL KOTA JAMBI

BAB 6. KEBIJAKAN DAN STRATEGI

BAB 7. SASARAN PEMBANGUNAN RUPM KOTA JAMBI

BAB 8. PENUTUP

1.8. Waktu Pelaksanaan

Waktu yang diperlukan untuk penyusunan buku Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Jambi adalah selama 90 (sembilan puluh) hari kalender, terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).



BAB 2

POTENSI DAN REALITAS

2.1. Keadaan Geografis dan Administratif

2.1.1. Keadaan Geografis

Kota Jambi, ibu kota Provinsi yang dijuluki Jambi Kota Beradat, adalah pusat perkembangan ekonomi terpesat di wilayahnya, meskipun secara geografis dikelilingi oleh Kabupaten Muaro Jambi. Pertumbuhan ini didorong oleh kebijakan strategis Pemerintah Kota Jambi untuk menarik *Private Investment* (domestik dan asing) demi memacu laju ekonomi makro dan mikro. Perkembangan pesat ini merupakan hasil langsung dari strategi Pemerintah Kota dalam memetakan peluang investasi. Guna mendongkrak perekonomian daerah, Pemerintah Kota Jambi secara aktif mendorong masuknya investasi swasta (dari dalam dan luar negeri), serta memaksimalkan sektor potensial seperti UMKM, pariwisata, pertanian, perdagangan, dan perhotelan.

Kondisi atmosferik ini berdampak langsung pada perencanaan investasi dan infrastruktur, termasuk kebutuhan desain bangunan hemat energi, standar drainase dan retensi air, perlindungan sempadan sungai untuk mengurangi risiko genangan pada puncak musim hujan, serta penjadwalan konstruksi dan logistik yang menyesuaikan variabilitas curah hujan.

A. Konektivitas ke Kota Jambi (Kota baru)

Jarak dari berbagai kabupaten dan kota ke Kota Jambi merupakan fondasi penting dalam menganalisis aksesibilitas regional, pola integrasi ekonomi, serta potensi pengembangan penanaman modal pada skala provinsi. Dalam konteks penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Jambi, informasi mengenai jarak dari wilayah-wilayah lain ke Kota Jambi memiliki relevansi strategis yang multidimensional. Pertama, jarak membantu mengidentifikasi area pengaruh ekonomi Kota Jambi sebagai pusat pertumbuhan regional. Kedua, informasi ini memungkinkan penentuan tipologi wilayah berdasarkan gradasi aksesibilitas, yang membedakan antara wilayah-wilayah dengan aksesibilitas tinggi (jarak dekat) dan aksesibilitas terbatas (jarak jauh). Ketiga, jarak menjadi basis untuk merumuskan strategi diferensiasi investasi yang disesuaikan dengan karakteristik lokasional dan kapasitas masing-masing wilayah. Keempat,

pemahaman tentang jarak mendukung perencanaan pengembangan infrastruktur penghubung baik dalam bentuk transportasi darat, laut, maupun telekomunikasi guna memperkuat konektivitas regional dan efisiensi ekonomi.

Tabel 2.1. Jarak ke Kota Jambi (Kota baru)

Ibu Kota Kabupaten	Jarak ke Kota Jambi (Kota Baru)
Kab. Batanghari (Muara Bulian)	60
Kab. Bungo (Muara Bungo)	252
Kab. Meragin (Bangko)	255
Kota Sungai Penuh (Sungai Penuh)	419
Kab. Tanjabbar (Kuala Tungkal)	131
Kab. Sarolangun (Sarolangun)	179
Kab. Tanjabtim (Muara Sabak)	129
Kab. Tebo (Muara Tebo)	206
Kab. Muaro Jambi (Sengeti)	29
Kab. Kerinci	431

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan Tabel 2.1, jarak Kota Jambi (Kota Baru) ke ibu kota Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi menunjukkan hierarki konektivitas yang menegaskan kedekatan fungsional Jambi dengan pusat-pusat di sekitarnya. Akses paling dekat adalah ke Sengeti, Muaro Jambi (29 km), yang menegaskan posisi aglomerasi inti Jambi–Muaro Jambi sebagai koridor utama layanan, logistik, dan rantai pasok harian. Hubungan jarak menengah ke Muara Bulian, Batanghari (60 km), Tanjung Jabung Timur/Muara Sabak (129 km), dan Tanjung Jabung Barat/Kuala Tungkal (131 km) memperlihatkan peran Jambi sebagai pusat pelayanan wilayah timur–pesisir yang terhubung dengan aktivitas perikanan, perkebunan, dan akses pelabuhan. Sementara itu, koridor tengah–barat seperti Sarolangun (179 km), Muara Tebo (206 km), dan Muara Bungo (252 km) menjadi jalur yang relevan bagi konsolidasi logistik ekspor–impor berbasis transportasi darat.

Kota Jambi memiliki kedekatan fungsional kuat dengan pusat-pusat wilayah sekitarnya. Jarak terdekat ke Sengeti, Muaro Jambi (29 km), menegaskan aglomerasi Jambi–Muaro Jambi sebagai koridor utama layanan dan logistik harian. Jarak menengah ke Muara Bulian, Muara Sabak, dan Kuala Tungkal menunjukkan peran Jambi sebagai pusat pelayanan kawasan timur–pesisir yang terhubung dengan perikanan, perkebunan,

dan pelabuhan. Sementara itu, hubungan ke Sarolangun, Muara Tebo, dan Muara Bungo memperlihatkan fungsi Jambi sebagai simpul konsolidasi logistik ekspor–impor di jalur tengah–barat. Dari sisi topografi, Kota Jambi didominasi kelerengannya datar 0–2% seluas ± 9.213 ha, yang tersebar di seluruh kecamatan dan terbesar di Paal Merah. Kelerengannya 2–8% mencapai ± 4.313 ha dengan konsentrasi terbesar di Kota Baru, sedangkan kemiringannya 8–15% seluas ± 2.538 ha terutama berada di Alam Barajo. Struktur kelerengannya ini menegaskan karakter Kota Jambi sebagai wilayah umumnya datar dan mudah dikembangkan.

B. Kelerengannya

Kondisi kelerengannya lahan di Kota Jambi menunjukkan karakteristik topografi yang relatif datar dan landai, sehingga sangat mendukung pengembangan wilayah perkotaan dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil interpretasi peta citra tahun 2020 dan dokumen RTRW Kota Jambi 2024–2044, sebagian besar wilayah kota berada pada kelerengannya 0–2% dengan luas mencapai 9.213,13 hektare. Wilayah datar ini tersebar di hampir seluruh kecamatan, terutama Paal Merah, Telanai Pura, Danau Teluk, dan Jambi Timur. Karakteristik lahan seperti ini sangat ideal untuk pembangunan infrastruktur, pengembangan pusat-pusat permukiman, serta perluasan kawasan ekonomi tanpa membutuhkan biaya konstruksi yang tinggi.

Selain itu, lahan dengan kemiringannya 2–8% yang mencapai 4.312,54 hektare memberikan alternatif ruang pengembangan yang tetap aman dan teknis untuk dimanfaatkan. Kecamatan seperti Kota Baru dan Alam Barajo memiliki sebaran lahan landai terbesar, yang kini tumbuh sebagai kawasan strategis dan menjadi lokasi berkembangnya permukiman baru, fasilitas pendidikan, jasa, dan perdagangan. Meski demikian, pola pemanfaatannya tetap memerlukan pengelolaan drainase yang baik untuk mengurangi potensi genangan air, terutama pada musim hujan.

Wilayah dengan kelerengannya 8–15% memiliki luas yang relatif kecil, yaitu 2.538,07 hektare, dan terkonsentrasi terutama di bagian barat Kota Jambi seperti Kecamatan Alam Barajo dan Kota Baru. Meskipun area ini masih dapat dimanfaatkan untuk pembangunan, namun perencanaan harus dilakukan secara lebih hati-hati dengan memperhatikan konservasi tanah, pengendalian erosi, dan teknik konstruksi yang sesuai kontur. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas lahan dan mencegah kerusakan lingkungan di masa mendatang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.2.

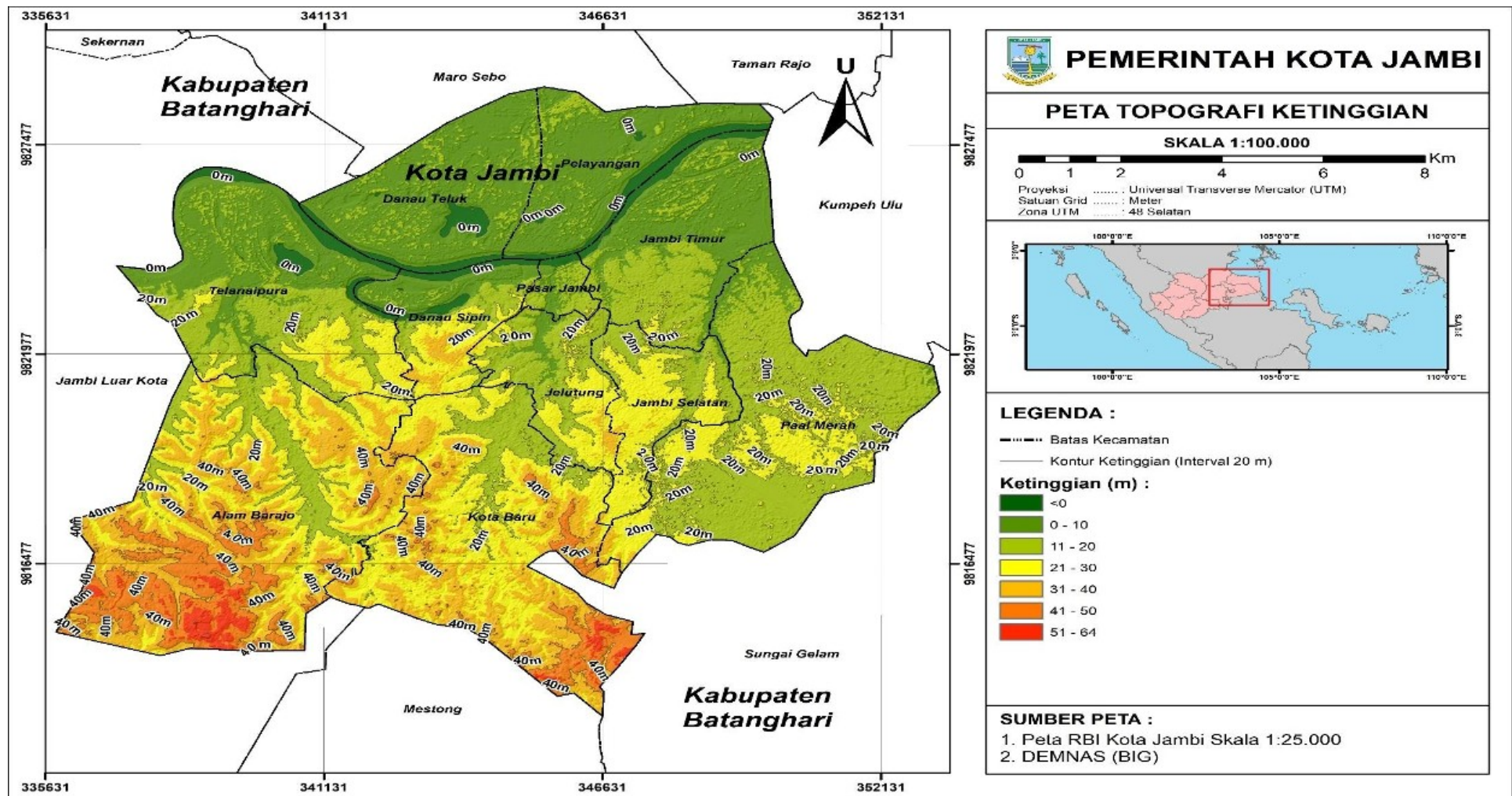
Tabel 2.2. Kelerenghan Lahan di Kota Jambi

No	Kecamatan	0–2% (Ha)	2–8% (Ha)	8–15% (Ha)	Danau/Sungai (Ha)	Jumlah (Ha)
1	Telanai Pura	1.518,60	203,34	32,38	282,53	2.036,84
2	Jambi Selatan	557,06	165,36	37,19	—	759,53
3	Jambi Timur	1.259,19	—	—	127,85	1.387,04
4	Pasar Jambi	124,1	19,81	—	21,31	165,23
5	Pelayangan	879,49	—	—	90,24	969,73
6	Danau Teluk	1.189,43	—	—	248,15	1.437,58
7	Kota Baru	255,25	1.671,58	753,88	0,64	2.681,36
8	Jelutung	498,44	486,44	49,69	9,28	763,84
9	Alam Barajo	779,41	1.340,10	1.501,39	—	3.620,99
10	Danau Sipin	460,53	161,11	111,78	140,9	874,32
11	Paal Merah	1.914,18	475,78	51,78	72	2.448,75
	Jumlah	9.213,13	4.312,54	2.538,07	921,61	16.985,35

Sumber: Interpretasi Peta Citra (2020) dan RTRW Kota Jambi Tahun 2024–2044

Di samping itu, kawasan perairan berupa danau dan sungai menempati area seluas 921,61 hektare, dengan kontribusi terbesar berada di Kecamatan Danau Teluk dan Telanai Pura. Kawasan ini memiliki fungsi ekologis penting sebagai daerah resapan air, habitat ekosistem perairan, serta penyangga terhadap potensi banjir. Oleh karena itu, pemanfaatan ruang di sekitar kawasan perairan harus diarahkan pada kegiatan yang berwawasan lingkungan serta mendukung kualitas tata ruang kota yang berkelanjutan.

Selanjutnya terkait dengan Topografi Kota Jambi sangat mendukung tata ruang perkotaan dan pengembangan pemanfaatan lahan, terutama pada sektor permukiman, jasa, dan infrastruktur. Sumber visual ini dapat digunakan untuk analisis pembangunan fisik, mitigasi risiko banjir, dan penentuan lokasi investasi pada kawasan dataran strategis, serta visualisasi spasial seperti kontur, kemiringan lahan, zona ketinggian, serta batas kecamatan secara terperinci. Secara detail dapat dilihat pada Gambar 2.1



Gambar 2.1. Peta Topografi Kota Jambi

Sumber: RPJPD Kota Jambi 2025-2045

Formasi geologi Kota Jambi didominasi oleh sedimen muda hasil proses fluvial dan rawa, yang sangat memengaruhi karakteristik tanah dan arah pengembangan wilayah. Formasi terbesar adalah Tmpm yang mencakup 45,12% wilayah dan terdiri atas sedimen lempung serta lanau yang lunak, sehingga membutuhkan teknik konstruksi yang lebih hati-hati. Formasi Qa atau endapan aluvial seluas 22,45% tersebar di dataran banjir dan sepanjang alur sungai, memiliki tanah subur namun rawan genangan sehingga lebih sesuai untuk ruang terbuka hijau atau pembangunan dengan pengaturan drainase yang baik. Sementara itu, formasi Pasir seluas 16,39% memiliki daya dukung tanah yang cukup baik tetapi mudah tererosi, sehingga memerlukan perlindungan vegetasi.

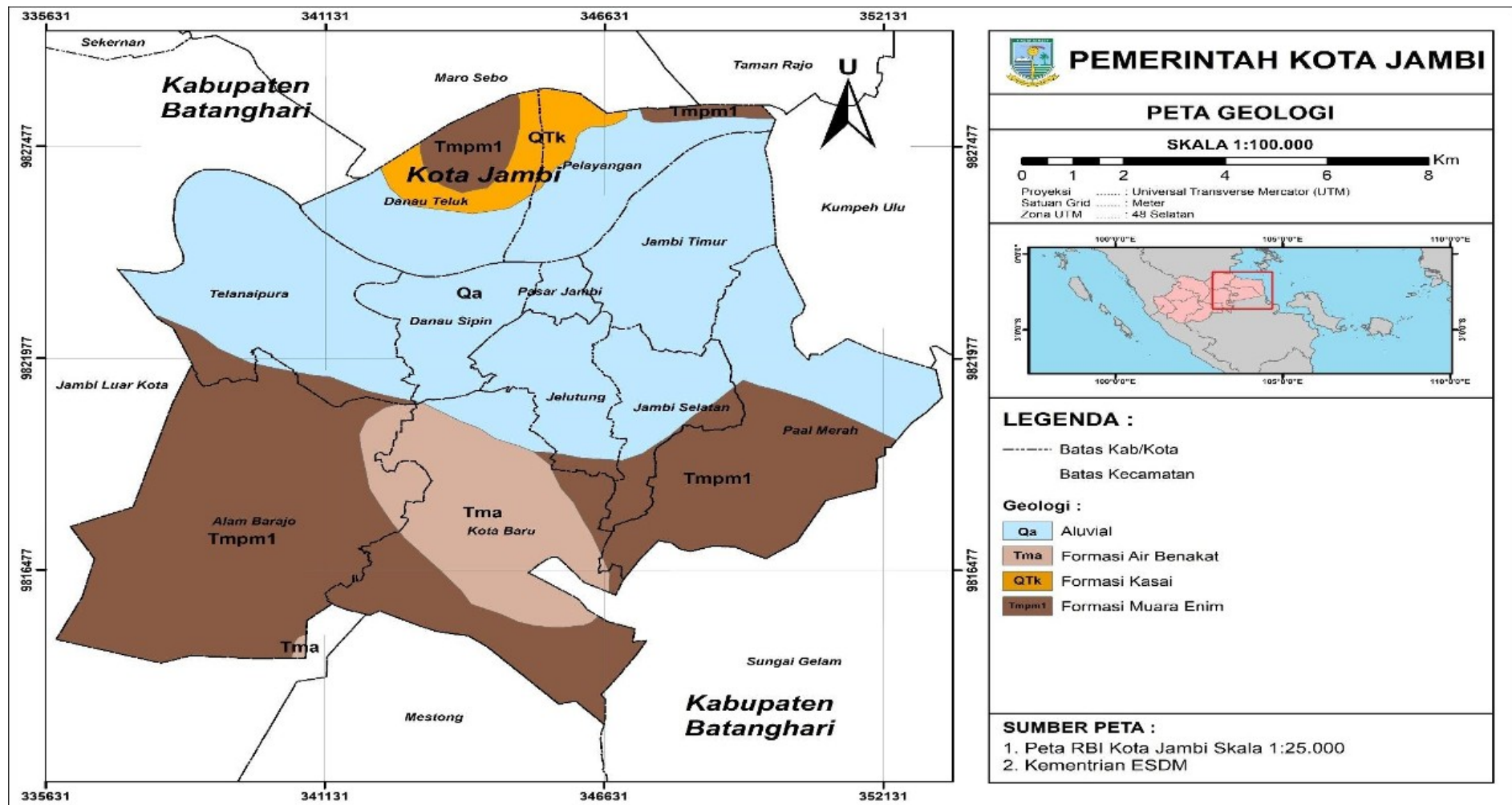
Formasi QTk (9,19%) dan Tma (6,50%) terdiri atas sedimen lebih tua yang relatif stabil dan aman untuk pembangunan skala sedang hingga besar. Adapun kawasan Danau hanya mencakup 0,34%, namun berfungsi penting sebagai zona resapan air dan penyangga ekosistem kota. Secara keseluruhan, variasi formasi geologi ini menunjukkan perlunya pengembangan ruang yang mempertimbangkan stabilitas tanah, potensi banjir, dan konservasi lingkungan agar pembangunan Kota Jambi dapat berlangsung secara aman dan berkelanjutan. Rincian lebih lanjut tentang persebaran dan komposisi setiap jenis batuan dapat dilihat pada Tabel 2.3 dan Gambar 2.2 berikut:

Tabel 2.3. Formasi Geologi Kota Jambi

No	Formasi Geologi	Luas (Ha)	%
1	Danau	57,99	0,34%
2	Pasir	2.784,08	16,39%
3	Qa	3.813,09	22,45%
4	QTk	1.561,44	9,19%
5	Tma	1.104,50	6,50%
6	Tmpm	7.664,22	45,12%
Jumlah		16.985,32	100,00%

Sumber: Interpretasi Peta Citra (2020) dan RTRW Kota Jambi Tahun 2024-2044

Selanjutnya dapat diidentifikasi variasi jenis batuan, umur geologi, serta pola struktur yang berkembang, yang menjadi dasar penting dalam memahami karakteristik fisik wilayah Kota Jambi pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2. Peta Geologi Kota Jambi
Sumber: RPJPD Kota Jambi 2025-2045

C. Hidrologi

Wilayah Kota Jambi dipisahkan oleh Sungai Batanghari menjadi bagian utara dan selatan. Bagian selatan merupakan wilayah yang paling luas dan dilintasi oleh setidaknya delapan anak sungai, yakni:

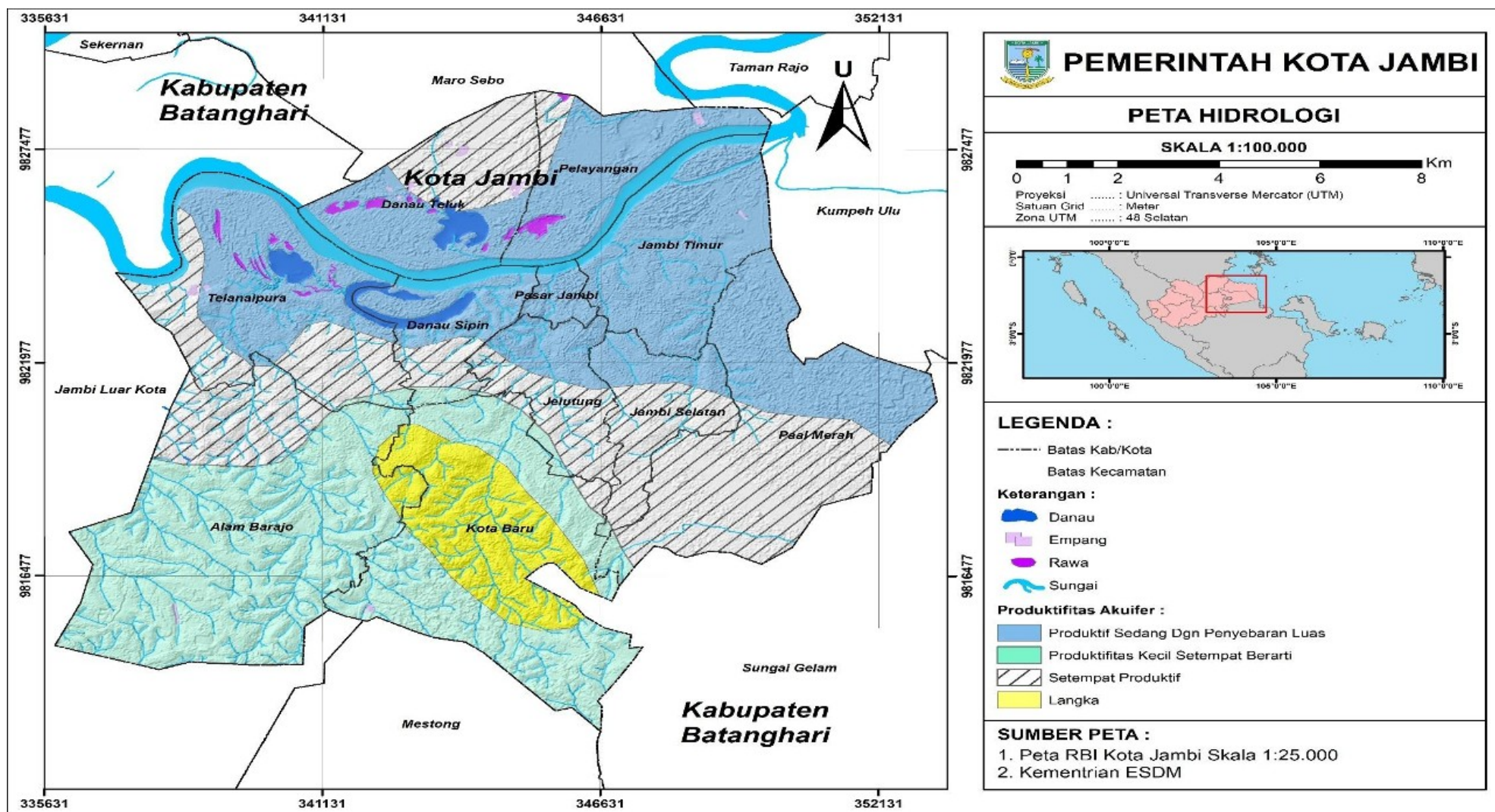
Tabel 2.4. Daerah Aliran Sungai yang Melintasi Wilayah Kota Jambi

No	Daerah Aliran Sungai	Panjang (Km)	Bagian Hulu	Bagian Hilir	Kelurahan yang Dilintasi	BWK yang Dilintasi
1	Sungai Kenali Kecil	10,68	Perumahan Citra Raya	Jembatan Buluran Pematang Sujur	Pematang Sujur, Penyengat Rendah, Teluk Kenali	BWK VI
2	Sungai Kenali Besar	13,79	Balai Benih Ikan	Danau Teluk Kenali	Kenali Asam Bawah, Bagan Pete, Mayang Mangurai, Beliang, Rawasari, Kenali Besar	BWK V
3	Sungai Kambang	4,3	SMA 4	Danau Sipin	Simpang III Sipin, Simpang IV Sipin, Pematang Sujur, Telanai	BWK V dan BWK VI
4	Sungai Danau Teluk	8,79	SMA 1	Danau Sipin	Sungai Putri, Solok Sipin, Legok	BWK I dan BWK VI
5	Sungai Putri	2,97	Lorong Diamond	Danau Sipin	Selamat, Sungai Putri	BWK VI



No	Daerah Aliran Sungai	Panjang (Km)	Bagian Hulu	Bagian Hilir	Kelurahan yang Dilintasi	BWK yang Dilintasi
6	Sungai Asam	10,68	Pertamina Kenali Asam	Pintu Air Angso Duo Sungai Batanghari	Kenali Asam Bawah, Paal V, Suka Karya, Jelutung, Lebak Bandung, Cempaka Putih, Sungai Asam, Beringin, Orang Kayo Hitam	BWK IV, BWK V, BWK I
7	Sungai Tembuku	5,35	Thehok	Jalan Raden Pamuk	Thehok, Jelutung, Tambak Sari, Talang Jauh, Pakuan Baru, Budiman, Sulanjana, Rajawali, Orang Kayo Hitam, Kasang	BWK I dan BWK IV
8	Sungai Sijenjang/Lubuk Raman	8,37	Perumahan Parma	Sungai Lubuk Raman	Pasir Putih, Wijaya Pura, Talang Banjar, Payo Selincih, Tanjung Sari, Sijenjang, Kasang Jaya	BWK III

Sumber: Interpretasi Peta Citra (2020) dan RTRW Kota Jambi Tahun 2024–2044



Gambar 2. 3. Peta Hidrologi

Sungai Batanghari selain berfungsi hidrologi juga berfungsi sebagai prasarana transportasi dan penunjang kegiatan ekonomi masyarakat serta sebagai sumber air baku untuk air minum. Sedangkan danau yang ada di Kota Jambi antara lain adalah Danau Sipin, Danau Teluk, Danau Penyengat dan Danau Kambang.

2.1.2. Keadaan Administratif

Kota Jambi merupakan ibu kota Provinsi Jambi yang memiliki posisi strategis sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan layanan publik di wilayah provinsi. Secara geografis, kota ini terletak pada koordinat 01°03'0,98"—01°04'1,07" Lintang Selatan dan 103°40'1,67"—103°40'022" Bujur Timur, menjadikannya berada di kawasan dataran rendah dengan aksesibilitas tinggi ke berbagai wilayah sekitarnya. Secara administratif, Kota Jambi memiliki luas wilayah ±169,85 km² yang terbagi ke dalam 11 kecamatan dan 68 kelurahan, sehingga struktur wilayahnya cukup padat dan beragam dalam fungsi ruang. Keunikan Kota Jambi adalah posisinya yang sepenuhnya dikelilingi oleh Kabupaten Muaro Jambi, menjadikannya sebagai *enclave city* yang memiliki hubungan administratif dan mobilitas yang sangat erat dengan daerah sekitarnya. Adapun batas-batas administratif Kota Jambi meliputi Kecamatan Sekernan di sebelah utara, Kecamatan Mestong di sebelah selatan, Kecamatan Jambi Luar Kota di bagian barat, serta Kecamatan Kumpeh di sisi timur. Kondisi ini menegaskan peran Kota Jambi sebagai simpul utama kegiatan regional, sekaligus menuntut koordinasi tata ruang dan pembangunan yang harmonis antara pemerintah kota dan kabupaten dalam mendukung perkembangan wilayah secara terpadu dan berkelanjutan. Secara administratif, Kota Jambi berbatasan langsung dengan Kabupaten Muaro Jambi, yaitu:

- Sebelah Utara: berbatasan dengan Kecamatan Sekernan.
- Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kecamatan Mestong.
- Sebelah Barat: berbatasan dengan Kecamatan Jambi Luar Kota.
- Sebelah Timur: berbatasan dengan Kecamatan Kumpeh.

Secara administratif, Kota Jambi merupakan daerah otonom yang seluruh batas wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi (*enklave*), sehingga kolaborasi lintas batas menjadi prasyarat penting bagi manajemen koridor pergerakan dan logistik. Wilayah administrasi Kota Jambi terdiri atas 11 kecamatan dan 68 kelurahan dengan luas sekitar 169,85 km²; distribusi terbesarnya berada pada Kecamatan Alam Barajo, Kota Baru, dan Paal Merah yang bersama-sama membentuk kantong pertumbuhan permukiman,

layanan pendidikan–kesehatan, serta aktivitas perdagangan dan jasa. Letak Kota Jambi yang relatif berjarak dekat ke ibu kota kabupaten/kota inti di provinsi (misalnya Sengeti/Muaro Jambi ± 29 km dan Muara Bulian ± 60 km) memperkuat perannya sebagai simpul pelayanan regional, sementara jarak ke pusat-pusat wilayah barat (Sungai Penuh–Kerinci) yang lebih jauh menegaskan kebutuhan peningkatan konektivitas antardaerah.

\ **Tabel 2.5.** Luas Wilayah Administrasi Kota Jambi

No.	Wilayah	Jumlah Kelurahan	Luas (Km ²)	%
1	Kota Baru	7	27,25	16,04
2	Alam Barajo	7	36,06	21,23
3	Jambi Selatan	5	7,6	4,47
4	Paal Merah	6	24,25	14,28
5	Jelutung	7	7,61	4,48
6	Pasar Jambi	4	1,67	0,98
7	Telanaipura	7	20,32	11,96
8	Danau Sipin	5	7,28	4,29
9	Danau Teluk	5	13,44	7,91
10	Pelayangan	6	10,69	6,29
11	Jambi Timur	9	13,68	8,05
Kota Jambi		68	169,85	100

Sumber: Kota Jambi Dalam Angka 2023; Revisi RTRW Kota Jambi 2023–2043; Permendagri No. 88 Tahun 2017; PPBW BIG, 2021

Berdasarkan Tabel 2.5, total luas wilayah administrasi Kota Jambi mencapai 169,85 km² yang terbagi ke dalam 11 kecamatan dan 68 kelurahan. Kecamatan Alam Barajo merupakan wilayah terluas dengan 36,06 km² (21,23%), diikuti oleh Kota Baru (27,25 km²; 16,04%) dan Paal Merah (24,25 km²; 14,28%). Kecamatan dengan luas terkecil adalah Pasar Jambi seluas 1,67 km² (0,98%), diikuti Jambi Selatan (7,6 km²; 4,47%) dan Jelutung (7,61 km²; 4,48%).

RUPM Kota Jambi diarahkan selaras dengan pola ruang yang menunjukkan dominasi kawasan budidaya terutama perumahan sekitar 9.300 ha dan perdagangan-jasa sekitar 2.500 ha serta tetap menjaga fungsi ekologis melalui alokasi kawasan lindung yang memadai sebagai penyangga kota; karena itu, prioritas investasi difokuskan pada intensifikasi pusat kota dan subpusat, pengembangan vertikal di koridor perdagangan-jasa, serta penyediaan infrastruktur pendukung permukiman terencana, sambil menerapkan filter proyek berbasis kepatuhan lingkungan untuk menghindari degradasi kawasan lindung. Sejalan dengan arah pengembangan pola ruang, RUPM mengendalikan ekspansi kota agar tidak memicu urban

sprawl dengan mendorong pemanfaatan lahan terbangun, TOD, konektivitas angkutan umum, dan jaringan pejalan kaki-sepeda sehingga terbentuk kota kompak, efisien, dan berkelanjutan; pada saat yang sama, RUPM menyiapkan paket proyek siap tawar di CBD, subpusat, dan koridor pertumbuhan untuk mengangkat nilai kawasan, memperluas koridor layanan secara merata, memperkuat identitas ekologis melalui RTH dan infrastruktur biru-hijau, serta memastikan kepastian peruntukan ruang bagi kegiatan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan pendekatan ini, RUPM tidak sekadar menarik modal, tetapi mengarahkan investasi agar menjadi instrumen strategis pengembangan wilayah: mendorong aktivitas produktif perdagangan-jasa dan logistik, memperkuat pelestarian sosial-budaya, meningkatkan kualitas hidup, dan menjadikan Kota Jambi tumbuh terukur, inklusif, serta tangguh daya dukung lingkungannya.

2.2. Demografi

Struktur demografi Kota Jambi menunjukkan pola yang terpusat pada kecamatan berpenduduk besar tetapi berkepadatan menengah seperti Alam Barajo, Paal Merah, dan Kota Baru. Kondisi ini mencerminkan ekspansi permukiman horizontal di koridor barat-barat daya, sehingga diperlukan peningkatan konektivitas jaringan jalan kolektor-sekunder, serta penguatan layanan dasar pada kawasan pertumbuhan baru tersebut. Di sisi lain, kecamatan inti seperti Jambi Selatan, Jelutung, Danau Sipin, dan Jambi Timur memiliki kepadatan sangat tinggi meskipun kontribusinya terhadap total penduduk tidak selalu terbesar. Hal ini menuntut kebijakan yang lebih fokus pada intensifikasi tata guna lahan, manajemen lalu lintas dan parkir, peningkatan angkutan umum, serta penyediaan ruang terbuka hijau dan sistem drainase untuk mengurangi tekanan lingkungan.

Sementara itu, kecamatan dengan jumlah penduduk kecil dan pertumbuhan rendah seperti Pasar Jambi, Pelayangan, dan Danau Teluk memerlukan strategi revitalisasi fungsi ekonomi perkotaan, pelestarian permukiman bersejarah, serta peningkatan aksesibilitas agar tidak tertinggal dari arah perkembangan kota menuju kawasan pinggiran. Secara keseluruhan, tren pertumbuhan moderat Kota Jambi hingga 2045 mengharuskan adanya perencanaan yang berbeda antarwilayah: pengendalian kepadatan dan peningkatan kualitas layanan di pusat kota, ekspansi terarah infrastruktur permukiman-air minum-persampahan di koridor barat-barat daya, serta penguatan jaringan transportasi yang menghubungkan pusat kota dengan kantong-kantong permukiman baru untuk menekan biaya mobilitas dan menjaga pemerataan layanan publik.

Analisis Demografi Kota Jambi menunjukkan pertumbuhan penduduk yang relatif stabil dengan laju rata-rata sekitar 1,22% per tahun hingga 2024, sehingga jumlah penduduk mencapai 635.101 jiwa. Pertumbuhan yang konsisten ini menegaskan meningkatnya kebutuhan pelayanan dasar, perumahan, infrastruktur, serta penguatan kapasitas ekonomi daerah. Struktur umur penduduk didominasi oleh kelompok usia produktif (15–64 tahun) yang mencapai sekitar 66% dari total populasi. Komposisi ini mencerminkan adanya potensi bonus demografi yang penting bagi Kota Jambi, di mana jumlah tenaga kerja potensial lebih besar dibandingkan kelompok usia non-produktif. Jika dikelola dengan baik melalui peningkatan keterampilan, peluang kerja, dan perluasan sektor-sektor ekonomi strategis, bonus demografi ini dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan peningkatan daya saing daerah. Selain itu, proporsi usia muda dan anak-anak yang tetap signifikan juga menjadi indikator bahwa kesiapan pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu terus diperkuat guna memastikan kesinambungan produktivitas dan kesejahteraan penduduk di masa depan.

Tabel 2.6. Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk per km² menurut Kecamatan di Kota Jambi

Wilayah	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk per km ²
Kota Baru	13,5	3.144,61
Alam Barajo	18,3	3.223,61
Jambi Selatan	9,37	7.828,73
Paal Merah	17,83	4.667,70
Jelutung	9,55	7.965,47
Pasar Jambi	1,8	6.837,72
Telanaipura	7,92	2.473,63
Danau Sipin	6,98	6.087,11
Danau Teluk	2,06	973,74
Pelayangan	2,08	1.235,04
Jambi Timur	10,62	4.929,53
Kota Jambi (Total)	100	3.738,37

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Jambi, 2025

Berdasarkan 2.6 menunjukkan bahwa struktur demografi Kota Jambi bersifat terpusat pada kecamatan berpenduduk besar namun berkepadatan menengah (Alam Barajo, Paal Merah, Kota Baru), yang menandakan ekspansi permukiman horizontal di koridor barat–

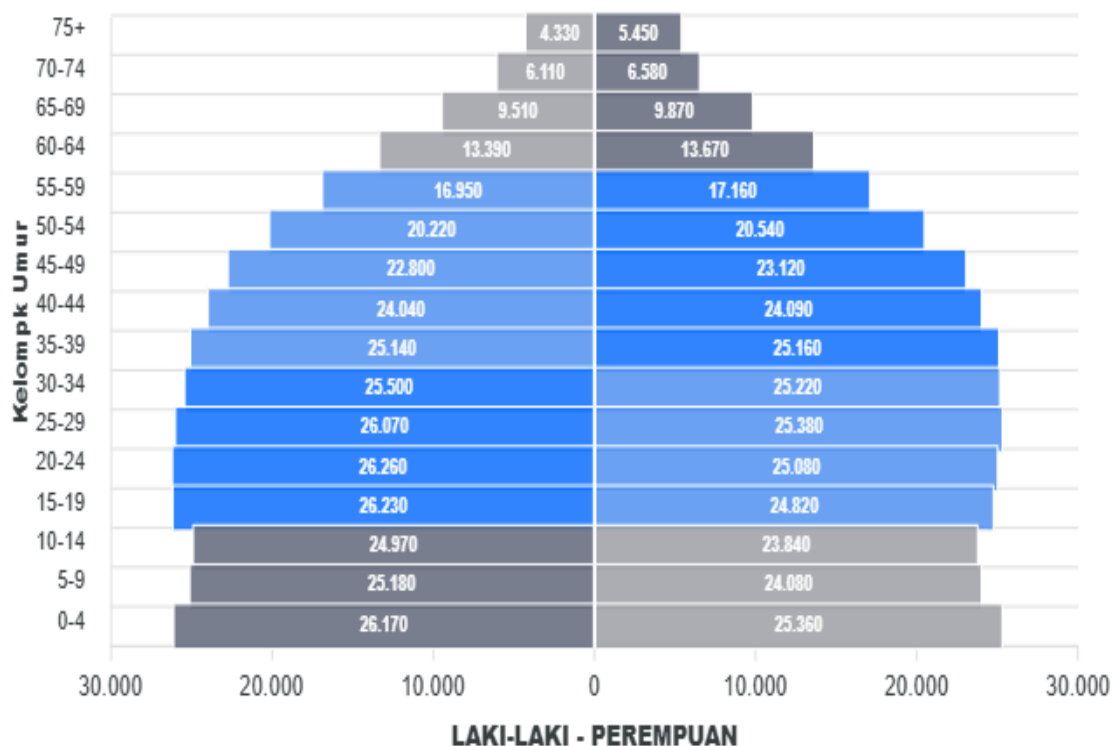
barat daya kota dan kebutuhan peningkatan konektivitas kolektor–sekunder serta layanan dasar di kawasan tumbuh baru; sebaliknya, kecamatan inti seperti Jambi Selatan, Jelutung, Danau Sipin, dan Jambi Timur memiliki kepadatan sangat tinggi meski porsinya terhadap total penduduk tidak selalu terbesar, sehingga prioritas kebijakan perlu menitikberatkan pada intensifikasi tata guna lahan, manajemen lalu lintas dan parkir, peningkatan angkutan umum, serta penyediaan ruang terbuka dan drainase untuk mengurangi tekanan lingkungan; kecamatan berpenduduk kecil dan pertumbuhan rendah (Pasar Jambi, Pelayangan, Danau Teluk) memerlukan strategi revitalisasi fungsi ekonomi perkotaan, perlindungan permukiman bersejarah, dan peningkatan aksesibilitas agar tidak tertinggal oleh arus perkembangan ke pinggiran; secara agregat, tren pertumbuhan moderat kota menuntut perencanaan diferensial: pengendalian kepadatan dan peningkatan kualitas layanan di pusat, ekspansi terarah infrastruktur permukiman–air minum persampahan di koridor barat–barat daya, serta penguatan jaringan transportasi yang menghubungkan pusat dengan kantong-kantong permukiman baru untuk menekan biaya mobilitas dan menjaga pemerataan akses layanan publik hingga 2045.

Tabel 2.7. Jumlah, Penyebaran Penduduk dan Luas Wilayah Menurut Kecamatan dalam Kota Jambi Tahun 2025

Wilayah	Jumlah Penduduk (jiwa)	Laju Pertumbuhan 2020–2024 (%)
Kota Baru	85.722	1,77
Alam Barajo	116.253	1,86
Jambi Selatan	59.514	1,17
Paal Merah	113.215	1,73
Jelutung	60.665	0,56
Pasar Jambi	11.419	0,55
Telanaipura	50.284	0,58
Danau Sipin	44.302	0,57
Danau Teluk	13.091	0,57
Pelayangan	13.205	0,56
Jambi Timur	67.431	0,54
Kota Jambi (Total)	635.101	1,22

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Jambi, 2025

Berdasarkan Tabel 2.7 menunjukkan jumlah penduduk dan laju pertumbuhan 2020–2024 per kecamatan, struktur kependudukan Kota Jambi menunjukkan konsentrasi terbesar di Alam Barajo (116.253 jiwa; 1,86% per tahun) dan Paal Merah (113.215 jiwa; 1,73% per tahun), diikuti Kota Baru (85.722 jiwa; 1,77% per tahun), yang bersama-sama merefleksikan dinamika ekspansi permukiman pada koridor barat–barat daya kota; sebaliknya, kawasan inti lama seperti Pasar Jambi (11.419 jiwa; 0,55% per tahun), Pelayangan (13.205 jiwa; 0,56% per tahun), dan Danau Teluk (13.091 jiwa; 0,57% per tahun) memiliki basis penduduk kecil dan pertumbuhan rendah, konsisten dengan dominannya fungsi perdagangan/pemerintahan dan keterbatasan ruang hunian; secara agregat, total penduduk Kota Jambi berjumlah 635.101 jiwa dengan laju pertumbuhan 1,22% per tahun, yang mengindikasikan kebutuhan penajaman prioritas layanan dasar dan infrastruktur pada kecamatan berpenduduk besar dan bertumbuh cepat, sekaligus strategi revitalisasi fungsi ekonomi, transportasi, dan permukiman di pusat kota untuk menjaga keseimbangan pelayanan dan efisiensi mobilitas lintas wilayah.



Gambar 2.4. Piramida Penduduk Kota Jambi, 2025

Sumber: <https://siperindu.online/piramida/>

Berdasarkan Gambar 2.4, piramida penduduk Kota Jambi tahun 2025 berdasarkan proyeksi SP2020 BPS menunjukkan struktur populasi yang relatif muda dan produktif,

dengan konsentrasi terbesar pada kelompok usia 15–34 tahun yang masing-masing mencapai lebih dari 26.000 jiwa pada laki-laki maupun perempuan. Bagian dasar piramida (usia 0–14 tahun) tetap besar dan seimbang, mencerminkan keberlanjutan regenerasi penduduk sekaligus kebutuhan layanan pendidikan dasar yang terus meningkat. Di sisi lain, bagian atas piramida (usia 60 tahun ke atas) mulai menyempit, namun tetap menunjukkan tren pertumbuhan lansia yang memerlukan perhatian terhadap penyediaan fasilitas kesehatan, layanan sosial, serta infrastruktur ramah lansia dalam dua dekade mendatang.

Tabel 2.8. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi (ribu jiwa), Periode 2021–2025.

Wilayah	2021	2022	2023	2024	2025
Kerinci	251,7	253,5	255,1	256,7	258,21
Merangin	358,1	363,3	368,4	373,4	378,36
Sarolangun	299,4	299,7	302,6	306,6	310,48
Batang Hari	309,4	308,9	312,7	316,9	320,7
Muaro Jambi	684,1	696,8	714,8	444,6	430,23
Tanjung Jabung Timur	222	224,4	226,9	229,3	231,49
Tanjung Jabung Barat	321,2	323,8	326,8	330,9	333,9
Tebo	341,5	346,2	350,8	355,3	359,64
Bungo	366,4	371,4	376,4	381,3	386,11
Kota Jambi	613,7	622,7	629,7	637	642,61
Kota Sungai Penuh	97,6	99,1	100,8	100,8	101,72
Provinsi Jambi	3.586,40	3.633,20	3.679,20	3.724,30	3.768,48

Sumber: Kota Jambi dalam Angka, 2025

Tabel 2.8 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jambi dan Kota Jambi pada periode 2021–2025 menunjukkan pola yang relatif stabil namun dengan kecenderungan melambat di akhir periode. Secara rata-rata tahunan, pertumbuhan penduduk Provinsi Jambi berada di kisaran sedikit di atas 1 persen per tahun, dengan laju sekitar 1,30 persen pada 2022 yang kemudian turun bertahap menjadi sekitar 1,19 persen pada 2025. Pola ini menggambarkan pertumbuhan yang moderat dan konsisten di tingkat provinsi.

Sementara itu, Kota Jambi memperlihatkan dinamika yang sedikit berbeda. Pada 2022, laju pertumbuhan penduduk Kota Jambi mencapai sekitar 1,47 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi sehingga mengindikasikan daya tarik urban yang kuat pada awal periode. Namun, pada tahun-tahun berikutnya laju pertumbuhan kota secara bertahap menurun: sekitar 1,12–1,16 persen pada 2023–2024, lalu turun lebih tajam hingga berada di bawah 1 persen (sekitar 0,88 persen) pada 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa menjelang 2025, penambahan penduduk di Kota Jambi melambat lebih cepat dibandingkan Provinsi Jambi secara keseluruhan, yang dapat mencerminkan kombinasi faktor seperti terbatasnya ruang kota, pergeseran pertumbuhan ke kawasan peri-urban, atau dinamika migrasi dan demografi lainnya yang mulai mengurangi laju konsentrasi penduduk di kota inti.

2.3. Ketenagakerjaan

Penguatan ketenagakerjaan dalam RUPM Kota Jambi 2025–2045 menjadi fondasi penting untuk memastikan pembangunan ekonomi berjalan inklusif dan berkelanjutan. Arah kebijakan utamanya adalah perluasan perlindungan jaminan sosial bagi seluruh pekerja, baik formal maupun informal, dengan target cakupan semesta pada tahun 2045. Pemerintah daerah mendorong kolaborasi intensif dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk mempercepat pendaftaran pekerja rentan, seperti pedagang kecil, buruh harian, pekerja rumah tangga, dan pekerja sektor jasa yang selama ini berada di luar sistem perlindungan. Tidak hanya itu, penegakan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) diwajibkan di setiap kawasan investasi prioritas agar seluruh proyek yang masuk mematuhi prinsip keamanan kerja, mengurangi kecelakaan, serta memastikan kesejahteraan tenaga kerja menjadi bagian dari indikator kualitas investasi di Kota Jambi.

Untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja masa depan, pemerintah juga menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai agenda strategis. Program-program seperti skilling, reskilling, dan sertifikasi kompetensi diarahkan agar selaras dengan kebutuhan sektor unggulan kota, terutama logistik, perdagangan-jasa, industri pengolahan ringan, ekonomi kreatif, dan pariwisata air–budaya. Pengembangan balai latihan kerja tematik di tiap koridor pertumbuhan dirancang agar pelatihan lebih kontekstual, tepat guna, dan mudah diakses masyarakat. Di sisi lain, sistem informasi pasar kerja berbasis kecamatan diperkuat untuk mengurangi mismatch antara kebutuhan industri dan ketersediaan tenaga kerja, sehingga distribusi kesempatan kerja menjadi lebih merata. Dengan kombinasi perlindungan sosial yang lebih kuat, peningkatan kompetensi yang relevan, dan sistem

penempatan kerja yang efektif, RUPM Kota Jambi 2025–2045 menyiapkan fondasi tenaga kerja yang produktif, adaptif, dan siap mendukung transformasi ekonomi kota selama dua dekade mendatang.

Kebijakan pemberdayaan ekonomi komunitas diarahkan pada perluasan perlindungan sosial bagi pelaku usaha mikro dan pekerja informal guna mengurangi kerentanan ekonomi, memperkuat rantai pasok lokal, serta memperluas basis usaha formal yang dapat terhubung langsung dengan proyek investasi prioritas. Langkah ini sejalan dengan visi RPJPD Kota Jambi 2025–2045 tentang transformasi ekonomi, peningkatan daya saing SDM, dan pembangunan berkelanjutan. Melalui roadmap ketenagakerjaan, pemerintah juga menargetkan peningkatan produktivitas tenaga kerja, penurunan jumlah pekerja tanpa perlindungan, dan pertumbuhan wirausaha baru setiap lima tahun, termasuk integrasi insentif pelatihan bagi investor yang membuka lapangan kerja berkualitas di koridor pertumbuhan Jambi–Muaro Jambi serta pusat layanan kota.

Tabel 2.9. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kota Jambi, 2024

Jenis kelamin	Angkatan kerja (orang)	Bukan angkatan kerja (orang)	Jumlah 15+ (orang)
Laki-laki	197.850	45.865	243.715
Perempuan	125.468	117.715	243.183
Total	323.318	163.580	486.898

Sumber: Sakernas Agustus 2024 dalam Kota Jambi dalam Angka 2025

Berdasarkan Tabel 2.9, penduduk Kota Jambi berumur 15 tahun ke atas pada 2024 berjumlah 486.898 orang, dengan 323.318 orang (66,4%) termasuk angkatan kerja yang didominasi laki-laki (197.850 orang) dibanding perempuan (125.468 orang). Sebaliknya, 163.580 orang (33,6%) tergolong bukan angkatan kerja, dengan jumlah perempuan lebih besar (117.715 orang) daripada laki-laki (45.865 orang), sehingga menunjukkan besarnya peran perempuan di luar pasar kerja formal, misalnya sebagai ibu rumah tangga atau pelajar. Ketimpangan partisipasi ini menuntut kebijakan peningkatan keterlibatan perempuan melalui dukungan fasilitas seperti penitipan anak dan pelatihan keterampilan, sekaligus penguatan sektor ekonomi yang menyerap tenaga kerja laki-laki. Dengan basis angkatan kerja yang besar, Kota Jambi perlu memprioritaskan penciptaan lapangan kerja produktif dan peningkatan kualitas SDM untuk menekan pengangguran dan menjaga stabilitas sosial

ekonomi. Kelompok bukan angkatan kerja terutama generasi muda juga perlu mendapat akses pendidikan dan pelatihan agar siap memasuki dunia kerja. Secara keseluruhan, indikator penduduk usia 15+ sebagai kelompok usia kerja menjadi penentu kapasitas penawaran tenaga kerja dan kebutuhan peningkatan keterampilan, sehingga penting dipantau secara berkala dan dijadikan dasar penetapan target penyerapan tenaga kerja, perancangan kemitraan industri–vokasi, serta penyelarasan kebijakan penanaman modal dengan kebutuhan kompetensi sektor unggulan dalam RUPM 2025–2045.

Tabel 2.10. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Terakhir dan Jenis Kelamin di Kota Jambi, 2024

Kegiatan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
I. Angkatan kerja	197.850	125.468	323.318
1. Bekerja	188.625	110.818	299.443
2. Pengangguran terbuka	9.225	14.650	23.875
II. Bukan angkatan kerja	45.865	117.715	163.580
1. Sekolah	25.015	21.746	46.761
2. Mengurus rumah tangga	12.700	91.726	104.426
3. Lainnya/Others	8.150	4.243	12.393
Total	243.715	243.183	486.898

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2024.

Berdasarkan Tabel 2.10 menunjukkan bahwa komposisi utama penduduk usia kerja Kota Jambi didominasi oleh angkatan kerja, yaitu sebesar 323.318 orang (66,4% dari total usia 15+), dan mayoritas di antaranya telah bekerja (299.443 orang atau 92,6% dari angkatan kerja). Pola ini memperlihatkan sektor ekonomi Kota Jambi masih cukup menyerap tenaga kerja, namun terdapat 23.875 penganggur terbuka yang mengindikasikan adanya tantangan dalam penyerapan kerja, terutama pada perempuan (TPAK perempuan lebih rendah dan jumlah pengangguran perempuan lebih tinggi dari laki-laki).

Pada kategori bukan angkatan kerja, mayoritas perempuan (91.726 dari total 117.715 perempuan) memilih mengurus rumah tangga, sementara laki-laki lebih banyak tercatat masih sekolah atau pada kategori lain. Hal ini mencerminkan tantangan struktural ketenagakerjaan, yaitu bias gender pada peran ekonomi dan domestik, serta potensi bonus

demografi yang belum sepenuhnya optimal jika kapasitas dan peluang ekonomi wanita belum didorong maksimal. Dengan demikian, arah kebijakan ketenagakerjaan di Kota Jambi perlu berfokus tidak hanya pada penciptaan lapangan kerja baru, tetapi juga penguatan pelatihan vokasi, fasilitasi wirausaha perempuan, dan penyediaan daya dukung agar partisipasi angkatan kerja khususnya Perempuan dapat meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi kota.

Tabel 2.11. Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu Terakhir di Kota Jambi, Tahun 2024

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Bekerja	Pengangguran	Jumlah Angkatan Kerja	Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja (%)
Tidak sekolah	38.929	1.910	40.839	95,32
SD/Sederajat	39.242	2.505	41.747	94,00
SMP/SMA/Sederajat	143.060	13.533	156.593	91,36
Diploma/PT	78.212	5.927	84.139	92,96
Total	299.443	23.875	323.318	92,62

Sumber: Kota Jambi dalam Angka, 2025

Berdasarkan data Tabel 2.11 Distribusi angkatan kerja Kota Jambi Tahun 2024 berdasarkan jenjang pendidikan menunjukkan bahwa kelompok lulusan SMP/SMA/Sederajat (156.593 orang) mendominasi jumlah angkatan kerja, namun mereka juga mempunyai angka pengangguran terbuka tertinggi (13.533 orang), sehingga tingkat partisipasi bekerjanya menjadi yang terendah dibanding jenjang lain (91,36%). Kelompok tanpa pendidikan formal dan lulusan SD memiliki tingkat partisipasi kerja tertinggi (>94%), meskipun secara absolut pengangguran di kelompok ini lebih kecil. Lulusan pendidikan tinggi (Diploma/PT) memiliki angka partisipasi kerja tinggi (92,96%), namun masih terdapat 5.927 penganggur terbuka, yang mengindikasikan tantangan pencocokan kompetensi lulusan terhadap kebutuhan pasar kerja lokal. Secara total, presentase bekerja terhadap angkatan kerja Kota Jambi adalah 92,62%, sudah relatif tinggi secara nasional, namun pengangguran struktural pada kelompok menengah-atas (SMA dan perguruan tinggi) perlu menjadi prioritas solusi kebijakan: pelatihan vokasi, sinergi kurikulum dengan dunia usaha,

dan fasilitasi akses kerja berbasis digital atau wirausaha muda. Implikasi dari data tersebut adalah pentingnya penguatan keterampilan dan konektivitas lulusan pendidikan menengah serta tinggi dengan pasar kerja agar bonus demografi dapat optimal dan angka pengangguran dapat ditekan secara berkelanjutan.

Tabel 2.12. Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu Terakhir di Kota Jambi, Tahun 2024

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Bukan Angkatan Kerja	Jumlah (Total)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)
≤ SD	30.681	71.520	57,10
SMP	41.052	82.799	50,42
SMA	73.574	230.167	68,03
Perguruan Tinggi	18.273	102.412	82,16
Total	163.580	486.898	66,40

Sumber: Kota Jambi dalam Angka, 2025

Berdasarkan Tabel 2.12 ini menunjukkan korelasi positif antara pencapaian pendidikan dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kota Jambi tahun 2024. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan, semakin besar peluang masuk ke angkatan kerja: lulusan perguruan tinggi memiliki TPAK tertinggi (82,16%), diikuti SMA (68,03%), sedangkan kelompok SMP ke bawah jauh lebih rendah (50–57%). Jumlah bukan angkatan kerja sangat dominan pada kelompok pendidikan dasar dan menengah pertama, yang dapat diinterpretasikan sebagai masih besarnya proporsi pelajar serta potensi migrasi ke pasar tenaga kerja setelah usia produktif.

Capaian TPAK agregat kota sebesar 66,4% menunjukkan bahwa sekitar sepertiga penduduk usia kerja masih belum aktif secara ekonomi, sebagian besar berada di tingkat pendidikan rendah. Implikasi untuk kebijakan adalah pentingnya percepatan akses pendidikan menengah dan tinggi, serta pelatihan vokasi bagi lulusan SD-SMP agar mereka secara bertahap mampu masuk ke pasar kerja dan mengurangi ketergantungan pada sektor informal atau kegiatan non-ekonomi. Selain itu, peran pendidikan tinggi perlu dioptimalkan sebagai pendorong produktivitas dan daya saing ekonomi daerah, mengingat mereka adalah

kelompok dengan peluang kerja tertinggi dan potensi dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Struktur penduduk usia 15+ yang bekerja selama seminggu terakhir di Kota Jambi tahun 2024 memperlihatkan dominasi status buruh/karyawan/pegawai, diikuti berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar, pekerja keluarga/tidak dibayar, dan pekerja bebas, dengan total pekerja sekitar 299,4 ribu orang yang didominasi laki-laki; komposisi ini menunjukkan pasar kerja perkotaan yang relatif formal di pusat layanan, namun masih terdapat kantong usaha mandiri dan kerja keluarga yang rentan, sehingga kebijakan RUPM perlu mendorong formalisasi UMKM, perluasan jaminan sosial berbasis gender, serta program skilling–reskilling yang ditautkan ke sektor prioritas perkotaan.

Tabel 2.13. Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja Seminggu Terakhir Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Jambi, 2024

Status Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Total
Berusaha sendiri (<i>Own account worker</i>)	33.651	20.019	53.670
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	14.463	10.073	24.536
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	11.817	1.733	13.550
Buruh/Karyawan/Pegawai (<i>Employee</i>)	108.971	56.557	165.528
Pekerja bebas (<i>Casual worker</i>)	13.713	1.848	15.561
Pekerja keluarga/tak dibayar (<i>Family worker/unpaid</i>)	6.010	20.588	26.598
Total	188.625	110.818	299.443

Sumber: Kota Jambi dalam Angka, 2025

Berdasarkan Tabel 2.13 menunjukkan bahwa Struktur pekerjaan utama di Kota Jambi tahun 2024 didominasi oleh kelompok buruh/karyawan/pegawai, yaitu sebanyak 165.528 orang atau 55,2% dari total penduduk bekerja usia 15 tahun ke atas, yang menandakan tingkat formalisasi kerja cukup tinggi dan besarnya ketergantungan pada sektor formal/perusahaan/pemerintahan. Sebagai perbandingan, pekerjaan mandiri (berusaha sendiri) menempati peringkat kedua terbesar (53.670 orang), menandakan jiwa kewirausahaan cukup berkembang di kalangan penduduk, walaupun proporsinya masih jauh di bawah proporsi pekerja formal.

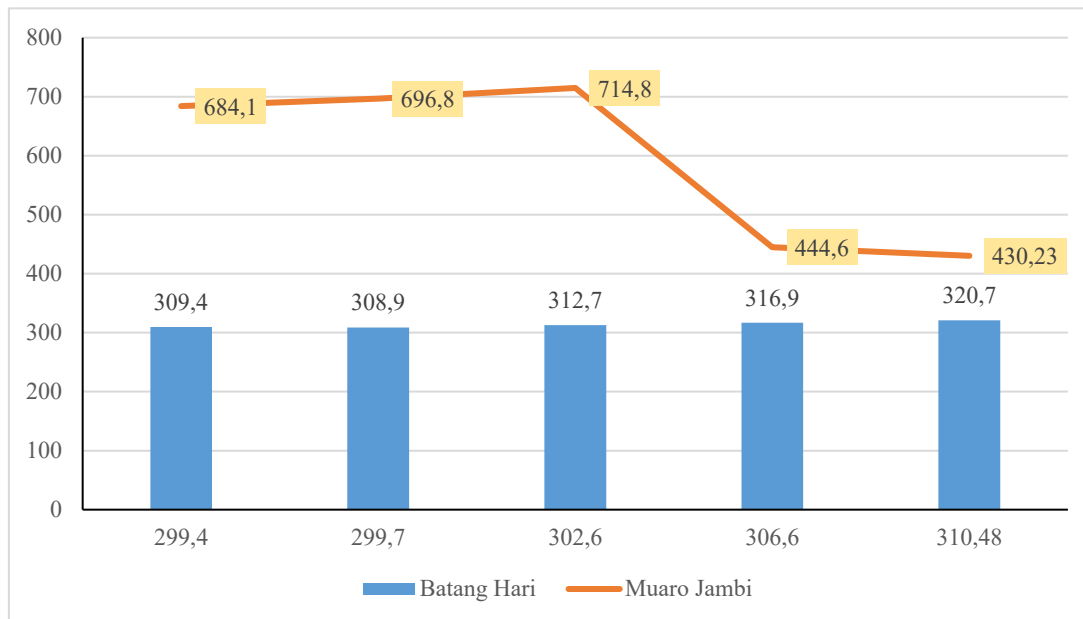
Tampak pula ketimpangan gender cukup besar pada kelompok pekerja keluarga/tidak dibayar, di mana sebagian besar pekerja tidak dibayar adalah perempuan (20.588 dari total 26.598 orang), mencerminkan fenomena unpaid labor di ranah domestik atau usaha keluarga. Kondisi ini menuntut kebijakan peningkatan perlindungan sosial dan pengakuan ekonomi kepada perempuan yang bekerja di sektor informal dan usaha rumah tangga. Selain itu, pekerja bebas (casual worker) dan usaha kecil dibantu buruh temporer lebih banyak didominasi laki-laki, menunjukkan kecenderungan laki-laki untuk mengambil segmen pasar kerja yang lebih fleksibel atau rentan tanpa perlindungan kerja yang memadai.

Komposisi ini menyiratkan bahwa strategi penguatan sektor ketenagakerjaan Kota Jambi harus memperhatikan sistem perlindungan formal dan informal, mendorong transformasi pekerja informal ke formal, serta membuka peluang peningkatan wirausaha perempuan melalui akses kredit, pelatihan, dan dukungan jaringan sosial ekonomi yang lebih merata.

2.4. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran komposit yang menggambarkan capaian pembangunan manusia melalui tiga dimensi dasar: umur panjang dan sehat (harapan hidup), pengetahuan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), serta standar hidup layak (pengeluaran/pendapatan riil per kapita) sebagai proksi daya beli. IPM dipakai untuk menilai kualitas hidup, membandingkan kinerja wilayah, dan menjadi rujukan perencanaan serta pengalokasian sumber daya pembangunan, termasuk di tingkat kota. Bagi RUPM Kota Jambi, IPM memengaruhi penetapan prioritas dan daya tarik investasi: IPM tinggi menandakan ketersediaan SDM lebih sehat, terdidik, dan produktif sehingga mendukung sektor bernilai tambah; sebaliknya, subkomponen IPM yang lemah mengarahkan strategi investasi ke proyek-proyek peningkatan layanan kesehatan, pendidikan vokasi, dan penguatan daya beli agar ekosistem investasi berkelanjutan terbentuk. Selain itu, tren dan target IPM menjadi indikator kinerja utama RUPM untuk memastikan bahwa pertumbuhan investasi berkontribusi pada peningkatan kualitas manusia, bukan semata ekspansi ekonomi jangka pendek. IPM seluruh Kabupaten/Kota di Jambi meningkat konsisten 2020–2024, mendorong rata-rata provinsi naik dari 72,29 ke 74,36 (status tinggi) yang mencerminkan perbaikan serentak pada kesehatan, pendidikan, dan daya beli rumah tangga. Kota Jambi memimpin dengan kategori sangat tinggi, naik dari 79,19 ke sekitar 81,77 dan menjadi

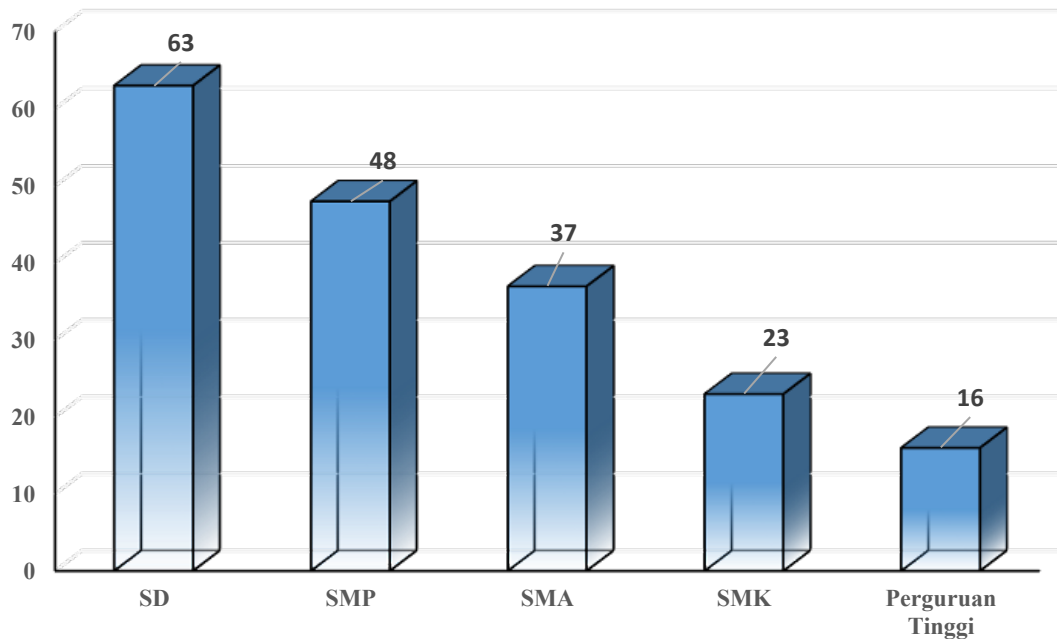
benchmark kualitas SDM serta daya tarik investasi berbasis jasa modern dan industri bernilai tambah di provinsi



Gambar 2.5. Indeks Pembangunan Manusia Kota Jambi dan Provinsi Jambi, Tahun 2020–2024.

Sumber: Kota Jambi dalam Angka, 2025

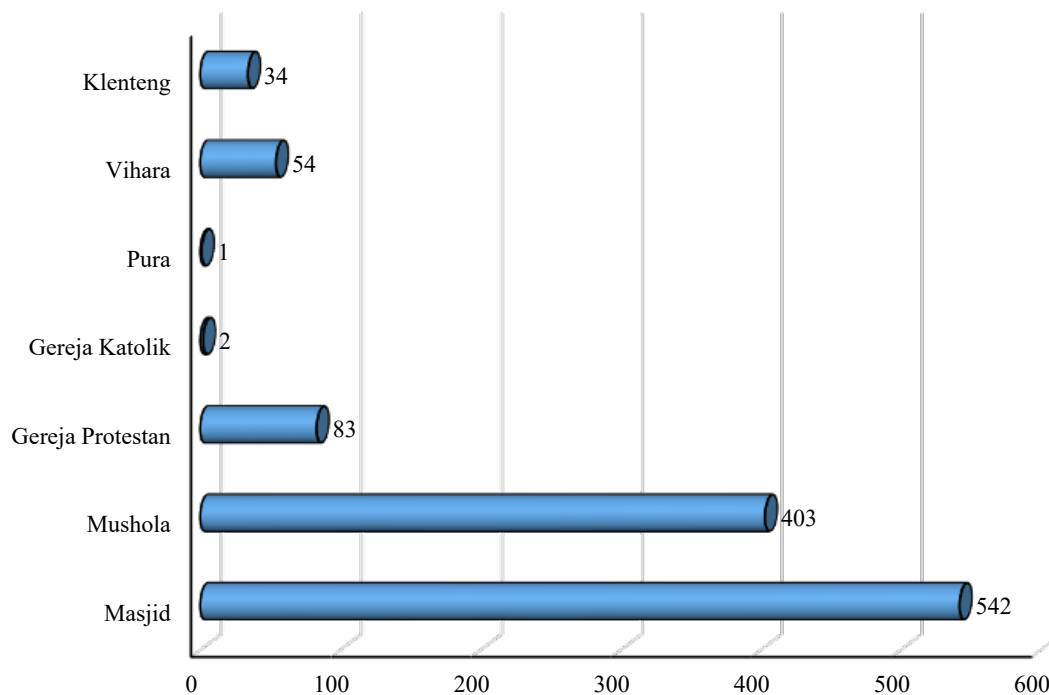
Berdasarkan Gambar 2.5 menunjukkan data IPM 2020–2024 mengalami peningkatan konsisten di seluruh kabupaten/kota Jambi, dengan rata-rata provinsi naik dari 72,29 menjadi 74,36 (status tinggi), menandakan perbaikan simultan pada kesehatan, pendidikan, dan daya beli yang menjadi fondasi kualitas SDM untuk investasi jangka panjang. Kota Jambi berada pada kategori sangat tinggi dan tertinggi di provinsi (79,19 menjadi 81,77), sehingga peran kota sebagai pusat layanan pendidikan, kesehatan, dan pasar kerja modern perlu dimantapkan untuk menarik investasi bernilai tambah dan mendorong spillover ke hinterland. Kota Sungai Penuh (76,02 menjadi 77,93) serta kabupaten ber-IPM relatif tinggi seperti Bungo (72,46 menjadi 74,41) dan Kerinci (72,47 menjadi 74,33) menunjukkan kesiapan SDM lebih baik untuk pengembangan pariwisata, agroindustri, dan jasa, yang dapat dipetakan sebagai mitra rantai nilai bagi proyek di Kota Jambi. Kabupaten dengan IPM lebih rendah Tanjung Jabung Timur (67,58 menjadi 70,77) dan Tanjung Jabung Barat (69,62 menjadi 72,01) tetap mengalami kemajuan, namun membutuhkan intervensi terarah pada layanan kesehatan primer, mutu pendidikan, dan produktivitas ekonomi maritim agar kesenjangan menurun dan pasar tenaga kerja regional menguat.



Gambar 2.6. Jumlah Kelurahan yang Memiliki Fasilitas Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Jambi, 2024

Sumber: Kota Jambi dalam Angka, 2025

Berdasarkan Gambar 2.6 dimnaa distribusi jumlah lembaga pendidikan formal di Kota Jambi menunjukkan dominasi sekolah dasar (SD) sebanyak 63 unit, dengan jumlah yang menurun pada jenjang yang lebih tinggi, menjadi 48 SMP, 37 SMA, 23 SMK, dan hanya 16 perguruan tinggi. Pola ini umum untuk struktur pendidikan di daerah urban Indonesia, di mana kebutuhan pendidikan dasar lebih besar secara kuantitatif untuk menjamin akses universal bagi anak usia sekolah. Penurunan jumlah institusi pada level menengah dan tinggi disebabkan oleh semakin spesifik kebutuhan, kapasitas daya tampung, dan selektivitas pendidikan lanjut. Jumlah SMK yang lebih sedikit dibanding SMA mengindikasikan peluang penguatan pendidikan vokasi/kejuruan untuk menunjang daya saing tenaga kerja lokal dan mendukung kebijakan link and match pendidikan dengan pasar kerja. Sedangkan, jumlah perguruan tinggi yang rendah mencerminkan masih terbatasnya kapasitas pendidikan tinggi lokal serta peluang untuk memperluas akses pendidikan tinggi guna mendukung terbentuknya ekosistem inovasi dan peningkatan kualitas SDM di Kota Jambi. Kebijakan pemerataan dan peningkatan kualitas lembaga pendidikan di seluruh jenjang menjadi strategis untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan optimalisasi bonus demografi dalam jangka panjang.



Gambar 2. 7. Jumlah Tempat Peribadatan di Kota Jambi, 2024

Sumber: Kota Jambi dalam Angka, 2025

Gambar 2.7 menunjukkan bahwa tempat ibadah di Kota Jambi didominasi oleh fasilitas Islam, dengan 542 masjid dan 403 mushola yang tersebar hingga tingkat permukiman. Komunitas Kristen terlayani oleh 83 gereja Protestan dan 2 gereja Katolik, sementara umat Buddha dan Konghucu memiliki 54 vihara dan 34 klenteng, serta 1 pura untuk umat Hindu. Pola ini menandakan perlunya pemeliharaan sarana ibadah mayoritas, pengaturan ruang yang memastikan akses inklusif, serta pemanfaatan rumah ibadah besar sebagai simpul kegiatan sosial, edukasi, dan pemberdayaan UMKM. Dalam konteks RUPM, rumah ibadah dapat diperkuat sebagai pusat informasi publik dan dukungan ekonomi komunitas dengan tetap menjaga toleransi dan keberagaman.

2.4.1. Pendidikan

Layanan pendidikan di Kota Jambi menunjukkan tren penguatan kapasitas di seluruh jenjang. Pada tingkat SD, jumlah sekolah meningkat dari 206 menjadi 211 unit, sementara jumlah murid tetap stabil di kisaran 57,5 ribu. Pertumbuhan paling signifikan terjadi di Kecamatan Kota Baru, Telanaipura, dan Paal Merah, yang secara demografis menjadi kawasan pertumbuhan baru. Kondisi ini menandakan kebutuhan mendesak untuk menambah

ruang kelas, melakukan redistribusi guru, serta memperkuat manajemen zonasi agar distribusi peserta didik lebih seimbang.

Pada jenjang SMP, penambahan sekolah dari 71 menjadi 73 unit mencerminkan kesiapan Kota Jambi dalam menyediakan kapasitas lanjutan bagi lulusan SD. Namun, peningkatan ini juga menuntut perencanaan jangka panjang terkait pemerataan akses, terutama di wilayah pinggiran yang mulai mengalami densifikasi penduduk. Sementara itu, pada jenjang SMA/SMK, dominasi peran sekolah swasta menunjukkan dinamika unik: pemerintah perlu memperkuat kemitraan dengan pihak swasta untuk memastikan mutu pendidikan, standardisasi sarana praktik, serta keterhubungan kurikulum dengan kebutuhan industri dan pasar kerja.

Rasio murid dan guru di tingkat SD juga mengalami perbaikan, tetapi masih terdapat ketimpangan antarwilayah. Beberapa kecamatan di kawasan pusat lama cenderung stagnan akibat minimnya ruang pengembangan fisik, sehingga memerlukan strategi revitalisasi sekolah, optimalisasi lahan, dan penyediaan transportasi pelajar untuk menjembatani akses ke sekolah di area yang lebih berkembang.

Tabel 2.14. Jumlah Sekolah dasar (SD) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menurut Kecamatan di Kota Jambi, Periode 2023/2024 dan 2024/2025

Wilayah	Sekolah					
	Negeri		Swasta		Total	
	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025
Kota Baru	25	25	2	3	27	28
Alam Barajo	16	16	2	2	18	18
Jambi Selatan	20	20	1	1	21	21
Paal Merah	17	18	2	4	19	22
Jelutung	18	18	7	6	25	24
Pasar Jambi	4	4	3	3	7	7
Telanaipura	9	9	2	2	11	11
Danau Sipin	5	5	1	1	6	6
Danau Teluk	1	1	—	—	1	1
Pelayangan	1	1	—	—	1	1
Jambi Timur	25	25	7	6	32	31
Kota Jambi	162	166	44	49	206	211

Sumber: Kota Jambi dalam Angka, 2025

Berdasarkan Tabel 2.14, Jumlah SD di Kota Jambi meningkat dari 206 menjadi 211 unit pada tahun ajaran 2023/2024–2024/2025, terdiri atas kenaikan SD negeri dari 162 menjadi 166 unit serta SD swasta dari 44 menjadi 49 unit. Pertumbuhan paling menonjol terjadi di Kecamatan Paal Merah (19 menjadi 22 unit) dan Kota Baru (2 menjadi 3 unit), sejalan dengan perluasan kawasan permukiman dan bertambahnya jumlah penduduk usia sekolah di wilayah tersebut. Kecamatan lain seperti Alam Barajo, Jambi Selatan, Telanaipura, Pasar Jambi, dan Danau Sipin relatif stabil, sehingga fokus kebijakan lebih pada perbaikan sarana, pemerataan guru, dan peningkatan mutu. Penurunan sekolah di Jelutung dan Jambi Timur akibat berkurangnya SD swasta perlu diwaspadai agar tidak membebani SD negeri. Kecamatan dengan satu SD, seperti Danau Teluk dan Pelayangan, tetap memerlukan intervensi berupa transportasi, kelas satelit, atau pendirian unit baru. Implikasi operasional meliputi penataan zonasi, penambahan ruang kelas dan sanitasi, serta penyesuaian alokasi guru dan BOS. Dalam RUPM, penguatan dan pemerataan SD mendukung kualitas pendidikan dasar, daya tarik investasi ramah keluarga, dan peluang kemitraan publik–swasta dalam digitalisasi layanan pendidikan.

Tabel 2.15. Jumlah Guru SD Menurut Kecamatan di Kota Jambi, 2023/2024–2024/2025

Wilayah	Guru Negeri		Guru Swasta		Jumlah Guru	
	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025
Kota Baru	370	370	39	45	409	415
Alam Barajo	304	302	130	134	434	436
Jambi Selatan	273	260	149	142	422	402
Paal Merah	294	296	18	29	312	325
Jelutung	222	212	136	150	358	362
Pasar Jambi	56	52	215	210	271	262
Telanaipura	268	257	167	169	435	426
Danau Sipin	94	92	139	137	233	229
Danau Teluk	56	54	10	11	66	65
Pelayangan	61	56	—	—	61	56
Jambi Timur	298	297	157	138	455	435
Kota Jambi	2.296	2.249	966	975	3.262	3.224

Sumber: Kota Jambi dalam Angka, 2025

Berdasarkan Tabel 2.15 menunjukkan total guru sekolah dasar di Kota Jambi mengalami penurunan tipis dari 3.262 orang pada tahun ajaran 2023/2024 menjadi 3.224 orang pada tahun ajaran 2024/2025, yang terutama disebabkan oleh berkurangnya guru pada sekolah negeri dari 2.296 orang menjadi 2.249 orang, sementara jumlah guru pada sekolah swasta meningkat dari 966 orang menjadi 975 orang. Kecamatan Paal Merah menunjukkan penguatan kapasitas karena jumlah guru bertambah dari 312 orang menjadi 325 orang, sedangkan Kecamatan Jelutung juga mengalami peningkatan dari 358 orang menjadi 362 orang yang sebagian besar berasal dari penambahan guru pada sekolah swasta. Kota Baru mengalami kenaikan moderat dari 409 orang menjadi 415 orang, sedangkan Kecamatan Jambi Timur, Telanaipura, Pasar Jambi, dan Jambi Selatan mengalami penurunan jumlah guru sehingga perlu penataan kembali distribusi beban mengajar, rotasi antarsekolah, serta rencana rekrutmen berbasis proyeksi murid. Kecamatan Pelayangan dan Danau Teluk menunjukkan penurunan kecil yang berpotensi menekan layanan pada wilayah dengan jumlah sekolah terbatas, sehingga kebijakan pemerataan penempatan guru dan dukungan bagi sekolah swasta yang strategis menjadi penting untuk menjaga rasio murid terhadap guru dan kualitas pembelajaran di seluruh kecamatan.

Tabel 2.16. Jumlah Murid SD Menurut Kecamatan di Kota Jambi, 2023/2024–2024/2025

Wilayah	Murid Negeri		Murid Swasta		Jumlah	
	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025
Kota Baru	7.086	7.249	799	959	7.885	8.208
Alam Barajo	6.218	6.206	1.883	1.927	8.101	8.133
Jambi Selatan	4.939	4.804	2.562	2.509	7.501	7.313
Paal Merah	6.582	6.553	284	396	6.866	6.949
Jelutung	3.443	3.467	2.516	2.496	5.959	5.963
Pasar Jambi	736	705	138	133	874	838
Telanaipura	4.554	4.488	2.776	2.884	7.330	7.372
Danau Sipin	1.640	1.547	1.884	1.929	3.524	3.476
Danau Teluk	764	776	263	290	1.027	1.066
Pelayangan	1.031	1.008	—	—	1.031	1.008
Jambi Timur	4.998	4.969	2.392	2.297	7.390	7.266
Kota Jambi	41.975	41.672	15.497	15.820	57.472	57.492

Sumber: Kota Jambi dalam Angka, 2025

Berdasarkan Tabel 2.16 menunjukkan Jumlah murid SD Kota Jambi meningkat tipis dari 57.472 pada 2023/2024 menjadi 57.492 pada 2024/2025, dengan komposisi murid negeri turun dari 41.975 menjadi 41.672 dan murid swasta naik dari 15.497 menjadi 15.820, yang menandakan pergeseran sebagian beban layanan ke satuan pendidikan swasta di beberapa kecamatan; pertumbuhan paling nyata terjadi di Kota Baru yang bertambah 323 murid didorong kenaikan di sekolah negeri dan swasta, sementara Telanaipura juga bertambah 42 murid terutama karena peningkatan murid swasta, sedangkan penurunan terlihat di Jambi Selatan yang berkurang 188 murid dan Pasar Jambi yang berkurang 36 murid sehingga perlu penataan zonasi dan redistribusi rombongan belajar; Danau Teluk mencatat kenaikan total 39 murid yang selaras dengan kenaikan di sekolah negeri dan swasta, sedangkan Pelayangan menurun 23 murid yang perlu diantisipasi agar efisiensi kelas tetap terjaga; secara kebijakan, tren ini merekomendasikan penguatan kemitraan dengan sekolah swasta di kecamatan yang mengalami pertumbuhan, penajaman alokasi guru dan BOS pada wilayah yang turun agar mutu tidak terdampak, serta penyelarasan kapasitas ruang kelas dengan proyeksi demografi usia sekolah per kecamatan.

Tabel 2.17. Jumlah SMP Negeri dan Swasta Menurut Kecamatan di Kota Jambi, 2023/2024–2024/2025

Wilayah	Sekolah Negeri		Sekolah Swasta		Total	
	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025
Kota Baru	6	6	4	4	10	10
Alam Barajo	2	2	4	4	6	6
Jambi Selatan	1	1	8	8	9	9
Paal Merah	4	4	4	4	8	8
Jelutung	1	1	6	6	7	7
Pasar Jambi	2	2	1	1	3	3
Telanaipura	3	3	8	8	11	11
Danau Sipin	1	1	5	6	6	7
Danau Teluk	1	1	0	0	1	1
Pelayangan	0	0	0	0	0	0
Jambi Timur	4	4	6	6	10	10
Kota Jambi	25	25	46	48	71	73

Sumber: Kota Jambi dalam Angka, 2025

Berdasarkan Tabel 2.17 menunjukkan Jumlah sekolah yang tercantum pada tabel meningkat dari 71 menjadi 73 unit pada 2024/2025, sepenuhnya didorong oleh bertambahnya sekolah swasta dari 46 menjadi 48 sedangkan sekolah negeri tetap 25; secara wilayah, penambahan terjadi di Danau Sipin yang naik dari 6 menjadi 7 akibat bertambahnya satu sekolah swasta, sementara kecamatan lain stabil, dengan konsentrasi tertinggi sekolah berada di Telanaipura (total 11), Kota Baru dan Jambi Timur (masing-masing 10), serta Jambi Selatan (9), yang menandakan pusat-pusat layanan pendidikan banyak ditopang penyelenggara swasta; konfigurasi ini menyiratkan kebutuhan penguatan kemitraan pemerintah–swasta untuk menjaga mutu dan kapasitas di kecamatan berintensitas tinggi, serta intervensi akses di kecamatan berjumlah sangat sedikit seperti Danau Teluk dan wilayah yang tidak tercatat memiliki satuan, agar pemerataan layanan dan rasio rombongan belajar tetap terjaga.

Tabel 2.18. Jumlah SMA Negeri dan Swasta Menurut Kecamatan di Kota Jambi, 2023/2024–2024/2025

Wilayah	Sekolah Negeri		Sekolah Swasta		Total	
	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025
Kota Baru	3	3	1	1	4	4
Alam Barajo	3	3	2	2	5	5
Jambi Selatan	0	0	5	6	5	6
Paal Merah	2	2	4	4	6	6
Jelutung	1	1	5	5	6	6
Pasar Jambi	0	0	3	3	3	3
Telanaipura	3	3	5	5	8	8
Danau Sipin	1	1	6	6	7	7
Danau Teluk	0	0	1	1	1	1
Pelayangan	0	0	0	0	0	0
Jambi Timur	1	1	4	4	5	5
Kota Jambi	14	14	32	33	46	47

Sumber: Kota Jambi dalam Angka, 2025

Berdasarkan Tabel 2.18, jumlah SMA di Kota Jambi meningkat dari 46 menjadi 47 unit pada tahun ajaran 2023/2024–2024/2025, dengan SMA negeri tetap 14 unit dan SMA swasta bertambah dari 32 menjadi 33 unit akibat penambahan satu sekolah swasta di

Kecamatan Jambi Selatan. Konsentrasi terbesar berada di Telanaipura (8 unit) dan Danau Sipin (7 unit), menunjukkan peran keduanya sebagai pusat layanan pendidikan menengah. Enam kecamatan memiliki 5–6 SMA, sementara tiga kecamatan tergolong akses terbatas: Danau Teluk hanya memiliki 1 SMA swasta, Kota Baru 4, dan Pelayangan belum memiliki SMA.

Dari sisi kebijakan, penambahan SMA di Jambi Selatan membutuhkan penataan zonasi dan penguatan sarpras, sedangkan wilayah minim atau tanpa SMA (Pelayangan dan Danau Teluk) memerlukan solusi akses transportasi pelajar, kelas jauh, atau pendirian sekolah baru. Kecamatan dengan dominasi swasta (Pasar Jambi, Danau Sipin) membutuhkan kemitraan pembiayaan dan pengawasan mutu, sementara Telanaipura sebagai kantong SMA negeri memerlukan pengaturan rombongan belajar, distribusi guru, dan penguatan peminatan agar lebih selaras dengan prioritas pembangunan pendidikan dalam RUPM 2025–2045.

Tabel 2.19. Jumlah Guru (SMA) Negeri dan Swasta Menurut Kecamatan di Kota Jambi, 2023/2024–2024/2025

Wilayah	Guru Negeri		Guru Swasta		Total	
	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025
Kota Baru	216	218	5	2	221	220
Alam Barajo	133	147	26	28	159	175
Jambi Selatan	0	0	76	79	76	79
Paal Merah	90	99	36	34	126	133
Jelutung	70	70	65	64	138	134
Pasar Jambi	0	0	0	0	0	0
Telanaipura	131	129	44	47	175	176
Danau Sipin	66	66	101	89	167	155
Danau Teluk	38	37	0	0	38	37
Pelayangan	0	0	0	0	0	0
Jambi Timur	74	70	54	57	128	127
Kota Jambi	821	836	407	400	1.228	1.236

Sumber: Kota Jambi dalam Angka, 2025

Berdasarkan Tabel 2.19, jumlah guru SMA di Kota Jambi meningkat sedikit dari 1.228 pada 2023/2024 menjadi 1.236 pada 2024/2025. Guru negeri bertambah terutama di Kota Baru (216 menjadi 218) dan Alam Barajo (133 menjadi 147), sementara beberapa kecamatan seperti Jambi Timur mengalami penurunan kecil. Jumlah guru swasta cenderung stabil namun menurun dari 407 menjadi 400, terutama di Danau Sipin (101 menjadi 89). Beberapa kecamatan, seperti Jambi Selatan dan Pasar Jambi, hanya memiliki guru swasta, sementara Pelayangan tercatat tanpa guru negeri maupun swasta. Secara umum, distribusi guru masih bervariasi antar kecamatan, dengan kecenderungan peningkatan pada guru negeri dan penurunan kecil pada guru swasta dalam dua tahun terakhir.

Tabel 2.20. Jumlah Murid (SMA) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menurut Kecamatan di Kota Jambi, 2023/2024 dan 2024/2025.

Wilayah	Murid Negeri		Murid Swasta		Total	
	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025
Kota Baru	3.493	3.523	12	7	3.505	3.530
Alam Barajo	2.121	2.399	502	563	2.623	2.962
Jambi Selatan	0	0	1.329	1.354	1.329	1.354
Paal Merah	1.564	1.670	467	433	2.031	2.103
Jelutung	1.253	1.259	639	686	1.892	1.945
Pasar Jambi	0	0	0	0	0	0
Telanaipura	2.099	2.135	493	462	2.592	2.597
Danau Sipin	1.047	1.058	1.216	1.262	2.263	2.320
Danau Teluk	477	559	0	0	477	559
Pelayangan	0	0	0	0	0	0
Jambi Timur	1.281	1.292	836	879	2.117	2.171
Kota Jambi	13.335	13.895	5.494	5.646	18.829	19.541

Sumber: Kota Jambi dalam Angka, 2025

Berdasarkan Tabel 2.20, jumlah murid SMA di Kota Jambi meningkat dari 18.829 pada tahun 2023/2024 menjadi 19.541 pada 2024/2025. Kenaikan ini terutama berasal dari

sekolah negeri yang bertambah dari 13.335 menjadi 13.895 murid, disertai peningkatan murid swasta dari 5.494 menjadi 5.646. Secara kecamatan, Alam Barajo mencatat lonjakan terbesar, sementara Jambi Selatan tetap didominasi murid swasta dengan kenaikan kecil. Beberapa kecamatan seperti Danau Teluk hanya mengalami pertumbuhan di sekolah negeri, sedangkan Paal Merah dan Telanaipura mencatat penurunan ringan pada murid swasta. Pasar Jambi dan Pelayangan tidak memiliki murid SMA. Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan populasi pelajar SMA yang stabil dan cenderung meningkat, dengan sekolah negeri sebagai penyumbang utama dan sekolah swasta tetap berperan penting di wilayah tertentu.

Tabel 2.21. Jumlah Sekolah SMK di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menurut Kecamatan di Kota Jambi, 2023/2024 dan 2024/2025.

Wilayah	Negeri		Swasta		Total	
	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025
Kota Baru	0	0	6	5	6	5
Alam Barajo	1	1	1	1	2	2
Jambi Selatan	1	1	3	3	4	4
Paal Merah	1	1	6	6	7	7
Jelutung	0	0	0	0	0	0
Pasar Jambi	0	0	1	1	1	1
Telanaipura	2	2	2	2	4	4
Danau Sipin	1	1	5	5	6	6
Danau Teluk	1	1	0	0	1	1
Pelayangan	0	0	0	0	0	0
Jambi Timur	0	0	4	4	4	4
Kota Jambi	6	6	28	27	33	33

Sumber: Kota Jambi dalam Angka, 2025

Berdasarkan Tabel 2.21, Kota Jambi memiliki 33 sekolah SMK pada 2023/2024–2024/2025, terdiri dari 6 negeri dan 27 swasta. Jumlah yang stabil ini penting bagi RUPM

Kota Jambi 2025–2045 karena SMK menjadi penopang utama penyedia tenaga kerja terampil untuk sektor industri dan jasa yang menjadi fokus investasi kota. Kualitas dan ketersediaan lulusan SMK berpengaruh langsung terhadap daya tarik investasi, sehingga penguatan fasilitas, peningkatan kompetensi guru, dan kolaborasi dengan industri perlu dioptimalkan. Dengan demikian, RUPM dapat menyelaraskan program investasi dengan pengembangan pendidikan vokasi sebagai fondasi peningkatan kualitas SDM dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Kota Jambi.

Tabel 2.22. Guru (SMK) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menurut Kecamatan di Kota Jambi, 2023/2024 dan 2024/2025.

Wilayah	Guru Negeri		Guru Swasta		Total	
	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025
Kota Baru	0	0	91	78	91	78
Alam Barajo	117	110	12	10	129	120
Jambi Selatan	116	121	34	30	150	151
Paal Merah	36	33	144	136	180	169
Jelutung	0	0	18	22	18	22
Pasar Jambi	0	0	9	8	9	8
Telanaipura	119	110	0	0	119	110
Danau Sipin	78	83	69	61	147	144
Danau Teluk	34	38	0	0	34	38
Pelayangan	0	0	0	0	0	0
Jambi Timur	0	0	60	50	60	50
Kota Jambi	500	495	437	395	937	890

Sumber: Kota Jambi dalam Angka, 2025

Berdasarkan Tabel 2.22 tentang Guru SMK di Kota Jambi Tahun 2023/2024 dan 2024/2025, total jumlah guru SMK mengalami penurunan dari 937 menjadi 890, dengan penurunan baik pada guru negeri (dari 500 menjadi 495) maupun guru swasta (dari 437 menjadi 395). Penurunan ini terlihat cukup signifikan terutama pada guru swasta di kecamatan seperti Kota Baru (dari 91 menjadi 78) dan Paal Merah (dari 144 menjadi 136). Beberapa kecamatan, seperti Alam Barajo, Telanaipura, dan Danau Sipin, juga mengalami sedikit penurunan guru negeri. Sedangkan di Jambi Selatan terdapat peningkatan guru

negeri, dari 116 menjadi 121. Data ini perlu menjadi perhatian dalam konteks RUPM Kota Jambi 2025-2045 karena keberadaan guru SMK yang memadai dan berkualitas menjadi kunci utama dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk mendukung sektor investasi dan pembangunan industri di kota ini. Upaya peningkatan kapasitas dan penyediaan tenaga pendidik yang kompeten harus menjadi bagian dari strategi investasi ketenagakerjaan, agar kebutuhan industri akan tenaga kerja terampil dapat terpenuhi dan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang di Kota Jambi .

Tabel 2.23. Murid (SMK) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menurut Kecamatan di Kota Jambi, 2023/2024 dan 2024/2025.

Wilayah	Murid Negeri		Murid Swasta		Total	
	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025
Kota Baru	0	0	855	881	855	881
Alam Barajo	1.601	1.542	149	135	1.750	1.677
Jambi Selatan	2.424	2.404	446	403	2.870	2.807
Paal Merah	684	696	2.353	2.167	3.037	2.863
Jelutung	0	0	95	91	95	91
Pasar Jambi	0	0	49	35	49	35
Telanaipura	1.744	1.834	0	0	1.744	1.834
Danau Sipin	1.252	1.267	735	664	1.987	1.931
Danau Teluk	501	476	0	0	501	476
Pelayangan	0	0	0	0	0	0
Jambi Timur	0	0	1.064	980	1.064	980
Kota Jambi	8.206	8.219	5.746	5.356	13.952	13.575

Sumber: Kota Jambi dalam Angka, 2025

Berdasarkan data Tabel 2.23 tentang jumlah murid SMK di Kota Jambi pada tahun 2023/2024 dan 2024/2025, terdapat penurunan total murid dari 13.952 menjadi 13.575 orang. Penurunan ini terjadi pada murid swasta yang turun dari 5.746 menjadi 5.356, sedangkan murid negeri relatif stabil (dari 8.206 menjadi 8.219). Penurunan terutama terlihat di kecamatan Paal Merah dengan murid swasta berkurang dari 2.353 menjadi 2.167, dan

Jambi Selatan yang juga mengalami pengurangan murid swasta dari 446 menjadi 403. Sementara itu, beberapa kecamatan seperti Kota Baru dan Telanaipura mencatat kenaikan murid swasta dan negeri secara berturut-turut, yang menunjukkan dinamika distribusi siswa SMK yang bervariasi antar kecamatan. Dalam konteks RUPM Kota Jambi periode 2025-2045, tren penurunan murid SMK swasta ini harus menjadi kajian untuk memastikan ketersediaan sumber daya manusia terampil tetap terjaga seiring rencana pengembangan investasi industri dan sektor vokasi. Upaya penguatan kualitas sekolah SMK dan penyesuaian kapasitas pendidikan sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah jangka panjang .

Tabel 2.24. Sekolah (MA) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menurut Kecamatan di Kota Jambi, 2023/2024 dan 2024/2025.

Wilayah	Negeri		Swasta		Total	
	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025
Kota Baru	0	0	3	3	3	3
Alam Barajo	0	0	3	3	3	3
Jambi Selatan	1	1	0	0	1	1
Paal Merah	1	1	1	2	2	3
Jelutung	0	0	2	2	2	2
Pasar Jambi	0	0	1	1	1	1
Telanaipura	1	1	2	2	3	3
Danau Sipin	0	0	2	2	2	2
Danau Teluk	0	0	3	3	3	3
Pelayangan	0	0	1	1	1	1
Jambi Timur	0	0	0	0	0	0
Kota Jambi	3	3	17	18	20	21

Sumber: Kota Jambi dalam Angka, 2025

Berdasarkan Tabel 2.24 tentang jumlah Sekolah Madrasah Aliyah (MA) di Kota Jambi Tahun 2023/2024 dan 2024/2025, total sekolah MA mengalami peningkatan dari 20 menjadi 21 sekolah. Sekolah negeri MA tetap berjumlah 3 sekolah selama dua tahun tersebut, sementara sekolah swasta MA bertambah dari 17 menjadi 18 sekolah. Penambahan sekolah

swasta terutama terlihat di Kecamatan Paal Merah yang meningkat dari 1 menjadi 2 sekolah swasta. Kecamatan lain seperti Kota Baru, Alam Barajo, Jambi Selatan, Jelutung, Pasar Jambi, Telanaipura, Danau Sipin, Danau Teluk, dan Pelayangan menunjukkan kestabilan jumlah sekolah MA. Tidak terdapat sekolah MA di Jambi Timur. Dalam konteks RUPM Kota Jambi periode 2025-2045, pertumbuhan jumlah sekolah MA ini penting sebagai bagian dari pengembangan pendidikan keagamaan yang mendukung pembentukan karakter dan sumber daya manusia yang berakhlak serta berdaya saing. Integrasi pendidikan agama dengan program investasi yang berorientasi pada pembangunan sosial-ekonomi dapat memperkuat aspek keberlanjutan dan inklusivitas dalam pembangunan daerah, sehingga memberikan nilai tambah bagi kualitas sumber daya manusia di Kota Jambi .

Tabel 2.25. Guru (MA) Menurut Kecamatan di Kota Jambi, Periode 2023/2024

Wilayah	Guru Negeri	Guru Swasta	Total
Kota Baru	0	56	56
Alam Barajo	0	48	48
Jambi Selatan	96	0	96
Paal Merah	47	19	66
Jelutung	0	24	24
Pasar Jambi	0	11	11
Telanaipura	36	34	70
Danau Sipin	0	16	16
Danau Teluk	36	66	102
Pelayangan	0	24	24
Jambi Timur	0	0	0
Kota Jambi	179	298	477

Sumber: Kota Jambi dalam Angka, 2025

Berdasarkan data Tabel 2.25 Guru Madrasah Aliyah (MA) Periode 2023/2024 di Kota Jambi, total jumlah guru mencapai 477 orang, dengan dominasi guru swasta sebanyak 298 orang dibandingkan guru negeri yang berjumlah 179 orang. Kecamatan Danau Teluk menjadi wilayah dengan jumlah guru MA terbanyak, yakni 102 orang, diikuti oleh Telanaipura dan Jambi Selatan. Beberapa kecamatan seperti Kota Baru, Alam Barajo, Jelutung, dan Pelayangan hanya memiliki guru swasta tanpa guru negeri, sementara Jambi

Selatan lebih banyak guru negeri. Ketersediaan guru yang relatif cukup ini menunjang pengembangan pendidikan agama di Kota Jambi yang berperan penting dalam membentuk karakter dan moral siswa. Dalam konteks RUPM Kota Jambi 2025-2045, keberadaan tenaga pendidik MA yang memadai dapat mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia yang religius dan berdaya saing, sekaligus menjadi bagian integral dalam perencanaan investasi pendidikan berbasis keagamaan yang inklusif dan berkelanjutan di Kota Jambi .

Tabel 2.26. Murid (MA) Menurut Kecamatan di Kota Jambi, Periode 2023/2024

Wilayah	Murid Negeri	Murid Swasta	Total
Kota Baru	0	828	828
Alam Barajo	0	565	565
Jambi Selatan	1.252	0	1.252
Paal Merah	623	226	849
Jelutung	0	186	186
Pasar Jambi	0	93	93
Telanaipura	0	321	321
Danau Sipin	0	150	150
Danau Teluk	392	739	1.131
Pelayangan	0	231	231
Jambi Timur	0	0	0
Kota Jambi	2.267	3.339	5.606

Sumber: Kota Jambi dalam Angka, 2025

Berdasarkan Tabel 2.26 tentang murid Madrasah Aliyah (MA) di Kota Jambi periode 2023/2024, terdapat total 5.606 murid dengan mayoritas bersekolah di madrasah swasta sebanyak 3.339 murid, sementara murid di madrasah negeri berjumlah 2.267. Kecamatan Kota Baru memiliki jumlah murid swasta terbesar, yakni 828 orang, diikuti oleh Danau Teluk dengan total murid MA terbanyak yaitu 1.131 murid yang terdiri dari murid negeri dan swasta. Kecamatan Jambi Selatan merupakan satu-satunya kecamatan yang murid MA-nya hanya dari madrasah negeri dengan 1.252 murid. Kecamatan lain seperti Paal Merah, Telanaipura, dan Jelutung didominasi murid di madrasah swasta. Tidak ada murid MA yang

tercatat di Kecamatan Jambi Timur. Data ini menunjukkan peran penting madrasah swasta dalam menyediakan pendidikan agama di Kota Jambi. Dalam konteks RUPM Kota Jambi 2025-2045, peningkatan kualitas dan akses pendidikan madrasah, khususnya di madrasah swasta, perlu diperhatikan sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia yang religius dan berkompetensi, mendukung pertumbuhan sosial-ekonomi dan investasi berorientasi pada nilai-nilai keberlanjutan dan inklusivitas.

Tabel 2.27. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Jambi, 2023 dan 2024

Jenjang	APM 2023	APM 2024	APK 2023	APK 2024
SD/MI/Sederajat	99,62	97,83	107,19	108,22
SMP/MTs/Sederajat	75,46	71,71	81,08	75,73
SMA/SMK/MA/Sederajat	70,53	73,97	110,33	102,97

Sumber: Kota Jambi dalam Angka, 2025

Berdasarkan Tabel 2.27 tentang Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut jenjang pendidikan di Kota Jambi tahun 2023 dan 2024, terlihat bahwa APM jenjang SD/MI/ sederajat mengalami penurunan dari 99,62% menjadi 97,83%, sedangkan APK untuk jenjang yang sama sedikit meningkat dari 107,19% menjadi 108,22%. Pada jenjang SMP/MTs/ sederajat, baik APM maupun APK mengalami penurunan yang cukup signifikan; APM turun dari 75,46% menjadi 71,71%, dan APK dari 81,08% menjadi 75,73%. Sebaliknya, jenjang SMA/SMK/MA/ sederajat menunjukkan peningkatan APM dari 70,53% menjadi 73,97%, walaupun APK menurun dari 110,33% menjadi 102,97%. Penurunan APM dan APK di jenjang SD dan SMP mengindikasikan tantangan dalam mempertahankan partisipasi belajar yang konsisten, terutama di tingkat menengah pertama, yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pendidikan dan investasi sumber daya manusia di Kota Jambi. Peningkatan APM di jenjang SMA/SMK/MA menunjukkan adanya kemajuan dalam akses pendidikan menengah atas, yang relevan dengan strategi RUPM Kota Jambi periode 2025-2045 untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia terampil demi menunjang pembangunan ekonomi dan investasi jangka panjang .

Tabel 2.28. Angka Melek Aksara Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kota Jambi, 2023 dan 2024

Kelompok	2023	2024
Laki-laki 15–24	100,00	100,00
Laki-laki 15–59	100,00	99,94
Laki-laki 15+	99,83	99,76
Laki-laki 60+	98,73	98,60
Perempuan 15–24	100,00	100,00
Perempuan 15–59	99,88	99,80
Perempuan 15+	99,29	99,61
Perempuan 60+	94,88	98,34
Total 15–24	100,00	100,00
Total 15–59	99,94	99,87
Total 15+	99,56	99,69
Total 60+	96,87	98,47

Sumber: Kota Jambi dalam Angka, 2025

Berdasarkan Tabel 2.28 tentang Angka Melek Aksara menurut jenis kelamin dan kelompok umur di Kota Jambi tahun 2023 dan 2024, tingkat melek aksara untuk kelompok usia 15–24 tahun mencapai 100% pada kedua tahun, menunjukkan generasi muda Kota Jambi hampir seluruhnya melek huruf. Untuk kelompok usia 15–59 dan 15+ tahun, tingkat melek aksara juga sangat tinggi, berada di atas 99%, dengan sedikit penurunan pada laki-laki usia 15–59 dari 100% menjadi 99,94% dan perempuan usia 15–59 dari 99,88% menjadi 99,80%. Namun, peningkatan signifikan terlihat pada kelompok usia 60+ terutama pada perempuan, dari 94,88% menjadi 98,34%, serta pada total populasi usia 60+ yang meningkat dari 96,87% menjadi 98,47%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan akses dan partisipasi pendidikan literasi di kelompok usia lebih tua. Secara keseluruhan, Kota Jambi menunjukkan capaian melek aksara yang sangat baik di hampir seluruh kelompok umur,

yang menjadi modal penting dalam pengembangan sumber daya manusia yang inklusif dan berkualitas.

Tabel 2.29. Jumlah Sekolah Dasar (SD) Menurut Kecamatan di Kota Jambi, 2020-2024

Wilayah	2020	2021	2024
Kota Baru	5	5	7
Alam Barajo	5	5	6
Jambi Selatan	5	5	6
Paal Merah	5	5	6
Jelutung	7	7	7
Pasar Jambi	2	2	2
Telanaipura	6	6	7
Danau Sipin	5	4	5
Danau Teluk	5	5	5
Pelayangan	5	5	5
Jambi Timur	9	9	9
Kota Jambi	59	58	63

Sumber: Kota Jambi dalam Angka, 2025

Berdasarkan Tabel 2.29 yang memuat data jumlah Sekolah Dasar (SD) di Kota Jambi pada tahun 2020, 2021, dan 2024, terjadi peningkatan jumlah sekolah SD dari 59 sekolah pada 2020 menjadi 63 sekolah pada 2024. Beberapa kecamatan seperti Kota Baru naik dari 5 menjadi 7 sekolah, Alam Barajo, Jambi Selatan, dan Paal Merah masing-masing mengalami penambahan satu sekolah SD. Kecamatan Jelutung, Pasar Jambi, Danau Teluk, Pelayangan, dan Jambi Timur menunjukkan stabilitas jumlah sekolah SD selama periode tersebut. Kecamatan Danau Sipin justru mengalami penurunan sekolah SD pada tahun 2021 dari 5 menjadi 4, lalu kembali ke 5 sekolah pada 2024. Secara keseluruhan, tren peningkatan jumlah SD ini menunjukkan upaya pemerintah daerah Kota Jambi dalam memperluas akses pendidikan dasar guna menjangkau lebih banyak anak usia sekolah. Dalam konteks Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Jambi periode 2025-2045, peningkatan fasilitas pendidikan dasar menjadi pondasi penting dalam pengembangan sumber daya manusia sejak

dini, yang pada gilirannya akan mendukung ketersediaan tenaga kerja berkualitas yang menjadi daya tarik investasi jangka panjang di daerah ini .

Tabel 2.30. Jumlah SMP per kecamatan (unit sekolah) di Kota Jambi Tahun 2020-2024

Wilayah	2020	2021	2024
Kota Baru	5	5	6
Alam Barajo	4	4	5
Jambi Selatan	5	5	5
Paal Merah	5	4	4
Jelutung	4	5	6
Pasar Jambi	3	3	3
Telanaipura	3	3	4
Danau Sipin	4	4	4
Danau Teluk	2	2	3
Pelayangan	2	3	2
Jambi Timur	6	6	6
Kota Jambi	43	44	48

Sumber: Kota Jambi dalam Angka, 2025

Berdasarkan data Tabel 2.30 mengenai jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Jambi per kecamatan pada tahun 2020, 2021, dan 2024, terdapat peningkatan jumlah sekolah SMP di Kota Jambi dari 43 unit pada tahun 2020 menjadi 48 unit pada tahun 2024. Kecamatan Kota Baru mengalami penambahan dari 5 menjadi 6 sekolah, Alam Barajo dari 4 menjadi 5, Jelutung dari 4 menjadi 6, serta Danau Teluk dari 2 menjadi 3 dan Telanaipura dari 3 menjadi 4 sekolah. Beberapa kecamatan seperti Jambi Selatan, Pasar Jambi, Danau Sipin, dan Jambi Timur mempertahankan jumlah sekolah yang relatif stabil selama tiga tahun tersebut. Sedangkan Paal Merah dan Pelayangan menunjukkan sedikit penurunan jumlah sekolah SMP pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah sekolah SMP ini menunjukkan upaya pengembangan akses dan pemerataan pendidikan menengah di Kota Jambi, yang berperan strategis dalam mencetak sumber daya manusia berkualitas, yang dapat memberikan dampak positif dalam mendukung program investasi

dan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang direncanakan dalam RUPM Kota Jambi 2025-2045

Tabel 2.31. Jumlah SMA per kecamatan (unit sekolah) di Kota Jambi Tahun 2020-2024

Wilayah	2020	2021	2024
Kota Baru	4	5	5
Alam Barajo	4	4	4
Jambi Selatan	5	5	4
Paal Merah	4	4	5
Jelutung	4	4	4
Pasar Jambi	1	1	1
Telanaipura	2	2	4
Danau Sipin	4	4	4
Danau Teluk	2	2	2
Pelayangan	2	2	1
Jambi Timur	3	3	3
Kota Jambi	35	35	37

Sumber: Kota Jambi dalam Angka, 2025

Berdasarkan data pada Tabel 2.31 tentang jumlah SMA per kecamatan di Kota Jambi pada tahun 2020, 2021, dan 2024, terlihat adanya peningkatan jumlah sekolah SMA dari 35 unit pada 2020 dan 2021 menjadi 37 unit pada 2024. Kecamatan Kota Baru menambah satu sekolah SMA pada 2021 dan mempertahankannya sampai 2024 dengan total 5 sekolah. Paal Merah juga menambah satu sekolah SMA pada 2024, sedangkan Telanaipura mengalami kenaikan signifikan dari 2 menjadi 4 sekolah SMA. Beberapa kecamatan seperti Jambi Selatan mengalami penurunan sekolah dari 5 menjadi 4, dan Pelayangan menurun dari 2 menjadi 1 sekolah pada 2024. Kecamatan lain seperti Alam Barajo, Jelutung, Pasar Jambi, Danau Sipin, Danau Teluk, dan Jambi Timur jumlah sekolahnya relatif stabil selama periode tersebut. Peningkatan jumlah sekolah SMA ini menunjukkan upaya pemerataan akses pendidikan menengah atas di Kota Jambi, yang menjadi faktor penting dalam pengembangan

sumber daya manusia berkualitas yang dibutuhkan untuk mendukung program investasi dan pertumbuhan ekonomi di RUPM Kota Jambi periode 2025-2045 .

Tabel 2.32. Jumlah SD per kecamatan (unit sekolah) Desa/Kelurahan yang Memiliki Fasilitas Sekolah Menurut Kecamatan dan Tingkat Pendidikan di Kota Jambi, 2020–2024

Wilayah	2020	2021	2024
Kota Baru	5	5	7
Alam Barajo	5	5	6
Jambi Selatan	5	5	6
Paal Merah	5	5	6
Jelutung	7	7	7
Pasar Jambi	2	2	2
Telanaipura	6	6	7
Danau Sipin	5	4	5
Danau Teluk	5	5	5
Pelayangan	5	5	4
Jambi Timur	9	9	9
Kota Jambi	59	58	63

Sumber: Kota Jambi dalam Angka, 2025

Berdasarkan Tabel 2.32 mengenai jumlah desa/kelurahan yang memiliki fasilitas sekolah dasar (SD) di setiap kecamatan Kota Jambi pada periode 2020, 2021, dan 2024, terdapat peningkatan jumlah fasilitas SD dari 59 di tahun 2020 menjadi 63 pada tahun 2024. Kecamatan Kota Baru mengalami peningkatan fasilitas SD dari 5 menjadi 7, diikuti oleh Alam Barajo, Jambi Selatan, Paal Merah, dan Telanaipura yang juga mencatat kenaikan fasilitas sekolah dasar. Kecamatan Jelutung, Pasar Jambi, Danau Teluk, dan Jambi Timur mempertahankan jumlah fasilitas sekolahnya secara stabil selama periode tersebut. Sementara itu, Pelayangan mengalami sedikit penurunan dari 5 menjadi 4 fasilitas sekolah dasar. Peningkatan dan pemerataan fasilitas SD di Kota Jambi menjadi indikator positif dalam memperluas akses pendidikan dasar. Langkah ini penting sebagai fondasi

pengembangan sumber daya manusia yang mendukung program investasi serta pembangunan jangka panjang dalam RUPM Kota Jambi 2025–2045.

Tabel 2.33. Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Fasilitas Sekolah SMP di Kota Jambi, Periode 2020–2024

Wilayah	2020	2021	2024
Kota Baru	5	5	6
Alam Barajo	4	4	5
Jambi Selatan	5	5	5
Paal Merah	5	4	4
Jelutung	5	5	6
Pasar Jambi	3	3	3
Telanaipura	3	3	4
Danau Sipin	4	4	4
Danau Teluk	2	2	3
Pelayangan	2	3	2
Jambi Timur	6	6	6
Kota Jambi	43	44	48

Sumber: Kota Jambi dalam Angka, 2025

Berdasarkan Tabel 2.33 yang memuat data jumlah desa/kelurahan yang memiliki fasilitas Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Jambi untuk periode 2020 hingga 2024, terlihat adanya peningkatan jumlah fasilitas SMP dari total 43 pada 2020 menjadi 48 pada 2024. Beberapa kecamatan seperti Kota Baru, Alam Barajo, Jelutung, Telanaipura, dan Danau Teluk mencatat penambahan fasilitas sekolah SMP dalam periode ini, sementara kecamatan lain seperti Jambi Selatan dan Pasar Jambi mempertahankan jumlah fasilitas yang stabil. Pelayangan justru mengalami penurunan fasilitas SMP dari 3 menjadi 2. Peningkatan fasilitas sekolah SMP di berbagai kecamatan ini menunjukkan upaya pemerintah Kota Jambi dalam memperluas akses pendidikan menengah pertama, yang sangat penting sebagai fondasi pendidikan lanjutan dan pengembangan sumber daya manusia. Peningkatan dan pemerataan fasilitas SMP menjadi strategi penting dalam RUPM Kota Jambi 2025–2045

untuk memperkuat kualitas pendidikan dan menyiapkan tenaga kerja kompeten yang mendukung investasi dan pembangunan berkelanjutan.

Tabel 2.34. Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Fasilitas Sekolah SMA di Kota Jambi, 2020–2024

Wilayah	2020	2021	2024
Kota Baru	4	5	5
Alam Barajo	4	4	4
Jambi Selatan	5	4	4
Paal Merah	4	4	5
Jelutung	4	4	4
Pasar Jambi	1	1	1
Telanaipura	2	2	4
Danau Sipin	4	4	4
Danau Teluk	2	2	2
Pelayangan	2	3	2
Jambi Timur	3	3	3
Kota Jambi	35	35	37

Sumber: Kota Jambi dalam Angka, 2025

Berdasarkan Tabel 2.34 mengenai jumlah desa/kelurahan yang memiliki fasilitas sekolah SMA di Kota Jambi dari tahun 2020 hingga 2024, terdapat peningkatan jumlah fasilitas SMA dari total 35 pada tahun 2020 dan 2021 menjadi 37 pada tahun 2024. Kecamatan Kota Baru dan Paal Merah masing-masing menambah fasilitas sekolah SMA, sementara Telanaipura mengalami peningkatan cukup signifikan dari 2 menjadi 4 fasilitas sekolah. Beberapa kecamatan seperti Alam Barajo, Jelutung, Pasar Jambi, Danau Sipin, Danau Teluk, dan Jambi Timur mempertahankan jumlah fasilitas yang stabil selama periode tersebut. Kecamatan Jambi Selatan mengalami penurunan fasilitas dari 5 menjadi 4, dan Pelayangan juga turun dari 3 menjadi 2 fasilitas sekolah SMA. Secara keseluruhan, peningkatan fasilitas sekolah SMA ini menunjukkan upaya untuk memperluas akses dan pemerataan pendidikan menengah atas di berbagai wilayah Kota Jambi.

Tabel 2.35. Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Fasilitas Sekolah SMK di Kota Jambi, 2020–2024

Wilayah	2020	2021	2024
Kota Baru	3	3	4
Alam Barajo	3	2	2
Jambi Selatan	2	2	2
Paal Merah	3	3	3
Jelutung	1	1	2
Pasar Jambi	1	1	1
Telanaipura	1	1	1
Danau Sipin	3	3	3
Danau Teluk	1	1	1
Pelayangan	0	1	1
Jambi Timur	4	4	4
Kota Jambi	22	21	23

Sumber: Kota Jambi dalam Angka, 2025

Berdasarkan Tabel 2.35 mengenai jumlah desa/kelurahan yang memiliki fasilitas Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Jambi periode 2020–2024, terlihat adanya pola fluktuatif yang mencerminkan dinamika pengembangan pendidikan vokasi di tingkat wilayah. Total fasilitas SMK sempat menurun dari 22 unit pada tahun 2020 menjadi 21 unit pada 2021, namun kembali meningkat menjadi 23 unit pada 2024. Penambahan fasilitas terutama terjadi di Kecamatan Kota Baru dan Jelutung, yang masing-masing bertambah dari 3 menjadi 4 unit dan dari 1 menjadi 2 unit pada 2024, menunjukkan pertumbuhan kebutuhan pendidikan vokasi seiring perkembangan permukiman dan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Sementara itu, Kecamatan Alam Barajo mengalami penurunan dari 3 menjadi 2 fasilitas dan tetap stabil hingga 2024, mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap kapasitas, demand siswa, serta efektivitas pemanfaatan fasilitas yang ada. Kecamatan Pelayangan juga menunjukkan kemajuan dengan penambahan fasilitas dari 0 menjadi 1 pada 2021 dan mempertahankannya hingga 2024, sedangkan Jambi Timur tetap konsisten dengan 4 fasilitas SMK sepanjang periode tersebut.

Perubahan distribusi fasilitas SMK ini menegaskan adanya pergerakan spasial dalam penyediaan layanan pendidikan vokasi di Kota Jambi. Hal ini perlu menjadi pertimbangan strategis dalam perencanaan RUPM Kota Jambi 2025–2045, terutama dalam memastikan keselarasan antara lokasi SMK, kebutuhan kompetensi tenaga kerja, serta potensi investasi sektor-sektor unggulan. Penguatan pendidikan vokasi yang responsif terhadap kebutuhan industri baik dalam bentuk peningkatan jumlah SMK, penambahan kompetensi keahlian, maupun kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri akan menjadi kunci dalam membangun sumber daya manusia yang kompeten, adaptif, dan berdaya saing, sekaligus mendukung transformasi ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Tabel 2.36. Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Fasilitas Perguruan Tinggi di Kota Jambi, 2020–2024

Wilayah	2020	2021	2024
Kota Baru	1	1	1
Alam Barajo	3	3	3
Jambi Selatan	2	2	2
Paal Merah	1	1	2
Jelutung	2	2	2
Pasar Jambi	2	1	1
Telanaipura	4	3	3
Danau Sipin	2	2	2
Danau Teluk	0	0	0
Pelayangan	0	0	0
Jambi Timur	0	1	1
Kota Jambi	17	15	16

Sumber: Kota Jambi dalam Angka, 2025

Berdasarkan data pada Tabel 2.36 mengenai Jumlah desa/kelurahan dengan fasilitas perguruan tinggi di Kota Jambi menunjukkan fluktuasi kecil, dari 17 desa pada 2020 menjadi 15 pada 2021 dan meningkat menjadi 16 pada 2024. Fasilitas paling terkonsentrasi berada di Telanaipura, disusul Alam Barajo dan Jambi Selatan, sementara beberapa kecamatan tidak memilikinya. Pola ini menunjukkan konsentrasi pendidikan tinggi di wilayah tertentu dan

menjadi bahan pertimbangan dalam RUPM 2025–2045 untuk pemerataan akses serta penguatan kapasitas pendidikan tinggi guna mendukung pembangunan dan investasi daerah.

2.4.2. Kesehatan

Sektor kesehatan merupakan aspek krusial dalam pembangunan daerah yang sangat erat kaitannya dengan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Jambi Periode 2025-2045. Penguatan infrastruktur dan layanan kesehatan di Kota Jambi menjadi salah satu prioritas utama agar dapat mendukung kualitas hidup masyarakat yang sehat dan produktif. Secara lebih detail sarana kesehatan yang ada di Kota Jambi dapat dilihat pada Tabel 2.37 .

Tabel 2.37. Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sarana Kesehatan: Rumah Sakit di Kota Jambi, 2020–2024

Wilayah	2020	2021	2024
Kota Baru	2	2	2
Alam Barajo	2	2	2
Jambi Selatan	1	1	1
Paal Merah	2	2	2
Jelutung	2	2	2
Pasar Jambi	1	1	1
Telanaipura	1	1	2
Danau Sipin	2	2	2
Danau Teluk	1	1	1
Pelayangan	0	0	0
Jambi Timur	2	2	2
Kota Jambi (Total)	16	16	17

Sumber: Kota Jambi dalam Angka, 2025

Berdasarkan Tabel 2.37 mengenai Jumlah desa/kelurahan dengan rumah sakit di Kota Jambi meningkat dari 16 pada 2020–2021 menjadi 17 pada 2024, terutama melalui penambahan fasilitas di Kecamatan Telanaipura. Sebagian besar kecamatan tetap stabil,

sementara Pelayangan tidak memiliki fasilitas rumah sakit. Peningkatan ini mencerminkan upaya memperluas akses layanan kesehatan rawat inap. Dalam konteks RUPM 2025–2045, pengembangan rumah sakit, poliklinik, puskesmas, serta peningkatan mutu tenaga kesehatan dan pemanfaatan teknologi menjadi strategi penting untuk pemerataan layanan, menarik investasi sektor kesehatan, dan memperkuat perekonomian lokal secara berkelanjutan.

Tabel 2.38. Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sarana Kesehatan: Poliklinik di Kota Jambi, 2020–2024

Wilayah	2020	2021	2024
Kota Baru	3	2	4
Alam Barajo	1	2	2
Jambi Selatan	1	1	1
Paal Merah	1	2	1
Jelutung	3	3	3
Pasar Jambi	3	3	2
Telanaipura	5	6	3
Danau Sipin	3	2	3
Danau Teluk	0	0	0
Pelayangan	0	0	0
Jambi Timur	5	5	4
Kota Jambi	25	26	25

Sumber: Kota Jambi dalam Angka, 2025

Berdasarkan Tabel 2.38 mengenai jumlah desa/kelurahan yang memiliki sarana kesehatan berupa poliklinik di Kota Jambi dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat bahwa total fasilitas poliklinik relatif tetap, yakni 25 pada 2020, meningkat menjadi 26 pada 2021, kemudian kembali menjadi 25 pada 2024. Kecamatan Telanaipura mencatat penurunan cukup signifikan dari 5 menjadi 3 desa dengan poliklinik pada 2024, sementara Kota Baru justru naik dari 3 menjadi 4 desa. Kecamatan Pasar Jambi mengalami penurunan dari 3 menjadi 2 desa, sedangkan Danau Teluk dan Pelayangan tetap tidak memiliki poliklinik

sepanjang periode tersebut. Beberapa kecamatan lain seperti Jelutung, Alam Barajo, dan Jambi Selatan mempertahankan jumlah fasilitas poliklinik yang relatif tetap. Data ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah fasilitas poliklinik cenderung tetap, distribusi geografisnya masih belum merata, sehingga menjadi perhatian penting dalam penyusunan RUPM Kota Jambi 2025-2045 agar akses layanan kesehatan primer dapat diperluas dan didistribusikan secara lebih merata untuk mendukung kualitas layanan kesehatan dan daya saing investasi di sektor kesehatan .

Tabel 2.39. Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sarana Kesehatan: Puskesmas di Kota Jambi, 2020–2024

Wilayah	2020	2021	2024
Kota Baru	2	2	2
Alam Barajo	2	2	2
Jambi Selatan	2	2	2
Paal Merah	4	4	4
Jelutung	3	2	2
Pasar Jambi	1	1	1
Telanaipura	2	2	2
Danau Sipin	1	1	1
Danau Teluk	1	1	1
Pelayangan	1	1	1
Jambi Timur	2	2	2
Kota Jambi	21	20	20

Sumber: Kota Jambi dalam Angka, 2025

Berdasarkan Tabel 2.39 yang menunjukkan jumlah desa/kelurahan dengan sarana kesehatan berupa puskesmas di Kota Jambi periode 2020 hingga 2024, terlihat bahwa total puskesmas relatif tetap, yaitu 21 pada 2020, menurun menjadi 20 pada 2021 dan tetap 20 pada 2024. Sebagian besar kecamatan seperti Kota Baru, Alam Barajo, Jambi Selatan, Paal Merah, Pasar Jambi, Telanaipura, Danau Sipin, Danau Teluk, Pelayangan, dan Jambi Timur

mempertahankan jumlah puskesmas yang relatif tetap selama periode ini. Hanya Jelutung yang mengalami penurunan dari 3 menjadi 2 desa dengan puskesmas. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah fasilitas puskesmas cenderung tetap, pemerataan dan pengelolaannya harus terus diperbaiki untuk mendukung akses layanan kesehatan primer yang optimal di seluruh wilayah Kota Jambi.

Tabel 2.40. Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sarana Kesehatan: Puskesmas Pembantu di Kota Jambi, 2020–2024

Wilayah	2020	2021	2024
Kota Baru	2	2	2
Alam Barajo	4	4	3
Jambi Selatan	3	3	3
Paal Merah	4	4	4
Jelutung	4	4	4
Pasar Jambi	1	1	1
Telanaipura	4	4	2
Danau Sipin	4	4	4
Danau Teluk	2	2	2
Pelayangan	3	3	3
Jambi Timur	4	4	3
Kota Jambi	35	35	33

Sumber: Kota Jambi dalam Angka, 2025

Berdasarkan Tabel 2.40 mengenai jumlah desa/kelurahan yang memiliki sarana kesehatan berupa puskesmas pembantu di Kota Jambi selama periode 2020 hingga 2024, terlihat bahwa total fasilitas puskesmas pembantu mengalami sedikit penurunan dari 35 desa pada 2020 dan 2021 menjadi 33 desa pada 2024. Beberapa kecamatan seperti Kota Baru, Jambi Selatan, Paal Merah, Jelutung, Pasar Jambi, Danau Sipin, Danau Teluk, dan Pelayangan mempertahankan jumlah fasilitas yang relatif tetap. Namun, Alam Barajo, Telanaipura, dan Jambi Timur mengalami penurunan jumlah desa dengan fasilitas

puskesmas pembantu masing-masing dari 4 menjadi 3, 4 menjadi 2, dan 4 menjadi 3. Penurunan fasilitas kesehatan primer ini perlu menjadi fokus perhatian dalam perencanaan RUPM Kota Jambi 2025-2045 untuk memastikan pemerataan akses layanan kesehatan di tingkat desa/kelurahan, yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendukung daya saing investasi di sektor kesehatan dan sektor terkait lainnya. Penguatan jaringan kesehatan primer melalui puskesmas pembantu ini juga dapat mempercepat pencapaian target pembangunan kesehatan yang berkelanjutan di Kota Jambi.

Tabel 2.41. Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sarana Kesehatan: Apotek di Kota Jambi, 2020–2024

Wilayah	2020	2021	2024
Kota Baru	4	4	5
Alam Barajo	5	5	6
Jambi Selatan	5	4	5
Paal Merah	4	4	6
Jelutung	7	7	7
Pasar Jambi	4	4	4
Telanaipura	5	5	6
Danau Sipin	3	3	4
Danau Teluk	1	2	2
Pelayangan	0	0	2
Jambi Timur	8	5	7
Kota Jambi	46	43	54

Sumber: Kota Jambi dalam Angka, 2025

Berdasarkan Tabel 2.41 yang menunjukkan jumlah desa/kelurahan yang memiliki sarana kesehatan berupa apotek di Kota Jambi periode 2020 hingga 2024, terdapat peningkatan signifikan dari total 46 desa pada tahun 2020 menjadi 54 desa pada tahun 2024. Kecamatan Paal Merah dan Alam Barajo mengalami peningkatan dari 4 menjadi 6 dan 5 menjadi 6 desa dengan apotek, begitu pula Kota Baru dan Telanaipura yang masing-masing naik dari 4 menjadi 5 dan 5 menjadi 6 desa. Kecamatan Pelayangan mencatat kemunculan

sarana apotek untuk pertama kalinya pada 2024 dengan 2 desa, sementara Jelutung mempertahankan jumlah apotek tetap sebanyak 7 desa. Jambi Timur menunjukkan fluktuasi dengan penurunan pada 2021 namun kembali meningkat menjadi 7 desa pada 2024. Kondisi ini menandakan terjadinya pemerataan dan peningkatan akses masyarakat terhadap layanan obat dan kesehatan yang esensial.

Dalam konteks RUPM Kota Jambi 2025-2045, pengembangan jaringan apotek yang lebih merata dan mencukupi sangat penting untuk mendukung pelayanan kesehatan primer, memperkuat sistem kesehatan lokal, dan menjadi salah satu faktor penarik investasi di bidang farmasi dan kesehatan yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah .

Tabel 2.42. Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kota Jambi, 2024

Wilayah	Jumlah Tenaga				
	Medis	Psikologi Klinis	Keperawatan	Kebidanan	Kefarmasian
Kota Baru	11	0	21	35	9
Alam Barajo	14	0	21	27	10
Jambi Selatan	21	0	22	36	9
Paal Merah	16	0	30	56	14
Jelutung	12	0	14	27	8
Pasar Jambi	4	0	9	11	3
Telanaipura	10	0	12	24	9
Danau Sipin	7	0	15	18	5
Danau Teluk	6	0	8	12	3
Pelayangan	5	0	5	10	2
Jambi Timur	16	0	10	24	7
Kota Jambi	122	0	167	280	79

Sumber: Kota Jambi dalam Angka, 2025

Berdasarkan Tabel 2.42, total tenaga kesehatan Kota Jambi tahun 2024 terdiri dari 122 tenaga medis, 167 tenaga keperawatan, 280 tenaga kebidanan, dan 79 tenaga kefarmasian, sementara tenaga psikologi klinis belum tersedia. Kecamatan Paal Merah memiliki jumlah tenaga kesehatan terbanyak, diikuti Jambi Selatan dan Alam Barajo, sedangkan Pasar Jambi

dan Pelayanan paling sedikit. Ketidakhadiran tenaga psikologi klinis menunjukkan perlunya pengembangan layanan kesehatan mental. Untuk RUPM Kota Jambi 2025–2045, penguatan tenaga kesehatan, khususnya psikologi klinis, menjadi prioritas strategis guna meningkatkan kualitas hidup dan mendorong investasi di sektor kesehatan.

Tabel 2.43. Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kota Jambi, 2024

Wilayah	Jumlah Tenaga			
	Kesehatan Masyarakat	Kesehatan Lingkungan	Gizi	Keterapian Fisik
Kota Baru	8	4	4	0
Alam Barajo	7	6	3	0
Jambi Selatan	6	4	3	0
Paal Merah	13	10	6	0
Jelutung	10	6	4	0
Pasar Jambi	2	2	2	0
Telanaipura	5	3	5	0
Danau Sipin	6	2	1	0
Danau Teluk	2	2	1	0
Pelayangan	1	1	1	0
Jambi Timur	8	5	3	0
Kota Jambi	68	45	33	0

Sumber: Kota Jambi dalam Angka, 2025

Berdasarkan Tabel 2.43 yang memaparkan jumlah tenaga kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, gizi, dan keterapian fisik di Kota Jambi tahun 2024, total tenaga kesehatan masyarakat mencapai 68 orang, tenaga kesehatan lingkungan berjumlah 45, tenaga gizi sebanyak 33, dan tenaga keterapian fisik belum tersedia. Kecamatan Paal Merah memiliki kontribusi tenaga kesehatan terbesar di ketiga kategori utama, yakni 13 tenaga kesehatan masyarakat, 10 tenaga kesehatan lingkungan, dan 6 tenaga gizi. Kecamatan Jelutung dan Kota Baru juga menonjol dengan jumlah tenaga kesehatan yang signifikan. Kecamatan Pelayangan dan Danau Teluk memiliki jumlah tenaga kesehatan paling sedikit di sebagian besar kategori. Absennya tenaga keterapian fisik menandakan adanya kebutuhan

untuk pengembangan pelayanan rehabilitasi dan terapi fisik di Kota Jambi. Dalam konteks penataan RUPM Kota Jambi 2025-2045, pengembangan tenaga kesehatan yang lengkap dan terdistribusi merata, termasuk tenaga rehabilitasi fisik, menjadi sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat dan mendukung pertumbuhan investasi sektor kesehatan yang berkelanjutan dan inklusif.

Tabel 2.44. Jumlah Tenaga Keteknisan Medis, Teknik Biomedika, dan Kesehatan Tradisional Menurut Kecamatan di Kota Jambi, 2024

Wilayah	Jumlah Tenaga		
	Keteknisan Medis	Teknik Biomedika	Tradisional
Kota Baru	7	7	0
Alam Barajo	10	3	0
Jambi Selatan	8	6	0
Paal Merah	11	11	0
Jelutung	7	5	0
Pasar Jambi	3	4	0
Telanaipura	7	5	0
Danau Sipin	3	6	0
Danau Teluk	2	2	0
Pelayangan	1	2	0
Jambi Timur	5	4	0
Kota Jambi	64	55	0

Sumber: Kota Jambi dalam Angka, 2025

Berdasarkan Tabel 2.44, total tenaga keteknisan medis di Kota Jambi tahun 2024 sebanyak 64 orang, tenaga teknik biomedika 55 orang, sementara tenaga kesehatan tradisional tidak tercatat. Kecamatan Paal Merah memiliki jumlah terbanyak, diikuti Alam Barajo dan Jambi Selatan, sedangkan Pelayangan dan Danau Teluk paling sedikit. Tidak tercatatnya tenaga kesehatan tradisional menunjukkan perlunya perhatian pada integrasi praktik lokal. Dalam RUPM Kota Jambi 2025–2045, penguatan distribusi tenaga keteknisan

medis dan teknik biomedika menjadi prioritas untuk meningkatkan pelayanan kesehatan modern dan menarik investasi di sektor teknologi kesehatan.

Tabel 2.45. Jumlah Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus Menurut Kecamatan di Kota Jambi, 2023–2024

Wilayah	Rumah Sakit Umum		Rumah Sakit Khusus	
	2023	2024	2023	2024
Kota Baru	2	4	0	0
Alam Barajo	2	2	0	0
Jambi Selatan	1	3	0	2
Paal Merah	2	1	0	0
Jelutung	1	1	1	1
Pasar Jambi	2	2	0	0
Telanaipura	1	3	1	1
Danau Sipin	2	2	0	0
Danau Teluk	0	1	0	0
Pelayangan	0	0	0	0
Jambi Timur	1	1	0	0
Kota Jambi	15	14	2	2

Sumber: Kota Jambi dalam Angka, 2025

Jumlah rumah sakit di Kota Jambi menunjukkan dinamika pada 2023–2024. Rumah sakit umum sedikit menurun dari 15 menjadi 14, sementara rumah sakit khusus tetap berjumlah 2. Beberapa kecamatan mengalami peningkatan fasilitas, seperti Kota Baru, Jambi Selatan, Telanaipura, dan Danau Teluk, sedangkan Paal Merah mengalami penurunan. Jelutung dan Telanaipura mempertahankan 1 rumah sakit khusus, sementara Pelayangan tidak memiliki fasilitas rumah sakit. Perubahan ini menegaskan pentingnya pemerataan dan penguatan layanan kesehatan. Dalam konteks RUPM Kota Jambi 2025–2045,

pengembangan rumah sakit umum dan khusus menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, mendukung daya saing sektor kesehatan, dan mendorong pembangunan berkelanjutan.

Tabel 2.46. Jumlah Puskesmas Rawat Inap dan Non Rawat Inap Menurut Kecamatan di Kota Jambi, 2023–2024

Wilayah	Puskesmas			
	Rawat Inap 2023	Rawat Inap 2024	Non Rawat Inap 2023	Non Rawat Inap 2024
Kota Baru	0	1	2	1
Alam Barajo	0	1	2	2
Jambi Selatan	0	1	3	1
Paal Merah	0	0	4	3
Jelutung	0	0	2	2
Pasar Jambi	0	0	1	1
Telanaipura	0	0	1	2
Danau Sipin	0	0	1	1
Danau Teluk	1	1	0	0
Pelayangan	0	0	1	1
Jambi Timur	0	0	2	2
Kota Jambi	3	4	17	15

Sumber: Kota Jambi dalam Angka, 2025

Berdasarkan Tabel 2.46 menunjukkan jumlah puskesmas rawat inap di Kota Jambi meningkat dari 3 pada 2023 menjadi 4 pada 2024, terutama karena penambahan di Kecamatan Kota Baru, Alam Barajo, dan Jambi Selatan. Sebaliknya, jumlah puskesmas non rawat inap menurun dari 17 menjadi 15. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan layanan kesehatan primer, terutama pengembangan puskesmas rawat inap agar akses layanan lebih merata. Dalam konteks RUPM Kota Jambi 2025–2045, peningkatan fasilitas kesehatan primer menjadi penting untuk memastikan layanan yang lebih baik sekaligus mendukung iklim investasi sektor kesehatan yang berkelanjutan.

Tabel 2.47. Jumlah Tenaga Kesehatan per Puskesmas di Kota Jambi Tahun 2025

Puskesmas	Dokter	Perawat	Bidan	Tenaga Kefarmasian
Paal X	4	9	18	4
Paal V	7	12	17	5
Kenali Besar	10	8	16	5
Rawasari	4	13	12	5
Pakuan Baru	3	16	21	5
Talang Bakung	3	13	17	5
Kebun Kopi	9	15	15	5
Paal Merah I	5	4	9	4
Paal Merah Ii	4	4	14	3
Simpang Kawat	5	16	20	6
Kebun Handil	7	11	21	11
Koni	4	9	11	3
Putri Ayu	5	11	13	7
Simpang Iv Sipin	7	15	16	7
Aur Duri	3	9	9	4
Olak Kemang	5	12	10	4
Tahtul Yaman	5	10	10	5
Tanjung Pinang	12	6	9	3
Payo Selincih	4	6	6	2
Talang Banjar	4	12	12	9
Kota Jambi	122	167	280	79

Sumber: Kota Jambi dalam Angka, 2025

Berdasarkan Tabel 2.47 menunjukkan data tahun 2025 Puskesmas di Kota Jambi memiliki 122 dokter, 167 perawat, 280 bidan, dan 79 tenaga kefarmasian, dengan sebaran yang relatif merata, meskipun masih belum terdapat dokter gigi. Beberapa puskesmas seperti Tanjung Pinang, Kenali Besar, dan Kebun Kopi memiliki jumlah dokter lebih banyak,

sementara tenaga perawat, bidan, dan kefarmasian paling dominan di Simpang Kawat dan Kebun Handil. Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan dan pemerataan tenaga kesehatan, termasuk pemenuhan dokter gigi, untuk meningkatkan kualitas layanan primer. Dalam konteks RUPM Kota Jambi 2025–2045, langkah tersebut penting guna memperkuat akses, mendukung program promotif–preventif, dan mendorong investasi di sektor kesehatan yang modern dan berkelanjutan.

Tabel 2.48. Tenaga Kesehatan per Puskesmas menurut Kecamatan di Kota Jambi, 2024

Puskesmas	Jumlah Tenaga		
	Kesehatan Masyarakat	Kesehatan Lingkungan	Gizi
Paal X	6	3	2
Paal V	2	1	1
Kenali Besar	6	3	2
Rawasari	4	3	1
Pakuan Baru	4	2	1
Talang Bakung	3	2	1
Kebun Kopi	2	2	1
Paal Merah I	3	2	1
Paal Merah Ii	3	1	1
Simpang Kawat	4	2	2
Kebun Handil	4	4	2
Koni	3	2	1
Putri Ayu	6	2	1
Simpang Iv Sipin	5	1	2
Aur Duri	3	1	1
Olak Kemang	2	2	1
Tahtul Yaman	2	1	1
Tanjung Pinang	4	2	1
Payo Selincih	5	2	1
Talang Banjar	4	2	1
Kota Jambi	68	45	33

Sumber: Kota Jambi dalam Angka, 2025

Berdasarkan Tabel 2.48 dimana perkembangan Tahun 2024 menunjukkan bahwa Kota Jambi memiliki 68 tenaga kesehatan masyarakat, 45 tenaga kesehatan lingkungan, dan 33 tenaga gizi yang tersebar di berbagai puskesmas. Penyebaran tenaga kesehatan masyarakat

paling banyak terdapat di Puskesmas Paal X dan Kenali Besar, sementara tenaga kesehatan lingkungan terbanyak berada di Kebun Handil. Tenaga gizi relatif merata dengan 1–2 orang per puskesmas. Meskipun distribusi tenaga kesehatan cukup baik, masih terdapat variasi jumlah di beberapa lokasi yang perlu diperbaiki. Dalam kerangka RUPM Kota Jambi 2025–2045, pemerataan tenaga kesehatan menjadi kunci untuk memperkuat layanan kesehatan primer, meningkatkan kualitas pelayanan, dan mendukung daya saing investasi sektor kesehatan secara berkelanjutan.

Tabel 2.49. Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Rumah Sakit di Kota Jambi, 2024 Tenaga Kesehatan per rumah sakit

Rumah Sakit	Dokter	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Tenaga Kefarmasian
Royal Prima	35	-	59	16	10
RSU Raden Mataher Jambi	154	-	600	116	66
RS TK IV Dr. Bratanata Unang Jambi	90	-	312	15	30
RS Bhayangkara Jambi	81	-	146	33	33
RS Santa Theresia	73	-	123	25	15
RS Jiwa Jambi	81	-	22	3	14
Siloam Hospital Jambi	68	-	113	9	23
RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi	95	-	218	102	40
RS Islam Arafah	66	-	240	58	39
RSIA Annisa Jambi	24	-	40	29	12
RS Kambang	49	-	95	16	17
RSU Baiturrahim Jambi	36	-	135	21	14
RSIA Rimbo Medika	14	-	40	10	7
RSU Erni Medika	19	-	17	5	4
RS Mitra	44	-	120	11	11
RSUD Abdurrahman Sayoeti	33	-	97	52	15
RS Rapha Theresia	31	-	45	9	6
Kota Jambi	993	-	2.354	515	333

Sumber: Kota Jambi dalam Angka, 2025

Berdasarkan Tabel 2.49 dimana pada Tahun 2024, rumah sakit di Kota Jambi menampung 993 dokter, 2.354 perawat, 515 bidan, dan 333 tenaga kefarmasian. RSUD Raden Mataher menjadi rumah sakit dengan jumlah tenaga kesehatan terbesar di semua kategori, menegaskan posisinya sebagai pusat layanan rujukan utama. Rumah sakit besar lainnya seperti RS TK IV Dr. Bratanata Unang, RS Bhayangkara, dan RSUD H. Abdul Manap juga memiliki tenaga kesehatan dalam jumlah signifikan sehingga mendukung keberagaman dan kelengkapan layanan medis di kota ini. Meski distribusi tenaga kesehatan tergolong baik, tidak adanya dokter gigi di seluruh rumah sakit menjadi catatan penting untuk peningkatan kualitas layanan. Dalam kerangka RUPM Kota Jambi 2025–2045, penguatan kapasitas dan pemerataan tenaga kesehatan—terutama dokter dan tenaga spesialis menjadi strategi kunci untuk meningkatkan mutu layanan, memperkuat daya saing sektor kesehatan, serta mendorong investasi berkelanjutan.

Tabel 2.50. Tenaga Kesehatan lainnya per RS Menurut Kecamatan di Kota Jambi, 2024

Rumah Sakit	Tenaga		
	Kesehatan Masyarakat	Kesehatan Lingkungan	Gizi
Royal Prima	2	2	1
RSU Raden Mataher Jambi	14	20	22
RS TK IV Dr. Bratanata Unang Jambi	3	2	4
RS Bhayangkara Jambi	-	-	2
RS Santa Theresia	1	-	3
RS Jiwa Jambi	11	9	1
Siloam Hospital Jambi	1	-	2
RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi	18	9	11
RS Islam Arafah	4	1	6
RSIA Annisa Jambi	-	-	1
RS Kambang	1	2	1
RSU Baiturrahim Jambi	3	2	4
RSIA Rimbo Medika	-	-	1
RSU Erni Medika	-	-	1
RS Mitra	-	-	1
RSUD Abdurrahman Sayoeti	13	3	6
RS Rapha Theresia	1	1	2
Kota Jambi (jumlah)	65	57	65

Sumber: Kota Jambi dalam Angka, 2025

Berdasarkan Tabel 2.50 yang menunjukkan jumlah tenaga kesehatan lainnya di rumah sakit Kota Jambi tahun 2024, terdapat total 65 tenaga kesehatan masyarakat, 57 tenaga kesehatan lingkungan, dan 65 tenaga gizi yang tersebar di berbagai rumah sakit. RSUD Raden Mataher Jambi menonjol dengan jumlah tenaga kesehatan terbanyak di ketiga kategori tersebut, mempertegas perannya sebagai pusat layanan kesehatan utama di Kota Jambi. Rumah sakit lain seperti RSUD H. Abdul Manap dan RS Jiwa Jambi juga memiliki jumlah tenaga kesehatan yang signifikan, mendukung berbagai kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat rumah sakit. Ketiadaan data untuk tenaga ahli teknologi laboratorium medik menunjukkan potensi area pengembangan yang penting, terutama dalam mendukung pelayanan diagnostik dan laboratorium yang semakin dibutuhkan dalam sistem kesehatan modern.

Dalam konteks penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Jambi 2025-2045, data distribusi tenaga kesehatan lainnya ini menjadi acuan strategis untuk perencanaan pengembangan kapasitas sumber daya manusia sektor kesehatan. Penguatan tenaga kesehatan masyarakat, lingkungan, dan gizi akan meningkatkan efektivitas program kesehatan preventif dan promotif yang berdampak positif pada kualitas hidup masyarakat. Selain itu, peningkatan tenaga ahli di bidang teknologi laboratorium medik perlu menjadi prioritas untuk menunjang revolusi digital dan teknologi kesehatan, sekaligus menarik investasi di sektor layanan kesehatan dan industri terkait. Dengan demikian, pengelolaan tenaga kesehatan yang terintegrasi dan merata akan memperkuat fondasi pembangunan kesehatan berkelanjutan yang selaras dengan visi RUPM Kota Jambi 2025-2045, mendukung pertumbuhan investasi dan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.

2.4.3. Indikator HLS, RLS dan UHH

Indikator Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan komponen utama yang membangun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Jambi. Berdasarkan data terbaru, Kota Jambi menunjukkan pencapaian IPM yang tinggi, yakni sekitar 81,77 pada tahun 2024, dan diperkirakan naik menjadi 82,32 pada tahun 2025, menempatkannya sebagai satu-satunya daerah di Provinsi Jambi dengan kategori IPM “sangat tinggi” (≥ 80).

HLS mengukur rata-rata tahun sekolah yang diharapkan dapat diperoleh oleh anak usia tujuh tahun ke atas, sementara RLS mengukur rata-rata lama sekolah yang sudah ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun ke atas. UHH menggambarkan peluang rata-rata umur penduduk saat lahir, mencerminkan dimensi kesehatan dan kesejahteraan dasar. Penelitian dan analisis menunjukkan bahwa ketiga indikator ini secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap IPM, artinya peningkatan HLS, RLS, dan UHH secara simultan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Jambi.

Dalam kaitannya dengan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Jambi 2025-2045, peningkatan indikator HLS dan RLS menandakan keberhasilan dalam memperluas akses dan kualitas pendidikan, yang selanjutnya memperkuat dimensi pengetahuan dari pembangunan manusia. Sementara peningkatan UHH menunjukkan kemajuan di bidang kesehatan dan kualitas hidup yang berdampak pada produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Strategi RUPM yang fokus pada investasi di sektor pendidikan dan kesehatan akan semakin memperkuat faktor-faktor pembentuk IPM tersebut. Dengan dukungan pembangunan infrastruktur pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, serta program-program pemberdayaan manusia berbasis kapasitas daerah, Kota Jambi dapat terus meningkatkan IPM-nya, sekaligus menarik investasi berkualitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.

Tabel 2.51. Indikator HLS, RLS dan UHH Kota Jambi Periode 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,1	15,37	15,38	15,39	15,55
2	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,92	11,2	11,21	11,22	11,51
3	Angka Usia Harapan Hidup	Angka	72,65	72,71	72,99	73,29	75,12
4	Indeks Pembangunan Manusia	Persen	78,37	79,12	79,58	80,15	81,77

Sumber: <https://ruangdata.jambikota.go.id/data-iku>

Berdasarkan Tabel 2.51 yang memaparkan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan Angka Usia Harapan Hidup (UHH) di Kota Jambi selama periode 2020 sampai 2024, terlihat tren peningkatan yang konsisten pada ketiga indikator tersebut. HLS meningkat dari 15,1 tahun pada 2020 menjadi 15,55 tahun pada 2024, RLS naik dari 10,92 tahun menjadi 11,51 tahun, dan UHH meningkat signifikan dari 72,65 tahun menjadi 75,12 tahun selama lima tahun tersebut. Perbaikan indikator ini secara langsung mendukung kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Jambi dari 78,37% pada 2020 ke 81,77% pada 2024, yang menempatkan Kota Jambi dalam kategori pembangunan manusia “sangat tinggi”.

Peningkatan HLS dan RLS menunjukkan kemajuan signifikan dalam kualitas pendidikan, yang berarti generasi muda Kota Jambi memiliki peluang pendidikan lebih panjang dan lebih baik, serta peningkatan pendidikan penduduk dewasa. Di sisi lain, peningkatan UHH mengindikasikan perbaikan kualitas layanan kesehatan dan kondisi hidup masyarakat yang lebih baik, yang secara signifikan mendukung dimensi kesehatan dalam IPM.

Dalam kaitannya dengan penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Jambi periode 2025-2045, data ini menegaskan pentingnya fokus investasi berkelanjutan pada sektor pendidikan dan kesehatan sebagai pilar utama pengembangan sumber daya manusia. RUPM dapat diarahkan untuk memperkuat infrastruktur pendidikan dan kesehatan, meningkatkan akses dan kualitas layanan, serta memastikan pemerataan manfaat pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat Kota Jambi. Strategi ini tidak hanya berpotensi meningkatkan IPM lebih lanjut tetapi juga memperkuat daya saing daerah, menciptakan peluang investasi baru, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh serta berkelanjutan.

2.5. Perekonomian

Perekonomian Kota Jambi menunjukkan kondisi yang relatif stabil dan berkembang dengan dukungan berbagai sektor yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing wilayah. Indikator makroekonomi seperti tingkat inflasi yang terkendali sepanjang 2024 mencerminkan pengelolaan ekonomi daerah yang efektif, di mana fluktuasi harga berbagai komoditas, terutama di sektor makanan, energi, transportasi, dan jasa, dapat dijaga sehingga tidak memberikan tekanan berlebihan terhadap daya beli masyarakat. Pertumbuhan investasi yang diarahkan melalui Rencana Umum Penanaman

Modal (RUPM) Kota Jambi 2025-2045 menitikberatkan pada penguatan sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan publik, yang semuanya berkontribusi meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan produktivitas ekonomi. Selain itu, sektor jasa seperti restoran, perawatan pribadi, dan rekreasi juga menunjukkan dinamika positif, mendukung diversifikasi ekonomi dan pengembangan ekonomi kreatif. Dengan pendekatan pengendalian inflasi dan peningkatan kualitas layanan serta fasilitas, Kota Jambi dapat menghadapi tantangan ekonomi global sekaligus memanfaatkan peluang investasi yang berkelanjutan, menjadikan perekonomian kota lebih tangguh, inklusif, dan berdaya saing tinggi.

2.5.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Jambi mencerminkan peningkatan kapasitas produksi dan pendapatan masyarakat yang ditopang aktivitas perdagangan, jasa, dan investasi daerah. Dinamika ini menjadi indikator utama keberhasilan pembangunan, karena berkaitan erat dengan penciptaan lapangan kerja, penurunan kemiskinan, dan penguatan daya saing kota dalam jangka panjang.

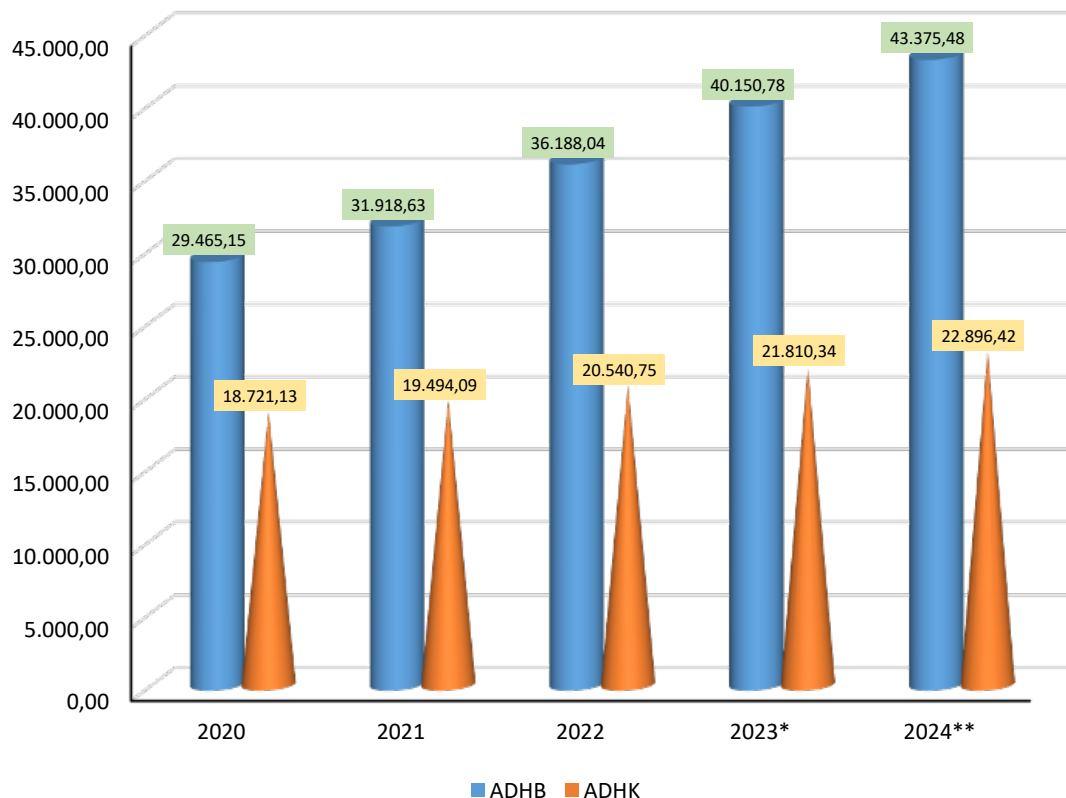
Tabel 2.52. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi (persen), 2020–2024

Kabupaten/Kota	Rata-Rata Laju Pertumbuhan Periode 2020-2024
Kerinci	4,655
Merangin	5,1975
Sarolangun	5,2625
Batang Hari	6,0525
Muaro Jambi	6,115
Tanjung Jabung Timur	1,9
Tanjung Jabung Barat	2,97
Tebo	4,745
Bungo	4,5775
Kota Jambi	5,165
Kota Sungai Penuh	4,525

Sumber: Kota Jambi dalam Angka, 2025

Berdasarkan Tabel 2.52 menunjukkan rata-rata laju pertumbuhan PDRB Kota Jambi periode 2020–2024 sebesar 5,165 persen, menempatkan Kota Jambi pada kelompok menengah–atas di antara kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Kota Jambi berada sedikit di bawah Sarolangun (5,2625 persen) dan Merangin (5,1975 persen), tetapi di atas Kerinci, Tebo, Bungo, dan Kota Sungai Penuh yang tumbuh di kisaran 4,5–4,7 persen.

Dibandingkan wilayah dengan pertumbuhan tertinggi, Kota Jambi masih tertinggal dari Muaro Jambi (6,115 persen) dan Batang Hari (6,0525 persen), yang menunjukkan bahwa akselerasi kegiatan ekonomi tertinggi justru terjadi di kawasan penyangga dan hinterland kota. Sementara itu, Kota Jambi jauh lebih baik dibanding Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur yang pertumbuhannya relatif rendah (sekitar 2–3 persen), sehingga perannya sebagai pusat jasa, perdagangan, dan administrasi tetap menjadi salah satu motor pertumbuhan utama di tingkat provinsi.



Gambar 2. 8. Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK (miliar)

Sumber: Kota Jambi dalam Angka, 2025

Berdasarkan Gambar 2.8 dimana PDRB Kota Jambi menunjukkan tren kenaikan yang tinggi sepanjang 2020–2024, baik secara nominal maupun riil. Nilai ADHB meningkat dari sekitar Rp29,47 triliun pada 2020 menjadi Rp43,38 triliun pada 2024, sedangkan ADHK

naik dari sekitar Rp18,72 triliun menjadi Rp22,90 triliun pada periode yang sama. Kenaikan simultan pada kedua indikator menandakan bahwa ekspansi ekonomi tidak hanya dipengaruhi inflasi, tetapi juga didorong pertumbuhan volume produksi dan aktivitas ekonomi yang makin intensif. Dalam konteks RUPM 2025–2045, tren ini menjadi landasan penting untuk penguatan investasi, pengembangan infrastruktur, dan diversifikasi sektor unggulan agar pertumbuhan ekonomi Kota Jambi tetap berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.

Tabel 2.53. Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Jambi (miliar rupiah), 2020–2024

Kode	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,01	0,86	0,82	0,78	0,76
B	Pertambangan dan Penggalian	2,36	2,32	2,2	1,89	1,75
C	Industri Pengolahan	11,89	11,61	11,41	10,8	10,62
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,2	0,2	0,21	0,22	0,23
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,24	0,24	0,24	0,23	0,23
F	Konstruksi	10,26	10,36	9,74	9,74	9,7
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	27,25	27,99	28	29	28,42
H	Transportasi dan Pergudangan	10,5	10,24	11,36	11,8	11,96
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,38	2,35	2,76	2,87	3,04
J	Informasi dan Komunikasi	6,04	6,03	6,24	6,31	6,22
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,18	8,3	8,64	8,37	8,42
L	Real Estat	3,95	3,94	3,98	3,85	3,75
M,N	Jasa Perusahaan	4,79	4,92	4,97	4,99	5
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	12,56	11,85	11,1	10,65	10,41
P	Jasa Pendidikan	6,49	6,4	6,46	6,25	6,18
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,2	3,54	3,37	3,32	3,57
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,03	1,28	1,4	1,08	1,16

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Jambi, 2025

Berdasarkan Tabel 2.53, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Jambi atas dasar harga konstan 2010 menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten selama periode 2020 hingga 2024, meningkat dari 18.721,13 miliar rupiah pada 2020 menjadi 22.896,42 miliar rupiah pada 2024. Pertumbuhan ini mencerminkan dinamika ekonomi yang beragam di berbagai lapangan usaha, sekaligus menunjukkan diversifikasi struktur ekonomi Kota Jambi. Sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor tetap menjadi kontributor utama PDRB, meningkat dari 5.102,40 miliar rupiah pada 2020 menjadi 6.504,42 miliar rupiah pada 2024, menandakan tingginya aktivitas perdagangan dan perputaran ekonomi perkotaan yang menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi kota. Sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan yang signifikan, dari 2.224,21 miliar rupiah menjadi 2.430,42 miliar rupiah, menunjukkan peningkatan kapasitas produksi, produktivitas, dan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja. Sektor konstruksi dan transportasi serta pergudangan juga mencatat kenaikan yang nyata, mencerminkan perkembangan infrastruktur dan mobilitas logistik yang mendukung aktivitas ekonomi secara keseluruhan.

Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, serta jasa perusahaan menunjukkan pertumbuhan yang stabil, mengindikasikan kematangan ekonomi berbasis layanan serta meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas dan jasa modern. Sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib tetap menjadi penopang ekonomi kota dengan kontribusi yang signifikan, sementara sektor jasa pendidikan dan jasa kesehatan serta kegiatan sosial mengalami pertumbuhan yang relatif tinggi, menandakan meningkatnya perhatian terhadap kualitas layanan publik dan kesejahteraan sosial. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan meskipun tumbuh lebih lambat, tetap strategis dalam menjaga ketahanan pangan dan penyediaan bahan baku lokal. Sektor pengadaan listrik, gas, air, serta pengelolaan sampah dan limbah juga menunjukkan tren positif, menandakan penguatan infrastruktur dasar yang mendukung aktivitas ekonomi.

Secara keseluruhan, tren pertumbuhan PDRB Kota Jambi selama periode 2020–2024 mencerminkan diversifikasi ekonomi yang semakin seimbang antara sektor primer, sekunder, dan tersier. Kondisi ini memberikan dasar empiris yang kuat bagi penyusunan Rencana Umum Pembangunan Kota Jambi (RUPM) 2025–2045, khususnya dalam merumuskan strategi pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, pemerataan pembangunan, penguatan kapasitas sektor prioritas, peningkatan kualitas



layanan publik, dan pengembangan investasi berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, sosial, dan teknologi inovatif.

Tabel 2.54. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Jambi (persen), 2020–2024.

Kode	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,66	-12,12	1,23	1,45	2,2
B	Pertambangan dan Penggalian	3,75	2,54	-0,15	-9,07	-2,51
C	Industri Pengolahan	-1,14	1,76	3,55	0,5	3,19
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,1	6,48	11,76	11,77	6,32
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	-3,1	4,95	4,25	2,19	2,76
F	Konstruksi	-1,12	5,04	-0,93	6,23	4,49
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-5,73	6,89	5,45	9,97	2,84
H	Transportasi dan Pergudangan	-23,12	1,51	16,91	10,28	6,35
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-6,59	3,15	23,34	10,5	11,14
J	Informasi dan Komunikasi	0,88	3,99	9,03	7,26	3,47
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	9,84	4,7	-0,16	0,19	5,64
L	Real Estat	-0,32	3,19	4,38	3,03	3,28
M,N	Jasa Perusahaan	-5,58	1,48	10,12	14,14	12,35
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-6,8	1,32	-0,98	2,3	1
P	Jasa Pendidikan	3,3	0,16	2,93	2,2	7,39
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,91	18,16	-2,4	4,13	12,85
R,S,T,U	Jasa Lainnya	-3,48	0,85	8,75	-17,63	11,79

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Jambi, 2025

Berdasarkan Tabel 2.54 dimana laju pertumbuhan PDRB Kota Jambi mengalami kontraksi tajam sebesar -4,24 persen pada 2020 akibat dampak pandemi yang menekan mobilitas, pariwisata, konsumsi rumah tangga, dan aktivitas perdagangan-jasa, serta diperburuk oleh lemahnya kinerja sektor primer, khususnya pertambangan dan penggalian yang tumbuh negatif karena penurunan permintaan global, fluktuasi harga komoditas, dan keterbatasan investasi baru. Namun, ekonomi kota kemudian pulih dengan pertumbuhan stabil sekitar 4–6 persen sepanjang 2021–2024 dan mencapai 4,98 persen pada 2024, didorong oleh pemulihan konsumsi rumah tangga dan investasi pasca-pelonggaran pembatasan, serta menguatnya sektor tersier seperti perdagangan, transportasi, akomodasi, jasa perusahaan, kesehatan, dan pendidikan seiring peningkatan mobilitas, digitalisasi layanan, dan ekspansi investasi di kawasan perkotaan. Pemulihan ini menegaskan peran Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa regional, sekaligus menunjukkan urgensi diversifikasi menuju ekonomi berbasis jasa, teknologi, dan sumber daya manusia yang menjadi fokus utama dalam perencanaan RUPM 2025–2045.

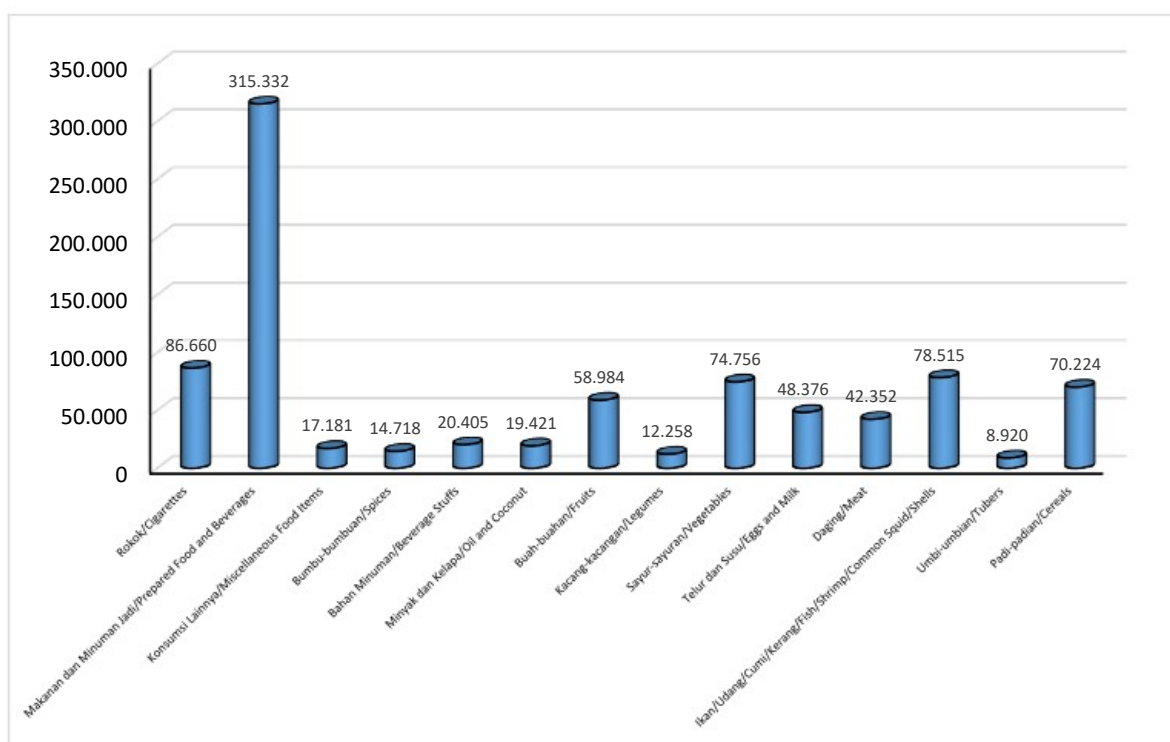
Tabel 2.55. Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Kota Jambi Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Persen), 2020–2024.

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	64,18	64,33	63,64	62,55	62,33
Pengeluaran Konsumsi LNPR	1,62	1,59	1,62	1,69	1,84
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	21,65	20,93	20,17	19,25	19,09
Pembentukan Modal Tetap Bruto	25,53	25,81	24,45	24,69	24,16
Perubahan Inventori	0,33	1,2	0,91	0,86	0,7
Net Ekspor Barang dan Jasa	-13,36	-10,62	-10,8	-9,01	-8,08
Produk Domestik Regional Bruto	18.721,13	19.494,09	20.540,75	21.810,34	22.896,42

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Jambi, 2025

Berdasarkan Tabel 2.55 menunjukkan struktur PDRB Kota Jambi sangat didominasi oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang mencapai sekitar 62–64 persen sepanjang 2020–2024. Kontribusi investasi melalui Pembentukan Modal Tetap Bruto juga cukup besar, stabil di kisaran 24–26 persen, sementara pengeluaran konsumsi pemerintah berada di sekitar 19–22 persen dan cenderung menurun sehingga peran belanja pemerintah relatif lebih kecil dibanding konsumsi rumah tangga.

Kontribusi Pengeluaran Konsumsi LNPRT tetap kecil namun menunjukkan sedikit peningkatan. Sementara itu, perubahan inventori memberikan porsi kurang dari 1 persen per tahun, menandakan bahwa peran stok persediaan terhadap PDRB relatif terbatas. Nilai Net Ekspor Barang dan Jasa tercatat negatif dan besarnya terus menurun dari sekitar –13 persen menjadi –8 persen, yang menunjukkan bahwa Kota Jambi masih merupakan net importer barang dan jasa. Namun demikian, tekanan defisit perdagangan terhadap PDRB berangsur berkurang selama periode 2020–2024.

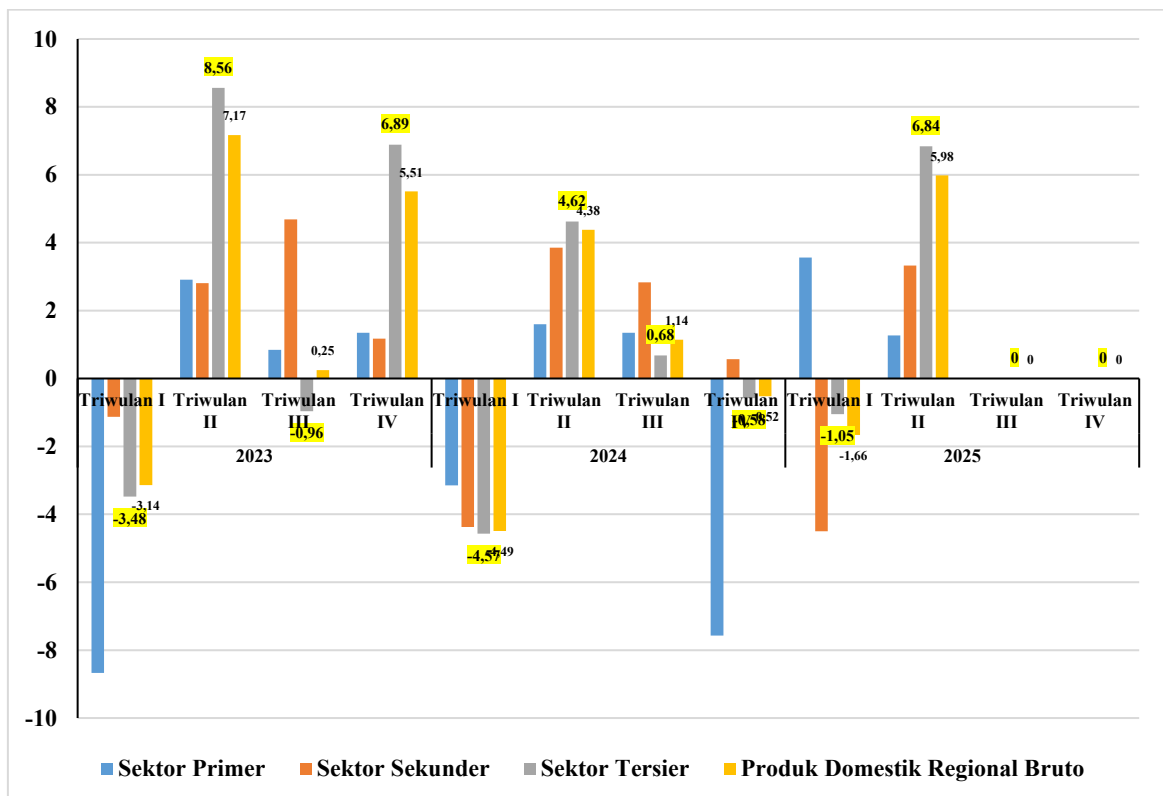


Gambar 2. 9. Pengeluaran per kapita per bulan (rupiah) di Kota Jambi

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Jambi, 2025

Pola pertumbuhan triwulanan (q-to-q) PDRB Kota Jambi menunjukkan siklus musiman yang konsisten: kontraksi pada triwulan I, pemulihan kuat pada triwulan II, moderasi pada triwulan III, dan lonjakan pada triwulan IV, tercermin pada 2023 dan 2024

serta kembali terlihat pada 2025 dengan penurunan PDRB total di triwulan I (-1,66) yang pulih tajam di triwulan II (5,98). Sektor primer paling volatil dengan kontraksi awal tahun yang dalam akibat pola tanam/panen dan cuaca (misalnya -7,57 pada triwulan I 2025) lalu berbalik positif di triwulan II (3,56), sedangkan sektor sekunder cenderung stabil namun tetap terpengaruh siklus proyek dan libur panjang—turun di triwulan I 2024 (-4,37) dan 2025 (-4,5) lalu rebound pada triwulan II (3,85 dan 3,33) dan menguat di triwulan III. Sektor tersier menjadi pendorong utama pemulihan melalui lonjakan triwulan II dan IV (contoh 6,84 pada triwulan II 2025), tetapi rentan melemah pada triwulan I dan III sejalan dinamika konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah. Secara operasional, penjadwalan belanja modal dan barang/jasa yang ditarik lebih awal untuk meredam kontraksi triwulan I, penguatan mitigasi risiko sektor primer (asuransi tani, irigasi mikro, pascapanen), sinkronisasi penyerapan proyek konstruksi dan manufaktur untuk menjaga momentum triwulan III, serta aktivasi event ekonomi dan program penopang konsumsi pada triwulan I dapat memperhalus siklus; di sisi monitoring, dashboard indikator frekuensi tinggi (mobilitas, transaksi ritel, konsumsi listrik industri) membantu mengantisipasi titik balik dan mengkalibrasi intervensi fiskal secara tepat waktu.



Gambar 2. 10. Sektor PDRB Kota Jambi 2023-2025

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Jambi, 2025

Adanya penyebab penurunan dan kenaikan laju pertumbuhan PDRB triwulanan (q-to-q) Kota Jambi dari sisi eksternal dan internal, selaras dengan pola 2023 hingga Triwulan II 2025. Dari sisi eksternal, sektor primer paling sensitif terhadap anomali cuaca seperti El Niño/La Niña yang mengganggu tanam-panen, serangan hama, serta fluktuasi harga komoditas (CPO, karet, ikan) sehingga kinerja awal tahun kerap tertekan; sebaliknya, musim panen utama, normalisasi curah hujan/irigasi, dan perbaikan harga mendorong pemulihan di pertengahan tahun.

Pada sektor sekunder, gangguan rantai pasok dan lonjakan biaya energi/logistik pascalibur, beserta pelemahan permintaan luar daerah, menekan output di awal tahun; sedangkan pemulihan logistik, percepatan proyek pemerintah–swasta menjelang akhir tahun, dan kenaikan pesanan manufaktur mengikuti siklus nasional mendorong rebound pada triwulan II–III. Untuk sektor tersier, musim belanja rendah pasca-liburan, kehati-hatian konsumen akibat tekanan biaya hidup, dan perlambatan belanja pemerintah saat penyesuaian anggaran biasanya memicu kontraksi triwulan I; kebalikannya, musim puncak wisata/keagamaan (Idulfitri, Nataru), event ekonomi (MICE, pameran), akselerasi penyaluran belanja publik, dan promosi ritel mengangkat kinerja pada triwulan II dan IV.

Kinerja ekonomi awal tahun melemah akibat keterlambatan belanja pemerintah, mundurnya proyek konstruksi, carry over pembayaran, serta berkurangnya jam kerja dan persediaan ritel. Kondisi ini diperburuk oleh bottleneck logistik serta downtime utilitas dan peralatan produksi. Pemulihan terjadi pada paruh berikutnya melalui percepatan lelang dan realisasi belanja, sinkronisasi proyek, peningkatan keandalan infrastruktur, restocking ritel, penambahan shift produksi, serta optimalisasi promosi dan distribusi, yang bersama-sama mendorong peningkatan output perdagangan, industri, dan konstruksi.

Siklus musiman perekonomian Kota Jambi ditandai kontraksi pada triwulan I akibat rendahnya konsumsi, transisi anggaran, dan gangguan pasokan primer, lalu pulih pada triwulan II dan mencapai puncak pada triwulan IV. Untuk merespons pola ini, kebijakan yang efektif meliputi percepatan pengadaan dan belanja prioritas di awal tahun, penguatan mitigasi risiko sektor primer, penjadwalan puncak aktivitas konstruksi dan manufaktur pada triwulan II–III, aktivasi kalender event ekonomi serta dukungan konsumsi rumah tangga pada triwulan I, serta pembangunan dashboard indikator frekuensi tinggi guna memantau dinamika ekonomi secara real time.



Tabel 2.56. Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan (rupiah), 2023 dan 2024

Kelompok Komoditas	2023	2024
Padi-padian/Cereals	69.594	70.224
Umbi-umbian/Tubers	10.354	8.920
Ikan/udang/cumi/kerang/Fish/shrimp/common squid/shells	80.157	78.515
Daging/Meat	41.159	42.352
Telur dan susu/Eggs and milk	48.200	48.376
Sayur-sayuran/Vegetables	66.486	74.756
Kacang-kacangan/Legumes	12.471	12.258
Buah-buahan/Fruits	54.714	58.984
Minyak dan kelapa/Oil and coconut	21.277	19.421
Bahan minuman/Beverage stuffs	19.161	20.405
Bumbu-bumbuan/Spices	14.020	14.718
Konsumsi lainnya/Miscellaneous food items	19.687	17.181
Makanan dan minuman jadi/Prepared food and beverages	292.709	315.332
Rokok/Cigarettes	84.036	86.660
Jumlah makanan/Total food	817.696	868.627
Perumahan dan fasilitas rumah tangga/Housing and household facilities	568.178	585.395
Aneka barang dan jasa/Goods and services	216.913	241.832
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala/Clothing, footwear, and headgear	49.910	58.735
Barang tahan lama/Durable goods	67.077	169.004
Pajak, pungutan, dan asuransi/Taxes and insurance	5.401	5.197
Keperluan pesta dan upacara/Parties and ceremonies	120.214	95.165
Jumlah bukan makanan/Total non-food	1.078.147	1.253.325
Jumlah	1.895.843	2.121.952

Sumber: BPS, Susenas Maret 2023 dan Maret 2024.

Berdasarkan Tabel 2.70 menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran per kapita sebulan masyarakat Kota Jambi menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 11,9% dari tahun 2023 ke 2024, didorong oleh pergeseran struktural pengeluaran yang didominasi oleh kelompok Bukan Makanan (tumbuh 16,2%), yang mana lonjakan ini dipicu oleh peningkatan drastis pada konsumsi Barang Tahan Lama (naik lebih dari 150%) dan kenaikan signifikan pada Makanan dan Minuman Jadi, secara tegas mencerminkan semakin matangnya masyarakat urban dengan daya beli kuat untuk kebutuhan sekunder dan tersier. Implikasi strategis untuk RUPM 2025–2045 adalah memfokuskan investasi pada penguatan sektor hilir dan penunjang, meliputi perdagangan eceran modern, jasa purnajual, dan logistik untuk barang tahan lama, serta mendorong investasi pada industri pengolahan makanan dan jasa akomodasi/makan minum untuk mengkapitalisasi tren konsumsi yang mengutamakan kepraktisan, sambil tetap memperhatikan investasi pada rantai pasok pangan segar (terutama sayur-sayuran) untuk menjaga ketahanan dan stabilitas harga komoditas pokok.

Tabel 2.57. Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompok pengeluaran, Tahun 2024 (rupiah)

Kelompok Pengeluaran	2024
40 persen terbawah	958.599
40 persen menengah	1.806.852
20 persen teratas	5.089.383
Kota Jambi (rata-rata)	2.122.022

Sumber: BPS, Susenas Maret 2023 dan Maret 2024.

Berdasarkan Tabel 2.70 menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran per kapita sebulan berdasarkan kelompok pengeluaran di Kota Jambi menunjukkan adanya kesenjangan ekonomi yang signifikan, ditandai dengan pengeluaran rata-rata 20% penduduk teratas yang mencapai Rp5.089.383, atau sekitar 5,3 kali lebih besar dibandingkan pengeluaran 40% penduduk terbawah (Rp958.599), jauh melampaui rata-rata kota (Rp2.122.022).

Disparitas ekstrem ini mengindikasikan bahwa sementara kelompok menengah-atas menjadi pasar utama bagi sektor jasa, ritel, dan barang tahan lama (seperti yang terlihat pada

analisis sebelumnya), kelompok 40% terbawah berpotensi mengalami tekanan kebutuhan dasar. Oleh karena itu, RUPM 2025–2045 harus menerapkan strategi investasi yang bersifat inklusif, berfokus pada peningkatan modal manusia (pelatihan vokasi, kesehatan) dan mendorong investasi yang padat karya pada sektor unggulan yang dapat menyerap tenaga kerja berketerampilan rendah hingga menengah. Tujuannya adalah untuk memperkuat daya beli kelompok 40% terbawah, mengurangi ketimpangan, dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata.

2.5.1.1. Potensi dan Peluang Kota Jambi

Kota Jambi memiliki beragam potensi dan peluang pengembangan yang tercermin dari enam bidang utama, yaitu perdagangan dan jasa, kesehatan, real estate, pendidikan, pariwisata dan kebudayaan, serta ekonomi kreatif. Bidang perdagangan dan jasa berkembang pesat seiring meningkatnya aktivitas ekonomi dan posisi strategis Kota Jambi sebagai pusat distribusi barang dan layanan bagi daerah sekitarnya. Bidang kesehatan menunjukkan peluang melalui peningkatan kebutuhan pelayanan medis berkualitas, pengembangan fasilitas rumah sakit, klinik, dan layanan kesehatan berbasis teknologi yang dapat menarik pasien dari luar daerah.

Pada bidang real estate, pertumbuhan penduduk dan aktivitas bisnis mendorong tingginya permintaan perumahan, kawasan komersial, dan hunian vertikal sehingga menarik investasi properti baru. Bidang pendidikan memiliki prospek besar karena Kota Jambi menjadi pusat pendidikan regional dengan peluang pengembangan sekolah, perguruan tinggi, serta pelatihan vokasi untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Potensi pariwisata dan kebudayaan dapat dioptimalkan melalui pengembangan destinasi alam, sejarah, dan budaya lokal yang didukung promosi intensif serta infrastruktur seperti akomodasi dan transportasi. Ekonomi kreatif melengkapi potensi tersebut lewat tumbuhnya usaha kuliner, fesyen, seni pertunjukan, desain, dan produk digital yang memanfaatkan kekayaan budaya dan kreativitas generasi muda. Sinergi enam bidang ini menjadi motor penting bagi pertumbuhan ekonomi Kota Jambi, peningkatan pendapatan daerah, perluasan lapangan kerja, dan penguatan identitas kota sebagai pusat kegiatan ekonomi dan budaya yang dinamis.

1. Bidang Perdagangan dan Jasa

Bidang perdagangan dan jasa merupakan sektor basis dengan kontribusi sekitar sepertiga PDRB Kota Jambi, bertumpu pada fungsi kota sebagai pusat pengumpulan dan

distribusi barang tingkat provinsi. Pemerintah mengelola 19 pasar dengan 2.611 pedagang, didominasi kios dan lapak yang mencerminkan kekuatan UMKM; Talang Banjar menjadi pasar terbesar dan Pasar Induk berfungsi sebagai simpul distribusi utama.

Investasi subsektor perdagangan dan reparasi tercatat sekitar 207 proyek (PMDN dan PMA) dengan nilai lebih dari Rp18 miliar dan secara analisis SLQ memiliki nilai $\pm 2,83$, menandakan keunggulan komparatif yang kuat. Ekosistem diperkuat 24 gerai ritel modern dan ± 80 gudang yang terkonsentrasi di koridor Lingkar Selatan–Timur, menjadikan Kota Jambi sebagai buffer stock dan hub logistik bagi wilayah sekitar, meski masih terdapat kesenjangan spasial antara kapasitas sarana dan permintaan di permukiman baru.

Permintaan perdagangan diproyeksikan tumbuh sekitar 5 persen per tahun, dari 9.377 unit usaha pada 2024 menjadi hampir 12.000 unit pada 2029, sehingga diperlukan ekspansi pasar lingkungan, ritel permukiman, dan simpul logistik baru serta penataan zonasi perdagangan di tiap kecamatan (Angso Duo–Pasar, Danau Sipin, Jelutung, Jambi Selatan, Jambi Timur, Kota Baru, Alam Barajo, Danau Teluk, dan Pelayangan) sesuai karakter fungsinya

2. Bidang Kesehatan

Bidang kesehatan telah berkembang menjadi salah satu pilar utama pembangunan sosial ekonomi dengan jaringan fasilitas cukup lengkap: sekitar 17 rumah sakit, 20 puskesmas, 33 pusku, 25 poliklinik, dan 54 apotek, yang terkonsentrasi di koridor Kota Baru–Telanaipura–Jambi Timur. Puskesmas dan jaringannya menjadi tulang punggung layanan primer, sementara rumah sakit pemerintah, TNI/Polri, dan swasta melayani rujukan sekunder–tersier bagi Kota Jambi dan daerah sekitar.

Indikator derajat kesehatan menunjukkan perbaikan signifikan: Umur Harapan Hidup naik dari $\pm 72,65$ tahun (2020) menjadi $\pm 75,12$ tahun (2024), IPM meningkat dari $\pm 78,37$ menjadi $\pm 81,77$, dan stunting balita turun ke sekitar 10,3 persen dengan target < 7 persen dalam RPJMD 2025–2029. SDM kesehatan secara agregat memadai (sekitar 122 dokter, 167 perawat, 280 bidan, dan 79 tenaga kefarmasian di puskesmas), tetapi distribusinya belum merata sehingga penguatan di kawasan tepi sungai dan permukiman baru menjadi agenda penting.

Poliklinik di Kota Jambi berperan penting dalam menyediakan layanan kesehatan dasar yang melengkapi puskesmas dan klinik pratama. Fasilitas ini memperluas akses masyarakat terhadap layanan kuratif, preventif, dan konsultatif, terutama di wilayah padat

penduduk dan pusat ekonomi. Dengan membantu mengurangi tekanan pada rumah sakit rujukan dan mempercepat penanganan kasus umum, poliklinik menjadi elemen penting dalam pemerataan layanan kesehatan. Ke depan, peningkatan kualitas layanan, digitalisasi sistem medis, serta penguatan jejaring dengan fasilitas kesehatan lain menjadi langkah strategis untuk mendukung arah pembangunan sektor kesehatan dalam RUPM Kota Jambi 2025–2045.

3. Bidang *Real Estate* / Permukiman

Bidang permukiman menjadi sektor strategis yang menopang pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup, didorong oleh pertumbuhan penduduk $\pm 1,2$ – $1,4\%$ per tahun dan perluasan kota sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan jasa. Pembangunan perumahan terkonsentrasi di pinggiran (Alam Barajo, Paal Merah, Kota Baru) dengan 156 lokasi perumahan 2020–2025, total lahan $\pm 2,38$ juta m^2 , PSU yang cukup besar (jalan, RTH, fasos), dan dominasi rumah subsidi (9.723 unit) yang menunjukkan fokus pada MBR.

Secara kumulatif terdapat ± 26.419 unit perumahan formal hingga 2022 yang tersebar di 11 kecamatan, di samping program bantuan rumah swadaya (BSPS, BRS) untuk meningkatkan rumah tidak layak huni. Tantangan utama adalah keterbatasan lahan, kesenjangan permintaan–pasokan, dan kualitas infrastruktur dasar, sehingga kebijakan RPJMD/RTRW diarahkan pada perumahan rakyat, penataan permukiman kumuh, dan pengendalian alih fungsi lahan.

4. Bidang Pendidikan

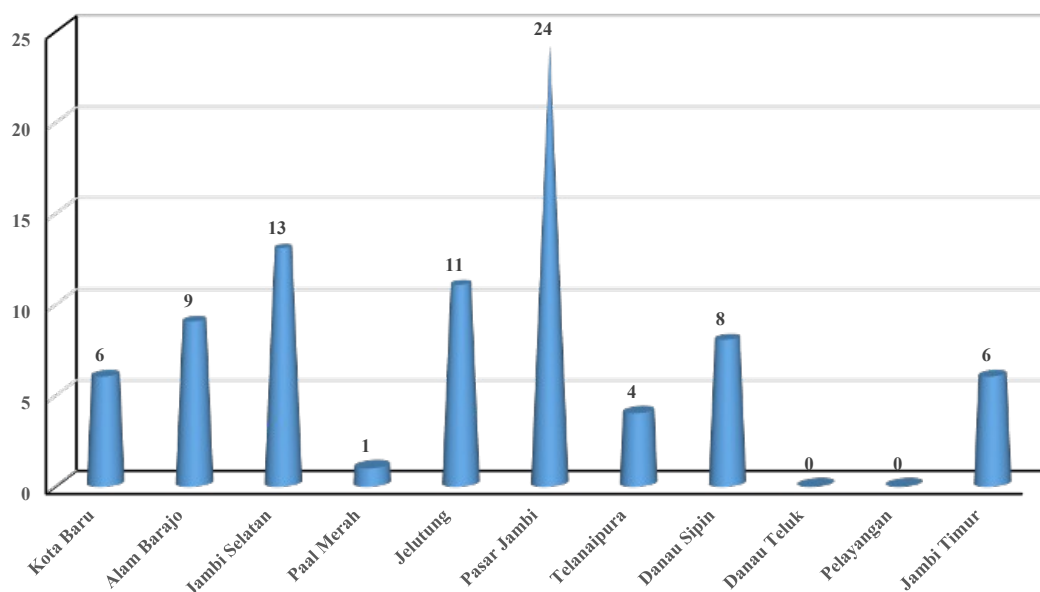
Pendidikan berperan sebagai pilar pembangunan ekonomi–sosial dan pembentuk human capital, sekaligus sektor jasa modern yang menguatkan posisi Kota Jambi sebagai kota berbasis pengetahuan. Analisis SLQ ($\pm 1,44$) menempatkan pendidikan sebagai sektor dengan kontribusi di atas rata-rata provinsi, DLQ = 1 menunjukkan pertumbuhan stabil, sementara *Shift–Share* mengklasifikasikannya sebagai “strategis tetapi berdaya saing lemah” sehingga perlu penguatan kompetitif, inovasi, dan kemitraan dengan industri.

Sistem pendidikan mencakup >700 satuan pendidikan (PAUD sampai perguruan tinggi) dengan sekitar 40% sekolah dikelola swasta dan konsentrasi tinggi di Telanaipura, Kota Baru, dan Paal Merah. Indeks mutu pendidikan Kota Jambi berada di posisi menengah atas di Sumatera, ditopang oleh ± 7.000 guru dengan 85% sudah tersertifikasi, namun masih membutuhkan tambahan guru terutama di bidang TIK, vokasi, dan kewirausahaan dalam lima tahun ke depan.

5. Bidang Pariwisata dan Kebudayaan

Pariwisata dan kebudayaan Kota Jambi bertumpu pada kekuatan sejarah, budaya, dan lanskap sungai, dengan aset seperti museum, situs sejarah, masjid berarsitektur khas, dan kampung tradisional yang mendukung wisata sejarah, religi, dan budaya. Kunjungan wisatawan nusantara ke Provinsi Jambi meningkat tajam 2020–2024 (dari ±957 ribu menjadi ±5,06 juta), dan Kota Jambi menjadi tujuan utama sekaligus hub perjalanan sebelum wisatawan melanjutkan ke destinasi lain seperti Kerinci dan Candi Muaro Jambi.

Terdapat tiga desa wisata, salah satunya (Kampung Baselang Bakung Jaya) sudah masuk 75 besar ADWI nasional, menunjukkan potensi kuat wisata berbasis komunitas. Investasi pariwisata sangat besar: ±7.177 proyek dengan nilai sekitar Rp1,17 triliun didominasi UMKM kuliner dan akomodasi; kota memiliki 1.215 rumah makan/restoran dan 82 hotel (1 bintang 5, 3 bintang 4, 27 bintang 3, 51 non-bintang), dengan okupansi hotel berbintang sekitar 51,8% dan lama tinggal rata-rata 1,7 hari.



Gambar 2. 11. Jumlah Unit Hotel Kota Jambi 2024

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Jambi, 2025

Berdasarkan Gambar 2.11 menunjukkan bahwa Perekonomian Kota Jambi pada tahun 2024–2025 menunjukkan karakteristik yang kontradiktif: di satu sisi, pertumbuhan didorong oleh Investasi Sektor Tersier (Jasa, Perdagangan, Konstruksi) dengan peningkatan tajam pada daya beli kelompok menengah-atas (lonjakan pengeluaran Barang Tahan Lama dan

Makanan Jadi), sementara di sisi lain, terdapat tantangan signifikan terkait kesenjangan sosial dan infrastruktur utilitas dasar. Meskipun Kota Jambi berhasil menekan persentase penduduk miskin ke level terendah 7,73%, kenaikan Garis Kemiskinan yang ekstrem menuntut RUPM untuk memfokuskan investasi pada stabilitas harga kebutuhan pokok melalui pengembangan rantai pasok dan pertanian urban yang efisien, untuk melindungi sisa 47,25 ribu jiwa penduduk miskin. Sementara itu, infrastruktur utilitas menunjukkan kelemahan struktural, di mana distribusi air PDAM terbebani oleh tingkat NRW (*Non-Revenue Water*) mencapai sekitar 37,6%, dan permintaan listrik menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas jaringan untuk mendukung zona pengembangan baru (Kota Baru dan Alam Barajo) serta sektor industri yang intensif energi. Oleh karena itu, investasi strategis harus bersifat hilirisistik dan inklusif, diarahkan pada modernisasi infrastruktur logistik/TIK, revitalisasi jaringan utilitas dasar untuk menekan kerugian dan mendukung kawasan pertumbuhan, serta investasi padat karya di sektor jasa dan pengolahan untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat dinikmati secara merata dan berkelanjutan sesuai visi RPJPD 2025-2045.

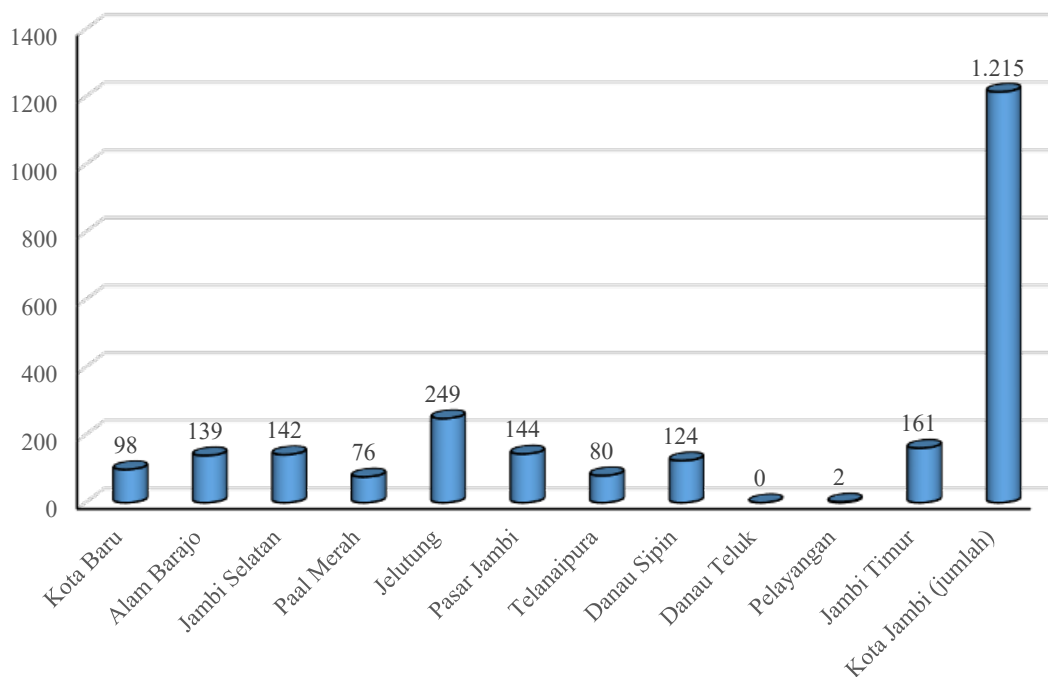
Tabel 2.58. Jumlah wisatawan di Kota Jambi Tahun 2022–2024

Tahun	Wisatawan Nusantara	Wisatawan Mancanegara	Jumlah
2022	661.512	3.542	665.054
2023	883.542	6.163	889.705
2024	945.527	11.196	956.723

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Jambi, 2025

Berdasarkan Tabel 2.58 menunjukkan bahwa data jumlah wisatawan Kota Jambi tahun 2022–2024 menunjukkan momentum pemulihan dan pertumbuhan yang kuat pasca-pandemi, dengan jumlah total wisatawan melonjak dari 665.054 orang pada tahun 2022 menjadi 956.723 orang pada tahun 2024, menandakan Kota Jambi semakin memantapkan posisinya sebagai pusat transit dan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) di Sumatera Bagian Tengah. Pertumbuhan ini didominasi oleh Wisatawan Nusantara yang meningkat konsisten dan mencapai 945.527 orang, sementara peningkatan wisatawan mancanegara yang tumbuh hampir tiga kali lipat dari 3.542 menjadi 11.196 menunjukkan

potensi yang belum tergarap dan daya tarik yang mulai meluas. Momentum pertumbuhan ini memperkuat peluang investasi yang telah diidentifikasi pada sektor Akomodasi, Makan Minum, dan *Hospitality* (seperti hotel menengah-atas, restoran tematik, dan fasilitas MICE modern), yang harus menjadi fokus dalam RUPM 2025–2045 untuk mengkapitalisasi pergerakan wisatawan, seraya mendorong investasi pada destinasi wisata berbasis budaya/sungai yang unik untuk meningkatkan lama tinggal wisatawan dan mengurangi sifat *transit* Kota Jambi.

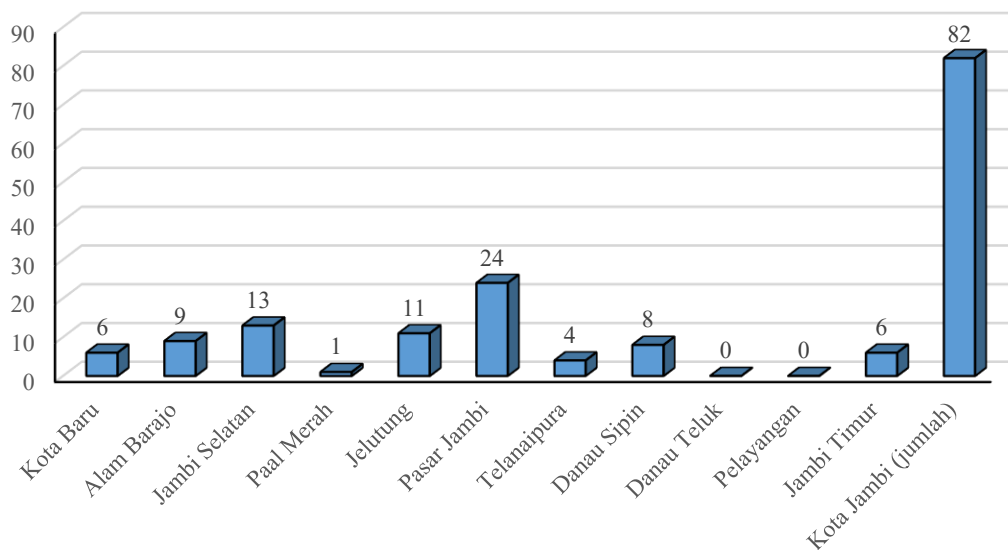


Gambar 2. 12. Jumlah restoran menurut Kecamatan, 2024

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Jambi , 2025

Berdasarkan Gambar 2.12 menunjukkan bahwa data sebaran 1.215 restoran non-nasional di Kota Jambi per tahun 2024 mengonfirmasi bahwa sektor Perdagangan dan Jasa, khususnya kuliner dan hospitalitas, adalah kekuatan utama ekonomi lokal dan harus menjadi prioritas investasi inti dalam RUPM 2025-2045, dengan menetapkan kecamatan Jelutung (249 unit), Jambi Timur (161 unit), dan Jambi Selatan (142 unit) sebagai *Growth Pole* Investasi Kategori I. Pertumbuhan yang terbukti ini menjadi aset kuat dalam strategi promosi untuk menarik investasi rantai pasok dan *franchise* besar, namun RUPM wajib mengintegrasikan rencana pengembangan infrastruktur jangka panjang, terutama pengelolaan limbah terpusat dan penataan manajemen parkir, untuk memastikan

keberlanjutan lingkungan dan peningkatan kualitas layanan publik di kawasan-kawasan padat tersebut.



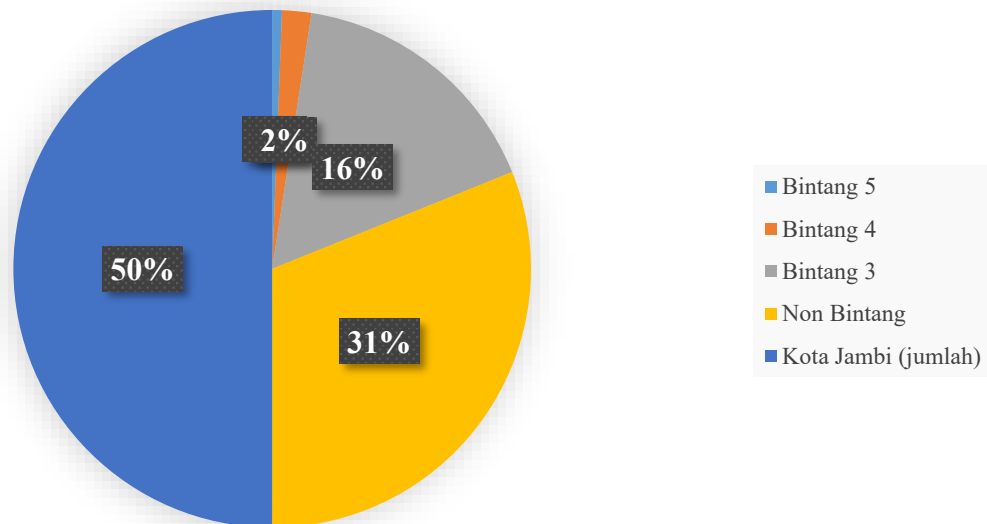
Gambar 2. 13. Jumlah hotel menurut Kecamatan, 2024

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Jambi , 2025

Berdasarkan Gambar 2.13 menunjukkan bahwa distribusi hotel Kota Jambi tahun 2024 sangat terkonsentrasi di Telanaipura (24 unit), diikuti Jambi Selatan (13) dan Pasar Jambi (11), sementara beberapa kecamatan masih minim seperti Paal Merah (1), Danau Sipin (4), Jambi Timur (6), Alam Barajo (9), dan bahkan tidak ada hotel di Danau Teluk serta Pelayangan; total keseluruhan mencapai 82 hotel, yang mengindikasikan pusat aktivitas pemerintahan, pendidikan, dan perdagangan menjadi magnet akomodasi, sedangkan wilayah pinggiran membutuhkan strategi pemerataan melalui insentif investasi akomodasi skala kecil, penguatan utilitas, dan pengaitan dengan destinasi/agenda wisata agar manfaat ekonomi lebih menyebar.

Untuk RUPM Kota Jambi 2025–2045, peta 82 hotel yang sangat terkonsentrasi di Telanaipura, Jambi Selatan, dan Pasar Jambi perlu dijadikan dasar penetapan koridor prioritas investasi MICE dan hotel berbintang, sekaligus strategi pemerataan ke kecamatan yang nol atau rendah (Pelayangan, Danau Teluk, Paal Merah, Danau Sipin) melalui insentif perizinan, dukungan utilitas, dan skema akomodasi skala kecil berbasis komunitas; integrasikan target kuantitatif (penambahan kamar/unit per kecamatan, okupansi minimal, dan kontribusi PDRB penyediaan akomodasi–makan minum) dengan pengembangan

destinasi dan event kota agar sebaran investasi lebih merata, memperkuat rantai pasok UMKM, serta menjaga stabilitas harga melalui peningkatan kapasitas saat puncak kunjungan sepanjang horizon 2025–2045.



Gambar 2. 14. Jumlah hotel menurut jenis, 2024

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Jambi , 2025

Berdasarkan Gambar 2.14 menunjukkan bahwa analisis struktur hotel Kota Jambi tahun 2024 menunjukkan adanya kesenjangan kualitas investasi yang harus segera diatasi oleh RUPM 2025-2045, ditandai oleh dominasi Hotel Non-Bintang (31%) dan persentase Bintang 5 yang tinggi (50%), kontras dengan minimnya Hotel Bintang 4 (hanya 2%) dan Bintang 3 (16%). Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa RUPM harus menjadikan peningkatan kualitas dan standardisasi akomodasi sebagai agenda utama, yaitu dengan memberikan insentif khusus untuk menarik investasi pembangunan hotel Bintang 3 dan 4 guna menampung segmen pasar korporat dan *MICE* menengah, sekaligus meluncurkan program pendampingan untuk *upskilling* hotel Non-Bintang menjadi akomodasi bersertifikasi CHSE, sehingga Kota Jambi dapat secara efektif meningkatkan daya saingnya sebagai destinasi pariwisata dan bisnis regional.

6. Bidang Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif tumbuh di atas dominasi sektor jasa, terutama pada subsektor kuliner & F&B, akomodasi, informasi–komunikasi, jasa perusahaan, dan jasa lainnya (seni, hiburan, komunitas kreatif). Tahun 2024 tercatat sekitar 640 proyek ekonomi kreatif dengan total

investasi Rp337,6 miliar dan serapan kerja ± 1.876 orang, dengan rata-rata investasi Rp527 juta per proyek namun median Rp50 juta yang menegaskan dominasi pelaku skala kecil–menengah.

Subsektor kuliner & F&B menyumbang sekitar 30% proyek dan 43% investasi, diikuti event & MICE (24,5% proyek; 30,4% investasi), serta digital–desain–media, seni–hiburan–rekreasi, dan subsektor pendukung lain. Secara spasial, konsentrasi utama berada di koridor barat–utara (Kota Baru, Alam Barajo, Danau Sipin, Telanaipura) dan selatan–timur (Paal Merah, Jambi Selatan, Jambi Timur), sementara Danau Teluk dan Pelayangan masih tertinggal meski memiliki potensi kuat sebagai kawasan heritage tepi sungai.

Analisis DLQ dan SLQ

Hasil pengelompokan sektor berdasarkan gabungan Static Location Quotient (SLQ) dan Dynamic Location Quotient (DLQ) memberikan gambaran menyeluruh mengenai struktur keunggulan sektoral dan arah pertumbuhannya di Kota Jambi. SLQ mengukur keunggulan komparatif sektoral secara statis, sedangkan DLQ menangkap dinamika pertumbuhan relatif sektor dibandingkan wilayah acuan. Dengan menggabungkan kedua indikator ini, sektor-sektor ekonomi dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori strategis: unggulan, prospektif, andalan, dan tertinggal.

Klasifikasi ini sangat penting untuk perumusan strategi pembangunan ekonomi daerah yang lebih terarah dan berbasis potensi sektoral. Pada Tabel 2.56 dan Gambar 2.9 memberikan rincian bidang di Kota Jambi berdasarkan empat kategori strategis tersebut. Struktur prioritas sektor ekonomi Kota Jambi berdasarkan overlay SLQ, DLQ, Shift–Share, dan Dekomposisi Daya Saing menunjukkan pola yang konsisten dengan karakter Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa. Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Perusahaan, serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial tergolong sebagai sektor unggulan utama karena memiliki basis ekonomi kuat, pertumbuhan relatif tinggi, dan daya saing yang konsisten memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian daerah. Di sisi lain, beberapa sektor seperti Industri Pengolahan, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate, Administrasi Pemerintahan, serta Jasa Pendidikan berada pada kategori prospektif, yang menunjukkan kapasitas tumbuh cukup baik meskipun belum sepenuhnya menjadi sektor basis. Sektor seperti Pengadaan Air dan Jasa Lainnya memiliki daya saing lokal yang cukup baik namun kontribusinya masih terbatas, sehingga dikategorikan sebagai potensial kompetitif lokal. Sementara itu, sektor-sektor besar seperti

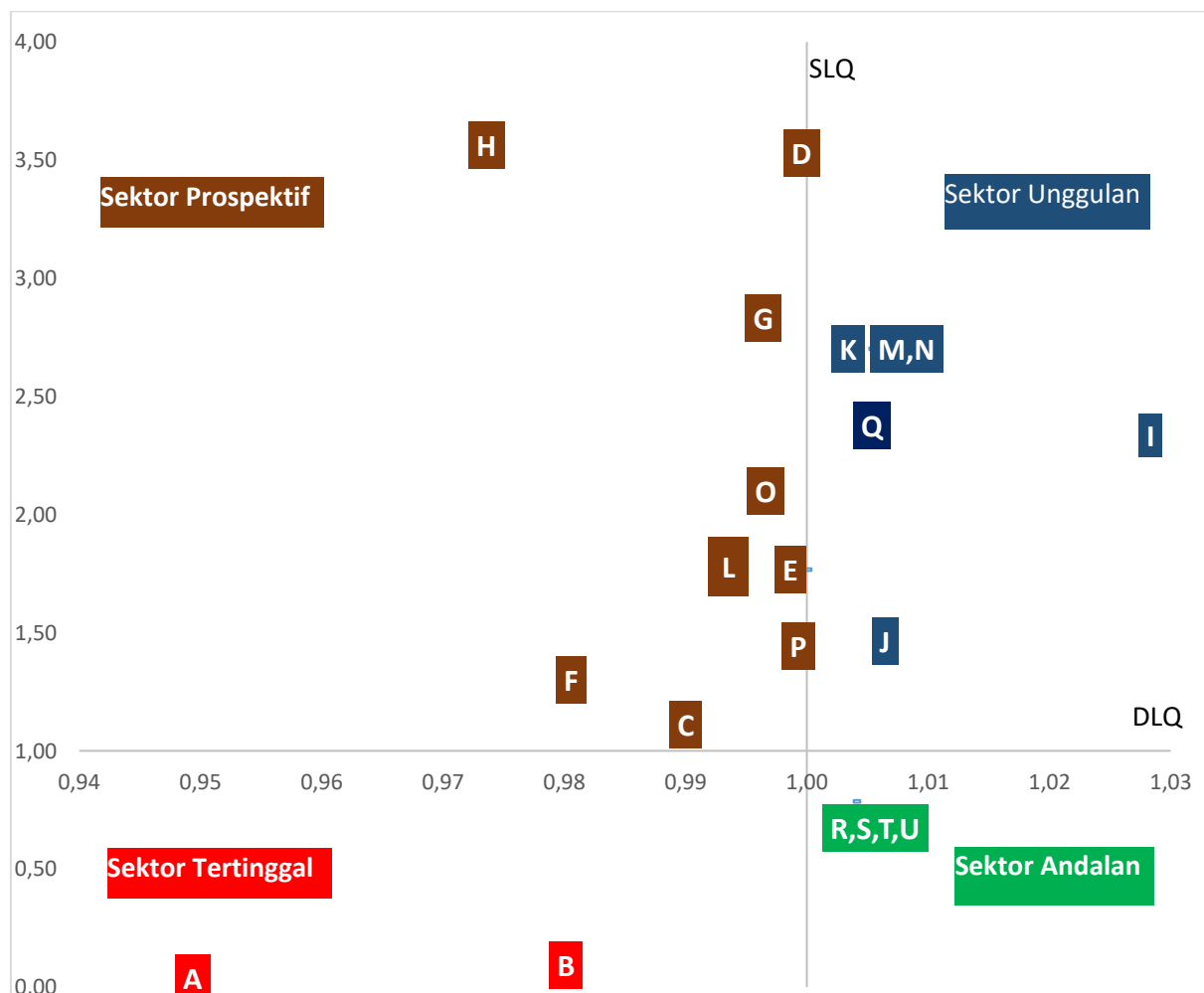
Perdagangan, Konstruksi, Transportasi, serta Pengadaan Listrik dan Gas masuk kategori strategis namun memiliki daya saing yang belum optimal, sehingga membutuhkan intervensi kebijakan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya. Adapun sektor Pertanian serta Pertambangan dan Penggalian berada pada kategori tertinggal, mencerminkan bahwa peran sektor primer semakin kecil dalam struktur ekonomi perkotaan Kota Jambi. Analisis ini memberikan arah yang jelas bagi penyusunan RUPM, khususnya dalam menetapkan sektor prioritas investasi dan strategi penguatan daya saing daerah.

Tabel 2.59. Klasifikasi Prioritas Sektor Ekonomi Kota Jambi Berdasarkan Overlay SLQ, DLQ, Shift–Share, dan Dekomposisi Daya Saing

Sektor	Kategori
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Unggulan Utama
J. Informasi dan Komunikasi	Unggulan Utama
M,N. Jasa Perusahaan	Unggulan Utama
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Unggulan Utama
C. Industri Pengolahan	Prospektif
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	Prospektif
L. Real Estate	Prospektif
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Prospektif
P. Jasa Pendidikan	Prospektif
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Potensial Kompetitif Lokal
R,S,T,U. Jasa lainnya	Potensial Kompetitif Lokal
D. Pengadaan Listrik dan Gas	Strategis tapi Lemah Daya Saing
F. Konstruksi	Strategis tapi Lemah Daya Saing
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Strategis tapi Lemah Daya Saing
H. Transportasi dan Pergudangan	Strategis tapi Lemah Daya Saing
A. Pertanian, Kehutanan, Perikanan	Tertinggal
B. Pertambangan dan Penggalian	Tertinggal

Sumber: Data diolah, 2025

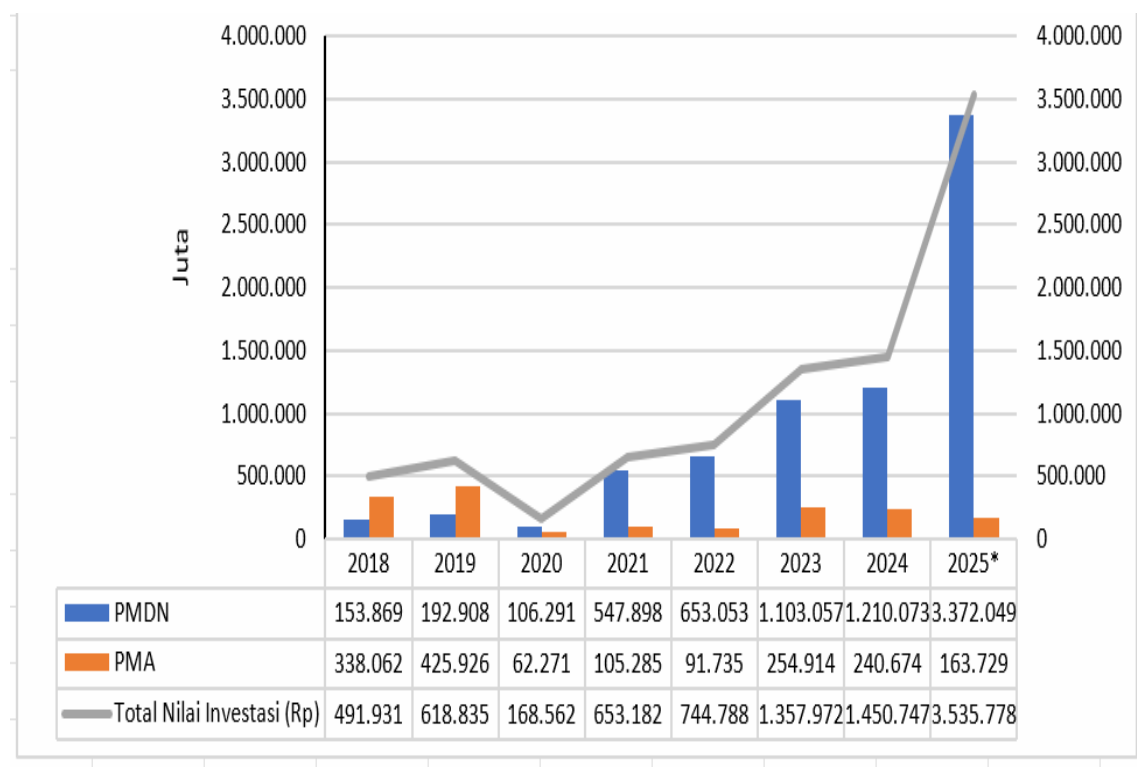
Pemetaan sektor ekonomi dalam gambar membagi perekonomian ke dalam empat kelompok utama dengan karakteristik dan implikasi kebijakan yang berbeda. Sektor unggulan (biru, kuadran kanan atas) memiliki nilai SLQ dan DLQ lebih besar dari satu, menunjukkan struktur yang kuat dan pertumbuhan di atas rata-rata sehingga menjadi motor utama perekonomian daerah. Sektor andalan (hijau, kuadran kanan bawah) dengan DLQ lebih besar dari satu namun SLQ di bawah satu tumbuh relatif cepat tetapi kontribusinya belum besar, sehingga perlu didorong melalui investasi dan akselerasi agar naik kelas menjadi sektor unggulan. Sektor prospektif (cokelat, kuadran kiri atas) memiliki SLQ di atas satu namun DLQ di bawah satu, artinya berperan besar dalam struktur ekonomi namun mengalami perlambatan pertumbuhan sehingga membutuhkan revitalisasi, modernisasi, dan diversifikasi agar tidak tergeser. Adapun sektor tertinggal (merah, kuadran kiri bawah) dengan nilai SLQ dan DLQ di bawah satu mencerminkan kontribusi dan pertumbuhan rendah; meski bukan prioritas utama, sektor ini tetap perlu program pengembangan skala kecil atau menengah serta integrasi ke rantai nilai sektor unggulan



Gambar 2. 15. Kuadran Sektor Gabungan SLQ dan DLQ Kota Jambi 2020 - 2024

2.5.1.2. Investasi

Penanaman Modal merupakan motor penggerak utama dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Kota Jambi, yang tidak hanya bertujuan meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tetapi juga menjamin pemerataan dan keberlanjutan. Dalam kerangka Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) 2025–2045, kontribusi investasi diklasifikasikan ke dalam tiga pilar manfaat. Secara Ekonomi, investasi (terutama di sektor Logistik, TIK, dan Industri Hilir) berfungsi sebagai *multiplier effect* yang kuat, menciptakan sektor unggulan baru, dan meningkatkan daya saing regional Kota Jambi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Secara Sosial, investasi berperan penting dalam peningkatan kualitas layanan publik dan modal manusia melalui pembangunan rumah sakit rujukan, fasilitasi pendidikan vokasi, serta menjamin penyerapan tenaga kerja terdidik secara inklusif. Terakhir, secara Lingkungan, penanaman modal diarahkan untuk mendukung prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance), khususnya dalam mengatasi masalah kritis seperti defisit air (NRW 37,6%) melalui skema KPBU dan investasi pengelolaan limbah, sehingga menjamin pembangunan kota yang tangguh dan berkelanjutan sesuai RTRW.



Gambar 2. 16. Realisasi Investasi Kota Jambi Periode 2018-2025 (Satuan Rp Juta)

Sumber: <https://mpp.jambikota.go.id/web/dashboard>

Periode perencanaan 2025–2029 menempatkan peningkatan Realisasi Investasi sebagai sasaran kunci untuk menjamin stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Kota Jambi, dengan target ambisius mencapai Rp 700 Miliar pada tahun 2026. Analisis menunjukkan bahwa pencapaian target ini harus didukung oleh tiga fokus utama. Pertama, Kepastian Regulasi dan Tata Ruang harus ditingkatkan melalui penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan regulasi insentif investasi daerah, yang krusial untuk mempercepat perizinan berusaha dan mengurangi hambatan non-teknis bagi investor. Kedua, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi keharusan, terutama dengan menguatkan sekolah vokasi dan memastikan adanya program *link and match* yang terintegrasi langsung dengan kebutuhan dunia usaha di sektor tersier (Logistik, TIK) yang menjadi basis ekonomi kota. Ketiga, strategi investasi harus diarahkan pada Ekspansi Spasial, yaitu mengembangkan pusat-pusat ekonomi baru di kawasan subpelayanan kota untuk pemerataan pembangunan, sekaligus mengoptimalkan potensi PMDN dan menarik investasi asing (PMA) yang saat ini masih minim, sehingga Realisasi Investasi tidak hanya bertambah secara kuantitas tetapi juga berkualitas.

Capaian kinerja penanaman modal Kota Jambi selama periode 2023–2030 menunjukkan tren yang meningkat berdasarkan realisasi investasi tahun-tahun awal. Pada tahun 2023, capaian realisasi investasi mencapai 94,5% dari target. Tahun 2024 menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan realisasi sebesar 128%, melampaui target RPJMD. Tahun 2025 memperlihatkan lonjakan yang sangat signifikan dengan capaian 176,79% dari target proyeksi. Hal ini mengindikasikan meningkatnya kepercayaan investor domestik maupun asing terhadap iklim investasi di Kota Jambi.

Kondisi ini menunjukkan besarnya potensi pertumbuhan ekonomi Kota Jambi yang turut didorong oleh efektivitas kebijakan pemerintah daerah. Penelitian Syafrial (2021) menegaskan bahwa sistem perizinan berbasis OSS meningkatkan kepercayaan investor melalui proses yang lebih cepat dan transparan. Selain itu, stabilitas makroekonomi dan reformasi kebijakan menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, sebagaimana ditegaskan oleh berbagai studi (Zakari & Musibau, 2023; Trang & Hång, 2023). Peningkatan realisasi investasi dari tahun ke tahun semakin menegaskan bahwa Kota Jambi berada pada jalur pertumbuhan ekonomi yang positif. Target investasi untuk tahun 2026–2030 diproyeksikan meningkat secara gradual sejalan dengan kebutuhan pembangunan dan peningkatan kapasitas ekonomi daerah

2.5.2. Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi adalah komposisi atau susunan peranan masing-masing sektor ekonomi (primer, sekunder, tersier) dalam membentuk perekonomian suatu wilayah atau negara. Struktur ini menggambarkan bagaimana setiap sektor berkontribusi terhadap pembentukan output (PDB/PDRB), penyerapan tenaga kerja, dan distribusi aktivitas produksi dalam suatu perekonomian. Struktur ekonomi ideal adalah struktur yang mampu memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki atau disediakan secara optimal, berorientasi pada kepentingan nasional, dan berlandaskan prinsip keadilan sosial untuk kesejahteraan rakyat.

Struktur ekonomi dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain distribusi PDB berdasarkan sektoral (pertanian, industri, jasa), komposisi tenaga kerja per sektor, komposisi modal dan investasi, serta tingkat ketergantungan eksternal. Perubahan struktur ekonomi dari waktu ke waktu misalnya dari struktur agraris ke struktur industri atau jasa mencerminkan proses transformasi struktural yang terjadi seiring pembangunan ekonomi dan modernisasi.

Pada awal tahun, perekonomian Kota Jambi cenderung melemah karena beberapa faktor internal. Belanja pemerintah—terutama belanja modal dan barang/jasa—sering terlambat direalisasikan, proyek konstruksi mulai berjalan lebih lambat, dan sebagian pembayaran tahun sebelumnya masih harus diselesaikan (carry over). Di sisi tenaga kerja dan dunia usaha, jam kerja berkurang karena banyak hari libur, tenaga kerja belum optimal terserap, serta stok barang ritel menipis sehingga pesanan ke industri juga ikut turun.

Masalah infrastruktur seperti kemacetan logistik, gangguan listrik, air, atau alat produksi yang rusak turut menekan output industri dan konstruksi.

Namun, kondisi membaik pada pertengahan hingga akhir tahun. Pemerintah mulai mempercepat lelang proyek, mempercepat penyerapan anggaran, dan menyesuaikan jadwal pembangunan dengan ketersediaan material dan tenaga kerja. Dunia usaha juga melakukan restocking, menambah shift produksi saat permintaan meningkat, serta mengaktifkan promosi di berbagai kanal. Perbaikan keandalan listrik, air, telekomunikasi, serta beroperasinya infrastruktur baru ikut menurunkan biaya distribusi dan membantu peningkatan produksi.



Tabel 2.60. Nilai Investasi Sektor Perdagangan dan Jasa di Kota Jambi Triwulan I

SEKTOR		Triwulan I					
		PMDN		PMA		PMDN + PMA	
		Proyek	Investasi (Rp. Juta)	Proyek	Investasi (US\$. Ribu)	Proyek	Investasi (Rp)
Sektor Primer	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	6	0,00			6	0,00
	Kehutanan	1	0,00			1	0,00
	Pertambangan	14	11.860,00			14	11.860.000.000,00
	Total (Sektor)	21	11.860,00	0	0,00	21	11.860.000.000,00
Sektor Sekunder	Industri Makanan	11	2.313,00	2	0,00	13	2.313.000.000,00
	Industri Kayu	1	0,00	1	0,00	2	0,00
	Industri Kertas dan Percetakan					0	0,00
	Industri Kimia Dan Farmasi	2	0,00	1	0,00	3	0,00
	Industri Karet dan Plastik	2	519,40	1	14,10	3	728.080.000,00
	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	3	0,00			3	0,00
	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	1	0,00			1	0,00
	Industri Lainnya	2	0,00			2	0,00
	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jambi		0,00			0	0,00
	Total (Sektor)	22	2.832,40	5	14,10	27	3.041.080.000,00
Sektor Tersier	Listrik, Gas dan Air	7	500,00	1	0,00	8	500.000.000,00
	Konstruksi	184	50.028,00			184	50.028.000.000,00
	Perdagangan dan Reparasi	196	17.726,20	11	23,60	207	18.075.480.000,00
	Hotel dan Restoran	34	56.813,60	2	0,00	36	56.813.600.000,00
	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	64	24.183,90	5	1.255,40	69	42.763.820.000,00
	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	28	35.426,30	3	0,90	31	35.439.620.000,00
	Jasa Lainnya	110	34.225,70	5	0,00	115	34.225.700.000,00
	Total (Sektor)	623	218.903,70	27	1.279,90	650	237.846.220.000,00
Total (Sektor Utama)		666	233.596,10	32	1.294,00	698	252.747.300.000,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Jambi, 2025



Tabel 2.61. Nilai Investasi Sektor Perdagangan dan Jasa di Kota Jambi Triwulan II

SEKTOR		Triwulan II					
		PMDN		PMA		PMDN + PMA	
		Proyek	Investasi (Rp. Juta)	Proyek	Investasi (US\$. Ribu)	Proyek	Investasi (Rp)
Sektor Primer	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	4	0,00	0	0,00	4	0,00
	Kehutanan	1	0,00	0	0,00	1	0,00
	Pertambangan	3	3.518,00	0	0,00	3	3.518.000.000,00
	Total (Sektor)	8	3.518,00	0	0,00	8	3.518.000.000,00
Sektor Sekunder	Industri Makanan	1	8.987,40	0	0,00	1	8.987.400.000,00
	Industri Kayu	0	0,00	0	57,40	0	849.520.000,00
	Industri Kertas dan Percetakan	1	0,00	0	0,00	1	0,00
	Industri Kimia Dan Farmasi	1	0,00	0	0,00	1	0,00
	Industri Karet dan Plastik	0	4,20	1	57,90	1	861.120.000,00
	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Industri Lainnya	0	59,30	0	0,00	0	59.300.000,00
	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jambi					0	0,00
	Total (Sektor)	3	9.050,90	1	115,30	4	10.757.340.000,00
Sektor Tersier	Listrik, Gas dan Air	1	3.327,70		0,00	1	3.327.700.000,00
	Konstruksi	57	16.910,10	0	0,00	57	16.910.100.000,00
	Perdagangan dan Reparasi	67	264.608,00	2	697,70	69	274.933.960.000,00
	Hotel dan Restoran	7	28.824,60	10	1.109,80	17	45.249.640.000,00
	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	17	8.322,10	2	779,60	19	19.860.180.000,00
	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	4	19.607,30	2	0,90	6	19.620.620.000,00
	Jasa Lainnya	53	48.338,10	7	5.515,60	60	129.968.980.000,00
	Total (Sektor)	206	389.937,90	23	8.103,60	229	509.871.180.000,00
Total (Sektor Utama)			217	402.506,80	24	8.218,90	241

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Jambi, 2025



Tabel 2.62. Nilai Investasi Sektor Perdagangan dan Jasa di Kota Jambi Triwulan II

SEKTOR		Triwulan III					
		PMDN		PMA		PMDN + PMA	
		Proyek	Investasi (Rp. Juta)	Proyek	Investasi (US\$. Ribu)	Proyek	Investasi (Rp)
Sektor Primer	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	6	797,70			6	797.700.000,00
	Kehutanan	1	1.138,50			1	1.138.500.000,00
	Pertambangan	18	3.365,60	2	565,30	20	11.732.040.000,00
	Total (Sektor)	25	5.301,80	2	565,30	27	13.668.240.000,00
Sektor Sekunder	Industri Makanan	7	7.307,10	1	0,00	8	7.307.100.000,00
	Industri Kayu	2	10.200,00	1	0,60	3	10.208.880.000,00
	Industri Kertas dan Percetakan	1	0,00			1	0,00
	Industri Kimia Dan Farmasi	3	0,00			3	0,00
	Industri Karet dan Plastik			1	0,00	1	0,00
	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	3	122,50			3	122.500.000,00
	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	1	0,00			1	0,00
	Industri Lainnya	5	0,00			5	0,00
	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen okteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jambi	2	0,00			2	0,00
	Total (Sektor)	24	17.629,60	3	0,60	27	17.638.480.000,00
Sektor Tersier	Listrik, Gas dan Air	8	0,00	1		9	0,00
	Konstruksi	162	7.435,70			162	7.435.700.000,00
	Perdagangan dan Reparasi	291	111.083,50	21	4,70	312	111.153.060.000,00
	Hotel dan Restoran	47	11.107,00	12	34,90	59	11.623.520.000,00
	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	106	6.595,00	7	5.614,10	113	89.683.680.000,00
	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	27	24.782,30			27	24.782.300.000,00
	Jasa Lainnya	165	9.420,70	8	12,10	173	9.599.780.000,00
	Total (Sektor)	806	170.424,20	49	5.665,80	855	254.278.040.000,00
Total (Sektor Utama)		855	193.355,60	54	6.231,70	909	285.584.760.000,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Jambi, 2025



Tabel 2.63. Nilai Investasi Sektor Perdagangan dan Jasa di Kota Jambi Triwulan IV

SEKTOR		Triwulan IV					
		PMDN		PMA		PMDN + PMA	
		Proyek	Investasi (Rp. Juta)	Proyek	Investasi (US\$. Ribu)	Proyek	Investasi (Rp)
Sektor Primer	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	6,00	281,8			6,00	281.800.000,00
	Kehutanan	1	2.750,9			1,00	2.750.900.000,00
	Pertambangan	15	3.222,0	1	565,30	16,00	11.588.440.000,00
	Total (Sektor)	22	6.254,70	1	565,30	23,00	14.621.140.000,00
Sektor Sekunder	Industri Makanan	5	8.701,4	1	0,0	6,00	8.701.400.000,00
	Industri Kayu	2	15,0	1	19,6	3,00	305.080.000,00
	Industri Kertas dan Percetakan	1	0,0			1,00	0,00
	Industri Kimia Dan Farmasi	1	0,0			1,00	0,00
	Industri Karet dan Plastik	1	428,0	1	72,4	2,00	1.499.520.000,00
	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	2	732,2			2,00	732.200.000,00
	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	1	0,0			1,00	0,00
	Industri Lainnya	7	0,0			7,00	0,00
	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jambi					0,00	0,00
	Total (Sektor)	20	9.876,60	3	92,00	23,00	11.238.200.000,00
Sektor Tersier	Listrik, Gas dan Air	15	178,0	1	0,0	16,00	178.000.000,00
	Konstruksi	136	53.018,0			136,00	53.018.000.000,00
	Perdagangan dan Reparasi	169	145.518,4	7	21,3	176,00	145.833.640.000,00
	Hotel dan Restoran	42	4.657,3	14	4,1	56,00	4.717.980.000,00
	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	53	8.645,5	5	788,0	58,00	20.307.900.000,00
	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	27	38.288,7			27,00	38.288.700.000,00
	Jasa Lainnya	105	7.161,7	6	8,4	111,00	7.286.020.000,00
	Total (Sektor)	547	257.467,60	33	821,80	580,00	269.630.240.000,00
Total (Sektor Utama)		589	273.598,90	37	1.479,10	626,00	295.489.580.000,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Jambi, 2025



Tabel 2.64. Nilai Investasi Sektor Perdagangan dan Jasa di Kota Jambi Tahun 2023

SEKTOR		Tahun 2023					
		PMDN		PMA		PMDN + PMA	
		Proyek	Investasi (Rp. Juta)	Proyek	Investasi (US\$. Ribu)	Proyek	Investasi (Rp)
Sektor Primer	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	16	797,70	0	0,00	16	1.079.500.000,00
	Kehutanan	3	1.138,50	0	0,00	2	3.889.400.000,00
	Pertambangan	35	18.743,60	2	565,30	17	38.698.480.000,00
	Total (Sektor)	54	20.679,80	2	565,30	35	43.667.380.000,00
Sektor Sekunder	Industri Makanan	19	18.607,50	3	0,00	22	27.308.900.000,00
	Industri Kayu	3	10.200,00	2	58,00	5	11.363.480.000,00
	Industri Kertas dan Percetakan	2	0,00	0	0,00	2	0,00
	Industri Kimia Dan Farmasi	6	0,00	1	0,00	7	0,00
	Industri Karet dan Plastik	2	523,60	3	72,00	5	3.088.720.000,00
	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	6	122,50	0	0,00	6	854.700.000,00
	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	2	0,00	0	0,00	2	0,00
	Industri Lainnya	7	59,30	0	0,00	7	59.300.000,00
	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jambi	2	0,00	0	0,00	2	0,00
	Total (Sektor)	47	29.512,90	9	130,00	56	42.675.100.000,00
Sektor Tersier	Listrik, Gas dan Air	16	3.827,70	2	0,00	18	4.005.700.000,00
	Konstruksi	403	74.373,80	0	0,00	403	127.391.800.000,00
	Perdagangan dan Reparasi	554	393.417,70	34	726,00	588	549.996.140.000,00
	Hotel dan Restoran	88	96.745,20	24	1.144,70	112	118.404.740.000,00
	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	187	39.101,00	14	7.649,10	201	172.615.580.000,00
	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	59	79.815,90	5	1,80	64	118.131.240.000,00
	Jasa Lainnya	328	91.984,50	20	5.527,70	348	181.080.480.000,00
	Total (Sektor)	1.635	779.265,80	99	15.049,30	1.734	1.271.625.680.000,00
Total (Sektor Utama)		1.736	829.458,50	110	15.744,60	1.825	1.357.968.160.000,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Jambi, 2025

2.5.3. Inflasi

Inflasi berperan penting dalam RUPM Kota Jambi 2025–2045 karena mencerminkan kestabilan harga yang memengaruhi iklim investasi, daya beli, dan biaya produksi. Inflasi yang terkendali menjadi sinyal positif bagi investor dan mendukung perencanaan investasi jangka panjang di berbagai sektor. Penguatan pasokan, efisiensi logistik, dan peningkatan produktivitas membantu menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, mendorong investasi berkelanjutan, serta memperluas kesempatan kerja. Stabilitas inflasi pada akhirnya menopang peningkatan kualitas pembangunan manusia dan memastikan target pembangunan ekonomi, sosial, dan investasi dalam RUPM tercapai secara berimbang dan berkelanjutan.

Tabel 2.65. Laju inflasi bulanan per kelompok di Kota Jambi Tahun 2024 (%).

Bulan	Umum	Makanan, Minuman, Tembakau	Pakaian dan Alas Kaki
Januari	0,68	2,31	0,06
Februari	0,24	0,88	0,32
Maret	0,28	0,96	0,2
April	-0,05	-1,13	0,14
Mei	0,29	1,34	0
Juni	-0,04	-0,34	0
Juli	-0,84	-3,14	0,6
Agustus	-0,16	-1,03	0
September	0,01	-0,27	0,34
Oktober	0,15	0,45	0,01
November	0,21	0,78	0,06
Desember	0,41	1,82	0,04

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Jambi, 2025

Berdasarkan Tabel 2.65 menunjukkan Inflasi di Kota Jambi sepanjang tahun 2024 menunjukkan fluktuasi yang relatif terkendali dengan inflasi umum yang puncaknya mencapai 0,68% pada Januari dan terkoreksi deflasi pada beberapa bulan seperti Juli (-0,84%). Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menonjol sebagai penyumbang utama inflasi dengan kenaikan signifikan dan juga deflasi tajam pada beberapa bulan, menunjukkan sensitivitas tinggi terhadap supply dan demand musiman. Sementara itu,

kelompok pakaian dan alas kaki tetap stabil dengan variasi inflasi yang rendah sepanjang tahun. Kondisi inflasi yang terkendali ini penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan kestabilan ekonomi Kota Jambi, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif. Dalam konteks penyusunan RUPM Kota Jambi 2025-2045, pengendalian inflasi, terutama pada kelompok kebutuhan pokok, menjadi aspek penting yang harus diperhatikan melalui penguatan ketahanan pangan, distribusi yang efisien, dan peningkatan produktivitas lokal. Dengan demikian, inflasi yang terkelola dengan baik akan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan menarik investasi yang berkontribusi pada pencapaian target pembangunan kota secara menyeluruh.

Tabel 2.66. Lanjutan Laju inflasi bulanan per kelompok di Kota Jambi Tahun 2024 (%)

Bulan	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar RT	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin RT	Kesehatan
Januari	-0,07	0,05	0,08
Februari	0,12	-0,32	-0,3
Maret	0,22	-0,24	-0,51
April	0,02	0,64	0,24
Mei	-0,01	0,05	0,34
Juni	-0,02	-0,01	-0,12
Juli	0,13	0,05	0,16
Agustus	0,18	0,07	0,05
September	0,35	0,02	-0,25
Oktober	0,01	-0,03	0,01
November	0,02	-0,1	-1,21
Desember	0	-0,12	-0,86

Sumber: Kota Jambi dalam Angka, 2025

Berdasarkan Tabel 2.66 menunjukkan Inflasi Kota Jambi pada Tahun 2024 menunjukkan fluktuasi yang relatif terkendali dengan inflasi umum mencapai puncak 0,68% pada Januari dan deflasi tajam -0,84% pada Juli. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau sangat berperan sebagai penyumbang utama inflasi dengan kenaikan signifikan di awal dan akhir tahun serta deflasi di pertengahan tahun, mencerminkan sensitivitas tinggi terhadap pasokan dan permintaan musiman. Kelompok pakaian dan alas kaki relatif stabil dan rendah inflasinya. Di sisi lain, sektor perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah

tangga mengalami fluktuasi kecil dengan kecenderungan inflasi positif di beberapa bulan, sementara perlengkapan rumah tangga dan kesehatan cenderung fluktuatif dengan penurunan harga terutama di akhir tahun pada sektor kesehatan. Kondisi ini menegaskan perlunya pengendalian harga yang fokus pada kebutuhan pokok dan layanan dasar agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan stabilitas ekonomi daerah tercipta. Dalam penyusunan RUPM Kota Jambi 2025-2045, pengelolaan dan pengendalian inflasi di sektor-sektor ini harus menjadi prioritas melalui investasi pada ketahanan pangan, efisiensi energi, dan penguatan layanan kesehatan, sehingga mendorong iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Tabel 2.67. Inflasi bulanan transportasi, info-keuangan, rekreasi-budaya di Kota Jambi
Tahun 2024 (%)

Bulan	Transportasi	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya
Januari	-0,26	0	0,00
Februari	-0,09	0	0,06
Maret	-0,26	0	0,00
April	1,57	0	0,00
Mei	-1,08	-0,03	0,00
Juni	0,06	0	0,00
Juli	0,13	0	0,06
Agustus	0,2	-0,58	0,54
September	-0,21	0,01	-0,05
Oktober	-0,25	-0,12	0,29
November	-0,05	-0,19	0,19
Desember	-0,6	-0,13	0,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Jambi, 2025

Berdasarkan Tabel 2.67 menunjukkan laju inflasi bulanan tahun 2024 pada kelompok transportasi, informasi komunikasi dan jasa keuangan, serta rekreasi, olahraga, dan budaya, terlihat bahwa kelompok transportasi mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dengan inflasi positif tertinggi mencapai 1,57% pada April dan deflasi terdalam -1,08% pada Mei hingga -0,6% pada Desember, mencerminkan sensitivitas harga transportasi terhadap faktor

musiman dan biaya bahan bakar. Kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan relatif stabil dengan nilai inflasi bergerak mendekati nol bahkan negatif di beberapa bulan, sedangkan kelompok rekreasi, olahraga dan budaya menunjukkan inflasi kecil yang fluktuatif, dengan puncak 0,54% di Agustus dan deflasi minor di beberapa bulan. Fluktuasi ini penting diperhatikan sebagai bagian dari mekanisme pengendalian inflasi agar dampak terhadap biaya hidup masyarakat dan biaya operasional usaha dapat distabilkan. Dalam konteks penyusunan RUPM Kota Jambi 2025-2045, pengelolaan inflasi di sektor transportasi dan jasa sangat krusial untuk mendukung mobilitas ekonomi dan investasi yang efisien, serta menjaga keberlangsungan pertumbuhan sektor rekreasi dan budaya sebagai bagian dari pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata daerah. Strategi pengendalian inflasi dan investasi tepat sasaran di sektor-sektor ini akan memperkuat daya saing Kota Jambi dan mendorong pembangunan berkelanjutan yang inklusif.

Tabel 2.68. Inflasi bulanan pendidikan, restoran, dan jasa pribadi di Kota Jambi

Tahun 2024 (%)

Bulan	Pendidikan	Penyediaan Makanan & Minuman/Restoran	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya
Januari	0,84	0,00	0,43
Februari	0,00	0,00	-0,12
Maret	0,00	0,47	-0,06
April	0,00	0,00	0,41
Mei	0,00	0,00	0,50
Juni	0,00	0,41	0,31
Juli	0,06	0,41	0,13
Agustus	0,57	0,43	0,36
September	0,00	0,10	0,26
Oktober	0,00	0,02	0,75
November	0,00	0,34	0,91
Desember	0,01	0,41	0,16

Sumber: BPS, Survei Harga Konsumen, 2025

Berdasarkan Tabel 2.68 yang mencatat inflasi bulanan untuk kelompok pendidikan, penyediaan makanan dan minuman/restoran, serta perawatan pribadi dan jasa lainnya di Kota Jambi sepanjang tahun 2024, terlihat bahwa inflasi pada sektor pendidikan relatif stabil

dengan lonjakan kecil 0,84% pada Januari dan inflasi mendekati nol pada bulan-bulan berikutnya. Kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran umumnya menunjukkan inflasi kecil dan berfluktuasi, dengan nilai tertinggi sekitar 0,47% pada Maret dan stabil di beberapa bulan lainnya. Sementara itu, perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami fluktuasi yang lebih signifikan, dengan sebagian besar bulan mencatat inflasi positif, terutama pada Oktober dan November yang masing-masing mencapai 0,75% dan 0,91%. Kondisi ini memperlihatkan bahwa sektor jasa pribadi dan perawatan menjadi pendorong inflasi yang lebih dinamis dibandingkan sektor pendidikan dan restoran.

Dalam konteks penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Jambi 2025-2045, data ini menggarisbawahi perlunya fokus pada pengembangan sektor pendidikan untuk menjaga stabilitas biaya pendidikan, sekaligus mendorong investasi di sektor jasa, terutama perawatan pribadi dan restoran, guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan layanan yang semakin dibutuhkan masyarakat. Pengendalian inflasi di ketiga sektor ini penting untuk menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan kualitas layanan publik dan swasta, serta menciptakan lingkungan investasi yang kondusif, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Jambi secara berkelanjutan.

2.6. Infrastruktur

Infrastruktur merupakan indikator kunci dalam RUPM karena menentukan kelancaran arus barang, orang, dan informasi yang langsung menurunkan biaya logistik, menaikkan produktivitas, serta meningkatkan daya tarik investasi lintas sektor sepanjang 2025–2045. Arah kebijakan nasional untuk RUPM menempatkan infrastruktur sebagai isu strategis dengan mandat optimalisasi kapasitas yang ada, pembangunan jaringan baru, integrasi antarwilayah, percepatan di kawasan berkembang, dan pemanfaatan skema Kerja Sama Pemerintah Swasta untuk menutup gap pembiayaan. Bukti studi daerah lain menunjukkan infrastruktur transportasi, energi, dan TIK berkorelasi signifikan dengan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, sehingga memasukkan indikator ketersediaan, kualitas, dan keterjangkauan infrastruktur ke dalam RUPM menjadi prasyarat guna mendorong investasi bernilai tambah dan pemerataan manfaat pembangunan. Di tingkat operasional, RUPM perlu menurunkan indikator infrastruktur menjadi target terukur seperti waktu tempuh koridor utama, indeks kondisi jalan, reliabilitas listrik–air, jangkauan broadband, kapasitas logistik,

dan ketahanan banjir, agar sinkron dengan prioritas penanaman modal sektoral dan pengembangan klaster ekonomi kota.

Infrastruktur yang terencana dan terintegrasi merupakan faktor pendorong fundamental bagi keberhasilan RUPM Kota Jambi 2025-2045, di mana investasi harus diprioritaskan untuk meningkatkan konektivitas logistik guna menurunkan biaya operasional, menjamin ketersediaan energi dan air bersih yang stabil, dan memodernisasi infrastruktur digital untuk mendukung ekosistem bisnis; pada saat yang sama, RUPM juga harus mengamankan investasi pada infrastruktur keberlanjutan seperti sistem IPAL dan penataan parkir di kawasan *growth pole* (seperti Jelutung dan Jambi Selatan) sebagai prasyarat untuk menjaga kualitas lingkungan dan daya saing kawasan komersial hingga tahun 2045.

Tabel 2.69. Panjang jalan per kewenangan (km)

Kewenangan	Panjang (km)
Kota/Municipality	510,452
Provinsi/Province	49,436
Negara/State	59,510

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi, 2025

Berdasarkan Tabel 2.69 menunjukkan dominasi jaringan jalan berada pada kewenangan Kota/Municipality sepanjang 510,452 km, jauh lebih besar dibanding jaringan Provinsi 49,436 km dan Negara 59,510 km; implikasinya, fokus RUPM perlu pada manajemen aset dan peningkatan kapasitas jalan kota yang menopang mobilitas harian, distribusi logistik last-mile, akses layanan publik, serta konektivitas ke simpul pertumbuhan, sambil memastikan koordinasi lintas kewenangan untuk proyek strategis provinsi–nasional (akses kawasan industri/logistik, ring road, dan koneksi antarwilayah) agar arus barang–orang lebih efisien dan biaya logistik menurun.

Tabel 2.70. Panjang jalan menurut permukaan di Kota Jambi, Tahun 2022–2024 (km)

Jenis Permukaan Jalan	2022	2023	2024
Aspal/Paved	475,693	474,101	480,270

Jenis Permukaan Jalan	2022	2023	2024
Kerikil/Gravel	5,565	4,787	4,109
Tanah/Soil	29,194	31,564	26,073
Lainnya/Others	—	—	—
Total	510,452	510,452	510,452

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi, 2025

Berdasarkan Tabel 2.70 menunjukkan Panjang jaringan jalan Kota Jambi tetap 510,452 km selama 2022–2024, namun kualitasnya membaik melalui peningkatan jalan beraspal dan pengurangan jalan kerikil serta jalan tanah. Meski demikian, keberadaan 26,073 km jalan tanah masih menjadi kendala bagi logistik, layanan publik, dan akses menuju kawasan wisata. Oleh karena itu, RUPM 2025–2045 perlu memprioritaskan peningkatan kualitas jalan melalui manajemen aset yang baik, percepatan konversi jalan tanah dan kerikil, serta penguatan aksesibilitas untuk mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

Tabel 2.71. Panjang jalan menurut kondisi di Kota Jambi, Tahun 2022–2024 (km)

Kondisi Jalan	2022	2023	2024
Baik/Good	359,723	442,452	447,215
Sedang/Moderate	43,914	14,051	13,645
Rusak/Damage	47,825	12,247	11,262
Rusak Berat/Severely Damage	58,990	41,702	38,330
Total	510,452	510,452	510,452

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi, 2025

Berdasarkan Tabel 2.71 menunjukkan data kondisi jalan 2022-2024 menunjukkan bahwa Kota Jambi memiliki keunggulan komparatif yang signifikan di bidang infrastruktur, dengan capaian jalan kondisi Baik mencapai 87.6% pada tahun 2024, yang merupakan aset promosi fundamental yang efektif menurunkan biaya logistik dan mendukung sektor perdagangan dan hospitalitas yang telah berkembang pesat. Namun, untuk periode RUPM 2025-2045, tantangan strategis bergeser dari rehabilitasi besar menjadi konservasi mutu aset, di mana Pemerintah Kota wajib memfokuskan investasi pada eliminasi sisa 38,330 km jalan

Rusak Berat (7.5%) yang masih menghambat akses, serta mengadopsi teknologi pemeliharaan preventif yang canggih guna menjamin persentase jalan Baik dapat dipertahankan di atas 95% secara berkelanjutan, sehingga mendukung pertumbuhan investasi yang stabil hingga dua puluh tahun ke depan.

Meskipun Kota Jambi berhasil mencapai persentase jalan kondisi Baik yang tinggi, RUPM 2025-2045 harus menetapkan fokus kebijakan pada konservasi dan eliminasi sisa kerusakan demi keberlanjutan investasi. Keberadaan 38,330 km jalan Rusak Berat (7.5%) masih menjadi *bottleneck* yang dapat menghambat akses investasi ke area produksi dan merusak citra kota; oleh karena itu, IKU jangka panjang RUPM harus bergeser dari rehabilitasi menjadi pemeliharaan preventif, dengan target minimal 95% jalan dalam kondisi Baik pada tahun 2045. Untuk mencapai target ini, diperlukan investasi konservasi mutu melalui adopsi teknologi modern, termasuk implementasi *road asset management system* berbasis digital, guna memastikan pemeliharaan rutin yang cepat tanggap dan alokasi anggaran yang efisien untuk menjaga kualitas aset infrastruktur yang telah dicapai.

Tabel 2.72. Jenis Sarana perdagangan menurut jenis di Kota Jambi, Tahun 2021–2024

Jenis Sarana Perdagangan	2021	2022	2023	2024
Pasar/Market	19	19	19	19
Toko/Store	237	237	237	237
Kios	1.135	1.111	1.111	1.111
Warung	—	—	—	—
Total	1.391	1.367	1.367	1.367

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, 2024

Berdasarkan Tabel 2.72 menunjukkan data sarana perdagangan 2021–2024 menunjukkan adanya stagnasi kuantitas pada 19 Pasar dan 237 Toko, yang kontras dengan dinamika konsumsi tinggi yang ditopang oleh 1.215 restoran dan 1.111 Kios, mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi saat ini bersandar pada unit usaha mikro dan informal. Oleh karena itu, RUPM 2025-2045 harus memfokuskan investasi pada revitalisasi dan modernisasi kualitas sarana; ini mencakup promosi investasi modal besar (PPP) untuk mentransformasi 19 Pasar menjadi pusat perdagangan *green* dan higienis yang terintegrasi dengan sistem logistik (*cold storage*), sambil mengarahkan investasi untuk penataan dan

standardisasi 1.111 Kios di *growth pole* komersial. Strategi ini juga membuka peluang investasi besar di ritel modern (seperti *supermarket* regional) di kawasan dengan daya beli tinggi yang masih minim sarana, serta mendorong digitalisasi perdagangan melalui platform *e-commerce* lokal untuk meningkatkan jangkauan pasar tanpa ekspansi fisik yang tidak teratur.

Tabel 2.73. Ruko, toko, kios, lapak, dan pedagang di pasar milik Pemerintah Kota Jambi, Tahun 2024

Pasar	Ruko	Toko	Kios	Lapak	Jumlah Pedagang
Pasar Rakyat TAC	0	13	89	54	143
Pasar Rakyat Kasang	0	0	39	114	153
Pasar Rakyat Talang Banjar	0	0	279	652	904
Pasar Rakyat Pasir Putih	0	0	92	229	332
Pasar Rakyat Olak Kemang	0	0	19	40	59
Pasar Rakyat Aur Duri	0	0	33	380	413
Pasar Induk	0	179	0	0	179
Pasar Tanah Pilih	0	42	0	0	71
Pasar Sitimang	0	0	0	0	0
Pasar Sitimang Belakang	0	0	26	0	26
Pasar Sijimat	0	0	186	0	186
Pasar Gang Siku	0	0	0	0	0
Pasar Buah-buahan	0	0	0	0	0
Pasar India	0	0	41	0	41
Pasar Kebun Handil	16	12	139	0	203
Pasar Mayang Sari	0	0	5	0	5
Pasar Kebun Bungo	0	0	6	0	6
Pasar Malioboro	0	0	17	0	17
Ruko Pemda (dalam kota)	46	0	0	0	65
Total	62	237	1.111	1.340	2.611

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, 2024

Analisis menunjukkan bahwa struktur perdagangan rakyat Kota Jambi 2024 didominasi kios dan lapak sebanyak 1.111 kios dan 1.340 lapak atau 94 persen dari seluruh unit niaga sementara ruko dan toko hanya berjumlah 62 dan 237 unit. Kondisi ini menegaskan dominasi pedagang mikro-kecil yang membutuhkan biaya sewa rendah dan ruang yang fleksibel. Pasar terbesar adalah Talang Banjar dengan 904 pedagang dan Aur

Duri dengan 413 pedagang, disusul Pasir Putih dengan 332 dan Kasang dengan 153 pedagang. Koridor-koridor tersebut menjadi pusat logistik kebutuhan pokok dan prioritas peningkatan infrastruktur pasar, mulai dari sanitasi, TPS terpadu, parkir, hingga pos retribusi digital untuk menurunkan biaya transaksi dan meningkatkan higienitas.

Pada Pasar Induk, keberadaan 179 unit toko menegaskan fungsinya sebagai simpul distribusi grosir yang perlu diperkuat melalui fasilitas rantai dingin dan pengaturan bongkar muat. Sementara itu, pasar dengan aktivitas nol seperti Sitimang, Gang Siku, dan Buah-buahan menunjukkan aset yang belum optimal dan dapat direvitalisasi menjadi sentra tematik atau dialihfungsikan sesuai kebutuhan lokal. Dalam RUPM 2025–2045, kebijakan dapat difokuskan pada digitalisasi retribusi, pendataan pedagang, pembiayaan mikro, standardisasi pasar sehat, penataan lalu lintas dan parkir, serta integrasi Pasar Induk dengan jaringan distribusi kota–provinsi untuk menekan inflasi pangan dan memperkuat usaha mikro.

Tabel 2.74. Pelanggan, listrik terjual, dan nilai penjualan (2024)

Uraian	Jumlah Pelanggan	Jumlah VA/Langganan	Nilai Penjualan Listrik (Rp)
Sosial	360.603	461.662.200	646.996.210
Rumah Tangga	309	54.113.400	98.207.505
Industri	30.211	188.494.350	292.101.965
Bisnis	5.923	47.240.650	58.258.119
Perkantoran	130	6.959.350	14.997.865
Penerangan Jalan	1.512	20.692.900	31.975.867
Multiguna	20	198.000	1.497.429
Kota Jambi	399.886	781.216.600	1.142.634.859

Sumber: PLN UP3 Jambi/PLN UP3 Kota Jambi, 2025

Berdasarkan Tabel 2.74, data pelanggan dan penjualan listrik Kota Jambi tahun 2024 menunjukkan ketidakseimbangan antara jumlah pelanggan dan besaran konsumsi energi. Kelompok Sosial memiliki pelanggan terbesar mencapai 360.603 dan nilai penjualan tertinggi sebesar Rp646,99 juta, namun rasio daya tersambung per pelanggan relatif rendah. Sebaliknya, sektor Industri hanya memiliki 30.211 pelanggan tetapi mencatat penjualan

listrik ketiga terbesar senilai Rp292,10 juta, menunjukkan bahwa industri merupakan pengguna energi berintensitas tinggi yang penting bagi PDRB meskipun jumlah pelanggannya lebih kecil. Jumlah pelanggan Rumah Tangga yang hanya tercatat 309 orang juga mengindikasikan inkonsistensi pengelompokan, di mana sebagian besar pelanggan rumah tangga tampaknya masuk kategori Sosial. Kondisi ini menegaskan pentingnya RUPM 2025–2045 untuk memprioritaskan peningkatan kapasitas dan keandalan jaringan listrik tegangan menengah dan tinggi guna mendukung kebutuhan sektor Industri dan Bisnis sebagai pengguna daya besar, sekaligus menjamin pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelompok Rumah Tangga dan Sosial.

Tabel 2.75. Produksi dan distribusi air bersih per bulan, 2024

Bulan	Produksi (m ³)	Air Disalurkan (m ³)
Januari	2.804.231	1.756.561
Februari	2.713.867	1.715.930
Maret	2.507.019	1.597.165
April	2.752.072	1.754.125
Mei	2.761.080	1.760.206
Juni	2.866.197	1.766.043
Juli	2.808.308	1.747.376
Agustus	2.879.820	1.780.712
September	2.992.319	1.871.158
Oktober	2.870.388	1.788.122
November	2.989.087	1.752.399
Desember	2.931.501	1.787.542
Total	33.880.889	21.134.795

Sumber: PDAM Tirta Sako Batuah Kota Jambi, 2025

Berdasarkan Tabel 2.75 menunjukkan bahwa data produksi dan distribusi air bersih PDAM Kota Jambi selama tahun 2024 menunjukkan tantangan efisiensi operasional yang serius, di mana dari total produksi tahunan sebesar 33.880.889 m³, hanya 21.134.795 m³ yang berhasil disalurkan kepada pelanggan. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata Non-Revenue Water (NRW) atau kehilangan air (sebagai selisih antara produksi dan air disalurkan) mencapai sekitar 37,6%, jauh di atas batas toleransi efisiensi utilitas yang ideal,

yang berarti satu dari setiap tiga meter kubik air yang diproduksi terbuang percuma akibat kebocoran teknis maupun non-teknis.

Secara musiman, meskipun produksi cenderung stabil sepanjang tahun dan bahkan mencapai puncaknya pada September dan November, volume air yang disalurkan menunjukkan fluktuasi yang tidak mengikuti peningkatan produksi, menegaskan perlunya investasi besar-besaran untuk revitalisasi jaringan pipa lama, implementasi sistem monitoring kebocoran berbasis sensor, dan optimalisasi manajemen distribusi untuk meminimalkan kerugian finansial dan memastikan kapasitas air baku yang ada mencukupi pertumbuhan kawasan investasi seperti Kota Baru dan Alam Barajo .

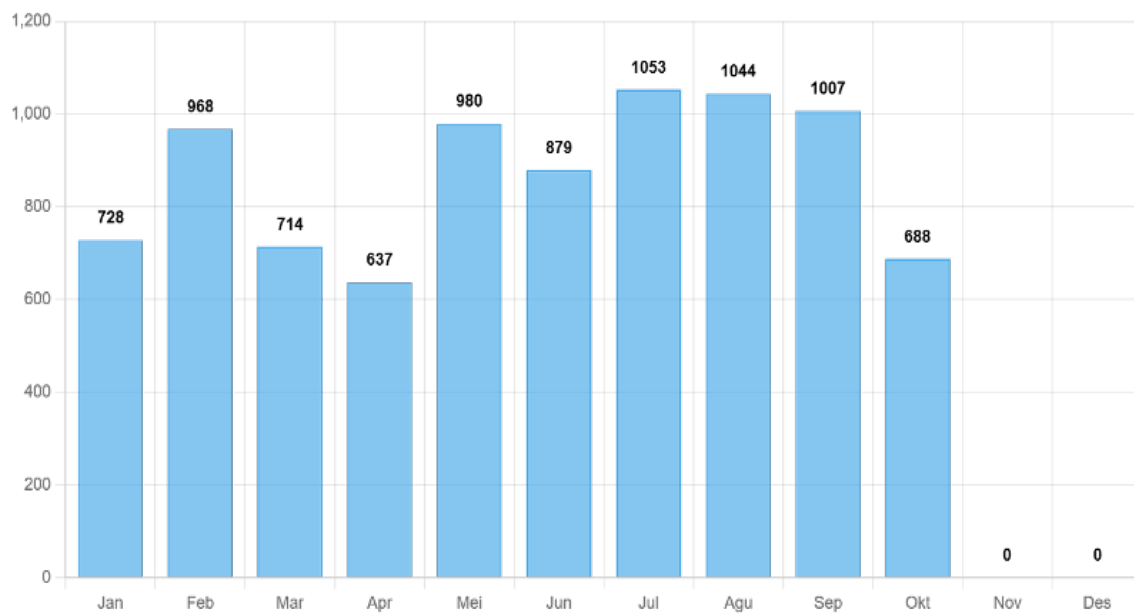
2.7. Potensi Penanaman Modal Kota Jambi

Potensi pengembangan penanaman modal Kota Jambi pada periode RUPM 2025–2045 akan difokuskan pada penguatan koridor jasa dan perdagangan yang telah terbukti dominan (didukung oleh 1.215 restoran) serta revitalisasi sektor pariwisata perkotaan yang didukung oleh 82 hotel. Strategi ini akan diintegrasikan dengan pemanfaatan konektivitas infrastruktur baru (terutama *ring road* dan akses tol) untuk secara agresif menarik investasi di sektor logistik, distribusi regional, dan industri bernilai tambah yang tidak berpolusi. Selain itu, diperlukan akselerasi modernisasi pasar rakyat dan 1.111 unit UMKM melalui investasi digitalisasi, standarisasi mutu, dan kemudahan akses pembiayaan mikro. Pengembangan akomodasi akan diarahkan pada pembangunan fasilitas MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) Bintang 3 dan 4 di kawasan strategis seperti Telanaipura, Jambi Selatan, dan Pasar Jambi untuk mengatasi kesenjangan kualitas. Seluruh upaya ini harus didorong oleh hilirisasi ekonomi kreatif, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas tinggi, dan dijamin oleh perbaikan iklim usaha yang berkelanjutan, kepastian tata ruang yang selaras, serta optimalisasi layanan perizinan terpadu yang cepat dan transparan.

2.7.1. NIB (Nomor Induk Berusaha)

Pemanfaatan optimal Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) merupakan cerminan keberhasilan Kota Jambi dalam menciptakan iklim investasi yang responsif dan minim birokrasi, yang menjadi fondasi utama bagi implementasi RUPM 2025–2045. Peningkatan jumlah penerbitan NIB tidak hanya menjadi indikator kunci kemudahan berusaha yang mampu mempercepat formalisasi bagi ribuan UMKM di sektor kuliner dan ritel, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pengawasan dan

akuntabilitas yang vital. Dalam kerangka RUPM, NIB akan dimanfaatkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk memetakan secara digital sebaran risiko investasi di kawasan *growth pole*, memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha, dari pembangunan hotel hingga operasional kios, telah sesuai dengan kepastian tata ruang dan berkontribusi secara legal terhadap target pertumbuhan ekonomi berkelanjutan Kota Jambi.



Gambar 2. 17. Nomor Induk Berusaha (NIB) Di Kota Jambi Tahun 2025

Sumber: <https://mpp.jambikota.go.id/web/dashboard>

Berdasarkan Gambar 2.17 menunjukkan dinamika bulanan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Kota Jambi sepanjang 2025 yang menunjukkan tren musiman dengan puncak pada triwulan III. Setelah mengalami penurunan dari Februari (968) ke April (637), jumlah NIB meningkat tajam pada Mei (980) dan kembali melemah pada Juni (879), kemudian mencapai puncak tahunan pada Juli (1.053) dan tetap tinggi pada Agustus (1.044) serta September (1.007), sebelum menurun signifikan pada Oktober (688); data November–Desember belum tersedia. Pola ini mengindikasikan bahwa momentum formalisasi usaha dipengaruhi oleh faktor siklus, antara lain kalender kebijakan (program pendampingan/insentif), kesiapan pelaku usaha pasca-lebaran, serta ekspektasi permintaan menjelang semester kedua. Implikasi kebijakan bagi RUPM 2025–2045 meliputi: (i) penguatan layanan perizinan dan pendampingan usaha pada periode pra-puncak (Mei–Juni) untuk memaksimalkan lonjakan NIB; (ii) intervensi stabilisasi pada bulan-bulan lemah (Maret–April, Oktober) melalui program promosi, kemudahan biaya, atau klinik OSS; dan

(iii) penetapan indikator operasional misalnya target NIB triwulanan, waktu layanan perizinan, dan tingkat keberlanjutan UMKM guna memastikan peningkatan formalisasi usaha yang merata dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi kota.

Tabel 2.76. Tabel Induk Berusaha (NIB) Berdasarkan Kecamatan Di Kota Jambi (Bulan Juli -Oktober Tahun 2025)

Kecamatan	Juli	Agustus	September	Oktober
Alam Barajo	192	196	196	109
Danau Sipin	82	89	61	46
Danau Teluk	30	12	8	16
Jambi Selatan	88	98	94	86
Jambi Timur	107	101	85	50
Jelutung	89	97	99	61
Kotabaru	191	139	182	100
Paal Merah	143	158	170	141
Pasar Jambi	13	16	13	2
Pelayangan	19	49	13	11
Telanaipura	92	89	86	66
Total	1046	1044	1007	688

Sumber: <https://mpp.jambikota.go.id/web/dashboard>

Berdasarkan Tabel 2.76 Distribusi penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Kota Jambi selama Juli–Oktober 2025 menunjukkan konsentrasi yang kuat pada kecamatan di koridor barat–selatan. Pada Agustus dan September 2025, Kecamatan Alam Barajo mencatat jumlah pendaftaran tertinggi, masing-masing 196 NIB, disusul Kotabaru dengan 182 NIB pada September dan Paal Merah dengan 170 NIB pada bulan yang sama. Pada Oktober, Paal Merah tetap menjadi lokasi dengan pendaftaran usaha baru terbesar, yaitu 141 NIB, diikuti Alam Barajo (109 NIB) dan Kotabaru (100 NIB).

Kecamatan dengan aktivitas menengah seperti Jambi Timur (50–101 NIB), Jambi Selatan (86–98 NIB), Jelutung (61–97 NIB), Telanaipura (66–89 NIB), dan Danau Sipin (46–89 NIB) menunjukkan dinamika usaha yang stabil namun tidak sebesar wilayah barat–tengah. Sebaliknya, kecamatan dengan jumlah NIB terendah adalah Pelayangan (11–49

NIB), Danau Teluk (8–16 NIB), dan Pasar Jambi yang hanya mencatat 2 NIB pada Oktober 2025.

Pola ini menegaskan adanya ketimpangan spasial dalam tumbuhnya usaha baru di Kota Jambi. Oleh karena itu, dalam perencanaan RUPM 2025–2045, diperlukan strategi yang membedakan kecamatan dengan pertumbuhan tinggi dan rendah. Kecamatan ber-NIB tinggi perlu dijadikan zona prioritas promosi investasi, sementara kecamatan ber-NIB rendah memerlukan intervensi khusus berupa penyediaan ruang usaha terjangkau, pendampingan perizinan OSS, dukungan pembiayaan mikro, peningkatan konektivitas last-mile, serta revitalisasi pasar rakyat untuk mendorong pemerataan aktivitas ekonomi secara berkelanjutan.

Tabel 2.77. NIB Berdasarkan Status Penanaman Modal di Kota Jambi Tahun 2025

Bulan	PMDN	PMA
Juli	1052	1
Agustus	1044	0
September	1007	0
Oktober	687	1

Sumber: <https://mpp.jambikota.go.id/web/dashboard>

Berdasarkan Tabel 2.77 menunjukkan Distribusi Nomor Induk Berusaha (NIB) berdasarkan status penanaman modal pada Juli hingga Oktober 2025 menunjukkan pola yang sangat konsisten, yaitu dominasi mutlak Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Pada Juli tercatat 1.052 PMDN dan 1 PMA, diikuti Agustus dengan 1.044 PMDN tanpa PMA, kemudian September dengan 1.007 PMDN tanpa PMA, dan Oktober dengan 687 PMDN serta hanya 1 PMA. Komposisi yang timpang ini mengindikasikan bahwa dinamika formalisasi dan pertumbuhan usaha di Kota Jambi sepenuhnya digerakkan oleh pelaku domestik umumnya skala mikro, kecil, dan menengah sementara minat Penanaman Modal Asing masih sangat terbatas. Implikasi kebijakan bagi RUPM 2025–2045 meliputi dua arah besar: pertama, memperkuat ekosistem PMDN melalui akses pembiayaan, pendampingan manajerial dan digital, kemudahan perizinan OSS, pengembangan pasar, serta peningkatan rantai pasok lokal; kedua, meningkatkan daya tarik PMA secara selektif bagi sektor bernilai tambah tinggi melalui kepastian tata ruang dan lahan, peningkatan infrastruktur layanan, insentif berbasis kinerja, dan penyusunan bank proyek siap tawar. Selain itu, perhatian khusus perlu diarahkan pada pengembangan industri akomodasi yang masih minim hotel

berbintang 3–4, peningkatan infrastruktur utilitas di kawasan padat seperti Jelutung dan Pasar Jambi, serta penyediaan infrastruktur dasar di Danau Teluk dan Pelayangan untuk membuka peluang investasi baru. Dengan strategi tersebut, transformasi struktur investasi diharapkan lebih seimbang, produktif, dan mampu memperkuat daya saing ekonomi Kota Jambi hingga 2045.

Tabel 2.78. Tabel NIB Berdasarkan Kategori Pelaku usaha

Bulan	Kategori Penanaman Modal	
	Perorangan	Badan Usaha
Juli	925	128
Agustus	924	120
September	887	120
Oktober	610	78

Sumber: <https://mpp.jambikota.go.id/web/dashboard>

Berdasarkan Tabel 2.78 menunjukkan Komposisi Nomor Induk Berusaha (NIB) Kota Jambi sepanjang Juli hingga Oktober 2025 menunjukkan pola yang konsisten, di mana pelaku usaha perseorangan mendominasi secara signifikan dibandingkan badan usaha. Pada Juli tercatat 925 NIB perseorangan dan 128 badan usaha, disusul Agustus dengan 924 perseorangan dan 120 badan usaha. Dominasi ini tetap terlihat pada September dengan 887 perseorangan dan 120 badan usaha, serta pada Oktober dengan 610 perseorangan dan 78 badan usaha. Pola tersebut menegaskan bahwa dinamika formalisasi usaha di Kota Jambi masih bertumpu pada pelaku mikro–kecil non-badan hukum, sehingga tingkat kelembagaan badan usaha tetap terbatas. Bagi RUPM 2025–2045, kondisi ini menuntut strategi penguatan ekosistem UMKM melalui fasilitasi legalitas, akses pembiayaan, pelatihan manajerial, digitalisasi, dan insentif bertahap untuk mendorong transformasi menuju badan usaha (CV/PT/Koperasi). Penguatan layanan OSS, konsolidasi infrastruktur utilitas di kawasan padat, serta peningkatan kualitas sektor akomodasi menjadi prioritas penting agar pertumbuhan investasi lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdampak langsung pada peningkatan daya saing ekonomi Kota Jambi.

2.7.2. Sektor Usaha

Sektor usaha dalam RUPM Kota Jambi 2025–2045 diposisikan sebagai pengungkit utama transformasi ekonomi kota melalui penguatan klaster jasa–perdagangan, pariwisata perkotaan, logistik dan industri bernilai tambah dekat konsumen, ekonomi kreatif, serta



layanan kesehatan dan pendidikan; arah tersebut disinergikan dengan kepastian tata ruang, peningkatan konektivitas dan kualitas infrastruktur, serta kemudahan perizinan terpadu agar arus investasi lebih merata lintas kecamatan, menciptakan lapangan kerja berkualitas, dan memperkuat ketahanan harga serta pendapatan daerah.

Tabel 2.79. Proyek Persektor Di Kota Jambi (Bulan Juli- Oktober Tahun 2025)

Kategori Lapangan Usaha	Jumlah Usaha			
	Juli	Agustus	September	Oktober
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,52	2,79	2,79	3,48
Pertambangan dan Penggalian	1,29	0,62	0,62	1,02
Industri Pengolahan	21,4	21,1	21,1	23,17
Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	0,08	0,44	0,44	0
Pengelolaan dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi	0,12	0,18	0,18	0,34
Konstruksi	10,62	6,7	6,7	4,58
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	29,39	34,61	34,61	32,27
Pengangkutan dan Pergudangan	1,57	1,68	1,68	0,93
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	17,12	16,67	16,67	18,77
Informasi dan Komunikasi	1,94	1,64	1,64	1,53
Aktivitas Keuangan dan Asuransi	0,52	0,4	0,4	1,19
Real Estat	0,85	1,42	1,42	1,61
Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	1,37	1,68	1,68	1,78
Jasa Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	5,01	4,48	4,48	5,01
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,04	0	0	0
Pendidikan	1,53	1,51	1,51	0,93
Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	0,48	0,49	0,49	0,08
Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	0,28	0,35	0,35	0,34
Aktivitas Jasa Lainnya	1,86	3,24	3,24	2,97
Aktivitas Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	0	0	0	0
Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	0	0	0	0
Total	100	100	100	100

Sumber: <https://mpp.jambikota.go.id/>

Berdasarkan Tabel 2.79 menunjukkan Struktur proyek per sektor di Kota Jambi sepanjang Juli hingga Oktober 2025 menunjukkan pola yang stabil, dengan dominasi kuat pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Pada seluruh bulan, sektor perdagangan menjadi yang terbesar, berkisar 29,39%–34,61%, yang mencerminkan karakter ekonomi Kota Jambi sebagai pusat aktivitas ritel, distribusi barang, dan jasa konsumsi. Sektor ini terus menunjukkan permintaan tinggi dan menjadi motor utama pertumbuhan UMKM.

Sektor Industri Pengolahan merupakan kontributor terbesar kedua, stabil pada kisaran 21%–23%, menunjukkan adanya basis manufaktur ringan yang konsisten, terutama pada pengolahan makanan, produk rumah tangga, dan industri berbasis jasa distribusi. Sementara sektor Akomodasi dan Makan Minum berada di posisi ketiga terbesar (16,67%–18,77%), mengindikasikan berkembangnya sektor pariwisata, gaya hidup, dan ekonomi konsumsi perkotaan.

Sebaliknya, sektor-sektor berbasis sumber daya seperti Pertanian, Pertambangan, dan Pengangkutan–Pergudangan hanya memberikan kontribusi kecil (masing-masing umumnya <5%), mencerminkan struktur ekonomi yang semakin urban dan berbasis jasa. Penurunan kontribusi sektor konstruksi dari 10,62% pada Juli menjadi 4,58% pada Oktober mengindikasikan adanya perlambatan proyek pembangunan menjelang akhir tahun, yang lazim terjadi karena faktor musiman dan penyesuaian siklus anggaran.

Beberapa sektor strategis seperti Kesehatan, Pendidikan, dan Informasi & Komunikasi tetap berada pada porsi rendah (<2%), menunjukkan bahwa kegiatan investasi pada layanan sosial dan ekonomi berbasis pengetahuan belum berkembang secara optimal. Di sisi lain, sektor Real Estat menunjukkan tren naik dari 0,85% menjadi 1,61%, yang dapat diartikan sebagai awal peningkatan minat pada properti komersial dan residensial.

Secara keseluruhan, struktur proyek Kota Jambi pada periode ini menggambarkan ekonomi yang didominasi sektor ritel, konsumsi, dan jasa komersial, sementara sektor industri menengah, layanan sosial, dan sektor berbasis teknologi masih terbatas. Temuan ini memberikan dasar bagi RUPM 2025–2045 untuk memperkuat hilirisasi industri pengolahan, memperluas investasi sektor jasa modern, meningkatkan daya tarik investasi konstruksi dan real estat, serta mempercepat pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan agar struktur usaha lebih seimbang, produktif, dan berkelanjutan, sekaligus mampu menciptakan peluang ekonomi baru yang lebih inklusif dan bernilai tambah tinggi.

Tabel 2.80. Proyek Perkategori Usaha Berdasarkan Kecamatan di Kota Jambi (Bulan Juli Oktober Tahun 2025)

Kecamatan	Juli		Agustus		September		Oktober	
	UMK	Non UMK	UMK	Non UMK	UMK	Non UMK	UMK	Non UMK
Alam Barajo	365	1	419	10	424	12	231	1
Danau Sipin	274	10	154	5	201	3	83	2
Danau Teluk	46	0	18	0	19	0	14	0
Jambi Selatan	218	3	192	5	228	1	126	1
Jambi Timur	211	3	176	1	172	1	72	0
Jelutung	261	10	223	3	227	35	108	4
Kotabaru	407	8	364	8	352	16	178	9
Paal Merah	304	7	315	5	351	8	203	4
Pasar Jambi	56	2	75	2	61	3	12	0
Pelayangan	24	0	72	0	16	0	11	0
Telanaipura	310	13	255	2	236	7	143	4
Total	2476	57	2263	41	2287	86	1181	25

Sumber: <https://mpp.jambikota.go.id/>

Berdasarkan Tabel 2.80 menunjukkan Proyek Perkategori Usaha Berdasarkan Kecamatan di Kota Jambi periode Juli–Oktober 2025 menunjukkan bahwa jumlah proyek UMK jauh lebih dominan dibanding Non-UMK di seluruh kecamatan.

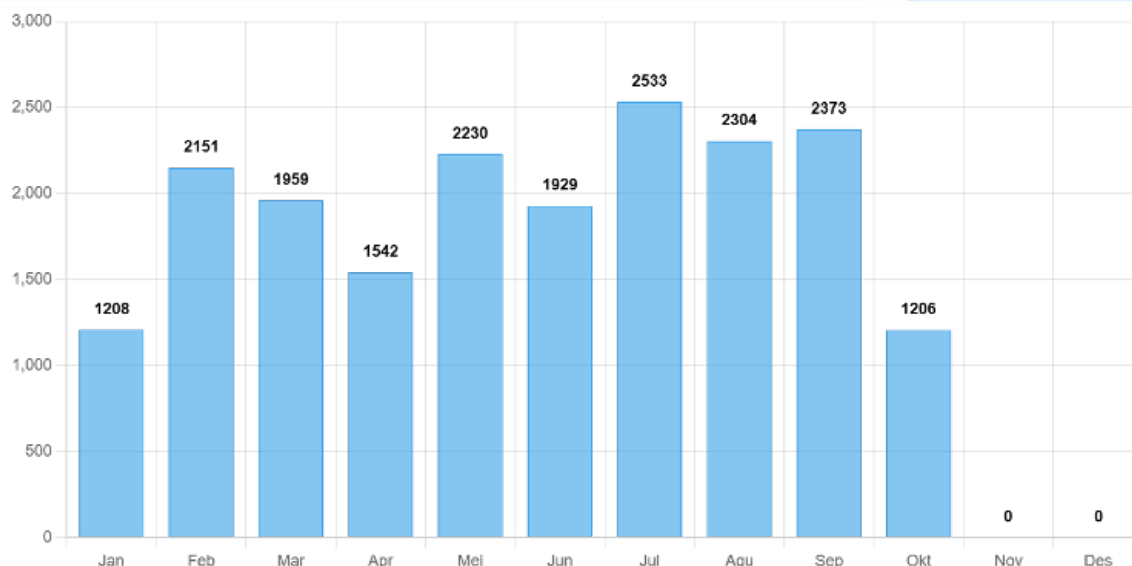
Data proyek perizinan usaha di Kota Jambi pada Juli–Oktober 2025 menunjukkan dominasi sangat kuat UMK, yang konsisten mencapai 95–98% dari total proyek setiap bulan. Jumlah UMK tercatat 2.476 proyek pada Juli, 2.263 pada Agustus, 2.287 pada September, dan menurun menjadi 1.181 pada Oktober. Sementara itu, Non-UMK hanya berada pada kisaran 25–86 proyek per bulan, dengan sedikit kenaikan pada September sebelum kembali turun.

Pola ini menegaskan bahwa aktivitas ekonomi kota masih didorong oleh usaha mikro dan kecil. Karena itu, RUPM 2025–2045 perlu memprioritaskan penguatan ekosistem UMK melalui pembiayaan, digitalisasi, standardisasi, ruang usaha, dan perizinan yang lebih mudah. Di sisi lain, peningkatan proyek Non-UMK perlu difasilitasi melalui kepastian tata ruang, insentif investasi, dan promosi proyek siap tawar untuk menyeimbangkan struktur usaha dan meningkatkan produktivitas kota.

Secara spasial, kecamatan dengan aktivitas tertinggi adalah Alam Barajo (419 proyek UMK pada Agustus dan 424 pada September), diikuti Kotabaru (407 UMK pada Juli) dan Paal Merah (351 UMK pada September). Sebaliknya, kecamatan seperti Danau Teluk dan Pelayangan terus mencatat proyek terendah, masing-masing hanya 18–19 proyek UMK pada Agustus–September dan bahkan tanpa satu pun proyek Non-UMK sepanjang periode tersebut. Beberapa kecamatan mulai menunjukkan pertumbuhan usaha Non-UMK, terutama Jelutung yang mencapai 35 proyek Non-UMK pada September dan Kotabaru dengan 16 proyek Non-UMK pada bulan yang sama. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan bahwa struktur investasi Kota Jambi masih sangat bertumpu pada UMK, sementara kontribusi Non-UMK masih kecil namun mulai meningkat di beberapa wilayah. Temuan ini penting untuk perencanaan RUPM 2025–2045, terutama dalam memperkuat ekosistem UMK dan mendorong tumbuhnya usaha berskala menengah dan besar secara lebih merata di seluruh kecamatan.

2.7.3. Pengajuan Proyek Berdasarkan Tingkat Resiko

Strategi pengajuan dan penanganan proyek investasi dalam RUPM Kota Jambi 2025–2045 secara fundamental didasarkan pada pendekatan perizinan berbasis risiko, yang merupakan pilar untuk menjamin kepastian berusaha dan kualitas pembangunan. Proyek dengan tingkat risiko rendah, seperti formalisasi 1.215 unit restoran mikro atau kios, akan didorong melalui perizinan mandiri NIB yang cepat dan otomatis, sehingga mendorong pertumbuhan UMKM yang signifikan. Sebaliknya, proyek berisiko tinggi, seperti pembangunan fasilitas MICE berskala besar atau kawasan industri yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yang kompleks (limbah, tata ruang), akan melalui proses validasi teknis dan pertimbangan dampak spasial yang ketat, memastikan bahwa pertumbuhan investasi selaras dengan rencana konservasi lingkungan dan pengendalian tata ruang kota hingga tahun 2045.



Gambar 2. 18. Proyek Berdasarkan Tingkat Resiko di Kota Jambi Tahun 2025

Sumber: <https://mpp.jambikota.go.id/>

Berdasarkan Gambar 2.46 memperlihatkan total proyek menurut tingkat risiko di Kota Jambi sepanjang 2025, dengan pola musiman: peningkatan dari Januari (1.208) menuju puncak pada Juli (2.533), tetap tinggi pada Agustus (2.304) September (2.373), lalu turun tajam pada Oktober (1.206), sementara November–Desember belum tersedia. Secara agregat, porsi proyek risiko rendah mendominasi setiap bulan, diikuti menengah rendah, menengah tinggi, dan tertinggi, mencerminkan preferensi investor pada portofolio konservatif yang sejalan dengan dominasi UMK dan sektor ritel–layanan. Implikasi untuk RUPM 2025–2045 adalah: penjadwalan program pendampingan dan percepatan perizinan pada pra-puncak (Mei–Juni) untuk memaksimalkan serapan proyek; penguatan manajemen risiko dan skema pembiayaan inovatif (KPBU/blended finance) agar sebagian proyek menengah dapat naik kelas; serta intervensi stabilisasi pada triwulan IV melalui promosi, insentif terukur, dan penyederhanaan layanan guna menjaga kontinuitas investasi tanpa meningkatkan eksposur risiko yang tidak terkelola.

Diagram tren bulanan total proyek yang terdaftar di Kota Jambi sepanjang tahun 2025 menunjukkan adanya fluktuasi yang signifikan, namun dengan puncak aktivitas tertinggi terjadi pada pertengahan tahun. Jumlah proyek mengalami peningkatan dari sekitar 1.200 unit di bulan Januari, mencapai puncak tertinggi di bulan Juli dengan sekitar 2.500 proyek, sebelum sedikit menurun pada bulan Agustus dan September (berkisar antara 2.300 hingga 2.400 proyek). Tren ini kemudian menunjukkan penurunan tajam di bulan Oktober, kembali ke tingkat awal tahun dengan sekitar 1.200 proyek, mengindikasikan bahwa tingkat

pendaftaran proyek di Kota Jambi bersifat musiman atau dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu di akhir triwulan ketiga dan awal triwulan keempat.

Tabel 2.81. Proyek Berdasarkan Resiko di Kota Jambi (Bulan Juli-Oktober Tahun 2025)

Kategori	Juli	Agustus	September	Oktober
Tinggi	168	129	131	48
Menengah Tinggi	407	274	317	109
Menengah Rendah	286	240	247	301
Rendah	1672	1661	1678	748
Total	2533	2304	2373	1206

Sumber: <https://mpp.jambikota.go.id/>

Berdasarkan Tabel 2.81 menunjukkan Data proyek berdasarkan tingkat risiko di Kota Jambi selama Juli–Oktober 2025 menunjukkan bahwa mayoritas kegiatan usaha berada pada kategori risiko rendah. Pada Juli tercatat 1.672 proyek risiko rendah, dan jumlah tersebut tetap stabil pada Agustus (1.661) serta September (1.678), sebelum menurun pada Oktober menjadi 748 proyek. Sementara itu, kategori risiko menengah rendah mengalami fluktuasi, mulai dari 286 proyek pada Juli menjadi 240 pada Agustus, 247 pada September, dan meningkat menjadi 301 proyek pada Oktober.

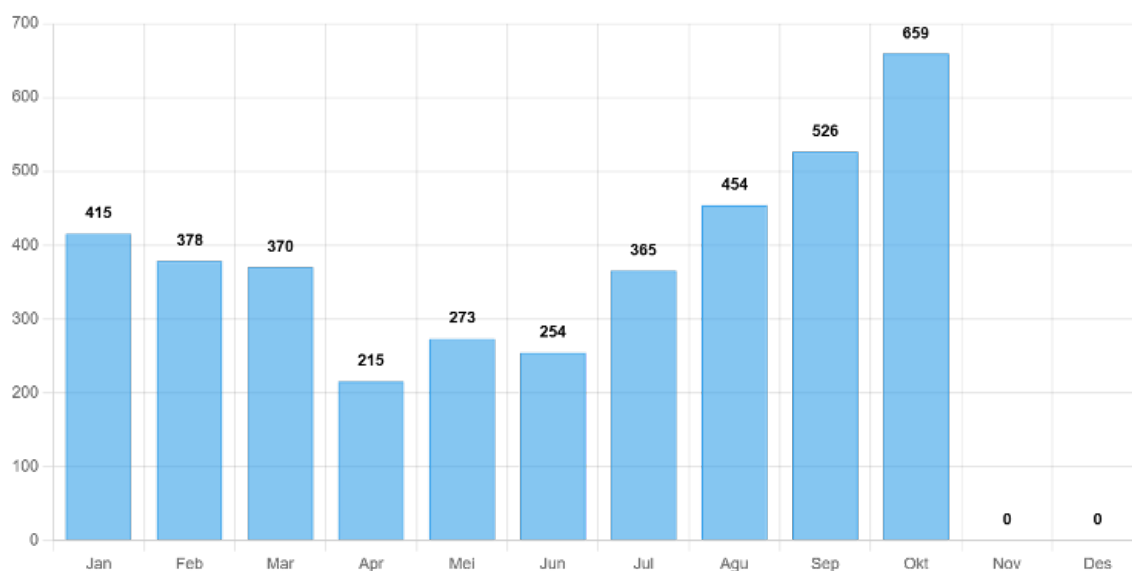
Kategori risiko menengah tinggi juga menunjukkan variasi, yaitu 407 proyek pada Juli, turun menjadi 274 pada Agustus, kemudian naik kembali pada September (317) sebelum turun signifikan menjadi 109 proyek pada Oktober. Adapun kategori risiko tinggi tercatat jauh lebih rendah dengan kecenderungan menurun, dari 168 proyek pada Juli menjadi 48 proyek pada Oktober.

Secara keseluruhan, total proyek mengalami penurunan dari 2.533 proyek pada Juli menjadi 1.206 proyek pada Oktober. Pola ini mengindikasikan bahwa struktur kegiatan usaha di Kota Jambi sangat didominasi oleh usaha berisiko rendah—yang umumnya merupakan sektor UMKM sementara proyek berisiko tinggi dan menengah tinggi relatif terbatas. Tren penurunan di semua kategori pada Oktober kemungkinan dipengaruhi oleh faktor musiman, perlambatan aktivitas usaha, atau proses penyesuaian administrasi perizinan. Temuan ini penting sebagai dasar perumusan kebijakan mitigasi risiko dan strategi peningkatan kualitas investasi dalam RUPM 2025–2045.

2.7.4. Penerbitan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha

Penerbitan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha meliputi pemenuhan NIB, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, serta Sertifikat Standar sesuai tingkat risiko merupakan instrumen kunci untuk mewujudkan iklim investasi yang pasti, cepat, dan berintegritas, sekaligus menjadi prasyarat operasionalisasi proyek prioritas dalam RUPM Kota Jambi 2025–2045 agar transformasi ekonomi perkotaan berlangsung inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Aktivitas pendaftaran proyek di Kota Jambi sepanjang tahun 2025, khususnya pada periode Juli hingga Oktober, secara dominan didorong oleh sektor UMK (Usaha Mikro dan Kecil), yang secara konsisten menyumbang lebih dari 96% dari total proyek bulanan, meskipun total proyek mengalami fluktuasi tajam dengan puncak pada bulan Juli dan penurunan signifikan di bulan Oktober. Dominasi UMK ini sangat selaras dengan temuan bahwa mayoritas perizinan proyek (sekitar 70%-80%) diklasifikasikan memiliki tingkat risiko Rendah, mengindikasikan bahwa ekosistem usaha di Kota Jambi didominasi oleh kegiatan usaha berskala kecil yang prosedur perizinannya telah disederhanakan oleh pemerintah untuk mempermudah investasi mikro. Pola ini menegaskan bahwa untuk mencapai visi pembangunan jangka panjang dalam RUPM Kota Jambi 2025-2045, strategi kebijakan harus difokuskan pada penguatan, perlindungan, dan peningkatan kapasitas Usaha Mikro dan Kecil sambil terus menyederhanakan persyaratan dasar perizinan.



Gambar 2. 19. Penerbitan Persyaratan Dasar di Kota Jambi (Tahun 2025)

Sumber: <https://mpp.jambikota.go.id/>

Berdasarkan Gambar 2.19 memperlihatkan tren penerbitan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha di Kota Jambi sepanjang 2025, yang menurun pada awal tahun (Januari 415; Februari 378; Maret 370; April 215) lalu berbalik meningkat sejak Mei (273) hingga mencapai puncak pada Oktober (659), sementara data November–Desember belum tersedia. Pola musiman ini selaras dengan dinamika perizinan sektoral dan lonjakan proyek pada triwulan III–IV, mengindikasikan efektivitas layanan OSS/MPP dan kebutuhan penyesuaian kapasitas layanan pada periode puncak. Implikasi bagi RUPM 2025–2045 meliputi: penjadwalan intensifikasi pendampingan perizinan sebelum periode puncak, penetapan SLA dan penambahan resources layanan pada Agustus–Oktober, serta integrasi data tata ruang–lingkungan–bangunan untuk menjaga kecepatan, kepastian, dan akuntabilitas penerbitan izin.

Aktivitas perizinan usaha di Kota Jambi menunjukkan dominasi kuat UMK yang mencakup lebih dari 96% proyek, dengan mayoritas berada pada kategori risiko rendah. Meskipun jumlah pendaftaran proyek berfluktuasi, pola penerbitan persyaratan dasar memperlihatkan pergeseran perhatian pemerintah menuju penguatan kepatuhan, terutama melalui peningkatan signifikan penerbitan SPPL pada bulan Oktober. Kondisi ini menegaskan ketergantungan ekonomi daerah pada sektor mikro, sementara proyek investasi berskala menengah dan besar masih sangat terbatas. Oleh karena itu, tantangan utama bagi pencapaian visi RUPM Kota Jambi 2025–2045 adalah memperluas portofolio investasi melalui upaya yang lebih proaktif dalam menarik dan memfasilitasi proyek strategis di luar sektor UMK.

Tabel 2.82. Penerbitan Persyaratan Dasar di Kota Jambi (Bulan Juli–Oktober Tahun 2025)

Jenis Perizinan / Dokumen	Juli	Agustus	September	Oktober
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	6	2	5	6
PBG	42	108	70	60
Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH)	57	91	160	19
Sertifikat Standar dan Perizinan	226	189	203	171
Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL)	0	0	0	1
Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)	26	64	72	380
Umku	8	0	16	3
Total	365	454	526	640

Sumber: <https://mpp.jambikota.go.id/>

Berdasarkan Tabel 2.82 menunjukkan data penerbitan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha di Kota Jambi pada Juli–Oktober 2025 menunjukkan dominasi konsisten pada dokumen untuk kegiatan berisiko rendah–menengah, terutama Sertifikat Standar, SPPL, dan PKPLH. Pada Juli dan Agustus, Sertifikat Standar merupakan jenis penerbitan terbanyak, masing-masing sekitar 226 dan 189 penerbitan, mencerminkan maraknya pendaftaran usaha baru terutama oleh UMK. Memasuki September, jumlah Sertifikat Standar kembali meningkat, sejalan dengan kenaikan permohonan PKPLH yang mengindikasikan perbaikan kepatuhan lingkungan.

Pada Oktober terjadi perubahan signifikan, di mana SPPL menjadi dokumen paling dominan (391 penerbitan), menandakan banyaknya kegiatan berisiko rendah yang cukup diproses melalui pernyataan pengelolaan lingkungan sederhana. Pada saat yang sama, dokumen berkompleksitas lebih tinggi seperti KKPR, PBG, dan terutama SKKL—tetap sangat terbatas pada seluruh periode, selaras dengan rendahnya jumlah proyek Non-UMK dan minimnya investasi berskala besar.

Secara keseluruhan, pola ini menggambarkan bahwa ekosistem perizinan Kota Jambi masih didorong oleh usaha kecil dengan persyaratan sederhana, sementara kebutuhan perizinan teknis dan tata ruang cenderung selektif. Bagi RUPM 2025–2045, hasil ini menegaskan pentingnya optimalisasi layanan Sertifikat Standar/OSS, peningkatan kualitas verifikasi SPPL–PKPLH, serta percepatan integrasi KKPR dan PBG melalui SIMBG untuk memastikan percepatan investasi tetap selaras dengan kepastian tata ruang dan perlindungan lingkungan.

2.7.5. TOP 5 KBLI

TOP 5 KBLI adalah lima Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dengan frekuensi kegiatan/izin terbanyak dalam periode analisis, sehingga merepresentasikan kelompok aktivitas ekonomi yang paling dominan dan prospektif di suatu daerah. Dalam konteks penyusunan RUPM Kota Jambi 2025–2045, identifikasi TOP 5 KBLI berfungsi untuk: (i) memetakan basis dan tren kekuatan ekonomi aktual yang tercermin dari arus NIB dan perizinan, (ii) menetapkan klaster prioritas investasi beserta kebutuhan infrastruktur, lahan, SDM, dan ekosistem pendukungnya, serta (iii) merancang insentif–regulasi dan layanan perizinan berbasis risiko yang spesifik per KBLI agar akselerasi penanaman modal lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

TOP 5 KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) berfungsi sebagai cerminan faktual dari basis ekonomi riil dan minat investasi eksisting di Kota Jambi, yang menjadi landasan krusial bagi penyusunan RUPM 2025-2045. Dengan mengidentifikasi lima sektor usaha yang paling dominan — yang kemungkinan besar didominasi oleh KBLI Usaha Mikro dan Kecil (UMK) mengingat data 96% proyek adalah UMK — RUPM dapat secara presisi merumuskan dua strategi utama: pertama, penguatan dan perlindungan pada KBLI yang sudah kuat (misalnya, sektor perdagangan atau makanan/minuman) dengan memberikan kemudahan perizinan lanjutan (seperti Persetujuan Bangunan Gedung/PBG) dan pendampingan; dan kedua, strategi transformasi untuk menarik investasi Non-UMK pada KBLI baru yang sejalan dengan visi pembangunan jangka panjang Kota Jambi, sekaligus memastikan bahwa seluruh kemudahan perizinan yang diberikan (termasuk KKPR dan SKKL) diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan sektor prioritas yang berdampak besar.

Tabel 2.83. TOP 5 KBLI di Kota Jambi (Bulan Juli-Oktober Tahun 2025)

Kode KBLI dan Jenis Usaha	Juli	Agustus	September	Oktober
56103 - Kedai Makanan	195	234	252	98
47112 - Perdagangan Eceran (Barang Yang Utamanya Makanan)	88	115	117	53
10792 - Industri Kue Basah	70	96	114	50
10794 - Industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya	61	60	74	43
10710 - Industri Produk Roti dan Kue	58	54	64	36
Total	472	559	621	280

Sumber: <https://mpp.jambikota.go.id/>

Berdasarkan Tabel 2.83 menunjukkan Data Top 5 KBLI Kota Jambi pada periode Juli hingga Oktober 2025 menunjukkan pola yang konsisten, yaitu dominasi kuat sektor kuliner, perdagangan eceran bahan pangan, dan industri pengolahan makanan skala kecil. KBLI 56103 (Kedai Makanan) secara berulang menjadi kategori dengan jumlah perizinan tertinggi setiap bulan, diikuti oleh perdagangan eceran kebutuhan pangan serta industri roti, kue, dan

keripik. Dominasi ini menggambarkan struktur ekonomi lokal yang bertumpu pada kegiatan konsumsi harian dan usaha mikro yang termasuk dalam kategori risiko rendah.

Pada bulan Juli dan Agustus, peningkatan perizinan terutama terjadi pada usaha kedai makanan dan ritel pangan. Hal ini mengindikasikan tingginya permintaan terhadap layanan penyediaan makanan serta kuatnya preferensi pelaku UMK untuk beroperasi di sektor tersebut. Memasuki September, terjadi pergeseran komposisi ke arah peningkatan aktivitas produksi pangan, khususnya pada industri keripik dan industri roti/kue, yang mencerminkan adanya perkembangan nilai tambah pada kegiatan ekonomi berbasis pangan.

Pada Oktober, total jumlah perizinan mengalami penurunan signifikan, seiring dengan perlambatan musiman. Meskipun demikian, struktur Top 5 KBLI tetap didominasi oleh sektor kuliner dan pangan, sehingga menunjukkan bahwa diversifikasi kegiatan usaha masih terbatas. Stabilitas pola ini selama empat bulan berturut-turut menegaskan bahwa struktur investasi Kota Jambi masih sempit dan sangat bergantung pada sektor berisiko rendah dan bersifat konsumtif.

Temuan-temuan tersebut memiliki relevansi strategis bagi penyusunan RUPM Kota Jambi 2025–2045. Pemerintah daerah perlu memperkuat ekosistem usaha berbasis pangan melalui peningkatan standar kualitas dan higienitas, fasilitasi sertifikasi halal dan keamanan pangan, penyempurnaan rantai pasok, serta dukungan pembiayaan dan teknologi. Di sisi lain, diperlukan strategi yang lebih proaktif untuk mendorong masuknya investasi pada sektor-sektor non-pangan yang bernilai tambah lebih tinggi, seperti industri hilir non-pangan, jasa kreatif, dan teknologi, guna memperluas struktur ekonomi dan meningkatkan daya saing kota secara berkelanjutan.

2.7.6. Penerbitan Izin Praktek Tenaga Kesehatan

Penerbitan Izin Praktik Tenaga Kesehatan (IPTK) merupakan investasi non-fisik penting yang harus menjadi bagian integral RUPM Kota Jambi 2025–2045 karena mencerminkan kualitas dan ketersediaan sumber daya manusia di sektor jasa kesehatan. Tidak seperti investasi industri yang diukur melalui KBLI atau nilai proyek, data IPTK meliputi jumlah dan jenis profesi berizin menjadi indikator kapasitas layanan dasar sekaligus daya tarik wilayah. RUPM perlu memanfaatkan data ini untuk memastikan pemerataan tenaga kesehatan, mendorong masuknya investasi swasta pada rumah sakit dan klinik, serta mendukung visi transformasi sosial berbasis layanan kesehatan berkualitas.

Pada saat yang sama, IPTK berfungsi sebagai mekanisme legal yang menjamin kompetensi, kewenangan, dan akuntabilitas tenaga kesehatan, sekaligus menjadi instrumen pengendali mutu serta pendorong pertumbuhan layanan kesehatan daerah. Melalui validitas STR, kejelasan kewenangan klinis, serta kepatuhan fasilitas pelayanan, sistem perizinan ini memastikan bahwa setiap praktik kesehatan dilakukan sesuai standar, regulasi profesi, dan kebutuhan pelayanan masyarakat Kota Jambi. Dalam konteks perencanaan investasi jangka panjang, keterkaitan IPTK dengan RUPM Kota Jambi 2025–2045 mencakup sedikitnya lima aspek strategis berikut.

1. Penjaminan mutu layanan

Perizinan berbasis kompetensi dan pembaruan berkala meningkatkan standardisasi klinis, keselamatan pasien, dan kredibilitas fasilitas kesehatan. Hal ini berimplikasi pada meningkatnya kepercayaan investor, terutama pada subsektor kesehatan yang menuntut kepastian kualitas tenaga profesional.

2. Pemerataan dan penugasan

Data izin praktik menjadi instrumen penting untuk memetakan distribusi tenaga kesehatan per wilayah. Informasi tersebut memungkinkan pemerintah merancang kebijakan insentif dan penempatan strategis di kecamatan yang mengalami kekurangan layanan, sehingga disparitas akses kesehatan dapat ditekan.

3. Integrasi perizinan–investasi

Sinkronisasi antara perizinan praktik dan perizinan fasilitas melalui mekanisme layanan satu pintu berbasis SLA mempercepat realisasi investasi klinik, rumah sakit, laboratorium, maupun telemedisin. Integrasi ini menciptakan alur yang lebih efisien bagi investor sekaligus memperkuat ekosistem layanan kesehatan modern.

4. Pengembangan kompetensi berkelanjutan

Persyaratan pemeliharaan izin melalui program pengembangan profesi berkelanjutan dapat disejajarkan dengan agenda peningkatan kualitas SDM kesehatan dalam RUPM.

5. Ketahanan sistem kesehatan

Tata kelola perizinan yang transparan dan akuntabel berkontribusi pada sistem kesehatan yang lebih tangguh, baik dalam menghadapi kejadian luar biasa maupun dalam memperluas layanan promotif, preventif, serta rujukan. Konsistensi regulasi dan jaminan mutu ini sekaligus mendorong investasi pada layanan yang mendukung ketahanan kesehatan jangka panjang



Tabel 2.84. Tenaga Kesehatan / Dokter Spesialis di Kota Jambi (Bulan Juli-Oktober Tahun 2025)

Tenaga Kesehatan / Dokter Spesialis	Juli	Agustus	September	Oktober
Dokter Gigi dan Spesialis	10	13	11	10
Dokter Umum	25	24	27	35
dr. Sp. Akupuntur Medik	0	0	0	0
dr. Sp. Anak	1	1	3	0
dr. Sp. Andrologi	0	0	0	0
dr. Sp. Anestesiologi dan Terapi Intensif	2	1	0	2
dr. Sp. Bedah	0	0	1	2
dr. Sp. Bedah Anak	1	0	0	0
dr. Sp. Bedah Plastik dan Rekonstruktif Estetik	0	0	0	0
dr. Sp. Bedah Saraf	0	0	0	0
dr. Sp. Bedah Toraks Kardiovaskular	1	0	0	0
dr. Sp. Dermatologi dan Venereologi	0	2	0	0
dr. Sp. Emergensi Medisin	0	0	0	0
dr. Sp. Farmakologi Klinik	0	0	0	0
dr. Sp. Forensik dan Medikolegal	0	0	1	0
dr. Sp. Gizi Klinik	0	0	0	0
dr. Sp. Jantung dan Pembuluh Darah	2	0	0	2
dr. Sp. Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Medik	1	0	1	1
dr. Sp. Kedokteran Kelautan	0	0	0	0
dr. Sp. Kedokteran Keluarga Layanan Primer	0	0	0	0
dr. Sp. Kedokteran Nuklir dan Teranostik Molekuler	0	0	0	0
dr. Sp. Kedokteran Okupasi	1	0	0	0
dr. Sp. Kedokteran Olahraga	0	0	0	0
dr. Sp. Kedokteran Penerbangan	0	0	0	0
dr. Sp. Mata	3	6	0	0
dr. Sp. Mikrobiologi Klinik	0	0	0	0
dr. Sp. Neurologi	5	1	11	0
dr. Sp. Obstetri dan Ginekologi	2	4	2	1
dr. Sp. Onkologi Radiasi	0	0	0	0
dr. Sp. Orthopaedi dan Traumatologi	1	0	0	0
dr. Sp. Parasitologi Klinik	0	0	0	0
dr. Sp. Patologi Anatomi	1	0	0	0
dr. Sp. Patologi Klinik	0	0	1	0
dr. Sp. Penyakit Dalam	5	3	1	2
dr. Sp. Psikiatri	1	0	2	4
dr. Sp. Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi	1	0	0	0
dr. Sp. Radiologi	0	0	0	0
dr. Sp. THT Bedah Kepala dan Leher	1	0	0	0
dr. Sp. Urologi	3	0	0	0
Nakes (tenaga kesehatan lainnya, perawat, bidan, dsb.)	214	168	153	124
Total	281	223	214	183

Sumber: <https://mpp.jambikota.go.id/>

Berdasarkan Tabel 2.84 menunjukkan bahwa jumlah total tenaga kesehatan di Kota Jambi mengalami penurunan cukup signifikan, dari 281 orang pada Juli menjadi 183 orang pada Oktober 2025. Penurunan ini terutama berasal dari kelompok tenaga kesehatan non-dokter, yang turun dari 214 menjadi 124 orang, sehingga berpotensi mempengaruhi kapasitas pelayanan dasar di fasilitas kesehatan. Sebaliknya, jumlah dokter umum menunjukkan peningkatan, dari 25 orang pada Juli menjadi 35 orang pada Oktober. Hal ini mengindikasikan adanya penguatan layanan kesehatan primer. Sementara itu, jumlah dokter gigi dan spesialis relatif stabil dengan fluktuasi kecil.

Ketersediaan dokter spesialis masih sangat terbatas dan tidak merata antarbidang. Beberapa spesialis hanya muncul pada periode tertentu, seperti Neurologi dan Bedah, sementara banyak bidang lain tidak tersedia sama sekali sepanjang periode pengamatan. Kondisi ini menunjukkan keterbatasan layanan spesialis di Kota Jambi dan perlunya strategi peningkatan pemerataan dan keberlanjutan tenaga spesialis. Secara keseluruhan, struktur tenaga kesehatan Kota Jambi masih bergantung pada tenaga umum, dengan kapasitas dokter spesialis yang belum mencukupi untuk mendukung layanan kesehatan rujukan secara optimal.

2.8. Pola Perkembangan Kota Jambi

Pola perkembangan internal Kota Jambi mengalami transformasi signifikan dari bentuk linear yang sebelumnya mengikuti alur Sungai Batanghari serta koridor-koridor transportasi utama, menjadi pola konsentris–radial yang menempatkan kawasan inti kota sebagai pusat pertumbuhan. Perubahan ini dipengaruhi oleh meningkatnya intensitas aktivitas perdagangan, jasa, pemerintahan, serta berkembangnya fungsi-fungsi perkotaan bernilai tambah seperti pusat komersial, layanan publik, dan fasilitas sosial. Konsentrasi kegiatan ekonomi di pusat kota menciptakan tarikan spasial yang mendorong intensifikasi pemanfaatan ruang, sehingga pertumbuhan bangunan vertikal, permukiman kawasan, dan peningkatan kepadatan menjadi semakin jelas.

Secara eksternal, Kota Jambi menunjukkan perluasan yang cepat ke arah barat, selatan, timur, dan utara. Ekspansi ini didorong oleh ketersediaan lahan yang lebih terjangkau, meningkatnya konektivitas antarwilayah, serta integrasi fungsional yang semakin kuat dengan Kabupaten Muaro Jambi sebagai hinterland utama. Aksesibilitas melalui jaringan jalan baru dan pengembangan koridor pertumbuhan menjadikan wilayah

pinggiran sebagai lokasi strategis bagi permukiman baru, pusat logistik, serta kegiatan perdagangan skala menengah.

Tabel 2.85. Pola Perkembangan Internal dan eksternal Kota Jambi

Aspek	Sub-Aspek / Arah	Pola Perkembangan
Pola perkembangan internal	Bentuk awal kota	Kota Jambi tumbuh sebagai “leburan” bangunan dan penduduk; bentuk awal kota netral lalu berubah mengikuti dinamika budaya.
Pola perkembangan internal	Pengaruh Sungai Batanghari	Penjalaran fisik awal berpola linear mengikuti Sungai Batanghari, terutama di Kota Seberang (BWP II) dan sempadan sungai bagian selatan (sebagian BWP III dan VI).
Pola perkembangan internal	Pola linear–konsentris	Ketika kawasan sempadan sungai jenuh, perkembangan kota memusat ke pusat utama, lalu menjalar linear sepanjang jalur transportasi utama sehingga membentuk pola konsentris terhadap pusat.
Pola perkembangan internal	Pola radial menerus	Kejenuhan koridor utama mendorong penjalaran ke jalan berhirarki lebih rendah; kawasan terbangun saling menyatu dan membentuk pola radial menerus dari pusat kota.
Pola perkembangan eksternal	Hinterland / kawasan luar	Kawasan non-terbangun di pinggiran berfungsi sebagai hinterland, namun mengalami konversi lahan karena kebutuhan permukiman kota dan harga lahan yang relatif murah.
Pola perkembangan eksternal	Pengaruh investasi infrastruktur	Rencana dan pembangunan infrastruktur (jalan, ring road, simpul tol, konektivitas ke kawasan industri) menarik perkembangan kota ke arah luar dan mempercepat perubahan guna lahan di kawasan luar.
Pola perkembangan eksternal	Relasi dengan Kab. Muaro Jambi	Secara administrasi Kota Jambi dikelilingi Kab. Muaro Jambi; perkembangan fisik di perbatasan membuat batas administrasi semakin kabur dan membentuk satu kesatuan kawasan permukiman serta sistem prasarana.
Pola perkembangan eksternal	Kawasan barat	Dipengaruhi pusat pendidikan tinggi dan ruas arteri primer Jambi–Muara Bungo; muncul permukiman skala besar berciri kota mandiri, bertipologi predominantly urban dan fungsinya mirip kota inti.
Pola perkembangan eksternal	Kawasan selatan	Berkembang linear mengikuti jalan arteri primer Jambi–Palembang; terjadi komersialisasi koridor utama, sementara bagian belakang masih berciri perdesaan; akan mengalami akselerasi seiring simpul Tol Sumatera dan JORR II.
Pola perkembangan eksternal	Kawasan timur	Berbatasan dengan permukiman, industri, perdagangan dan jasa kota inti; desa-desa sekitar berkembang menjadi predominantly urban/semi urban dengan pola perdagangan deret di koridor jalan utama dan permukiman padat.
Pola perkembangan eksternal	Kawasan utara	Wilayah utara Sungai Batanghari; rencana jalan lingkaran utara yang menghubungkan Jalan Lintas Timur dengan ruas ke Pelabuhan Muara Sabak menjadi pemicu baru pergerakan barang dan pertumbuhan kawasan.

Sumber: RPJPD Kota Jambi 2025-2045

Berdasarkan Tabel 2.85 menunjukkan Perkembangan kawasan peri-urban menunjukkan percepatan transformasi ruang, ditandai oleh peralihan lahan pertanian

menjadi permukiman, perdagangan, dan jasa akibat tekanan pertumbuhan dari pusat kota. Kawasan transisi ini memadukan karakter rural–urban dengan aktivitas ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang tumbuh cepat namun tidak merata. Di Kota Jambi, ekspansi ke barat, selatan, timur, dan utara menegaskan peran peri-urban sebagai ruang perluasan utama bagi perumahan besar, fasilitas komersial, dan simpul kegiatan yang menguatkan keterkaitan dengan Kabupaten Muaro Jambi. Kondisi ini menuntut tata ruang yang adaptif, infrastruktur memadai, dan pengendalian alih fungsi lahan agar perkembangan peri-urban tetap terarah dan berkelanjutan.

Tabel 2.86. Perkembangan Kawasan Peri-Urban

Arah Kawasan	Ciri Utama	Faktor Pendorong	Karakter & Dampak
Barat	Berbatasan dengan arah utama pengembangan kota inti; secara administrasi berada di Kec. Jambi Luar Kota.	Pusat pendidikan tinggi Provinsi Jambi dan ruas jalan arteri primer lintas Kota Jambi–Muara Bungo.	Muncul permukiman skala besar berciri kota mandiri; tipologi predominantly urban; fungsi komersial dan permukiman mirip kota inti.
Selatan	Kawasan peri-urban mengikuti ruas jalan arteri primer Jambi–Palembang.	Perubahan guna lahan linear di koridor utama menjadi lahan komersial; akses akan diperkuat JORR II dan simpul Tol Sumatra.	Bagian belakang masih berciri perdesaan; ke depan diprediksi mengalami akselerasi pertumbuhan, menarik permukiman ke luar serta menggeser industri/peredagang dari jalan lingkar selatan.
Timur	Berbatasan dengan permukiman, industri, perdagangan, dan jasa kota inti; meliputi Desa Mekar Jaya, Kebun IX, Tangkit Lama, dan Kasang Kumpeh.	Aksesibilitas tinggi melalui jalan primer dan angkutan umum kota; harga lahan dan ketersediaan ruang.	Bagian dekat kota berciri predominantly urban, bagian luar semi urban; pola perdagangan deret di koridor utama; permukiman dengan kepadatan mirip kota inti.
Utara	Wilayah di utara Sungai Batanghari.	Rencana jalan lingkar utara yang menghubungkan Jalan Lintas Timur dengan ruas Kota Jambi–Pelabuhan Muara Sabak.	Jalan lingkar menjadi jalur baru pergerakan barang menuju Pelabuhan Talang Duku dan berpotensi memicu perkembangan kawasan utara.

Sumber: RPJPD Kota Jambi, 2025-2045

Berdasarkan Tabel 2.85 menunjukkan Secara umum, kawasan peri-urban Kota Jambi menggambarkan ruang transisi antara kota inti yang sudah padat dan wilayah perdesaan di Kabupaten Muaro Jambi, dengan ciri campuran permukiman baru, fungsi komersial, dan

sisa-sisa lahan non-terbangun. Kawasan ini tumbuh mengikuti koridor transportasi utama dan rencana infrastruktur baru, sehingga pola ruangnya cenderung memanjang di sepanjang jalan arteri dan secara bertahap membentuk klaster permukiman dan kegiatan ekonomi yang terintegrasi dengan kota.

Pertumbuhan peri-urban diperkuat oleh tiga faktor utama: tekanan kebutuhan lahan permukiman dari rumah tangga kota, harga tanah yang relatif lebih murah di pinggiran, dan peningkatan aksesibilitas akibat pembangunan jalan regional, ring road, dan konektivitas ke kawasan industri dan pelabuhan. Dalam jangka panjang, dinamika ini berpotensi mengaburkan batas administratif antara Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi, sehingga kawasan peri-urban berfungsi sebagai satu kesatuan sistem permukiman dan ekonomi yang menuntut pengelolaan tata ruang dan infrastruktur secara terpadu lintas wilayah.

Dengan mengintegrasikan analisis pertumbuhan peri-urban dengan strategi penguatan pusat kota, sehingga arah investasi dapat didorong secara lebih terarah, efisien, dan berkelanjutan. Melalui pendekatan komprehensif, program ini mengidentifikasi sektor-sektor unggulan, menetapkan prioritas pengembangan ruang, serta merumuskan instrumen kebijakan untuk menarik dan mengelola investasi domestik maupun regional. Dengan demikian, Program Komprehensif Pengembangan Investasi Kota Jambi 2025–2045 diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan potensi wilayah, mewujudkan pertumbuhan yang inklusif, dan memastikan kawasan peri-urban berkembang sebagai bagian integral dari transformasi Kota Jambi menuju kota yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Program Komprehensif Pengembangan Investasi Kota Jambi 2025–2045 disusun untuk memberikan arah strategis dalam memperkuat struktur ekonomi kota sekaligus mengelola dinamika pembangunan yang semakin kompleks. Salah satu fenomena penting yang menjadi perhatian utama adalah pertumbuhan kawasan peri-urban yang berkembang pesat sebagai respon terhadap kebutuhan ruang kota, ketersediaan lahan, dan peningkatan konektivitas dengan wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Perubahan ini tidak hanya memperluas ruang aktivitas masyarakat, tetapi juga menciptakan peluang baru bagi investasi perumahan, perdagangan, jasa, dan infrastruktur pendukung.



Tabel 2.87. Program Komprehensif Pengembangan Investasi Kota Jambi 2025-2045

Sektor Prioritas	Kawasan Pengembangan Spesifik	Fokus Pengembangan & Produk Investasi	Program Prioritas DPMPTSP	Kegiatan Utama	IKU DPMPTSP yang Diintegrasikan
Akomodasi & Makan Minum (Unggulan Utama)	Danau Sipin (Ekowisata), Kecamatan Danau Teluk (Budaya/Sejarah), Koridor Transit Tol.	Produk: Waterfront Ecotourism, Homestay Budaya Seberang Kota, Sentra Kerajinan/Batik, Jasa Tur & Rest Area Transit.	Layanan Terpadu Ekowisata (LITE)	1. Mengintegrasikan izin KBLI Jasa Pariwisata (79xx, 55xx) dengan komitmen lingkungan (SPPL) wajib. 2. Pemasaran investasi yang menghubungkan Danau Sipin dan Seberang Kota sebagai destinasi transit.	7. Kualitas Proyek: Persentase realisasi investasi Non-UMK di KBLI Pariwisata. 8. Kepatuhan: Persentase NIB di sektor Pariwisata yang telah memiliki komitmen SPPL terverifikasi.
	Spesifik: Kuliner Koridor): Koridor Jalan Soemantri, Jelutung (CBD), Kota Baru (Komersial), Lokasi <i>Event</i> Temporer (Car Free Day/CFD)	Produk: Kuliner Terstruktur (Risiko Menengah), UMK Kuliner Hilir (dengan izin PIRT/Halal), Fasilitas Teras Kuliner Bersama, Zona <i>Food Truck</i> resmi, Restoran Berstandar.	Program Penataan Kawasan, <i>Scaling Up</i> , & Fasilitas Event	1. Penataan Spasial: Mengalihkan UMK Kuliner <i>street vending</i> ke lokasi terpusat/ <i>Mini Ruko</i> yang terstandar. 2. Standarisasi: Pemberian Insentif <i>Fast-Track</i> Sertifikasi Halal dan PIRT. 3. Fasilitas Event: Menyediakan Panduan Perizinan Temporer & Lokasi Baku untuk kegiatan Kuliner <i>Car Free Day</i> dan <i>event</i> kuliner lainnya.	1. Kualitas Ruang Usaha: Jumlah perizinan UMK Kuliner di lokasi terstruktur/ <i>Mini Ruko</i> . 2. Kualitas Perizinan: Persentase kenaikan jumlah proyek Kuliner dari Risiko Rendah ke Menengah. 3. Kepatuhan: Jumlah Sertifikasi Halal/PIRT yang terfasilitasi.
	Infrastruktur Konektivitas & Energi: Koridor Jalan Lingkar (Ring Road), Kawasan Perbatasan Kota	Produk: Terminal Kargo Terpadu, Proyek KPBU Transportasi Publik, PLTS Atap Skala Komersial, <i>Waste-to-Energy</i> (WtE).	Program Perizinan Infrastruktur Hijau	1. Pembentukan Tim Percepatan untuk PBG/KKPR proyek infrastruktur/Energi Terbarukan. 2. Promosi	9. Kepastian Usaha: Persentase penurunan selisih waktu penerbitan NIB dengan PBG/KKPR. 10. Investasi Berkelanjutan: Persentase



Sektor Prioritas	Kawasan Pengembangan Spesifik	Fokus Pengembangan & Produk Investasi	Program Prioritas DPMPTSP	Kegiatan Utama	IKU DPMPTSP yang Diintegrasikan
				peluang investasi yang terintegrasi dengan Exit Tol.	investasi yang masuk kategori <i>Green Investment</i> (PLTS, WtE).
Informasi & Komunikasi (Unggulan Utama)	Kecamatan Telanaipura (Pusat Bisnis), Kecamatan Kota Baru (Komersial)	Produk: Data Center, Fintech untuk UMK, <i>Co-working Spaces</i> , Jasa Pendidikan & Pelatihan berbasis digital.	Program Digitalisasi Perizinan dan Promosi	1. Pengembangan Dashboard Investasi berbasis <i>real-time</i> untuk DPMPTSP. 2. Promosi peluang investasi KBLI Jasa Keuangan/Digital.	11. Daya Saing: Jumlah <i>Fintech</i> atau investasi digital yang terfasilitasi. 12. Indikator Diversifikasi: Persentase peningkatan jumlah NIB di luar TOP 5 KBLI (Makanan/Eceran).
Jasa Perusahaan (Unggulan Utama)	Telanaipura (Pusat Bisnis), Jelutung (Koridor CBD)	Produk: Jasa Konsultasi Spesialis (Hukum, Akuntansi), Jasa Administrasi Terpadu (BPO), Logistik modern.	Program Fasilitasi Kemitraan Non-UMK	1. Memfasilitasi investasi jasa profesional skala regional. 2. Mendorong investasi logistik modern di area pergudangan.	13. Kualitas Proyek: Persentase Kenaikan Proyek Risiko Menengah/Tinggi Sektor M, N. 14. Nilai Investasi: Peningkatan nilai investasi di KBLI Jasa Perusahaan.
Jasa Kesehatan & Sosial (Unggulan Utama)	Kecamatan Telanaipura (Pusat Jasa), Kecamatan Kota Baru (Akses Lingkar Barat)	Produk: Rumah Sakit Spesialis/Tersier (Risiko Tinggi), Klinik Spesialis (Jantung, Onkologi), Fasilitas Lab Kesehatan.	Layanan <i>Fast-Track</i> SDM Spesialis	1. Implementasi SLA 3-5 hari kerja untuk penerbitan IPTK Dokter Spesialis. 2. Sinkronisasi data ketersediaan SDM dengan peluang investasi Rumah Sakit.	1. Resolusi <i>Bottleneck</i> : Persentase penyelesaian IPTK Dokter Spesialis tepat waktu. 2. Investasi Jasa: Persentase pertumbuhan nilai investasi di KBLI Jasa Kesehatan/Sosial (Q).
Industri Pengolahan (Prospektif)	Paal Merah (Area Industri), Kawasan Pinggiran Kota	Produk: Industri Pengolahan Menengah (Non-Agro), Manufaktur Non-UMK (Risiko Menengah/Tinggi), Perakitan Skala Mikro.	Fasilitasi UMK Naik Kelas & Kemitraan	1. Penyediaan Lahan Matang (<i>Land Banking</i>) dengan KKPR/RDTR yang jelas untuk industri non-UMK. 2. Promosi peluang	11. Nilai Investasi: Persentase peningkatan nilai investasi di KBLI Industri Pengolahan (di luar KBLI 10xxx). 12. Kualitas Perizinan: Persentase kenaikan jumlah proyek dari Risiko



Sektor Prioritas	Kawasan Pengembangan Spesifik	Fokus Pengembangan & Produk Investasi	Program Prioritas DPMPTSP	Kegiatan Utama	IKU DPMPTSP yang Diintegrasikan
				investasi hilirisasi di luar sektor pangan.	Rendah ke Menengah/Tinggi di Sektor C.
Jasa Keuangan & Asuransi (Prospektif)	Telanaipura (Pusat Bisnis), Kota Baru (Komersial)	Produk: Fintech pendukung UMK, Kantor Cabang Utama Bank/Asuransi Regional, Venture Capital untuk startup digital.	Program Digitalisasi Perizinan dan Promosi	1. Promosi Kota Jambi sebagai Hub Finansial Digital regional. 2. Memfasilitasi perizinan dan pendirian kantor cabang lembaga keuangan yang melayani UMK.	13. Daya Saing: Jumlah <i>Fintech</i> atau investasi jasa keuangan digital yang terfasilitasi. 14. Diversifikasi: Persentase pertumbuhan nilai investasi di KBLI Sektor K.
Real Estate (Prospektif - KBLI 68)	Kawasan Perbatasan (Ekspansi), Telanaipura (Properti Sewa)	Produk: Pemukiman Terjangkau (<i>Affordable Housing</i>), Pembangunan Apartemen/Hunian Vertikal, Pengembangan <i>Land Banking</i> terstruktur.	Akselerasi Izin Properti Terpadu	1. Tim Percepatan KKPR/PBG untuk Proyek Perumahan MBR dan Vertikal. 2. Mendorong diversifikasi <i>Developer</i> ke properti sewa (<i>kos/apartemen</i>) dekat kampus/RS.	15. Kepastian Tata Ruang: Persentase penyelesaian KKPR/PBG Proyek MBR dalam SLA. 16. Kualitas Akomodasi: Jumlah perizinan Properti Sewa Terstruktur.
Jasa Pendidikan (Prospektif - KBLI 85xx)	Telanaipura (Area Kampus), Kawasan Perbatasan	Produk: Kampus Vokasi dan/atau Universitas Satelit (Risiko Tinggi), Fasilitas Pelatihan Kejuruan, Sekolah Internasional.	Layanan Izin Institusi Jasa	1. Implementasi SLA Cepat untuk Izin Prinsip dan Izin Operasional Lembaga Pendidikan. 2. Sinkronisasi rencana ekspansi kampus dengan penyediaan utilitas.	17. Investasi Jasa Non-Kesehatan: Persentase pertumbuhan nilai investasi sektor Pendidikan/Pelatihan. 18. Kualitas Akomodasi: Persentase pemenuhan PBG untuk asrama/kos terstruktur di sekitar kampus.
Aset & Utilitas (Pengelolaan Sampah/Magot)	Area TPA (Sesuai Zonasi Lingkungan),	Produk: Investasi Fasilitas Waste-to-Energy (WtE) (Risiko Tinggi), Fasilitas	Program Investasi Hijau	1. Promosi Peluang Investasi WtE melalui skema KPBU. 2. Memfasilitasi izin	19. Investasi Hijau: Persentase investasi yang masuk di sektor Pengelolaan Limbah. 20.



Sektor Prioritas	Kawasan Pengembangan Spesifik	Fokus Pengembangan & Produk Investasi	Program Prioritas DPMPTSP	Kegiatan Utama	IKU DPMPTSP yang Diintegrasikan
	Kawasan Industri/Pangan	Budidaya Magot (Black Soldier Fly) menggunakan limbah organik.	& Mitigasi Risiko	operasional budidaya Magot yang menggunakan limbah organik.	Mitigasi Risiko: Persentase peningkatan kapasitas pengelolaan limbah organik melalui investasi.
Jasa Kesehatan dan Sosial (Esensial)	Kecamatan Telanaipura (Pusat Pemerintahan/Jasa), Kecamatan Kota Baru (Area Komersial).	Produk: Rumah Sakit Spesialis/Tersier (Risiko Tinggi), Klinik Spesialis (Jantung, Onkologi), Fasilitas Lab Kesehatan.	Layanan Fast-Track SDM Spesialis	1. Implementasi SLA 3-5 hari kerja untuk penerbitan IPTK Dokter Spesialis. 2. Sinkronisasi data ketersediaan SDM dengan peluang investasi Rumah Sakit.	3. Resolusi Bottleneck: Persentase penyelesaian IPTK Dokter Spesialis tepat waktu. 4. Investasi Jasa: Persentase pertumbuhan nilai investasi di KBLI Jasa Kesehatan/Sosial (Q).
5. Jasa Keuangan, Digital, dan Perdagangan	Kecamatan Telanaipura (Pusat Bisnis), Kecamatan Kota Baru (Komersial).	Produk: Data Center, Fintech untuk UMK, Co-working Spaces, Ritel Modern, Jasa Pendidikan & Pelatihan.	Program Digitalisasi Perizinan dan Promosi	1. Pengembangan Dashboard Investasi berbasis real-time untuk DPMPTSP. 2. Promosi peluang investasi KBLI Jasa Keuangan/Digital sebagai driver efisiensi UMK.	9. Daya Saing: Jumlah Fintech atau investasi digital yang terfasilitasi. 10. Indikator Diversifikasi: Persentase peningkatan jumlah NIB di luar TOP 5 KBLI (Makanan/Eceran).
8. Ritel dan Perdagangan Modern	Koridor Utama Kota (JBC, Sudirman), Pusat Keramaian Komersial (Kota Baru, Jambi Selatan).	Produk: <i>Mini Ruko</i> dan Ruang Komersial untuk UMK, Pusat Grosir (Non-UMK), Ritel Modern/Supermarket.	Regulasi UMK Ritel & Pengendalian Tata Ruang	1. Mengalihkan UMK Perdagangan Eceran (KBLI 47xxx) ke lokasi Mini Ruko terpusat. 2. Mengharmonisasi izin ritel modern (Non-UMK) dengan zonasi RTRW agar tidak mematikan UMK.	15. Keseimbangan Pasar: Rasio pertumbuhan investasi Ritel Modern vs. UMK. 16. Kualitas Ruang Usaha: Jumlah perizinan Ritel UMK di <i>Ruko</i> Terstruktur.

2.9. Kontribusi Penanaman Modal Bagi Pembangunan Kota Jambi (Ekonomi dan Sosial Budaya)

Penyusunan Arah Pengembangan Penanaman Modal Kota Jambi berlandaskan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2024 tentang RPJPD 2025–2045 dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang RTRW 2013–2033. Kedua regulasi ini menjadi pijakan strategis dalam menentukan arah pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya berkelanjutan. Selaras dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, kebijakan ini menekankan pentingnya menciptakan iklim investasi yang kondusif, transparan, dan berkeadilan, dengan memperhatikan potensi daerah serta keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian sosial-budaya.

Tabel 2.88. Kondisi Kelembagaan Penanaman Modal Kota Jambi

Aspek	Bentuk Kontribusi	Uraian Dampak
Ekonomi	1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Penanaman modal mendorong sektor produktif seperti perdagangan, jasa, dan pariwisata, sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperluas basis pendapatan daerah.
	2. Penciptaan Lapangan Kerja	Investasi membuka kesempatan kerja baru bagi masyarakat lokal, menurunkan angka pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan sosial.
	3. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pajak dan retribusi dari aktivitas investasi menambah pendapatan daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
	4. Transfer Teknologi dan Peningkatan SDM	Investor membawa teknologi, sistem manajemen modern, serta praktik bisnis efisien yang dapat diadopsi tenaga kerja lokal.
	5. Pengembangan Infrastruktur dan Daya Saing Daerah	Pembangunan kawasan industri, jalan, dan sarana logistik memperkuat daya saing Kota Jambi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera.
Sosial Budaya	1. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Dampak ekonomi dari investasi meningkatkan daya beli dan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan perumahan layak.
	2. Penguatan Identitas dan Citra Daerah	Keberhasilan menarik investasi menumbuhkan kebanggaan dan rasa memiliki terhadap Kota Jambi sebagai kota maju dan ramah investasi.
	3. Peningkatan Interaksi Sosial dan Dinamika Budaya	Arus investasi membawa keragaman budaya dan meningkatkan toleransi serta kolaborasi antarwarga.
	4. Tumbuhnya Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif	Masyarakat terdorong untuk mengembangkan usaha lokal di bidang kuliner, kerajinan, dan pariwisata berbasis kearifan lokal.
	5. Peningkatan Peran Lembaga Sosial dan Pendidikan	Program tanggung jawab sosial (CSR) perusahaan berkontribusi dalam pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Tabel 2.88 menunjukkan dalam kerangka tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi berperan sebagai motor penggerak utama dalam mendorong investasi daerah melalui penyusunan Peta Potensi Investasi dan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Jambi 2025–2045. Dokumen ini mengintegrasikan arah kebijakan RPJPD dan RTRW, sehingga investasi diarahkan pada kawasan-kawasan yang sesuai dengan rencana tata ruang dan berpotensi memberikan multiplier effect terhadap pembangunan daerah. Upaya tersebut didukung oleh Pemerintah Kota Jambi melalui penyederhanaan perizinan, peningkatan kapasitas aparatur, serta promosi dan branding “Invest in Jambi City”, guna meningkatkan kepercayaan investor dan memperkuat citra positif daerah.

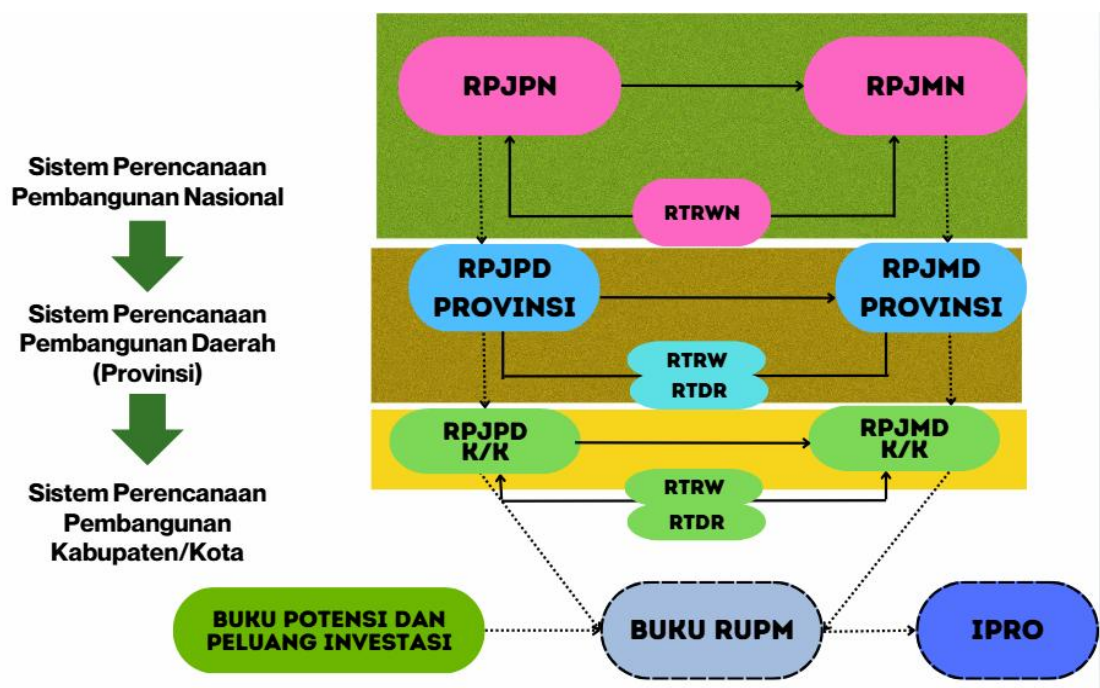
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jambi turut berperan dalam menyinergikan kebijakan penanaman modal melalui Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jambi serta koordinasi antarwilayah untuk memperkuat konektivitas ekonomi dan infrastruktur. Pendekatan lintas-level ini memastikan bahwa investasi yang masuk tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, tetapi juga berkontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat, pengembangan budaya lokal, serta pelestarian lingkungan sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan.

2.10. Isu Strategis Terkait Penanaman Modal di Kota Jambi

Dalam upaya mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan, Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sedang menyusun Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Jambi Periode 2025–2045 sebagai dokumen strategis yang berfungsi sebagai pedoman utama dalam pengelolaan investasi jangka panjang di daerah. Penyusunan dokumen ini berlandaskan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi Tahun 2025–2045, yang mengarahkan visi, misi, dan sasaran pembangunan jangka panjang. Selain itu, proses penyusunan RUPM juga diselaraskan dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Jambi Tahun 2013–2033, yang menjadi dasar pengaturan pemanfaatan ruang dan struktur pengembangan wilayah. Pada tingkat nasional, RUPM mengacu pada kebijakan penanaman modal nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2007 tentang Penanaman Modal, sehingga memastikan keselarasan arah kebijakan investasi daerah dengan prinsip, regulasi, dan prioritas pembangunan nasional.

Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Jambi Periode 2025–2045 dilaksanakan melalui suatu alur hirarki perencanaan yang terstruktur dan terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota. Secara konseptual, RUPM berada dalam satu kesatuan sistemik yang mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan berjenjang, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang kemudian diturunkan ke tingkat provinsi melalui RPJPD dan RPJMD Provinsi, serta selanjutnya diterjemahkan ke dalam RPJPD dan RPJMD kabupaten/kota. Seluruh kerangka perencanaan tersebut diselaraskan dengan rencana tata ruang, baik RTRWN, RTRW provinsi, RTRW kota, maupun RTDR sebagai acuan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam konteks ini, RUPM Kota Jambi disusun tidak hanya sebagai respons terhadap arah pembangunan jangka panjang daerah, tetapi juga sebagai dokumen strategis yang berfungsi untuk mengintegrasikan kebijakan ruang, pembangunan, serta investasi daerah. Hubungan ini diperkuat dengan keberadaan dokumen turunan seperti Buku Potensi dan Peluang Investasi serta IPRO yang menjadi instrumen operasional dalam memfasilitasi promosi dan realisasi investasi (Gambar 2.60).



Gambar 2. 20.Alur Hirarki Dokumen RUPM Kota Jambi Periode 2025-2045

Berdasarkan Gambar 2.20 menunjukkan alur Hirarki RUPM Kota Jambi 2025–2045 tersusun sebagai pedoman strategis pengembangan investasi jangka panjang, yang kemudian diturunkan ke dalam dokumen operasional seperti Buku Potensi dan Peluang Investasi serta IPRO (*Investment Project Ready to Offer*). Dengan demikian, RUPM memastikan bahwa arah kebijakan investasi Kota Jambi konsisten, terukur, dan selaras dengan rencana pembangunan serta pemanfaatan ruang di semua tingkatan.

Sebagai bagian dari proses perencanaan tersebut, perlu dilakukan identifikasi terhadap isu-isu strategis penanaman modal yang mencerminkan tantangan, peluang, serta faktor-faktor kunci yang memengaruhi perkembangan investasi di Kota Jambi. Isu-isu ini menjadi landasan penting dalam merumuskan arah kebijakan, strategi, serta program prioritas penanaman modal yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keseimbangan sosial, budaya, dan lingkungan. Dengan memahami isu strategis secara komprehensif, Pemerintah Kota Jambi dapat menyusun kebijakan investasi yang lebih adaptif, sinergis, dan berdaya dorong tinggi bagi terwujudnya visi pembangunan jangka panjang daerah yang dapat dilihat sebagai isi strategis RUPM Kota Jambi yang dijelaskan pada Tabel 2.89 berikut:

Tabel 2.89. Isu Strategis dan Keterkaitan dengan RUPM 2025–2045

No.	Isu Strategis	Keterkaitan dengan RUPM 2025–2045
1	Keterbatasan Infrastruktur Penunjang Investasi	Meskipun Kota Jambi memiliki posisi strategis sebagai pusat perdagangan dan jasa di Provinsi Jambi, ketersediaan infrastruktur seperti jaringan jalan, kawasan industri, air bersih, dan sistem logistik masih terbatas. RUPM 2025–2045 perlu memprioritaskan arah investasi pada pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar untuk menciptakan iklim investasi yang kompetitif dan berkelanjutan.
2	Kualitas dan Kapasitas SDM yang Belum Merata	Rendahnya kompetensi tenaga kerja lokal di sektor industri dan jasa menghambat optimalisasi investasi. Penyusunan RUPM diarahkan untuk mengintegrasikan kebijakan investasi dengan program peningkatan kualitas SDM, pelatihan vokasi, dan kemitraan dengan dunia usaha.
3	Proses Perizinan dan Birokrasi yang Masih Kurang Efisien	Meskipun reformasi birokrasi telah berjalan melalui digitalisasi perizinan oleh DPMPSTP, masih terdapat persepsi investor tentang panjangnya proses



No.	Isu Strategis	Keterkaitan dengan RUPM 2025–2045
		dan koordinasi antarinstansi. RUPM 2025–2045 perlu menegaskan strategi deregulasi, penyederhanaan prosedur, dan penguatan sistem pelayanan investasi berbasis elektronik (OSS dan MPP Digital).
4	Keterbatasan Promosi dan Branding Investasi Daerah	Belum optimalnya promosi potensi investasi menyebabkan rendahnya minat investor luar. Dalam RUPM 2025–2045, perlu dirumuskan strategi promosi terpadu dengan branding “Invest in Jambi City” untuk meningkatkan citra positif daerah dan menarik investasi berkelanjutan di sektor prioritas.
5	Keterpaduan Perencanaan Ruang dan Investasi	Beberapa potensi investasi belum sepenuhnya selaras dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana pembangunan daerah. RUPM harus memastikan bahwa arah investasi mengacu pada Perda No. 9 Tahun 2013 tentang RTRW Kota Jambi 2013–2033 serta mempertimbangkan revisi dan integrasi dengan RPJPD 2025–2045, sehingga investasi tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dan tata ruang.
6	Keterbatasan Dukungan Pembiayaan dan Kemitraan Usaha Lokal	Akses pembiayaan bagi UMKM dan usaha penunjang investasi masih terbatas. RUPM perlu mengarahkan strategi kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan sektor swasta untuk memperluas skema pembiayaan inklusif dan memperkuat rantai nilai ekonomi lokal.
7	Ketimpangan Pertumbuhan Antarwilayah dan Sektor	Aktivitas investasi masih terpusat di kawasan pusat kota, sementara wilayah pinggiran dan sektor pertanian perkotaan belum terintegrasi dalam rantai ekonomi produktif. Dalam RUPM, diperlukan strategi pemerataan investasi melalui pengembangan kawasan potensial seperti kawasan industri ringan, perdagangan, dan pariwisata berbasis budaya dan lingkungan.
8	Keterlibatan Masyarakat dan Kearifan Lokal dalam Pembangunan	Investasi harus berorientasi pada pembangunan inklusif dengan melibatkan lembaga kemasyarakatan dan adat. Penyusunan RUPM harus mengacu pada Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 6 Tahun 2025 agar investasi selaras dengan nilai-nilai sosial budaya dan memperkuat kohesi masyarakat.

No.	Isu Strategis	Keterkaitan dengan RUPM 2025–2045
9	Ketahanan Lingkungan dan Daya Dukung Wilayah	Meningkatnya tekanan pembangunan berpotensi menurunkan kualitas lingkungan kota. RUPM perlu menetapkan arah investasi hijau (green investment) dan pengembangan ekonomi sirkular agar pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan kelestarian lingkungan.
10	Sinkronisasi Kebijakan Pusat, Provinsi, dan Kota	Diperlukan harmonisasi antara kebijakan Penanaman Modal Nasional (UU No. 25 Tahun 2007), RUPM Provinsi Jambi, dan RUPM Kota Jambi agar arah investasi daerah sejalan dengan prioritas nasional serta mampu menarik dukungan lintas level pemerintahan dan sektor swasta.

2.11. Kelembagaan Penanaman Modal di Kota Jambi

Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Jambi menjadi wujud nyata dari penguatan kelembagaan penanaman modal di daerah. MPP berfungsi sebagai pusat layanan terpadu yang mengintegrasikan berbagai jenis pelayanan publik, termasuk layanan investasi yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi. Melalui sistem ini, proses perizinan usaha dan investasi dapat dilakukan secara cepat, transparan, dan efisien, sehingga menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memperkuat kepercayaan investor terhadap tata kelola pemerintahan daerah.

Dengan adanya MPP, pelaku usaha dapat mengakses layanan seperti pendaftaran izin usaha, konsultasi investasi, dan penyelesaian administrasi perizinan dalam satu lokasi yang terintegrasi dengan berbagai instansi terkait baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun lembaga non-pemerintah. Hal ini mendukung implementasi sistem perizinan berbasis digital (OSS–Online Single Submission) yang sejalan dengan kebijakan nasional dalam percepatan investasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan kebijakan turunan dari Kementerian Investasi/BKPM RI.

Dari perspektif kelembagaan, MPP memperkuat peran DPMPTSP Kota Jambi sebagai motor penggerak penanaman modal yang tidak hanya memberikan pelayanan administratif, tetapi juga berfungsi sebagai pusat promosi investasi daerah. Melalui koordinasi lintas sektor dengan Pemerintah Kota Jambi dan Pemerintah Provinsi Jambi, MPP menjadi sarana strategis dalam memperkuat tata kelola pelayanan publik berbasis

investasi, meningkatkan efisiensi birokrasi, serta mewujudkan prinsip good governance dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Berikut adalah poin-poin penting mengenai proses pelayanan perizinan DPMPTSP Kota Jambi:

1. Sistem Pelayanan Daring

Saat ini, proses perizinan banyak dilakukan secara daring melalui sistem yang dikelola oleh DPMPTSP Kota Jambi, seperti:

- a) Sistem OSS RBA (*Online Single Submission Risk-Based Approach*) merupakan platform perizinan berusaha yang berlaku secara nasional di Indonesia, dirancang untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan bagi pelaku usaha. Berbeda dengan sistem perizinan konvensional, OSS RBA mengadopsi pendekatan berbasis risiko, di mana tingkat kompleksitas dan persyaratan izin disesuaikan dengan tingkat risiko kegiatan usaha. Semakin rendah risiko suatu usaha, semakin sederhana pula proses perizinannya, bahkan beberapa izin dapat langsung terbit. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, transparan, dan efisien, sehingga pelaku usaha dapat lebih mudah memulai dan mengembangkan bisnis mereka di seluruh wilayah Indonesia.
 - b) SILANCAR (Sistem Informasi Layanan Perizinan Aman, Nyaman, Cepat, Akurat, Akuntabel, Resmi) adalah platform daring resmi yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Jambi. Sistem ini didedikasikan secara spesifik untuk memfasilitasi proses pendaftaran Perizinan Khusus Tenaga Kesehatan, memastikan seluruh tahapan perizinan bagi para profesional medis dapat dilakukan dengan standar keamanan, kenyamanan, kecepatan, akurasi, akuntabilitas, dan legitimasi yang tinggi. Dengan adanya SILANCAR, tenaga kesehatan di Kota Jambi dapat mengurus perizinan mereka secara digital, mengurangi birokrasi dan mempersingkat waktu tunggu.
2. Alur Umum Pendaftaran Perizinan Daring (Contoh SILANCAR)

Alur pembuatan layanan melalui SILANCAR dirancang untuk memudahkan pemohon dalam memperoleh berbagai izin secara cepat, transparan, dan terstandarisasi. Proses ini terdiri dari lima tahapan utama yang saling berkesinambungan. Pertama, pemohon harus membuat akun pada portal perizinan resmi (perizinan.janolkota.go.id) dengan menyiapkan KTP serta email aktif sebagai identitas dasar. Setelah akun aktif,

pemohon diwajibkan menyiapkan seluruh dokumen persyaratan yang dipersyaratkan, seperti Pas Foto, KTP, rekomendasi instansi terkait, STR, maupun ijazah sesuai jenis layanan yang diajukan.

Tahap berikutnya adalah mengunggah seluruh dokumen tersebut ke dalam sistem, memastikan bahwa file telah sesuai dengan ketentuan format, ukuran, dan kelengkapan yang diminta. Setelah dokumen diunggah, petugas DPMPTSP akan melakukan proses verifikasi untuk memastikan kesesuaian dan keabsahan data. Apabila ditemukan kekurangan, pemohon dapat diminta melakukan perbaikan atau melengkapi berkas.

Tahap akhir adalah penerbitan izin. Setelah seluruh dokumen dinyatakan valid dan telah melalui proses verifikasi, izin akan diterbitkan secara digital melalui sistem SILANCAR. Pemohon kemudian dapat mengunduh dokumen izin atau menindaklanjuti informasi lanjutan sesuai kebutuhan layanan. Dengan alur yang terstruktur ini, SILANCAR menjadi instrumen pelayanan perizinan yang efisien, akuntabel, dan mempermudah masyarakat maupun pelaku usaha dalam memperoleh layanan perizinan secara cepat dan tepat. Adapun alur dalam pembuatan SILANCAR ditunjukkan pada Gambar 2.21.



Gambar 2. 21. Alur Pembuatan SILANCAR



2. Pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP)

DPMPTSP Kota Jambi secara aktif menghadirkan pelayanan publik yang mudah diakses melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Jambi, yang berlokasi strategis di Jl. H. Zainir Haviz, Komplek Perkantoran Walikota. MPP ini menyediakan berbagai layanan tatap muka komprehensif untuk mendukung proses investasi dan perizinan. Investor dan pelaku usaha dapat memanfaatkan fasilitas Informasi dan Konsultasi untuk memahami regulasi terbaru, serta mendapatkan Pendampingan Pelayanan Perizinan Berusaha (OSS) dan jenis perizinan non-perizinan lainnya. Selain itu, MPP juga menawarkan Pendampingan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), Layanan Bantuan Pencetakan Izin, dan Verifikasi Akun Penyedia, memastikan setiap tahapan proses perizinan dapat ditangani dengan dukungan langsung. Layanan ini tersedia pada jam operasional MPP, biasanya dari Senin hingga Kamis pukul 08.00-15.00 WIB, dan Jumat pukul 08.00-11.00 WIB, yang menunjukkan komitmen DPMPTSP Kota Jambi dalam menciptakan iklim investasi yang responsif dan berorientasi pada kemudahan pelaku usaha.

BAB 3

ANALISIS DATA

3.1. Analisis SWOT

Penyusunan RUPM Kota Jambi 2025–2045 merupakan langkah strategis yang sejalan dengan Visi dan misi RPJPD Kota Jambi dalam menekankan transformasi investasi dari sektor konsumtif menuju portofolio berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan (Kazançoğlu et al., 2020). Sebagai Pusat Kegiatan Wilayah dan simpul perdagangan-jasa di Sumatera Tengah, Kota Jambi menghadapi peluang dan tantangan untuk mendorong ekonomi hijau melalui teknologi bersih, efisiensi sumber daya, serta kemitraan antara usaha besar dan UMKM, guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Rita et al., 2024). RUPM juga mempertimbangkan faktor ketimpangan ekonomi, memprioritaskan investasi di sektor strategis seperti pertanian, pariwisata, dan industri kreatif, termasuk pengembangan pariwisata berkelanjutan di Danau Sipin dan Batanghari, untuk mendorong diversifikasi ekonomi dan pemerataan manfaat (Almizan et al., 2024; Heryadi et al., 2024; Mubarak, 2022). Infrastruktur dan layanan publik digital diperkuat untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif (Mubarak, 2022).

Pengelolaan sumber daya dan kebijakan lingkungan yang ketat menjadi bagian dari strategi, sejalan dengan konsep ekonomi sirkular dan prinsip green economy, untuk memastikan keberlanjutan dan keuntungan jangka panjang bagi Kota Jambi (Kazançoğlu et al., 2020). Dengan pendekatan terintegrasi ini, RUPM berfungsi sebagai panduan investasi sekaligus peta jalan menuju kota cerdas dan berkelanjutan, yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan daya tarik investasi (Ristianawati & Hartono, 2022).

RUPM Kota Jambi Periode 2025-2045 ini disusun berdasarkan analisis strategis (SWOT) yang komprehensif, mengintegrasikan potensi dan tantangan kota. Dokumen RUPM Kota Jambi 2025-2045 mengidentifikasi Kekuatan utama kota seperti status PKW dan dominasi Sektor Tersier yang didukung oleh efisiensi layanan perizinan (*OSS*) untuk menangkap Peluang eksternal. Peluang ini meliputi adanya keselarasan dengan RPJMN (terutama pada *Green Investment* dan pembangunan Infrastruktur Konektivitas seperti Jalan Tol Trans-Sumatera), yang membuka pasar baru yang besar bagi Logistik, Pariwisata, dan Jasa Spesialis di Jambi.

Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal guna merumuskan strategi yang tepat. Dalam penyusunan RUPM Kota Jambi, efektivitas strategi sangat bergantung pada kemampuan mengatasi kelemahan internal, seperti tingginya angka NRW 37,6% dan kesenjangan keterampilan tenaga kerja lokal dengan kebutuhan sektor bernilai tambah. Tantangan tersebut semakin berat karena adanya ancaman eksternal, termasuk persaingan regional, ketidakpastian regulasi pusat, dan lemahnya penegakan tata ruang yang berpotensi menimbulkan urban sprawl dan konflik lahan. Dengan memperhatikan potensi wilayah, kondisi kependudukan, perekonomian, serta keunggulan komparatif Kota Jambi, analisis SWOT menjadi landasan penting dalam menetapkan kebijakan penanaman modal yang lebih terarah dan berkelanjutan. Beberapa komponen dalam analisis SWOT Rencana Umum Penanaman Modal Kota Jambi dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.1. Komponen SWOT

No.	Indikasi (Alasan Mendesak)	Data Pendukung
1.	Mandat Perda RPJPD	Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2024 menetapkan RPJPD Kota Jambi 2025–2045, yang membutuhkan RUPM sebagai penjabaran arahan lokasi investasi.
2.	Tantangan Daya Saing Sektoral	Hasil Analisis Static Location Quotient (SLQ) menunjukkan sektor Transportasi dan Pergudangan serta Perdagangan adalah sektor strategis tapi lemah daya saing.
3.	Penyelesaian Defisit Utilitas Kritis	Angka Non-Revenue Water (NRW) Kota Jambi masih mencapai sekitar 37,6%, mengindikasikan inefisiensi sistem air bersih yang kritikal bagi investor.
4.	Kebutuhan Transformasi Investasi	Investasi saat ini didominasi sektor risiko rendah/konsumtif, bertentangan dengan visi RPJPD untuk pertumbuhan yang berkualitas.
5.	Penyelarasan Tata Ruang	RUPM diperlukan untuk mengatur Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan mengarahkan investasi sesuai Perda RTRW Nomor 9 Tahun 2013.
6.	Penguatan Status PKW	RUPM dibutuhkan untuk mengoptimalkan peran Kota Jambi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) regional di Sumatera bagian tengah.
7.	Kewajiban Insentif Terarah	Perlunya merancang insentif sesuai UU Nomor 25 Tahun 2007 (Pasal 19) dan Perpres Nomor 16 Tahun 2012 (sebagai rujukan Perka BKPM) untuk investasi prioritas.
8.	Fokus <i>Green Investment</i>	RUPM perlu memastikan keselarasan investasi dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG), sesuai arahan DRAFT Buku RUPM 2025-2045.
9.	Integrasi Perencanaan	RUPM menjadi jembatan antara RPJPD 2025-2045 dan RPD 2024-2026 (Perwal No. 11 Th. 2023) untuk konsistensi program pembangunan.
10.	Peningkatan Efek Pengganda	Sektor basis dengan potensi hilirisasi (misalnya Industri Makanan/Minuman) perlu didorong untuk menaikkan PDRB kota.

3.1.1. Kekuatan

Kekuatan strategis yang dimiliki Kota Jambi menjadi landasan penting bagi penyusunan RUPM 2025–2045, khususnya dalam menetapkan fokus sektor unggulan, arah pengembangan kawasan investasi, dan strategi percepatan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Berdasarkan analisis SWOT, terdapat beberapa kekuatan utama yang dimiliki Kota Jambi, yaitu:

Tabel 3.2. Kekuatan

No.	Kekuatan	Data Pendukung
1.	Status PKW	Kota Jambi berstatus Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dalam sistem perkotaan nasional.
2.	Dominasi Sektor Tersier	Sektor Jasa, Perdagangan, dan Konstruksi memiliki nilai SLQ > 1 (Sektor Basis), menjadi motor ekonomi utama kota.
3.	Landasan Hukum Jangka Panjang	Adanya Perda RPJPD 2025-2045 yang memberikan kepastian arah pembangunan 20 tahun ke depan.
4.	Sistem Perizinan Efisien	Pemkot Jambi memiliki "Sistem Perizinan Online Kota Jambi" yang melayani 73 jenis perizinan dan mendukung sistem OSS.
5.	Posisi Geografis Strategis	Terletak di Jalur Lintas Timur Sumatera dan keberadaan Sungai Batanghari sebagai aset logistik dan pariwisata.
6.	Infrastruktur Kesehatan Rujukan	Kota Jambi adalah pusat rujukan kesehatan di Provinsi Jambi (RS Provinsi, RS Swasta skala besar).
7.	Kawasan Strategis Budaya	Kawasan Kota Seberang (Pelayangan) ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Sosial Budaya dalam RTRW, siap dikembangkan menjadi wisata <i>heritage</i> .
8.	Kawasan Pertumbuhan Baru	Alokasi kawasan pengembangan di Kota Baru/Alam Barajo sesuai RTRW untuk menampung investasi Real Estate dan utilitas.
9.	Pendidikan/Kampus	Kota Jambi adalah pusat pendidikan tinggi di Provinsi Jambi, berpotensi sebagai sumber daya riset dan tenaga kerja terdidik.
10.	Alokasi Pusat Kegiatan	Telanaipura, Pasar Jambi, dan Jelutung ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Kota (Orde I) yang merupakan <i>core</i> investasi kota (RTRW 2013-2033 dan Draft RUPM).

3.1.2. Kelemahan

Analisis terhadap aspek Kelemahan (*Weaknesses*) menjadi langkah penting dalam penyusunan strategi pembangunan dan penanaman modal Kota Jambi. Identifikasi kelemahan memungkinkan perumus kebijakan memahami batasan internal yang dapat menghambat pencapaian target pembangunan jangka panjang, termasuk tujuan yang telah ditetapkan dalam RUPM 2025–2045. Melalui pemetaan kelemahan secara objektif,

pemerintah daerah dapat merancang intervensi yang lebih tepat sasaran, memperbaiki sistem yang belum optimal, serta mencegah potensi risiko yang dapat mengurangi daya tarik investasi. Berdasarkan analysis SWOT terdapat beberapa kelemahan yang dimiliki Kota Jambi:

Tabel 3.3. Kelemahan

No.	Kelemahan	Data Pendukung
1.	Defisit Kritis Utilitas Air	Angka Non-Revenue Water (NRW) mencapai 37,6%, mengindikasikan inefisiensi jaringan air bersih yang tinggi.
2.	Sektor Rentan Bencana	Kawasan sepanjang Sungai Batanghari (Logistik, Kota Seberang) memiliki Indeks Risiko Bencana (IRB) Sedang-Tinggi (rawan banjir).
3.	Kesenjangan Keterampilan (SDM)	Kualitas Pendidikan Vokasi (SMK) belum sepenuhnya <i>link & match</i> dengan kebutuhan sektor baru seperti Logistik modern, TIK, atau <i>Hospitality</i> .
4.	Keterbatasan Lahan Logistik Modern	Ketersediaan lahan industri/pegudangan modern yang terintegrasi dengan Jalan Lingkar dan utilitas pendukung masih terbatas.
5.	Kualitas Investasi	Investasi didominasi oleh proyek risiko rendah/komersial yang kurang menciptakan efek pengganda dibandingkan investasi sektor industri prioritas.
6.	Masalah Pengelolaan Limbah	Infrastruktur pengelolaan sampah dan limbah B3 belum memadai, menghambat <i>Green Investment</i> .
7.	Ketergantungan Bahan Baku Pangan	Industri Makanan dan Minuman masih memiliki ketergantungan tinggi pada pasokan bahan baku dari luar daerah.
8.	Inefisiensi Sektor Logistik	Sektor Transportasi dan Pergudangan diklasifikasikan sebagai sektor strategis tapi lemah daya saing (SLQ tinggi, tapi pertumbuhan didorong struktur).
9.	Akses Permodalan UMKM	Keterbatasan akses modal dan standardisasi produk (Halal, PIRT) yang menghambat integrasi UMK ke rantai pasok.
10.	Laju <i>Urban Sprawl</i>	Laju pertumbuhan fisik kota cenderung tidak terkendali di pinggiran (<i>urban fringe</i>), bertentangan dengan efisiensi tata ruang.

3.1.3. Peluang

Analisis peluang merupakan bagian penting dalam penyusunan RUPM Kota Jambi 2025–2045, karena membantu pemerintah daerah mengenali berbagai dinamika eksternal yang dapat mendorong pertumbuhan investasi. Peluang seperti peningkatan konektivitas wilayah, perkembangan ekonomi digital, dukungan kebijakan nasional, dan tren investasi berkelanjutan menjadi dasar bagi pengembangan sektor-sektor prioritas jangka panjang.

Dengan memanfaatkan peluang secara strategis, Kota Jambi dapat memperkuat daya saing, menarik lebih banyak investasi, dan memastikan arah pembangunan selaras dengan visi RPJPD 2025–2045. Pemahaman terhadap peluang ini menjadi pijakan penting untuk merancang strategi yang proaktif, adaptif, dan berorientasi pada pertumbuhan berkelanjutan hingga tahun 2045.

Tabel 3.4. Peluang

No.	Peluang	Data Pendukung
1.	Integrasi Jalan Tol	Pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatera (termasuk <i>Exit Tol</i>) meningkatkan aksesibilitas dan potensi Jambi sebagai simpul logistik darat.
2.	Pariwisata Pasca-Tol	Keberadaan Candi Muaro Jambi (sekitar 36 km/60 menit dari <i>Exit Tol Pijoan</i>) dan Kota Seberang (heritage) dapat meningkatkan <i>length of stay</i> wisatawan.
3.	Investasi Hijau (ESG)	Arahan kebijakan nasional (RPJMN 2025–2045) memprioritaskan Investasi Berwawasan Lingkungan (ESG), mendorong PLTS dan pengelolaan limbah.
4.	Skema KPBU/PPP	Adanya skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah utilitas (NRW) dan infrastruktur.
5.	Pertumbuhan TIK	Tren permintaan terhadap Data Center dan infrastruktur digital dapat memanfaatkan Jambi sebagai regional <i>digital backbone</i> .
6.	Sertifikasi Halal Wajib	Regulasi Wajib Halal membuka peluang investasi pada Rumah Produksi Bersama dan jasa sertifikasi/pengemasan modern bagi UMK.
7.	Potensi <i>Medical Tourism</i>	Peningkatan permintaan terhadap layanan kesehatan spesialis membuka peluang investasi RS Tersier/Spesialis untuk mengurangi rujukan keluar daerah.
8.	Dukungan <i>Urban Farming</i>	Adanya teknologi dan tren pertanian perkotaan untuk efisiensi rantai pasok dan stabilitas pangan (sesuai <i>Draft Peta Profil Investasi</i>).
9.	Regulasi Kemudahan Investasi	Dukungan dari Pemerintah Pusat melalui UU Cipta Kerja dan sistem OSS RBA yang mempermudah perizinan dan penyederhanaan birokrasi.
10.	Dana Internasional/CSR	Peluang mendapatkan pendanaan untuk konservasi, pengembangan kawasan budaya Kota Seberang, atau proyek sosial-lingkungan.

3.1.4. Tantangan

Analisis tantangan menjadi bagian penting dalam penyusunan RUPM Kota Jambi 2025–2045, karena memberikan gambaran mengenai berbagai risiko eksternal yang dapat mempengaruhi iklim investasi dan arah pembangunan jangka panjang. Tantangan seperti ketidakpastian ekonomi global, persaingan antarwilayah, perubahan teknologi yang cepat, tuntutan standar pelayanan publik, serta isu lingkungan dan perubahan iklim perlu dicermati agar tidak menghambat realisasi investasi. Dengan memahami tantangan sejak awal, pemerintah daerah dapat merancang strategi mitigasi yang tepat, memperkuat ketahanan ekonomi kota, dan memastikan bahwa arah pembangunan serta penanaman modal tetap berada pada jalur yang berkelanjutan hingga tahun 2045.

Tabel 3.5. Tantangan

No.	Tantangan	Data Pendukung
1.	Kompetisi Regional	Persaingan agresif dari kota-kota PKW lainnya di Sumatera (Palembang, Padang) dalam menarik PMA/PMDN berkualitas tinggi.
2.	Ketidakpastian Regulasi Pusat	Dasar hukum RUPM 2025–2045 belum ada Perpres baru (masih merujuk UU 25/2007), menciptakan potensi ketidakpastian.
3.	Gejolak Harga Logistik	Kenaikan harga energi dan logistik global dapat meningkatkan biaya investasi, berpengaruh negatif pada sektor Logistik dan Industri Hilir.
4.	Ancaman Perubahan Iklim	Peningkatan frekuensi dan intensitas banjir Batanghari (IRB Sedang-Tinggi) mengancam investasi infrastruktur di bantaran sungai.
5.	Konflik Tata Ruang	Risiko perkembangan hunian di pinggiran (<i>urban fringe</i>) yang tidak terkendali, berpotensi melanggar RTRW dan memicu sengketa lahan.
6.	Inflasi Pangan Tinggi	Ketergantungan pangan tinggi membuat ekonomi kota rentan terhadap gejolak harga pangan yang dipicu faktor eksternal.
7.	Suku Bunga/Moneter	Kenaikan suku bunga acuan dan kebijakan moneter pusat dapat menghambat investasi di sektor Real Estate (properti) dan industri padat modal.
8.	Isu Keamanan Siber	Peningkatan ancaman serangan siber yang dapat menghambat investasi di sektor TIK dan <i>Digital Economy</i> .
9.	Intervensi Provinsi/Pusat	Adanya kebijakan pengembangan kawasan atau sektor yang tumpang tindih dari Pemerintah Provinsi atau Pusat.
10.	Perpindahan Sektor Basis	Risiko perpindahan sektor manufaktur atau pengolahan yang sudah ada ke kawasan industri yang lebih matang di provinsi tetangga.

3.2. Analisis PESTEL

Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Jambi untuk periode 2025–2045 memiliki urgensi ganda: mematuhi mandat hukum yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang RPJPD Kota Jambi 2025–2045, sekaligus menjawab tantangan transformasi ekonomi yang fundamental. Kota Jambi, yang berstatus sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dituntut untuk menarik investasi yang bukan hanya kuantitas, tetapi juga berkualitas, berdaya saing tinggi, dan berkelanjutan (ESG).

Untuk memastikan RUPM Kota Jambi 2025–2045 menjadi peta jalan pembangunan yang efektif, diperlukan analisis variabel eksternal melalui pendekatan PESTEL, karena faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum memiliki pengaruh langsung terhadap iklim investasi meskipun berada di luar kendali pemerintah daerah. Studi-studi sebelumnya menegaskan pentingnya pendekatan ini, di mana stabilitas politik, kebijakan pajak, dan regulasi investasi memengaruhi keputusan penanaman modal (Sigcha et al., 2020), sementara inflasi, suku bunga, dan kondisi ekonomi global turut menentukan daya tarik investasi (Niu, 2024). Dinamika demografi dan sikap masyarakat memberikan wawasan strategis (Bloom et al., 2007), kemajuan teknologi mendorong produktivitas (Isaeva et al., 2023), dan isu lingkungan menuntut perhatian terhadap keberlanjutan (Achinas et al., 2019). Kepastian hukum juga penting untuk menjamin investasi serta meningkatkan minat investor jangka panjang (Zhang et al., 2023). Dengan analisis PESTEL yang komprehensif, RUPM dapat dirancang untuk merespons perubahan global maupun lokal dan menciptakan iklim investasi yang kondusif serta berkelanjutan bagi Kota Jambi.

Analisis PESTEL menjadi dasar penting dalam memastikan RUPM Kota Jambi dirancang secara aman, efisien, dan berkelanjutan, terutama melalui penilaian faktor lingkungan dan legal. Aspek lingkungan menekankan pentingnya mitigasi risiko banjir melalui pemetaan topografi dan identifikasi kerentanan sebagaimana dijelaskan (Rasn et al., 2021; Thannoun & Ismaeel, 2024), yang membantu menentukan lokasi pembangunan yang lebih aman. Dari sisi legal, penerapan RTRW 2013–2033 memastikan kepastian hukum bagi investor dan mendorong pembangunan yang selaras dengan aturan tata ruang. Analisis PESTEL juga memungkinkan RUPM terhubung dengan agenda nasional seperti investasi hijau, ESG, dan penguatan infrastruktur TIK (Alimin, E., Eddy, D., Afriani, D., Agusfianto, N. P., Octavia, Y. F., Mulyaningsih, T., Satriawan, S., Yusuf, S. Y. M.,

Irwansyah, R., Moonti, A., Sudarni, A. A. C., Endrawati, B. F., Suhadarliyah, A., Armiani, A., Andayani, S. U., & Tabun, 2022), sekaligus membantu pemangku kepentingan memprioritaskan lokasi investasi yang aman dan berkelanjutan untuk meminimalkan risiko sosial, ekologis, dan ekonomi (Antomi, 2019; Dhenabayu et al., 2022). Dengan demikian, PESTEL memastikan bahwa strategi pembangunan Kota Jambi mampu merespons dinamika eksternal sekaligus menjaga keberlanjutan jangka panjang. Adapun hasil dari analisis PESTEL yang ditunjukkan pada table berikut:

Tabel 3.6. Analisis PESTEL

Faktor	Deskripsi Faktor	Peluang (Opportunities)	Ancaman (Threats)	Implikasi Strategis RUPM
1. Politik (<i>Political</i>)	Stabilitas pemerintahan, kebijakan fiskal, dan komitmen regulasi daerah/pusat.	Adanya Perda RPJPD Nomor 10 Tahun 2024 dan komitmen politik terhadap visi investasi hijau (<i>Green Investment</i>).	Kompetisi Regional: Persaingan agresif dari PKW lain di Sumatera (Palembang, Padang). Ketidakpastian Regulasi Pusat: Perpres RUPM 2025–2045 belum ditetapkan.	RUPM harus selaras dengan RPJPD dan menetapkan Insentif Non-Fiskal yang kompetitif dan terarah untuk memenangkan persaingan.
2. Ekonomi (<i>Economic</i>)	Pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, dan daya beli masyarakat.	Status Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang menjadi <i>hub</i> Logistik dan Perdagangan, didukung oleh Sektor Tersier (SLQ > 1).	Gejolak Harga Logistik/Komoditas: Fluktuasi harga energi global yang dapat menaikkan biaya investasi dan biaya operasional. Inflasi Pangan: Ketergantungan pangan yang tinggi terhadap pasokan luar daerah.	Fokus investasi pada sektor basis (Logistik & TIK) dan mendorong hilirisasi pangan lokal untuk menstabilkan harga dan mengurangi impor.
3. Sosial (<i>Social</i>)	Demografi, budaya, tingkat pendidikan, dan gaya hidup masyarakat.	Potensi Pariwisata Budaya: Kawasan Kota Seberang (Kawasan Strategis Sosial Budaya) dan Candi Muaro Jambi (36 km dari Exit Tol Pijoan) dapat meningkatkan <i>length of stay</i> .	Kesenjangan Keterampilan: Kualitas Pendidikan Vokasi (SMK) belum sepenuhnya <i>link & match</i> dengan kebutuhan sektor unggulan RUPM.	Investasi harus difokuskan pada Pendidikan Vokasi (Logistik, <i>Hospitality</i>) dan Kesehatan Spesialis untuk menutup <i>gap</i> SDM dan meningkatkan kualitas hidup.



Faktor	Deskripsi Faktor	Peluang (Opportunities)	Ancaman (Threats)	Implikasi Strategis RUPM
4. Teknologi (<i>Technological</i>)	Inovasi, otomasi, infrastruktur digital, dan R&D.	Tren Ekonomi Digital dan permintaan tinggi terhadap Data Center dan infrastruktur TIK (fiber optik).	Ancaman Siber: Peningkatan risiko keamanan siber yang dapat menghambat investasi di sektor TIK.	Prioritas investasi pada infrastruktur TIK (<i>digital backbone</i>) dan mendorong adopsi teknologi (misalnya Urban Farming Berteknologi) untuk efisiensi pangan.
5. Lingkungan (<i>Environmental</i>)	Perubahan iklim, isu keberlanjutan (ESG), dan pengelolaan sumber daya alam.	Arahan RPJMN dan RPJPD yang memprioritaskan Investasi Hijau (ESG), membuka peluang di sektor energi terbarukan dan pengelolaan limbah.	Defisit Kritis Utilitas: Angka Non-Revenue Water (NRW) mencapai 37,6% (hambatan terbesar bagi investor). Risiko Bencana: IRB Sedang-Tinggi (rawan banjir) di sepanjang Batanghari mengancam infrastruktur.	Mewajibkan kepatuhan ESG pada proyek besar dan memprioritaskan skema KPBU untuk investasi revitalisasi utilitas air bersih dan pengelolaan limbah.
6. Hukum (<i>Legal</i>)	Undang-undang, peraturan daerah, dan sistem perizinan.	Penegakan RTRW: Perda RTRW Nomor 9 Tahun 2013 yang mengatur zonasi dan penggunaan sistem OSS RBA yang mempermudah perizinan.	Konflik Tata Ruang: Risiko <i>urban sprawl</i> di pinggiran kota (Kota Baru/Alam Barajo) yang tidak sesuai KKPR/RTRW. Sengketa Lahan: Potensi konflik lahan di kawasan ekspansi investasi.	RUPM harus menjadi alat penegakan KKPR dan RTRW untuk pengendalian tata ruang dan memberikan jaminan kepastian lahan yang disiapkan untuk investasi.



BAB 4

VISI DAN MISI RUPM KOTA JAMBI 2025-2045

Visi RUPM Nasional sampai Tahun 2025 menekankan pentingnya investasi berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, dan sejahtera melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan daya saing teknologi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Kepastian hukum menjadi aspek kunci karena regulasi yang jelas mampu meningkatkan kepercayaan investor, terutama pada sektor hilirisasi dan pengembangan inovasi lintas sektor.

Misi RUPM mencakup tiga hal utama: (1) menciptakan iklim investasi yang berdaya saing melalui kepastian hukum, layanan yang cepat, dan biaya yang efisien; (2) memperkuat investasi strategis, termasuk ekonomi digital, untuk meningkatkan daya saing dengan dukungan regulasi dan infrastruktur yang memadai; dan (3) mewujudkan pemerataan investasi di seluruh wilayah Indonesia sesuai prinsip keadilan sosial dan nondiskriminasi. Program sertifikasi dan pendaftaran tanah yang transparan juga menjadi bagian penting untuk menjamin kepastian hukum sekaligus membuka peluang investasi, termasuk pada sektor pertanian dan usaha lokal. Pencapaian visi tersebut memerlukan penerapan prinsip akuntabilitas, keberlanjutan, dan pemerataan, sehingga manfaat investasi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pada tingkat provinsi, Visi RUPM Provinsi Jambi 2015–2025 menargetkan penanaman modal yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan sejahtera. Kebijakan investasi daerah diarahkan untuk sejalan dengan arah pembangunan nasional, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan. Kebijakan investasi di Provinsi Jambi menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga, penetapan prioritas pada investasi yang memberikan manfaat sosial tinggi, serta pemberian ruang bagi investor yang mendukung prinsip keberlanjutan. DPMPTSP berperan sentral dalam penyelenggaraan perizinan serta memastikan bahwa investasi yang masuk memberikan dampak positif jangka panjang.

Prioritas investasi diarahkan pada sektor-sektor bernilai tambah seperti hilirisasi pertanian dan pengolahan sumber daya alam, misalnya pada komoditas kelapa sawit, agar mampu meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan. Kepastian hukum dan kejelasan regulasi penggunaan

lahan menjadi faktor penting dalam menarik investasi, sekaligus melindungi lingkungan dan masyarakat setempat. Visi RUPM Provinsi Jambi mempunyai makna:

1. Pertumbuhan ekonomi Jambi ditopang oleh sektor primer yang dapat berdampak luas terhadap lingkungan, oleh karena itu, dibutuhkan penanaman modal yang berorientasi dan ramah pada lingkungan.
2. Penanaman modal sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi daerah, namun yang dibutuhkan adalah penanaman modal yang berwawasan lingkungan yang dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.
3. Untuk mewujudkan penanaman modal yang berwawasan lingkungan dibutuhkan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi penanaman modal yang kuat harus mampu meningkatkan jalinan antara instansi pemerintah dengan swasta dan Masyarakat maupun sesama instansi pemerintah ditingkat pusat maupun Kabupaten/Kota. Penciptaan dan pemeliharaan hubungan tersebut baik secara vertikal dengan pemerintah pusat dan luar negeri. Menciptakan dan memadukan program penanaman modal dengan program terkait lainnya.
4. Penanaman modal yang berwawasan lingkungan yang dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan mengandung arti bahwa Pemerintah Provinsi Jambi harus mampu menciptakan peluang bagi investor yang ramah lingkungan; oleh karena itu, penanaman modal harus diarahkan dan diprioritaskan pada penanaman modal yang memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat dengan tidak mengorbankan lingkungan.
5. Peningkatan penanaman modal di Provinsi Jambi diharapkan mampu mewujudkan masyarakat Jambi yang maju, adil, dan sejahtera, mengandung arti bahwa hasil dari penanaman modal dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian sehingga terjadi kemajuan bagi seluruh strata masyarakat secara merata dan adil yang pada gilirannya memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Jambi.

Dalam upaya untuk mewujudkan Visi di atas agar arah dan tujuan dari Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi Jambi dapat terealisasi dengan baik, maka Misi RUPM Provinsi Jambi tahun 2015–2025 sebagai berikut:

1. Menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif yang ditandai dengan terciptanya rasa aman dan nyaman dalam kegiatan penanaman modal yang



tercermin dari rendahnya tingkat gangguan keamanan bagi investor, baiknya hubungan pengusaha dengan buruh dan lingkungan sekitar, tidak adanya lagi pungutan liar oleh oknum pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat, serta terselesainya masalah konflik antara pengusaha dengan masyarakat dan terciptanya hubungan industrial secara baik.

2. Meningkatkan infrastruktur penanaman modal secara kualitas dan kuantitas prima antara lain seperti: kebijakan daerah yang berpihak kepada penanam modal (investor) secara adil; standar pelayanan yang kondusif dan sehat investasi; dan proses perizinan yang cepat, murah, dan transparan; hal ini perlu didukung oleh kualitas sumber daya manusia, infrastruktur transportasi, kawasan industri, listrik, telepon, air minum, rumah sakit, pasar, dan fasilitas lain yang berstandar minimal nasional.
3. Menjalin kepastian hukum dan kepastian berusaha yang ditandai dengan adanya SOP (Standard Operating Procedure) di bidang penanaman modal yang berpihak pada penanaman modal yang dapat diterapkan dan dapat menjamin hak-hak pekerja, penegakan hukum yang konsisten dan tidak diskriminatif, serta perlakuan yang sama terhadap penanaman modal lokal, domestik, dan asing.
4. Mewujudkan penanaman modal yang ecofriendly yang ditandai dengan keramahan pada lingkungan baik pengelolaannya maupun teknologi yang digunakan, penanaman modal yang tidak mencemari udara, sungai, air, dan tanah; penanaman modal berorientasi pada kelestarian lingkungan; penanaman modal yang pro pada bahan baku lokal, tenaga kerja lokal, dan sumber daya lokal lainnya.
5. Meningkatkan diversifikasi kegiatan ekonomi yang memiliki nilai tambah tinggi yang ditandai dengan meningkatnya penanaman modal ke sektor industri hilir, seperti industri hilir berbasis komoditi perkebunan, kehutanan, pertanian, perikanan, industri pakan ternak dan ikan; meningkatnya industri di sektor perdagangan, jasa, dan industri kreatif seperti perhotelan dan industri rumah tangga diantaranya handicraft serta produk UKM lainnya.
6. Meningkatkan peluang bagi investasi sumber daya manusia untuk mendukung terakomodasinya pelayanan prima kepada investor, sehingga mampu meningkatkan daya saing produk investasi

4.1. Visi RUPM Kota Jambi Periode 2025-2045

Visi RPJPD 2025–2045 **“Kota Jambi Maju, Adil, Berkelanjutan dengan Masyarakat yang Sejahtera, Agamis, dan Berbudaya”** serta visi RPJMD 2025–2029 **“Mewujudkan Kota Perdagangan dan Jasa yang Bersih, Aman, Harmonis, Agamis, Inovatif, dan Sejahtera”** sejalan dengan Visi RUPM Kota Jambi 2025–2045 mengintegrasikan arah investasi berkelanjutan nasional dengan kebutuhan serta potensi lokal. Visi RUPM Kota Jambi 2025-2045 adalah:

“Kota Jambi sebagai Pusat Investasi Hijau, Inklusif, dan Berdaya Saing menuju Kota Cerdas dan Berkelanjutan.”

Secara keseluruhan, visi RUPM Kota Jambi menggambarkan strategi yang holistik dan terintegrasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, merata, dan selaras dengan kebijakan nasional maupun provinsi. Dengan visi ini, arah pengembangan investasi Kota Jambi diharapkan mampu mendorong pertumbuhan PDRB yang berkualitas, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan nilai tambah lokal, menjaga kelestarian lingkungan, serta mewujudkan tata kelola kota cerdas yang akuntabel dan partisipatif. Adapun makna dari visi RUPM Kota Jambi 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1. Pusat Investasi

Keselarasan visi terlihat dari fokus RUPM dalam memposisikan Kota Jambi sebagai pusat investasi regional (*regional investment hub*) yang menyediakan proyek siap ditawarkan, kepastian layanan perizinan satu pintu, serta ekosistem pendukung seperti kawasan industri, logistik, dan layanan keuangan. Arah ini merupakan terjemahan langsung dari orientasi “perdagangan dan jasa” pada RPJMD, sehingga RUPM berfungsi sebagai instrumen implementatif untuk mendorong klaster jasa unggulan, memperkuat promosi proyek prioritas, dan memperluas aksesibilitas investasi berkualitas di wilayah Sumatera Tengah.

2. Hijau

Pilar hijau dalam RUPM Kota Jambi secara tegas memperkuat poros “berkelanjutan dan hijau” pada RPJPD dan mandat “bersih” pada RPJMD. Pemerintah mengarahkan setiap investasi untuk menerapkan standar lingkungan yang ketat melalui pelaksanaan AMDAL, prinsip efisiensi energi dan air, teknologi ramah lingkungan, serta pengelolaan

limbah sirkular. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi rendah emisi, kebijakan ini diperkuat dengan dorongan pada proyek-proyek hijau dan insentif selektif bagi investasi ramah lingkungan, termasuk kewajiban sertifikasi hijau bagi kawasan industri dan sektor usaha. Komitmen ini ditindaklanjuti secara konkret menjadi portofolio proyek strategis yang bankable dan siap KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha), meliputi pengembangan utilitas dasar (seperti SPAM untuk menekan *Non-Revenue Water* dan fasilitas Waste-to-Energy), infrastruktur bersih (transportasi publik listrik dan TOD), modernisasi Infokom (*ducting* TIK/data center), penguatan rantai pasok pangan (*cold chain*), dan revitalisasi kawasan *waterfront-heritage* yang berkelanjutan.

3. Inklusif

Sejalan dengan nilai “adil dan sejahtera” dalam RPJPD dan konsep “aman, harmonis, sejahtera” dalam RPJMD, pilar inklusif dalam RUPM memastikan bahwa manfaat investasi dirasakan secara merata oleh seluruh kelompok masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui serangkaian strategi pemerataan ekonomi dan sosial. Fokus utamanya adalah pada penyerapan tenaga kerja lokal yang tinggi (Misi 1) dan penguatan kemitraan usaha besar dengan UMKM/koperasi (Misi 2) melalui mekanisme *kontrak payung* dan target pengadaan daerah. Lebih lanjut, inklusivitas diperkuat melalui peningkatan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) via program vokasi terarah (*link and match*) dan secara spasial, dengan pemerataan proyek investasi berdasarkan arah RTRW dan RDTR. Strategi pemerataan spasial ini secara khusus mengarahkan investasi ke Orde II dan Orde III (seperti Pelayangan dan Jambi Timur) untuk menyeimbangkan konsentrasi yang selama ini didominasi Orde I (CBD), sehingga mewujudkan keadilan dan kesejahteraan di seluruh kawasan kota.

4. Berdaya Saing

Pilar ini mengoperasionalisasikan penekanan “berdaya saing” pada visi RUPM yang selaras dengan orientasi pembangunan ekonomi daerah. Daya saing investasi diperkuat melalui kepastian regulasi dan penyediaan lahan, efisiensi waktu dan biaya perizinan, penyediaan infrastruktur konektivitas dan energi yang handal, serta pemberian insentif selektif untuk sektor-sektor prioritas yang memiliki nilai tambah tinggi.

5. Kota Cerdas (*Smart City*)

Arah “kota cerdas” dalam RUPM konsisten dengan nilai “inovatif” dalam RPJMD dan dimensi “maju” dalam RPJPD. Tata kelola investasi dirancang berbasis data dan sistem

digital secara end-to-end, mulai dari penyediaan informasi peluang, proses perizinan, monitoring realisasi, hingga pelaporan dan pengawasan. Pendekatan ini memastikan layanan yang transparan, akuntabel, efisien, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha.

6. Berkelanjutan

Pilar berkelanjutan merepresentasikan integrasi dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang sejalan dengan mandat RPJPD dan RPJMD. Fokus kebijakan mencakup hilirisasi ekonomi bernilai tambah, penciptaan pekerjaan yang layak, pengurangan kemiskinan dan ketimpangan, serta penguatan ketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana. Nilai “agamis dan berbudaya” dalam RPJPD/RPJMD juga diarusutamakan melalui penerapan kriteria sosial–budaya ESG, pengembangan pariwisata heritage, dan partisipasi publik dalam pengembangan proyek investasi.

7. Orientasi Hasil (*Result-Oriented*)

RUPM mengadopsi pendekatan berbasis hasil untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas kebijakan. Keberhasilan investasi diukur dengan indikator terpilih seperti realisasi investasi hijau, proporsi kemitraan UMKM, serapan tenaga kerja lokal, efisiensi waktu dan biaya perizinan, kualitas lingkungan (emisi dan limbah), serta pemerataan spasial proyek. Pendekatan ini menegaskan bahwa seluruh strategi harus berkontribusi pada pencapaian pembangunan jangka panjang Kota Jambi secara terukur dan berkelanjutan.

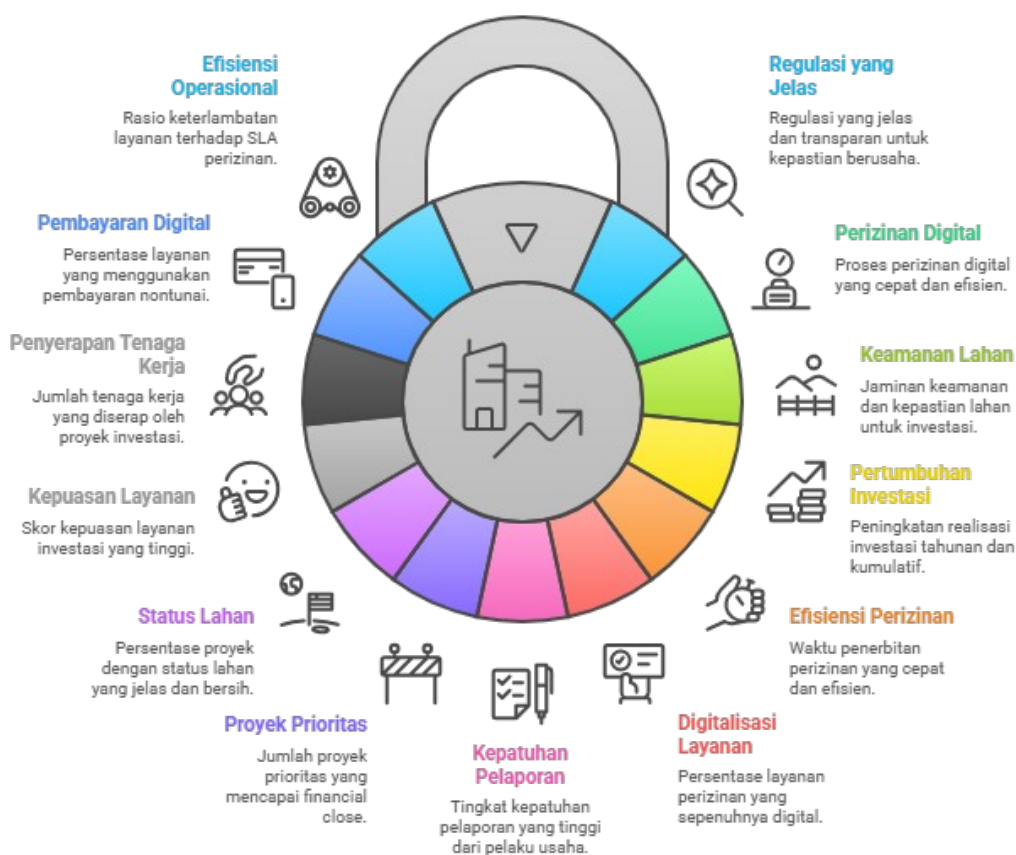
4.2. Misi RUPM Kota Jambi Periode 2025-2045

Misi yang akan dijalankan untuk mewujudkan Visi penanaman modal daerah Kota Jambi Tahun 2025-2045 yaitu:

Misi 1: Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing

Misi 1 RUPM Kota Jambi berfokus pada penciptaan Iklim Investasi yang Kondusif dan Berdaya Saing melalui peningkatan kepastian dan kemudahan berusaha. Tujuan utama misi ini adalah menjamin regulasi yang jelas, perizinan digital *end-to-end* yang cepat, serta kepastian lahan dan keamanan agar daya saing kota meningkat. Keberhasilan misi ini akan diukur secara ketat melalui indikator kunci seperti pertumbuhan realisasi investasi (PMA+PMDN) tahunan, rata-rata waktu penerbitan perizinan, tingkat kepatuhan pelaporan LKPM, serta persentase layanan digital yang menggunakan pembayaran nontunai dan

tanda tangan elektronik. Selain itu, misi ini juga mengukur dampak sosial dengan memantau penyerapan tenaga kerja lokal dan efisiensi operasional melalui rasio keterlambatan layanan terhadap *Service Level Agreement* (SLA). Adapun indikator misi 1 dapat dijelaskan pada Gambar 4.1 berikut:



Made with Napkin

Gambar 4. 1. Indikator iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing

Misi 2: Mendorong pemerataan dan keadilan investasi antar wilayah

Misi 2 RUPM Kota Jambi berfokus pada dorongan Pemerataan dan Keadilan Investasi Antar Wilayah, dengan tujuan utama mengurangi disparitas ekonomi antar-kecamatan. Strategi ini menekankan pada persebaran investasi yang selaras dengan RTRW/RDTR, penguatan konektivitas logistik, dan penguatan kemitraan usaha besar dengan UMKM/koperasi agar manfaat investasi benar-benar dirasakan merata oleh seluruh masyarakat. Keberhasilan misi ini akan diukur melalui indikator pemerataan yang ketat, termasuk rasio nilai investasi tertinggi berbanding terendah antar-kecamatan (dengan target

penurunan rasio), peningkatan kontribusi kecamatan non-CBD terhadap total realisasi, dan jumlah proyek *ready to offer* di setiap wilayah. Selain itu, misi ini juga memantau dampak inklusif melalui serapan tenaga kerja lokal, nilai kontrak kemitraan usaha besar–UMKM, serta efisiensi koridor logistik melalui waktu tempuh rata-rata antar-kawasan, dan kepuasan pelaku usaha terhadap dukungan lokasi di luar CBD. Adapun indikator misi 2 dapat dijelaskan pada Gambar 4.2 berikut:

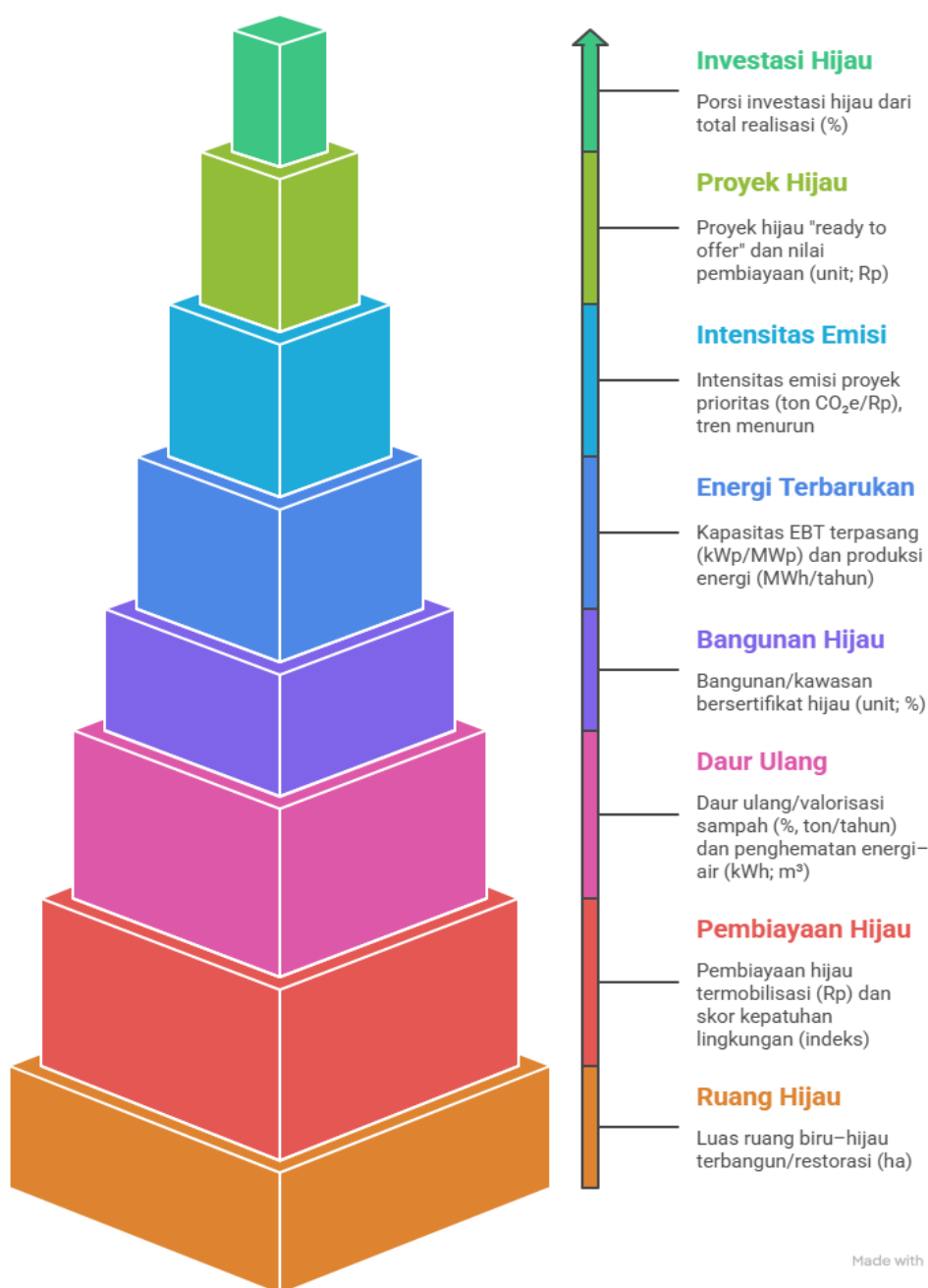


Gambar 4. 2. Indikator pemerataan dan keadilan investasi antar wilayah

Misi 3: Mengembangkan investasi hijau dan ekonomi berkelanjutan

Misi 3 RUPM Kota Jambi berfokus pada pengembangan Investasi Hijau dan Ekonomi Berkelanjutan, sebuah langkah fundamental untuk mendorong pertumbuhan ekonomi rendah emisi. Tujuannya adalah memprioritaskan proyek dan pelaku usaha yang secara ketat memenuhi prinsip ESG (Environmental, Social, Governance), efisiensi energi–air, dan konsep ekonomi sirkular dalam pengelolaan limbah, sehingga ketahanan lingkungan kota meningkat. Keberhasilan misi ini akan diukur melalui serangkaian indikator kuantitatif yang ketat, termasuk porsi nilai investasi hijau terhadap total realisasi,

penurunan intensitas emisi proyek prioritas, peningkatan kapasitas Energi Baru Terbarukan (EBT) terpasang, serta persentase bangunan/kawasan yang mendapatkan sertifikasi hijau (GREENSHIP/EDGE/LEED). Selain itu, misi ini juga memantau dampak lingkungan langsung seperti volume sampah yang dialihkan dari TPA melalui 3R/*Waste-to-Energy* (WtE), dan luas ruang terbuka hijau/biru yang direstorasi, menegaskan komitmen kota terhadap keberlanjutan. Adapun indikator misi 3 dapat dijelaskan pada Gambar 4.3 berikut:



Made with  Napkin

Gambar 4. 3. Indikator investasi hijau dan ekonomi berkelanjutan

Misi 4: Memperkuat sektor unggulan dan ekonomi kreatif

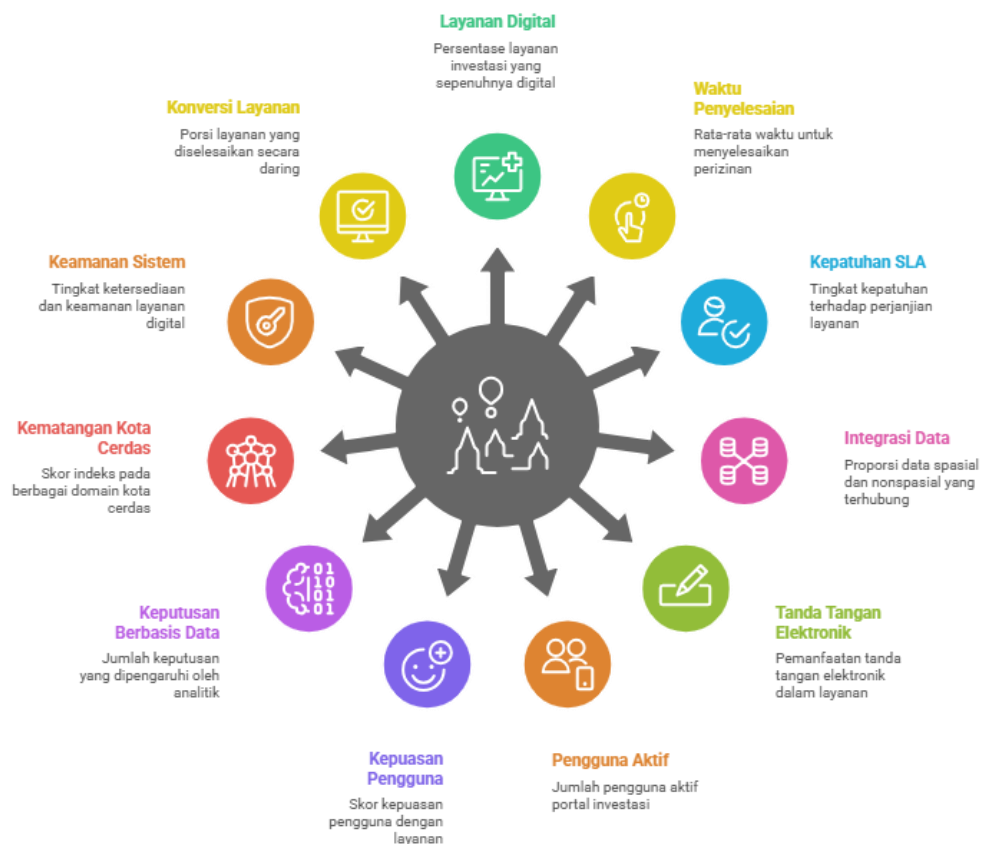
Misi 4 RUPM Kota Jambi didedikasikan untuk Memperkuat Sektor Unggulan dan Ekonomi Kreatif, yang bertujuan mempercepat pertumbuhan nilai tambah daerah. Strategi ini berfokus pada akselerasi hilirisasi sektor unggulan—seperti agro, perikanan, hasil hutan, dan makanan & minuman (F&B)—sambil menguatkan ekosistem ekonomi kreatif—digital (Sektor R–U). Keberhasilan misi ini akan diukur melalui peningkatan nilai tambah output hilir dan penetrasi pasar luar daerah/ekspor untuk produk unggulan dan kreatif. Indikator pendukung yang ketat, seperti jumlah proyek hilirisasi yang terealisasi, jumlah pelaku kreatif yang naik kelas melalui inkubasi dan pembiayaan, perolehan sertifikasi mutu dan HKI, serta omzet median pelaku UMKM binaan, akan memastikan bahwa produk dan talenta Jambi berdaya saing dan berorientasi pasar, sekaligus membuka peluang kerja formal tersertifikasi di sektor-sektor kunci. Adapun indikator misi 4 dapat dijelaskan pada Gambar 4.4 berikut:



Gambar 4. 4. Indikator sektor unggulan dan ekonomi kreatif

Misi 5: Mewujudkan Kota Cerdas (*Smart City*) dan pusat layanan investasi digital

Misi 5 RUPM Kota Jambi berfokus pada Mewujudkan Kota Cerdas (*Smart City*) dan Pusat Layanan Investasi Digital, yang bertujuan mewujudkan layanan investasi digital *end-to-end* dan ekosistem terintegrasi agar proses perizinan lebih cepat, transparan, dan berbasis data, sehingga meningkatkan daya saing Kota Jambi. Pemerintah daerah membangun layanan digital terpadu yang mencakup seluruh tahapan, mulai dari informasi peluang, layanan konsultasi, perizinan, monitoring realisasi, hingga pelaporan kepatuhan. Untuk menjamin kecepatan dan akuntabilitas, sistem ini diwajibkan mengadopsi tandatangan elektronik (TTE), pembayaran nontunai, serta menerapkan mekanisme fiktif-positif dalam pengurusan perizinan. Transformasi ini diperkuat dengan integrasi data spasial dan nonspasial dari berbagai proyek ke dalam *dashboard* kinerja daerah, yang memungkinkan pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based policy*), serta memastikan keberhasilan melalui indikator kinerja seperti rata-rata waktu penyelesaian perizinan dan skor kematangan *smart city*. Adapun indikator misi 5 dapat dijelaskan pada Gambar 4.5 berikut:



Made with Napkin

Gambar 4. 5. Indikator Kota Cerdas (*Smart City*) dan pusat layanan investasi digital

Misi 6: Meningkatkan kolaborasi dan promosi investasi daerah

Pemerintah daerah mengedepankan strategi kolaborasi dan promosi melalui pembentukan Forum *Quadruple Helix* yang aktif melibatkan pemerintah, industri, academia, dan komunitas—sebagai wadah utama untuk menyusun *pipeline* proyek investasi dan melakukan pemetaan kebutuhan keterampilan tenaga kerja yang relevan. Selain sinergi internal, kegiatan promosi investasi harus dilakukan secara terarah dan strategis (*sector-focused and investor-specific*) dengan menyiapkan materi investasi yang bankable (seperti *opportunity profile* dan *pre-feasibility*), didukung oleh paket insentif yang jelas dan kompetitif guna menarik minat investor potensial. Dalam skala yang lebih luas, Kota Jambi berupaya menjalin kemitraan regional dan nasional untuk mendorong integrasi rantai pasok antarwilayah di Sumatera Tengah serta membuka akses pasar ekspor bagi produk unggulan daerah. Melalui sinergi multipihak dan strategi promosi yang tepat, ekosistem investasi daerah diharapkan dapat tumbuh lebih inklusif, terintegrasi, dan berdaya saing di tingkat nasional maupun global.

Misi 6 RUPM Kota Jambi berfokus pada peningkatan Kolaborasi dan Promosi Investasi Daerah, dengan tujuan utama membangun ekosistem multipihak yang kuat dan promosi yang terarah agar deal flow meningkat, *pipeline* proyek berkualitas terwujud, dan jejaring pasar daerah meluas. Strategi kunci mencakup pengaktifan Forum *Quadruple Helix* (pemerintah–industri–akademia–komunitas) untuk menyusun *pipeline* dan kebutuhan kompetensi, serta memfasilitasi kerja sama lintas daerah untuk integrasi rantai pasok. Keberhasilan misi ini diukur secara kuantitatif, berfokus pada tingkat konversi promosi (dari *leads* menjadi MoU/LoI hingga realisasi investasi), nilai dan jumlah kontrak kemitraan usaha besar UMKM dalam rantai pasok lokal, waktu tindak lanjut prospek investor oleh *helpdesk*, dan jumlah proyek *ready to offer* yang dipresentasikan dalam *roadshow* dan *business matching*. Selain itu, misi ini juga memastikan OPD dan BUMD didampingi untuk menyiapkan materi promosi yang terstandar dan proyek yang benar-benar *bankable*. Adapun indikator kuantitatif terperinci untuk mengukur capaian Misi 6 dapat dilihat pada Gambar 4.6 yang mencakup metrik dari *leads* hingga realisasi investasi.

1	Membangun Ekosistem Kolaborasi Membangun jaringan antara pemerintah, industri, academia, dan komunitas
2	Meningkatkan Promosi Investasi Melakukan kegiatan promosi untuk menarik investor
3	Mengembangkan Proyek Siap Ditawarkan Menyiapkan proyek untuk dipresentasikan kepada investor
4	Mengonversi Leads Menjadi Investasi Mengubah leads promosi menjadi komitmen investasi
5	Meningkatkan Kemitraan Usaha Mendorong kemitraan antara usaha besar dan UMKM
6	Memperluas Jangkauan Promosi Digital Meningkatkan visibilitas online melalui portal investasi
7	Meningkatkan Layanan Dukungan Investor Memastikan respons tepat waktu dan kepuasan investor
8	Memfasilitasi Kerja Sama Lintas Daerah Mempromosikan integrasi rantai pasok dan akses pasar
9	Menstandarisasi Materi Promosi Mengembangkan materi promosi yang konsisten dan diperbarui
10	Memberikan Pelatihan Pitching Melatih OPD/BLUD dan BUMD untuk menyiapkan proyek bankable

Gambar 4. 6. Indikator kolaborasi dan promosi investasi daerah

Keselarasan RUPM Kota Jambi 2025–2045 dengan dokumen perencanaan daerah tercermin melalui integrasi yang kuat antara enam misi utama RUPM dengan arah kebijakan RPJPD 2025–2045 dan RPJMD 2025–2029. Misi pertama, yaitu pembangunan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing, selaras dengan RPJPD yang menekankan transformasi tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan modern serta penguatan stabilitas ekonomi daerah. Keterkaitan ini diperkuat oleh RPJMD melalui agenda penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kapasitas ekonomi



perkotaan, serta ketertiban dan partisipasi masyarakat. Sementara itu, Misi kedua, mengenai pemerataan dan keadilan investasi antarkawasan, berkorespondensi dengan RPJPD yang menegaskan pentingnya pembangunan yang merata dan inklusif, serta RPJMD yang mengarahkan pemerataan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup sebagai fondasi pertumbuhan investasi. Misi ketiga, yaitu investasi hijau dan ekonomi berkelanjutan, juga sejalan dengan fokus RPJPD pada ketahanan ekologi dan transformasi ekonomi berkelanjutan, serta diperkuat oleh RPJMD melalui prioritas pengelolaan lingkungan hidup yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan.

Selanjutnya, Misi keempat RUPM terkait penguatan sektor unggulan dan ekonomi kreatif menunjukkan konsistensi dengan RPJPD yang mendorong transformasi ekonomi bernilai tambah serta penguatan sosial budaya, termasuk pariwisata dan heritage, dan selaras dengan RPJMD yang menekankan peningkatan kapasitas ekonomi perkotaan dan kualitas sumber daya manusia. Misi kelima, yaitu pengembangan kota cerdas dan layanan investasi digital, juga beririsan dengan RPJPD yang memprioritaskan modernisasi tata kelola dan peningkatan sarana pelayanan publik, serta RPJMD yang memperkuat smart governance dan smart utility dalam pengelolaan infrastruktur daerah. Terakhir, Misi keenam tentang penguatan kolaborasi dan promosi investasi konsisten dengan RPJPD yang menekankan partisipasi publik, ketertiban, dan kesinambungan pembangunan, serta sejalan dengan RPJMD yang mengedepankan ketertiban lingkungan, partisipasi masyarakat, dan penguatan kualitas sumber daya manusia. Keselarasan lintas dokumen ini menegaskan bahwa RUPM berfungsi sebagai instrumen implementatif yang menghubungkan visi pembangunan jangka panjang dan menengah Kota Jambi secara holistik, integratif, dan berkelanjutan.



BAB V

ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL KOTA JAMBI

Kota Jambi tidak hanya berfungsi sebagai ibu kota provinsi, tetapi secara regional ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), menjadikannya simpul utama distribusi barang dan jasa di kawasan Sumatera bagian tengah. Posisi geografisnya yang vital di jalur konektivitas Lintas Timur Sumatera dan keberadaan Sungai Batanghari menempatkan kota ini sebagai hub logistik dan perdagangan yang efektif, yang menuntut dukungan investasi pada infrastruktur konektivitas dan logistik modern (gudang, Data Center) untuk memperkuat kapasitas pelayanan regionalnya. Sejalan dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045, tantangan fundamental Kota Jambi adalah melakukan transformasi struktural investasi. Profil investasi saat ini cenderung didominasi oleh sektor konsumtif dan berisiko rendah (terutama perdagangan eceran dan jasa sederhana), yang kurang menciptakan efek pengganda.

Oleh karena itu, investasi harus didorong menuju portofolio yang berkualitas, berdaya saing tinggi, dan berkelanjutan, berfokus pada Sektor Jasa Tersier Unggulan (Kesehatan Spesialis, Pendidikan Vokasi, dan TIK/Digital) serta Industri Hilir yang bernilai tambah. Di sisi lain, realitas pembangunan menunjukkan adanya defisit mendesak dalam utilitas dasar, yang paling kritis adalah tingginya angka Non-Revenue Water (NRW) sebesar 37,6% dalam sistem air bersih.

Angka ini tidak hanya mencerminkan inefisiensi, tetapi juga secara langsung menghambat kepastian iklim usaha bagi sektor Properti dan Industri yang memerlukan pasokan air baku yang handal. Di sisi sosial, investasi harus berkontribusi pada peningkatan kualitas modal manusia melalui investasi di bidang pendidikan vokasi dan fasilitas kesehatan spesialis, sambil menjaga stabilitas pangan dan efisiensi rantai pasoknya untuk menekan laju inflasi dan mengatasi tingkat kemiskinan, memastikan bahwa pertumbuhan investasi bersifat inklusif bagi kelompok masyarakat 40% terbawah. Aspek-aspek ini secara keseluruhan berkorelasi langsung dengan daya saing dan ketahanan sosial-ekonomi Kota Jambi di masa depan. Arah kebijakan penanaman modal harus berfokus pada percepatan realisasi investasi berkualitas melalui penguatan empat pilar yang saling terhubung: Sektoral, Infrastruktur, Sosial-Inklusif, dan Iklim Usaha.

Arah kebijakan penanaman modal Kota Jambi, yang termaktub dalam Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) 2025–2045, dirancang sebagai instrumen utama untuk mengorkestrasi transformasi struktural ekonomi kota. Kebijakan ini bertujuan untuk menggeser dominasi investasi dari sektor konsumtif ke sektor produktif dan jasa bernilai tambah tinggi. Strategi utama RUPM adalah secara eksplisit berfokus untuk mengkapitalisasi dominasi Sektor Tersier yang sudah kuat, sekaligus memicu industrialisasi hilir yang terintegrasi. Hal ini diwujudkan melalui promosi penanaman modal yang sangat tersegmentasi dan berorientasi pada hasil, dengan memprioritaskan tiga sektor unggulan yang krusial bagi visi jangka panjang Kota Jambi sebagai Pusat *Hub* Regional yang Berdaya Saing.

Tabel 5.1. Analisis & Strategi RUPM Berbasis Sektor Unggulan Utama Kota Jambi Periode 2025–2045

Sektor Unggulan Utama	Karakteristik Kunci & Peluang Investasi	Arah Investasi Strategis
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Peluang: <i>Heritage Tourism</i> (Pelayangan), <i>Waterfront City</i> (Batanghari), <i>Business & MICE</i> (Pusat Kota). Pertumbuhan layanan pariwisata dan gaya hidup urban.	Pengembangan Klaster Pariwisata & Hospitality: Investasi pada hotel/resort, restoran tematik, dan fasilitas MICE, terutama di kawasan <i>Waterfront</i> dan dekat bandara.
J. Informasi dan Komunikasi	Peluang: Digitalisasi pemerintahan & bisnis, <i>Smart City</i> , kebutuhan <i>data center</i> , dan ekosistem <i>startup</i> .	Pusat Infrastruktur & Ekosistem Digital: Investasi pada jaringan serat optik, <i>data center</i> , <i>co-working spaces</i> , dan akselerator <i>startup</i> digital.
M,N. Jasa Perusahaan	Peluang: Kebutuhan layanan <i>outsourcing</i> , konsultasi, keuangan, dan <i>support services</i> bagi bisnis yang berkembang. Tumbuhnya UMKM dan sektor formal.	Pusat Layanan Bisnis Terintegrasi: Mendorong investasi pada gedung perkantoran modern, <i>shared services centers</i> , dan penyedia layanan konsultasi/keuangan.
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Peluang: Kota Jambi sebagai PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) di Sumatera Tengah, kebutuhan akan layanan kesehatan rujukan dan fasilitas sosial yang modern.	Hub Kesehatan & Sosial Regional: Investasi pada RS spesialis/tersier, klinik modern, fasilitas <i>wellness</i> , dan pengembangan pusat pendidikan/penelitian kesehatan.

Tabel 5.2. Arah Kebijakan dan Strategi RUPM Kota Jambi 2025–2045 (Fokus 4 Sektor Unggulan)

Pilar Strategis	Arah Kebijakan (Output)	Kebijakan Prioritas	Strategi Implementasi Detail (Berbasis Sektor Unggulan)
I. Iklim Investasi Cerdas & Tatakelola	Menciptakan iklim usaha yang efisien, transparan, dan berbasis risiko (RBA) khusus untuk Sektor Unggulan.	Reformasi Perizinan Sektoral & Digitalisasi.	1. Prioritas <i>Fast-Track</i> Perizinan untuk proyek investasi Akomodasi (Hotel Bintang), Data Center, Rumah Sakit Spesialis. 2. Pengembangan Digital Investment Dashboard yang menampilkan paket investasi siap tawar khusus untuk 4 sektor unggulan ini, lengkap dengan lokasi spasial (Orde Kegiatan).
II. Fokus Sektoral & Daya Saing	Mengkonsolidasikan investasi pada Sektor Unggulan Utama untuk memaksimalkan <i>multiplier effect</i> regional.	Insentif Sektoral Terukur & Kemitraan Strategis.	1. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum: Insentif Fiskal (Pajak Daerah) untuk pembangunan hotel/resort baru di kawasan <i>Waterfront</i> dan Fasilitas Kredit Mikro untuk UMKM kuliner di <i>Creative Hub</i> . 2. Informasi & Komunikasi: Alokasi lahan khusus dan Subsidi Infrastruktur Jaringan untuk Data Center dan TIK Hub di dekat bandara/Koridor Kota Baru. 3. Jasa Perusahaan: Insentif Zona Ekonomi Khusus Jasa (ZEK-Jasa) dan kemitraan dengan kampus untuk penyediaan SDM akuntansi/IT. 4. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial: Insentif Non-Fiskal untuk RS Rujukan Regional, dan KPBU untuk klinik/fasilitas kesehatan di Orde II.
III. Sebaran Investasi Spasial (Orde Kegiatan)	Mendorong pertumbuhan yang merata, terintegrasi, dan memanfaatkan potensi tematik kawasan sesuai	Strategi Klasterisasi Berbasis Sektoral & TOD.	1. Orde I (Pusat Kota): Konsolidasi Jasa Perusahaan di CBD, Akomodasi & Makan Minum di <i>Waterfront</i> , dan Jasa Kesehatan di Telanaipura. 2. Orde II

Pilar Strategis	Arah Kebijakan (Output)	Kebijakan Prioritas	Strategi Implementasi Detail (Berbasis Sektor Unggulan)
	karakter Sektor Unggulan.		(Subpusat): Pengembangan TIK Hub & Creative Hub Digital (Informasi & Komunikasi, Jasa Perusahaan) di Kota Baru. 3. Orde III (Pusat Lingkungan): Penguatan Pariwisata <i>Heritage</i> (Akomodasi & Makan Minum) di Pelayangan dan Fasilitas Kesehatan Dasar (Jasa Kesehatan) di area permukiman baru.
IV. Inklusivitas & Keberlanjutan (ESG)	Memastikan setiap investasi bersifat inklusif terhadap ekonomi lokal dan mematuhi prinsip investasi hijau, didukung oleh SDM yang kompeten.	Kemitraan Vokasi & Kepatuhan ESG Wajib.	1. Kemitraan <i>Link & Match</i> Kurikulum antara Politeknik/Vokasi dengan Sektor Kesehatan, TIK, dan Hospitality (Jasa Perusahaan, Akomodasi). 2. Kewajiban Laporan ESG bagi investasi di Sektor Akomodasi (efisiensi energi) dan TIK (konsumsi daya). 3. Fasilitasi Kredit Mikro untuk UMKM penunjang Pariwisata & Ekonomi Kreatif.

5.1. Logistik dan Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK)

RUPM Kota Jambi 2025–2045 memprioritaskan investasi pada Logistik dan TIK sebagai pilar utama konektivitas regional. Arah kebijakan secara tegas mendorong investasi PMA berkapasitas tinggi pada infrastruktur gudang modern, *cold storage* untuk komoditas pangan, dan sistem konektivitas TIK/*data center* guna memperkuat fungsi Kota Jambi sebagai pusat *hub* logistik dan *digital backbone* regional. Strategi promosi penanaman modal diarahkan langsung kepada investor *Global Supply Chain* dan operator *Data Center* skala besar, menyajikan paket peluang investasi (*Project Offering*) yang mengaitkan ketersediaan lahan di koridor Jalan Lingkar (Ring Road) dengan rencana pembangunan infrastruktur tol dan utilitas. Tujuannya adalah menarik investasi yang

mampu meningkatkan efisiensi rantai pasok regional dan menyediakan layanan digital yang andal.

Tabel 5.3. Arah Program Kebijakan dan Regulasi TIK

Program Prioritas	Kegiatan Utama	Output Perizinan
Akselerasi Tata Ruang Logistik	Penyediaan <i>Land Banking</i> : Pemetaan dan alokasi lahan matang di kawasan Jalan Lingkar dan Perbatasan Kota (sesuai RTRW) untuk proyek Logistik/Data Center.	Penerbitan KKPR/PBG yang dipercepat khusus untuk Proyek Gudang/Data Center.
Penguatan Iklim Usaha Digital	Insentif Non-Fiskal TIK: Pemberian jaminan percepatan layanan utilitas (listrik/air) dan kemudahan perizinan operasional (SLA Cepat) bagi investor <i>Data Center</i> .	SLA Cepat untuk Izin Prinsip dan Izin Operasional Proyek TIK.
Kemitraan dan Adopsi Teknologi	Fasilitasi Kemitraan: Mendorong <i>joint venture</i> antara investor TIK/Logistik besar dengan <i>startup</i> dan penyedia jasa lokal untuk menciptakan ekosistem digital.	Peningkatan jumlah NIB Risiko Menengah/Tinggi pada KBLI J (Informasi & Komunikasi).
Standardisasi dan Keamanan	Penetapan standar teknis (SLA) untuk keandalan jaringan logistik dan pengawasan kepatuhan keamanan data pada <i>Data Center</i> .	Sertifikasi Standar dan Izin Komersial/Operasional KBLI J.

Sumber: Data diolah, 2025

5.2. Industri Hilir (Makanan dan Minuman)

Kebijakan investasi pada Sektor Industri Hilir berfokus pada dimensi inklusif RUPM dengan menargetkan investasi pada Industri Pengolahan Makanan dan Minuman Jadi untuk menciptakan nilai tambah hilirisasi produk pertanian lokal, sejalan dengan tren pengeluaran masyarakat dan upaya penguatan UMK. Strategi promosi difokuskan pada skema kemitraan terintegrasi (*integrated partnership*) dan investasi padat karya. Pemerintah Kota akan menawarkan insentif dan fasilitas pendirian Rumah Produksi Bersama (*Shared Production Center*) bagi investor yang berkomitmen melakukan

integrasi rantai pasok dengan UMK makanan dan minuman lokal yang telah memiliki sertifikasi (Halal/PIRT). Pendekatan ini memastikan bahwa investasi skala menengah tidak hanya meningkatkan pertumbuhan, tetapi juga berkontribusi pada penguatan modal manusia dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Tabel 5.4. Arah Program Kebijakan dan Regulasi Industri Hilir

Program Prioritas	Kegiatan Utama	Output Perizinan
Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi	Insentif <i>Fast-Track</i> : Pemberian prioritas dan biaya yang terjangkau untuk pengurusan Sertifikat Halal, PIRT, dan BPOM bagi UMK/industri hilir.	Peningkatan signifikan jumlah Sertifikat PIRT/Halal yang diterbitkan.
Pengembangan Rumah Produksi Bersama	Fasilitasi Kemitraan: Mendorong investasi PMDN untuk pembangunan dan pengelolaan fasilitas produksi bersama (sewa/kelola) yang memenuhi standar industri.	Penerbitan Izin Berusaha untuk fasilitas produksi kolektif dan Industri Pengolahan Risiko Menengah.
Penguatan Rantai Pasok Pangan	Mendorong investasi pada efisiensi rantai pasok pangan dan penyediaan infrastruktur <i>cold storage</i> untuk menjaga stabilitas harga dan kualitas bahan baku.	NIB Risiko Menengah pada KBLI Gudang dan <i>Cold Storage</i> yang melayani sektor pangan.
Promosi dan Akses Pasar	Fasilitasi Ekspor: Melakukan <i>business matching</i> dan promosi produk hilir unggulan Kota Jambi ke pasar domestik dan internasional.	Peningkatan jumlah UMK/Industri Hilir yang memiliki Perizinan Berusaha untuk Ekspor.

Sumber: Data diolah, 2025

5.3. Pariwisata (MICE dan Budaya Sungai)

Untuk memaksimalkan potensi jasa di luar perdagangan, RUPM memberikan insentif khusus pada investasi fasilitas MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition), hotel bintang 3/4 yang terstandar, serta pengembangan destinasi wisata berbasis budaya, sungai, dan ekowisata guna meningkatkan *length of stay* wisatawan domestik yang sedang melonjak signifikan. Strategi Promosi Penanaman Modal dikemas dalam bentuk Portofolio Investasi Wisata Tematik yang menargetkan pengembang properti, operator hospitality berskala nasional/internasional, serta investor strategis yang mendukung pembangunan ekonomi kreatif. Penekanan promosi adalah pada peluang

pengembangan Waterfront City di koridor Batanghari dan insentif non-fiskal berupa percepatan perizinan KKPR/PBG di kawasan strategis sosial-budaya, memastikan bahwa pengembangan pariwisata berjalan paralel dengan pelestarian warisan budaya, ekosistem sungai, dan identitas khas Jambi sesuai visi RUPM.

Tabel 5.5. Arah Program Kebijakan dan Regulasi Pariwisata

Program Prioritas	Kegiatan Utama	Output Perizinan
Akselerasi Izin Proyek Wisata	Penyediaan Insentif Khusus: Pemberian percepatan perizinan KKPR/PBG untuk pembangunan Hotel Bintang 3/4 di lokasi strategis dan Fasilitas MICE.	Penerbitan NIB Risiko Tinggi di Sektor Akomodasi/MICE yang terintegrasi dengan rencana tata ruang.
Pengembangan Kawasan Budaya	Fasilitasi Kemitraan Konservasi: Mendorong investasi swasta untuk revitalisasi rumah panggung dan fasilitas <i>homestay</i> di Pelayangan (Kota Seberang) dengan standar wisata budaya.	Peningkatan jumlah Izin Usaha Pariwisata (NIB KBLI 90) yang berfokus pada wisata budaya dan ekologi sungai.
Integrasi Wisata	Promosi Terpadu: Membangun <i>Portofolio Investasi Wisata Tematik</i> yang mengintegrasikan akomodasi MICE dengan destinasi budaya (Sungai Batanghari) dan Candi Muaro Jambi.	Peningkatan realisasi investasi yang mampu meningkatkan target <i>length of stay</i> wisatawan.
Peningkatan Kualitas Layanan	Vokasi <i>Hospitality</i> : Mendorong investasi pada pendidikan vokasi dan pelatihan SDM di bidang pariwisata dan perhotelan.	Peningkatan jumlah Insentif yang diberikan kepada investor Pendidikan Vokasi (<i>Hospitality</i>).

Sumber: Data diolah, 2025

1. Arah Kebijakan Sektor dan Diversifikasi Investasi

Kebijakan harus mengkapitalisasi dominasi Sektor Tersier dengan memprioritaskan:

- Logistik dan TIK: Mendorong investasi PMA berkapasitas tinggi pada infrastruktur gudang modern, *cold storage*, dan sistem konektivitas TIK/data center untuk memperkuat fungsi Kota Jambi sebagai pusat *hub* regional.
- Industri Hilir: Menargetkan investasi pada Industri Pengolahan Makanan dan Minuman Jadi untuk menciptakan nilai tambah hilirisasi, sejalan dengan tren pengeluaran masyarakat dan visi RUPM.

- Pariwisata: Memberikan insentif khusus pada investasi fasilitas MICE, hotel bintang 3/4 yang terstandar, dan pengembangan destinasi wisata berbasis budaya/sungai guna meningkatkan *length of stay* (lama tinggal) wisatawan domestik yang sedang melonjak.

Tabel 5.6. Arah Program Kebijakan dan Regulasi

Program Prioritas	Kegiatan Utama	Output Perizinan
Akselerasi Izin Proyek Wisata	Penyediaan Insentif Khusus: Pemberian percepatan perizinan KKPR/PBG untuk pembangunan Hotel Bintang 3/4 di lokasi strategis dan Fasilitas MICE.	Penerbitan NIB Risiko Tinggi di Sektor Akomodasi/MICE yang terintegrasi dengan rencana tata ruang.
Pengembangan Kawasan Budaya	Fasilitasi Kemitraan Konservasi: Mendorong investasi swasta untuk revitalisasi rumah panggung dan fasilitas <i>homestay</i> di Pelayangan (Kota Seberang) dengan standar wisata budaya.	Peningkatan jumlah Izin Usaha Pariwisata (NIB KBLI 90) yang berfokus pada wisata budaya dan ekologi sungai.
Integrasi Wisata	Promosi Terpadu: Membangun <i>Portofolio Investasi Wisata Tematik</i> yang mengintegrasikan akomodasi MICE dengan destinasi budaya (Sungai Batanghari) dan Candi Muaro Jambi.	Peningkatan realisasi investasi yang mampu meningkatkan target <i>length of stay</i> wisatawan.
Peningkatan Kualitas Layanan	Vokasi <i>Hospitality</i> : Mendorong investasi pada pendidikan vokasi dan pelatihan SDM di bidang pariwisata dan perhotelan.	Peningkatan jumlah Insentif yang diberikan kepada investor Pendidikan Vokasi (<i>Hospitality</i>).

Sumber: Data diolah, 2025

2. Arah Kebijakan Infrastruktur dan Utilitas Dasar

Kebijakan harus mengatasi defisit infrastruktur yang menjadi hambatan investasi:

- Revitalisasi Utilitas Air: Mewajibkan investasi, melalui skema KPBU atau penugasan BUMD, untuk revitalisasi total jaringan air bersih guna menekan angka Non-Revenue Water (NRW) 37,6%, serta memastikan pembangunan

kapasitas air baku baru untuk melayani kawasan pertumbuhan utama (Kota Baru dan Alam Barajo).

- Keandalan Energi: Mengalihkan fokus insentif listrik dari harga (karena tarif sudah seragam) ke kualitas dan keandalan jaringan dengan mendorong investasi pada peningkatan kapasitas dan penyediaan pasokan listrik yang stabil (terutama untuk Industri dan Bisnis Besar).

Tabel 5.7. Arah Kebijakan Infrastruktur dan Utilitas Dasar

Program Prioritas	Kegiatan Utama	Output Perizinan
Akselerasi Izin Proyek Wisata	Penyediaan Insentif Khusus: Pemberian percepatan perizinan KKPR/PBG untuk pembangunan Hotel Bintang 3/4 di lokasi strategis dan Fasilitas MICE.	Penerbitan NIB Risiko Tinggi di Sektor Akomodasi/MICE yang terintegrasi dengan rencana tata ruang.
Pengembangan Kawasan Budaya	Fasilitasi Kemitraan Konservasi: Mendorong investasi swasta untuk revitalisasi rumah panggung dan fasilitas <i>homestay</i> di Pelayangan (Kota Seberang) dengan standar wisata budaya.	Peningkatan jumlah Izin Usaha Pariwisata (NIB KBLI 90) yang berfokus pada wisata budaya dan ekologi sungai.
Integrasi Wisata	Promosi Terpadu: Membangun <i>Portofolio Investasi Wisata Tematik</i> yang mengintegrasikan akomodasi MICE dengan destinasi budaya (Sungai Batanghari) dan Candi Muaro Jambi.	Peningkatan realisasi investasi yang mampu meningkatkan target <i>length of stay</i> wisatawan.
Peningkatan Kualitas Layanan	Vokasi <i>Hospitality</i> : Mendorong investasi pada pendidikan vokasi dan pelatihan SDM di bidang pariwisata dan perhotelan.	Peningkatan jumlah Insentif yang diberikan kepada investor Pendidikan Vokasi (<i>Hospitality</i>).

Sumber: Data diolah, 2025

3. Arah Kebijakan Inklusif dan Penguatan Modal Manusia

Kebijakan harus memastikan investasi berkontribusi pada penyelesaian masalah sosial-ekonomi:

- Peningkatan Modal Manusia: Menyediakan insentif bagi investor yang berinvestasi pada pendidikan vokasi (SMK) spesialisasi Logistik, Perdagangan, dan *Hospitality*, serta investasi pada klinik spesialis dan fasilitas *medical tourism*.

- Stabilitas Pangan dan UMKM: Mendorong investasi padat karya di sektor jasa dan efisiensi rantai pasok pangan (termasuk *urban farming* berteknologi) untuk menjaga stabilitas harga (menekan laju Garis Kemiskinan) dan memperkuat ketahanan ekonomi kelompok 40% terbawah, sejalan dengan perbaikan kualitas kemiskinan (P1 dan P2).

Tabel 4.1. Arah Kebijakan Inklusif dan Penguatan Modal Manusia

Program Prioritas	Kegiatan Utama	Indikator Dampak Sosial
Insentif Kualitas SDM	Pemberian Insentif Non-Fiskal: Fasilitas percepatan perizinan bagi investor Vokasi dan Kesehatan Spesialis. Mendorong kerjasama <i>link & match</i> antara kurikulum vokasi dengan kebutuhan investor Logistik/TIK.	Peningkatan persentase tenaga kerja lokal yang diserap oleh proyek investasi sektor unggulan.
Kemitraan Inklusif (UMKM)	Mewajibkan Kemitraan: Mendorong skema kemitraan terstruktur (misalnya <i>Sub-Kontrak</i>) antara proyek investasi besar (Konstruksi, Real Estate) dengan UMKM lokal bersertifikasi.	Penurunan tingkat Garis Kemiskinan dan peningkatan ketahanan ekonomi kelompok 40% terbawah.
Fasilitasi Kesehatan Rakyat	Perizinan RS Spesialis: Percepatan izin pembangunan fasilitas kesehatan tersier untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan berkualitas.	Peningkatan investasi di KBLI Jasa Kesehatan (Q) dan pengurangan angka rujukan keluar daerah.
Ketahanan Pangan Kota	Mendorong investasi pada efisiensi rantai pasok pangan dan teknologi produksi pangan perkotaan (<i>Urban Farming</i>) untuk menekan laju inflasi.	Penurunan laju inflasi yang bersumber dari gejolak harga pangan.

Sumber: Data diolah, 2025

4. Arah Kebijakan Iklim Usaha dan Tata Ruang

Kebijakan harus menciptakan kepastian hukum dan daya saing:

- Insentif Terarah: Merancang Insentif Non-Fiskal yang spesifik dan terukur (misalnya kemudahan perizinan, percepatan layanan perizinan, dan jaminan kepastian lahan sesuai RTRW) sebagai pembeda utama daya saing, mengingat tarif listrik bukan lagi faktor pembeda harga.

- Investasi Hijau (Green Investment): Mewajibkan setiap proyek investasi besar sejalan dengan prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance), memprioritaskan investasi pada pengelolaan limbah dan energi terbarukan.
- Persebaran Investasi: Mengendalikan *urban sprawl* melalui penegakan RTRW dan mengarahkan investasi ke kawasan pertumbuhan baru (Kota Baru, Alam Barajo) sambil merevitalisasi kawasan sentra lama (Pasar Jambi, Telanaipura) untuk efisiensi utilitas.

Tabel 4.2. Arah Kebijakan Iklim Usaha dan Tata Ruang

Area Kebijakan	Fokus Prioritas Program	Detail Implementasi
Akselerasi Perizinan & Insentif	Penerapan Insentif Non-Fiskal Terarah	Merancang Insentif Non-Fiskal yang spesifik dan terukur (misalnya percepatan layanan perizinan (<i>Fast-Track</i>), jaminan pendampingan pra-investasi, dan kemudahan akses data) sebagai pembeda daya saing.
	Penyederhanaan Proses OSS	Penguatan peran DPMPPTSP sebagai Lembaga <i>OSS Corner</i> untuk memberikan asistensi teknis dan penyelesaian hambatan perizinan di luar sistem elektronik.
Penyelarasan Tata Ruang (RTRW)	Penegakan RTRW dan Pengendalian <i>Urban Sprawl</i>	Mewajibkan setiap proyek investasi, terutama Real Estate (L) dan Industri (C), untuk mendapatkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang ketat dan mengacu pada zonasi kawasan pertumbuhan baru (misalnya Kota Baru dan Alam Barajo).
	Revitalisasi Sentra Lama	Mengarahkan investasi revitalisasi (misalnya properti sewa, jasa MICE) untuk mendukung kawasan sentra lama seperti Pasar Jambi dan Telanaipura agar terjadi efisiensi utilitas dan pencegahan kekosongan ruang kota.
Investasi Hijau (Green Investment)	Kewajiban Prinsip ESG	Mewajibkan setiap proyek investasi besar dan berisiko menengah/tinggi sejalan dengan prinsip ESG (<i>Environmental, Social, and Governance</i>).
	Prioritas Sektor Lingkungan	Memberikan insentif khusus pada investasi pengelolaan limbah (WtE), energi terbarukan (PLTS Atap Komersial), dan infrastruktur mitigasi dampak lingkungan.

BAB 6

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Penyusunan RUPM Kota Jambi 2025–2045 merupakan tindak lanjut strategis dari Perda RPJPD 2024 yang diarahkan untuk mentransformasi Kota Jambi menjadi pusat investasi yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan. Perumusannya didasarkan pada Analisis PESTEL yang tidak hanya memaksimalkan peluang seperti peningkatan konektivitas melalui Tol Trans-Sumatera, pertumbuhan investasi hijau, dan percepatan digitalisasi tetapi juga merespons ancaman kompetisi kawasan, ketidakpastian regulasi, serta risiko lingkungan dan sosial jangka panjang. Analisis ini menegaskan perlunya penguatan fondasi pembangunan agar Kota Jambi mampu bersaing di tengah dinamika ekonomi nasional dan global.

Untuk menghadapi kelemahan struktural seperti keterbatasan utilitas dasar dan kesenjangan SDM, sekaligus memanfaatkan posisi strategis Kota Jambi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), RUPM dirancang dengan empat pilar utama. Pilar *Transformasi Sektoral* mendorong investasi pada logistik, TIK, dan hilirisasi pangan guna menciptakan nilai tambah dan multiplier effect. Pilar *Infrastruktur Kritis & Lingkungan* menekankan percepatan pembangunan utilitas melalui skema KPBU berbasis prinsip ESG, termasuk penanganan NRW dan peningkatan layanan perkotaan. Pilar *Modal Manusia Inklusif* diarahkan untuk memperkuat kualitas tenaga kerja melalui investasi vokasi dan layanan kesehatan spesialis. Sementara itu, pilar *Iklim Usaha & Tata Ruang* memperkuat digitalisasi perizinan OSS, penegakan KKPR/RTRW, serta kepastian hukum bagi investor. Keseluruhan strategi ini disusun untuk memastikan arah investasi Kota Jambi yang lebih fokus, adaptif, dan berkelanjutan hingga 2045.

6.1. Kebijakan

Arah kebijakan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Jambi 2025–2045 ditetapkan sebagai respons strategis terhadap dinamika eksternal dan kebutuhan internal kota. Kebijakan ini merupakan sintesis kritis dari Analisis PESTEL yang berhasil mengidentifikasi Peluang besar dari proyek infrastruktur nasional (*Jalan Tol Trans-Sumatera*) dan tren global *Investasi Hijau*, sekaligus merespons Ancaman berupa kompetisi regional yang semakin ketat. Untuk mengatasi Kelemahan internal, seperti defisit utilitas dan kesenjangan keterampilan SDM, strategi inti RUPM difokuskan pada

penguatan empat pilar utama. Pilar ini meliputi Transformasi Sektoral untuk mengutamakan Logistik, TIK, dan Industri Hilir Pangan; Infrastruktur Kritis & Lingkungan yang wajib menggunakan skema KPBU/PPP untuk revitalisasi utilitas dan kepatuhan ESG; penguatan Modal Manusia Inklusif melalui insentif vokasi dan kesehatan spesialis; serta penguatan Iklim Usaha & Tata Ruang melalui penegakan KKPR/RTRW. Secara keseluruhan, arah kebijakan ini ditujukan untuk mengkonsolidasikan Kekuatan Kota Jambi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan.

Misi 1 Arah Kebijakan Iklim Investasi Kondusif & Berdaya Saing

Pengembangan investasi kota diarahkan pada pemerataan spasial, pembentukan pusat pertumbuhan baru, peningkatan konektivitas logistik, serta penguatan kemitraan dan tenaga kerja lokal. Seluruh kecamatan difokuskan untuk mengembangkan sektor unggulan (akomodasi, F&B, jasa profesional, kesehatan), sektor prospektif (manufaktur, keuangan, real estat), hingga sektor strategis dan potensial lokal. Pada periode awal (2025–2029), kebijakan berfokus pada penyusunan peta zonasi investasi berbasis RDTR, paket kemudahan lokasi, perbaikan koridor logistik, serta syarat tenaga kerja lokal. Memasuki periode 2030–2039, arah kebijakan meningkat ke tahap re-zoning adaptif, pembangunan anchor ekonomi seperti pasar grosir, creative hub, rumah produksi bersama, penguatan cold-chain, serta integrasi logistik dan transportasi publik. Pada akhir periode 2040–2045, seluruh wilayah ditargetkan mencapai sebaran investasi yang seimbang, pusat pertumbuhan yang matang, biaya distribusi yang kompetitif, rantai pasok UMKM yang tangguh, dan ketersediaan lahan siap investasi (CnC) tanpa backlog.

Misi 2 Arah Kebijakan Pemerataan dan Keadilan Investasi Antar Wilayah

Fokus utama adalah mengurangi ketimpangan pusat–pinggiran (CBD vs luar CBD). Kecamatan seperti Pelayangan, Danau Teluk, Jambi Timur, Kota Baru, dan Jambi Selatan diarahkan sebagai lokasi prioritas untuk perdagangan, logistik, industri skala ringan, pariwisata, dan utilitas. Pada periode pertama, kebijakan disusun dalam bentuk peta prioritas investasi per kecamatan dan paket kemudahan lokasi. Pada periode kedua dan ketiga, dilakukan pembangunan anchor ekonomi, penguatan layanan dasar, serta pengembangan logistik dan MICE untuk mendorong pertumbuhan. Di periode keempat,



targetnya adalah penurunan disparitas antarwilayah secara stabil, dengan kontribusi investasi dari luar CBD menjadi dominan dan berkelanjutan.

Misi 3 Arah Kebijakan Investasi Hijau & Ekonomi Berkelanjutan

Seluruh kecamatan prioritas diarahkan mengadopsi prinsip ESG (Environmental–Social–Governance). Pada tahap awal, kebijakan dimulai dengan checklist ESG, audit kepatuhan, standar efisiensi energi–air, serta proyek percontohan 3R dan PLTS atap. Pada tahap kedua dan ketiga, kebijakan meningkat ke integrasi ESG dalam perizinan, penggunaan smart metering, penerapan EPR, perluasan cold chain hijau, pembangunan ruang biru–hijau, hingga elektrifikasi transportasi. Pada akhir 2045, Kota Jambi ditargetkan memiliki portofolio proyek hijau yang mapan, tingkat emisi yang turun signifikan, ekonomi sirkular yang berfungsi penuh, serta mobilitas rendah emisi yang terintegrasi dengan TOD.

Misi 4 Arah Kebijakan Penguatan Sektor Unggulan & Ekonomi Kreatif

Pemerintah Kota Jambi memfokuskan strategi penguatan pada Sektor F&B, Pariwisata (I), UMKM Kreatif (R–U), Hilirisasi Agro–Perikanan (C), dan perlindungan HKI. Dalam periode awal 2025–2029, pembangunan ditekankan pada penguatan basis produksi melalui pendirian sentra pengolahan, rumah produksi bersama, percepatan sertifikasi halal, penataan kawasan *waterfront*, dan pengaktifan kalender MICE untuk menarik pengunjung. Memasuki periode kedua (2030–2034) dan ketiga (2035–2039), fokus beralih pada akselerasi *branding* kota, perluasan rantai dingin (*cold chain*) terintegrasi untuk hasil agro–perikanan, penguatan jaringan ritel modern bagi produk lokal, pengembangan venue kreatif yang permanen, serta konsolidasi HKI/IP lokal untuk meningkatkan nilai jual. Pada akhir tahun 2045, ekosistem ekonomi kreatif dan F&B ditargetkan menjadi mapan, berorientasi ekspor, terhubung erat dengan pasar nasional dan global, serta ditopang oleh talenta lokal yang tersertifikasi dan memiliki daya saing tinggi.

Misi 5 Arah Kebijakan Kota Cerdas & Pusat Layanan Investasi Digital

Visi Kota Jambi diarahkan menjadi kota investasi berbasis digital yang didukung oleh layanan yang sepenuhnya terintegrasi, mencakup portal terpadu, integrasi data, automasi



layanan, dan analitik kebijakan. Pada tahap awal periode 2025–2029, pemerintah memulai dengan membangun portal investasi terpadu, mengembangkan dashboard data dasar, menerapkan alur kerja digital, serta mengimplementasikan layanan fiktif-positif untuk proses perizinan. Layanan fiktif-positif adalah mekanisme dalam penyelenggaraan perizinan di mana permohonan izin dianggap disetujui secara otomatis jika pemerintah tidak memberikan keputusan dalam batas waktu yang telah ditetapkan. Kemudian, periode kedua (2030–2034) dan ketiga (2035–2039) akan berfokus pada penguatan integrasi data kritis, seperti antara sistem perizinan OSS dengan data RDTR dan pelaporan LKPM, termasuk adopsi Robotik Proses Automasi (RPA) dan *data exchange* yang mulus antar-OPD. Pada puncaknya, tahun 2045, layanan investasi Kota Jambi ditargetkan menjadi end-to-end otomatis, cepat, tanpa *bottleneck*, dan berstandar global, sementara seluruh data kota berfungsi sebagai satu peta investasi yang akurat dan *real time*, menjadikan Kota Jambi sebagai pusat layanan digital yang berdaya saing tinggi.

Misi 6 Arah Kebijakan Kolaborasi dan Promosi Investasi Daerah

Arah Kebijakan Kota Jambi fokus membangun kolaborasi multipihak dan promosi investasi yang lebih terarah untuk meningkatkan deal flow, menghadirkan pipeline proyek berkualitas, serta memperluas jejaring pasar daerah. Forum Quadruple Helix di kawasan strategis seperti Telanaipura dan Pasar Jambi menjadi motor kolaborasi, yang berkembang dari pertemuan kuartalan (2025–2029) menuju ekosistem inkubasi riset–teknologi dan kesepakatan investasi pada 2040–2045. Promosi investasi dilakukan melalui penyediaan materi bankable standar-bilingual, roadshow, dan business matching, didukung pusat fasilitasi deal permanen untuk mempercepat realisasi investasi. Integrasi rantai pasok regional, khususnya pada koridor logistik Alam Barajo–Kotabaru, serta strategi branding investasi berbasis klaster koridor (CBD, Waterfront–Heritage, Knowledge–Health), memperkuat posisi Kota Jambi sebagai destinasi investasi yang kompetitif menuju 2045.



Tabel 6.1. Arah Kebijakan Iklim investasi kondusif & berdaya saing (Misi 1)

Tujuan	Kecamatan	Sektor Potensi	2025–2029 (Periode 1)	2030–2034 (Periode 2)	2035–2039 (Periode 3)	2040–2045 (Periode 4)
Persebaran investasi berbasis ruang	Telanaipura, Pasar Jambi, Jelutung, Jambi Timur, Pelayangan, Danau Teluk, Alam Barajo, Kotabaru, Jambi Selatan, Kota Baru	Unggulan: I (Akomodasi dan Makan Minum), J (Informasi dan Komunikasi), M–N (Jasa Profesional & Perusahaan), Q (Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial); Prospektif: C (Industri Pengolahan), K (Jasa Keuangan dan Asuransi), L (Real Estat), O (Administrasi Pemerintahan), P (Jasa Pendidikan); Strategis/Lemah: D (Pengadaan Listrik dan Gas), F (Konstruksi), G (Perdagangan), H (Transportasi dan Pergudangan); Potensial lokal: E (Pengadaan Air, Pengelolaan Limbah), R–S–T–U (Jasa Lain-lain: Kebudayaan,	Integrasikan peta RDTR ke perizinan digital dan tetapkan zonasi investasi tematik per koridor	Lakukan re-zoning adaptif berbasis kinerja investasi dan kapasitas utilitas	Pemantapan sebaran investasi, kontrol alih fungsi ruang, evaluasi periodik kesesuaian ruang–investasi	Mencapai keseimbangan investasi spasial yang optimal dan mandiri di setiap Orde. Penerapan sistem monitoring <i>real-time</i> untuk kesesuaian ruang dan optimalisasi pemanfaatan Bank Tanah untuk proyek prioritas.



Tujuan	Kecamatan	Sektor Potensi	2025–2029 (Periode 1)	2030–2034 (Periode 2)	2035–2039 (Periode 3)	2040–2045 (Periode 4)
		Hiburan, Jasa Perorangan)				
Pusat pertumbuhan baru	Luar-CBD: Danau Teluk, Pelayangan, Jambi Timur (Talang Banjar/Sijenjang), Kota Baru (Kenali Besar/Mayang Mangurai), Alam Barajo, Kotabaru	I (Akomodasi dan Makan Minum), R–S–T–U (Jasa Lain-lain), G–H (Perdagangan & Transportasi), C/I (Industri Pengolahan/Akomodasi), E (Pengadaan Air, Pengelolaan Limbah)	Tetapkan kawasan prioritas luar-CBD dengan paket kemudahan lokasi (utilitas, akses, izin cepat)	Bangun anchor: pasar grosir, creative hub, jetty wisata, rumah produksi bersama	Skala-up aktivitas ekonomi dan layanan pendukung (logistik, MICE, ekraf)	Pusat pertumbuhan matang dengan jejaring pasar lintas wilayah dan kinerja stabil
Konektivitas logistik	Koridor lingkaran barat–timur, akses waterfront, jalur ke CBD/Angso Duo, koneksi ke bandara/pelabuhan regional	G–H (Perdagangan & Transportasi), C (Industri Pengolahan), I (Akomodasi dan Makan Minum), L (Real Estat)	Identifikasi–peningkatan koridor distribusi, titik bongkar-muat, embrio TOD	Integrasikan koridor dengan angkutan umum, cold chain, akses waterfront	Modernisasi simpul logistik, ATCS barang, sistem informasi rute	Waktu tempuh turun, biaya distribusi kompetitif, keandalan koridor tinggi



Tujuan	Kecamatan	Sektor Potensi	2025–2029 (Periode 1)	2030–2034 (Periode 2)	2035–2039 (Periode 3)	2040–2045 (Periode 4)
Serapan kerja lokal	Alam Barajo, Kotabaru, Pasar Jambi, Jambi Selatan, Kenali Asam Bawah	C (Industri Pengolahan), G (Perdagangan), I (Akomodasi dan Makan Minum), Q (Jasa Kesehatan), R–S–T–U (Jasa Lain-lain)	Terapkan syarat tenaga kerja lokal pada proyek prioritas; jalankan vokasi terarah per koridor	Kemitraan industri–vokasi; sertifikasi dan penempatan kerja	Penyesuaian kurikulum berbasis permintaan; insentif serapan TK lokal	Serapan lokal tinggi dan berkelanjutan; peningkatan keterampilan berkesinambungan
Kemitraan besar–UMKM	Pasar Jambi, Telanaipura, Jambi Timur, Kota Baru, Jambi Selatan	G–I (Perdagangan & Akomodasi), C/I (Industri Pengolahan/Akomodasi), K (Jasa Keuangan), R–S–T–U (Jasa Lain-lain)	Susun katalog pengadaan lokal; kontrak payung; kurasi dan standardisasi mutu	Pendalaman rantai pasok lokal; pembiayaan invoice/PO	Ekspansi kemitraan lintas daerah dan sektor; konsolidasi kualitas	Rantai pasok lokal tangguh; porsi pengadaan lokal meningkat stabil
Lahan siap investasi	Waterfront (Danau Teluk–Pelayangan–Jambi Timur), Logistik/industri (Alam Barajo–Kotabaru), Layanan publik (Telanaipura–Kenali Asam Bawah)	L (Real Estat), C (Industri Pengolahan), I (Akomodasi dan Makan Minum), Q (Jasa Kesehatan), O (Administrasi Pemerintahan), E (Pengadaan Air, Pengelolaan Limbah)	Bentuk bank tanah daerah/kawasan; operasionalkan SOP CnC dengan SLA	Integrasikan bank tanah ke perizinan; terapkan land readjustment di lokasi prioritas	Penyelesaian sengketa terukur (non-litigasi/litigasi cepat); digital cadastre	Ketersediaan kavling CnC berkelanjutan; zero backlog lahan proyek strategis



Tujuan	Kecamatan	Sektor Potensi	2025–2029 (Periode 1)	2030–2034 (Periode 2)	2035–2039 (Periode 3)	2040–2045 (Periode 4)
Penurunan disparitas	Luar-CBD: Pelayangan, Danau Teluk, Jambi Timur, Kota Baru, Jambi Selatan	Campuran sesuai potensi: I (Akomodasi & Makan Minum), R–S–T–U (Jasa Lain-lain), G–H (Perdagangan & Transportasi), C/I (Industri Pengolahan/Akomodasi), E (Air & Limbah)	Terapkan insentif berbasis lokasi dan tetapkan indikator disparitas target	Review tahunan paket insentif dan capaian pemerataan investasi	Aktifkan policy triggers bila gap belum turun; realokasi dukungan	Disparitas antarkawasan rendah dan stabil; kontribusi investasi luar-CBD dominan



Tabel 6.2. Arah Kebijakan Pemerataan dan Keadilan Investasi Antar Wilayah (Misi 2)

Tujuan	Kecamatan	Sektor Potensi	Arah Kebijakan			
			2025–2029 (Periode 1)	2030–2034 (Periode 2)	2035–2039 (Periode 3)	2040–2045 (Periode 4)
Persebaran investasi berbasis ruang	Telanaipura, Pasar Jambi, Jelutung, Jambi Timur, Pelayangan, Alam Barajo, Kotabaru, Jambi Selatan, Danau Teluk, Kota Baru	Unggulan: I (Akomodasi dan Makan Minum), J (Informasi dan Komunikasi), M–N (Jasa Profesional & Perusahaan), Q (Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial); Prospektif: C (Industri Pengolahan), K (Jasa Keuangan), L (Real Estat), O (Administrasi), P (Jasa Pendidikan); Strategis: D (Pengadaan Listrik–Gas), F (Konstruksi), G (Perdagangan), H (Transportasi & Pergudangan); Potensial: E (Pengadaan Air–Limbah), R–S–T–U (Jasa Lainnya)	Peta sebaran prioritas investasi berbasis RDTR per kecamatan/koridor dan daftar proyek per lokasi	Integrasi peta RDTR ke perizinan digital; zonasi investasi tematik per koridor	Re-zoning adaptif berbasis kinerja investasi dan kapasitas utilitas	Pengendalian ketat alih fungsi; evaluasi periodik sebaran investasi agar seimbang
Pusat pertumbuhan baru	Luar-CBD: Danau Teluk, Pelayangan, Jambi Timur	Kreatif & Pariwisata (I - Akomodasi/F&B, R–S–T–U - Jasa Lainnya), Grosir-Logistik	Tetapkan kawasan prioritas dan paket kemudahan lokasi	Bangun anchor (pasar grosir, creative hub,	Skala-up aktivitas ekonomi dan	Pusat pertumbuhan matang;



Tujuan	Kecamatan	Sektor Potensi	Arah Kebijakan			
			2025–2029 (Periode 1)	2030–2034 (Periode 2)	2035–2039 (Periode 3)	2040–2045 (Periode 4)
	(Talang Banjar/Sijenjang), Kota Baru (Kenali Besar/Mayang Mangurai), Alam Barajo, Kotabaru	(G–H - Perdagangan/Transportasi), UMKM/Manufaktur ringan (C/I - Industri Pengolahan/Akomodasi), Layanan Dasar–Utilitas (E, D - Air/Limbah/Listrik/Gas)	(utilitas, akses, izin)	jetty wisata, rumah produksi)	layanan pendukung (MICE/kreatif/logistik)	profil investasi dan jejaring pasar lintas wilayah
Konektivitas logistik	Koridor lingkaran barat–timur, akses waterfront, jalur ke CBD/Angso Duo, koneksi ke bandara/pelabuhan regional	G–H (Perdagangan–Transportasi dan Pergudangan), C (Industri Pengolahan), I (Akomodasi dan Makan Minum), L (Real Estat Logistik/Komersial)	Identifikasi–peningkatan koridor distribusi, titik bongkar muat, embrio TOD	Integrasi koridor dengan angkutan umum, cold chain, dan akses waterfront	Modernisasi simpul logistik, ATCS (Average Time Cycle Stock) barang, sistem informasi rute	Waktu tempuh turun, biaya distribusi kompetitif, keandalan koridor tinggi
Serapan kerja lokal	Alam Barajo, Kotabaru, Pasar Jambi, Jambi	C (Industri Pengolahan), G (Perdagangan), I (Akomodasi dan Makan Minum), Q (Jasa	Syarat TK lokal pada proyek prioritas; vokasi terarah per koridor	Kemitraan industri–vokasi;	Penyesuaian kurikulum berbasis permintaan;	Serapan lokal tinggi–berkelanjutan ; mobilitas



Tujuan	Kecamatan	Sektor Potensi	Arah Kebijakan			
			2025–2029 (Periode 1)	2030–2034 (Periode 2)	2035–2039 (Periode 3)	2040–2045 (Periode 4)
	Selatan, Kenali Asam Bawah	Kesehatan), R–S–T–U (Jasa Lainnya)		sertifikasi dan penempatan	insentif serapan TK lokal	karier dan upskilling rutin
Kemitraan besar–UMKM	Pasar Jambi, Telanaipura, Jambi Timur, Kota Baru, Jambi Selatan	G–I (Perdagangan & Akomodasi/F&B), C/I (Manufaktur F&B & Akomodasi), K (Jasa Keuangan), R–S–T–U (Jasa Kreatif/Lainnya)	Katalog pengadaan lokal; kontrak payung; kurasi & standarisasi	Pendalaman rantai pasok lokal; pembiayaan invoice/PO	Ekspansi kemitraan lintas daerah dan sektor; konsolidasi kualitas	Porsi pengadaan lokal meningkat; rantai pasok tangguh dan inklusif
Lahan siap investasi	Waterfront (Danau Teluk–Pelayangan–Jambi Timur), Logistik/industri (Alam Barajo–	L (Real Estat), C (Industri Pengolahan), I (Akomodasi dan Makan Minum), Q (Jasa Kesehatan), O (Administrasi), E (Utilitas Air/Limbah)	Bentuk bank tanah; SOP CnC (<i>Computer Numerical</i>)	Integrasi bank tanah ke perizinan; skema land readjustment	Resolusi sengketa terukur (non-litigasi/litigasi cepat);	Zero backlog lahan untuk proyek strategis; suplai



Tujuan	Kecamatan	Sektor Potensi	Arah Kebijakan			
			2025–2029 (Periode 1)	2030–2034 (Periode 2)	2035–2039 (Periode 3)	2040–2045 (Periode 4)
	Kotabaru), Layanan publik (Telanaipura–Kenali Asam Bawah)		<i>Control</i>) dengan SLA		digital cadastre	kavling CnC(<i>Computer Numerical Control</i>) berkelanjutan
Penurunan disparitas	Luar-CBD: Pelayanan, Danau Teluk, Jambi Timur, Kota Baru, Jambi Selatan	Campuran sesuai potensi: I (Akomodasi dan Makan Minum), R–S–T–U (Jasa Lainnya: Kreatif/Rekreasi), G–H (Perdagangan dan Transportasi/Logistik), C/I (Industri Pengolahan/Akomodasi), E (Pengadaan Air/Limbah/Utilitas)	Insentif berbasis lokasi dan indikator kesenjangan	Review tahunan paket insentif; target pemerataan investasi	Policy triggers jika gap belum turun; realokasi dukungan	Disparitas antarkawasan rendah dan stabil; kontribusi luar-CBD dominan



Tabel 6.3. Arah Kebijakan Investasi Hijau dan Ekonomi Berkelanjutan (Misi 3)

Tujuan	Kecamatan	Sektor Potensi	2025–2029 (Periode 1)	2030–2034 (Periode 2)	2035–2039 (Periode 3)	2040–2045 (Periode 4)
Mainstream ESG	Telanaipura, Pasar Jambi, Jelutung, Jambi Timur, Alam Barajo, Kotabaru	I (Akomodasi–F&B), J (Infokom), M–N (Jasa Profesional & Perusahaan), Q (Jasa Kesehatan), C (Industri Pengolahan), L (Real Estat)	Tetapkan persyaratan ESG pada seleksi proyek; checklist AMDAL/UKL-UPL; audit kepatuhan berkala; publikasi skor kepatuhan pelaku usaha	Integrasikan penilaian ESG ke perizinan dan insentif; pendampingan penerapan standar dan pelaporan emisi	Wajib pelaporan intensitas emisi/limbah untuk proyek prioritas; koreksi kebijakan berbasis data ESG	ESG menjadi standar baku seluruh proyek; penurunan intensitas emisi dan limbah berkelanjutan
Efisiensi energi–air	Telanaipura, Jelutung, Kenali Asam Bawah, Pasar Jambi	I (Akomodasi–F&B), J (Infokom), M–N (Jasa Profesional & Perusahaan), Q (Jasa Kesehatan), C (Industri Pengolahan), L (Real Estat)	Terapkan standar minimum kinerja energi/air (MEPS) untuk bangunan/industri; audit energi-air awal	Program retrofit peralatan dan manajemen energi-air; smart metering pada bangunan publik/kawasan	Skala-up retrofit kawasan dan insentif kinerja; kontrak hemat energi (ESCO)	Kota efisien: KPI penghematan energi-air tercapai di sektor publik dan swasta
Ekonomi sirkular	Jambi Selatan, Danau Teluk, Pelayangan, Jambi Timur, Kota Baru	I (Akomodasi–F&B), J (Infokom), M–N (Jasa Profesional & Perusahaan), Q (Jasa Kesehatan), C (Industri Pengolahan), L (Real Estat)	Implementasi 3R, EPR (extended producer responsibility) untuk kemasan; pilot fasilitas kompos/WtE skala kota	Perluasan TPS3R, bank sampah produksi, standar sortasi; kemitraan off-take bahan daur ulang	Pusat sirkular terpadu dengan pasar material; integrasi UMKM daur ulang ke rantai pasok	Tingkat daur ulang dan pengalihan dari TPA tinggi; ekonomi sirkular menjadi sumber nilai tambah



Tujuan	Kecamatan	Sektor Potensi	2025–2029 (Periode 1)	2030–2034 (Periode 2)	2035–2039 (Periode 3)	2040–2045 (Periode 4)
Energi terbarukan terpasang	Telanaipura, Jelutung, Pasar Jambi, fasilitas publik dan komersial kota	I (Akomodasi–F&B), J (Infokom), M–N (Jasa Profesional & Perusahaan), Q (Jasa Kesehatan), C (Industri Pengolahan), L (Real Estat)	Pasang PLTS atap aset publik/komersial; fasilitasi net-metering; katalog vendor; quick-win sekolah/RS/kantor	Insentif daerah untuk PLTS atap; perluasan ke pusat perbelanjaan, hotel, dan perkantoran	Integrasi PLTS dengan penyimpanan dan manajemen beban; pembiayaan hijau retail	Daya terpasang EBT kota signifikan; biaya energi turun dan emisi berkurang
Infrastruktur biru–hijau	Pelayangan, Danau Teluk, Jambi Timur, Telanaipura	I (Akomodasi–F&B), J (Infokom), M–N (Jasa Profesional & Perusahaan), Q (Jasa Kesehatan), C (Industri Pengolahan), L (Real Estat)	Rancang RTH, danau/sungai sebagai retensi; drainase berwawasan lingkungan; penataan sempadan	Pembangunan skala koridor waterfront–heritage; green street dan taman kota	Ekspansi jaringan ruang biru–hijau antar-kawasan; integrasi ekosistem ke RDTR	Ketahanan banjir/kekeringan meningkat; kualitas lingkungan perkotaan membaik
Transportasi bersih & TOD (tambahan lokal)	Telanaipura, Pasar Jambi, koridor Angso Duo, Jambi Timur	I (Akomodasi–F&B), J (Infokom), M–N (Jasa Profesional & Perusahaan), Q (Jasa Kesehatan), C (Industri Pengolahan), L (Real Estat)	Pilot bus listrik Trans Bahagia; rute prioritas; titik TOD awal; lokasi fasilitas isi ulang kendaraan listrik	Perluasan armada listrik; SPKLU publik/privat; jalur pejalan–sepeda terintegrasi	Integrasi tarif dan operasi multimoda; elektrifikasi bertahap angkutan layanan kota	Mobilitas rendah emisi mapan; waktu tempuh stabil dan kualitas udara lebih baik
Utilitas hijau & data	Jelutung, Telanaipura,	I (Akomodasi–F&B), J (Infokom), M–N (Jasa	Inisiasi KPBU utilitas: SPAM (turunkan NRW),	Eksekusi KPBU, operasi awal; data	Skala-up kapasitas; integrasi	Utilitas andal, kehilangan air



Tujuan	Kecamatan	Sektor Potensi	2025–2029 (Periode 1)	2030–2034 (Periode 2)	2035–2039 (Periode 3)	2040–2045 (Periode 4)
(tambahan lokal)	Alam Barajo, Kotabaru	Profesional & Perusahaan), Q (Jasa Kesehatan), C (Industri Pengolahan), L (Real Estat)	WtE/kompos; ducting TIK; cold chain pangan–perikanan	center efisien energi; konektivitas pasar dingin	monitoring utilitas ke dashboard kota	turun, loss logistik pangan menurun
Sertifikasi hijau	Telanaipura, Pasar Jambi, Kenali Asam Bawah, Jambi Timur	I (Akomodasi–F&B), J (Infokom), M–N (Jasa Profesional & Perusahaan), Q (Jasa Kesehatan), C (Industri Pengolahan), L (Real Estat)	Program pendampingan dan pembiayaan sertifikasi hijau	Ekspansi sertifikasi ke kawasan dan parkir rindang; insentif pajak/retribusi	Standar sertifikasi hijau menjadi norma pengembangan	Proporsi bangunan/kawasan bersertifikat meningkat signifikan
Pembiayaan hijau	Seluruh kecamatan prioritas sesuai proyek	I (Akomodasi–F&B), J (Infokom), M–N (Jasa Profesional & Perusahaan), Q (Jasa Kesehatan), C (Industri Pengolahan), L (Real Estat)	Siapkan pipeline KPBU hijau, green bond/loan; fasilitas penjaminan dan blended finance	Penutupan pembiayaan proyek; marketplace teknologi hijau; skema pembayaran berbasis kinerja	Re-financing dan replikasi proyek; integrasi pembiayaan hijau ke penganggaran daerah	Arus pembiayaan hijau stabil; portofolio proyek berkelanjutan meningkat



Tabel 6.4. Arah Kebijakan Sektor Unggulan dan Ekonomi Kreatif (Misi 4)

Tujuan	Kecamatan	Sektor Potensi	2025–2029 (Periode 1)	2030–2034 (Periode 2)	2035–2039 (Periode 3)	2040–2045 (Periode 4)
Hilirisasi agro–perikanan–hasil hutan	Kota Baru (Kenali Besar/Mayang Mangurai), Jambi Selatan, Alam Barajo, Kotabaru	C (Industri Pengolahan), I (Akomodasi–F&B), E (Utilitas & Daur Ulang / <i>Cold Chain</i> Pendukung)	Bangun sentra pengolahan dan QC; pilot <i>cold chain</i> untuk pangan–perikanan; izin produksi pangan cepat	Perluas jaringan cold chain dan laboratorium mutu; standarisasi proses; kemitraan bahan baku	Skala-up kapasitas sentra; integrasi dengan logistik kota dan kanal ekspor	Klaster hilir mapan; pangsa produk olahan lokal meningkat dan berorientasi pasar
Kenaikan nilai tambah F&B	Pasar Jambi–CBD, Telanaipura, Jambi Selatan, Kota Baru	I (Akomodasi–F&B), C (Industri Pengolahan Pangan), K (Jasa Keuangan), G (Perdagangan/Ritel Modern)	Rumah produksi bersama; sertifikasi halal & mutu; kemasan/labeling; legalitas NIB kolektif	Pembiayaan rantai pasok (invoice/PO); kurasi produk; perluasan ritel modern	Co-manufacturing dan private label; penetrasi e-commerce nasional	Produk F&B unggulan naik kelas; nilai tambah dan margin meningkat
Penguatan pariwisata kota	Jambi Timur–Pelayangan–Danau Teluk (waterfront/heritage), Telanaipura (MICE)	I (Pariwisata/F&B), R–S–T–U (Jasa Kreatif & Lainnya), L (Real Estat/Ruang Publik)	Penataan waterfront–heritage Batanghari; kalender event MICE tahunan; paket walking tour	Aktivasi koridor kuliner & seni; kemitraan hotel/EO; promosi destinasi tematik	Pengembangan venue/event berskala nasional; integrasi tiket & transport	Daya saing destinasi kuat; lama tinggal dan belanja wisatawan meningkat



Tujuan	Kecamatan	Sektor Potensi	2025–2029 (Periode 1)	2030–2034 (Periode 2)	2035–2039 (Periode 3)	2040–2045 (Periode 4)
Skala UMKM & kreatif	Pasar Jambi, Jambi Selatan, Kota Baru, Telanaipura	R–S–T–U (Jasa Kreatif & Lainnya), I (Akomodasi–F&B), J (Informasi & Komunikasi/Digital), K (Jasa Keuangan)	Inkubasi & pendampingan; akses pembiayaan mikro-kecil; onboarding marketplace	Program akselerasi (branding, pricing, distribusi); kontrak B2B; aggregator logistik	Konsolidasi brand kota; studio kolaboratif dan lisensi IP lokal	Basis pelaku kreatif/UMKM mapan dan produktif; omzet median naik berkelanjutan
HKI & branding	Telanaipura (pusat pemerintahan), Pasar Jambi (showcase), Pelayangan (heritage)	M–N (Jasa Profesional & Perusahaan), R–S–T–U (Jasa Kreatif), I (Akomodasi–F&B)	Fasilitasi merek, desain, HKI (paten sederhana, desain industri, hak cipta); IG untuk produk khas	Kampanye identitas (city brand) dan kurasi rutin; katalog ekspor	Lisensi IP, kolaborasi desainer, dan brand ambassador	Reputasi kota kreatif menguat; nilai komersial HKI meningkat
Akses pasar	Pasar Jambi–CBD, Telanaipura, Jambi Timur, Kota Baru	G (Perdagangan), I (Akomodasi–F&B), R–S–T–U (Jasa Kreatif), K (Jasa Keuangan), L (Real Estat/Ritel Modern)	Business matching rutin; kanal ekspor awal; kemitraan ritel modern	Ekspansi jaringan buyer nasional; house of Jambi (showroom)	Konsorsium ekspor; fulfillment pusat (OMNI channel)	Akses pasar domestik & ekspor stabil; transaksi B2B berulang
Talenta & vokasi	Telanaipura (BLK/rumah talenta), Kota Baru, Jambi Selatan, Pasar Jambi	P (Pendidikan), J (Informasi & Komunikasi/Digital), R–S–T–U (Jasa Kreatif), C/I (Industri Pengolahan/Akomodasi–F&B)	Program vokasi terapan/sertifikasi (barista, baker, konten, desain, QC); magang industri	Skema link and match; beasiswa talenta; sertifikasi profesi massal	Akademi kota kreatif; pipeline talenta untuk klaster prioritas	Talenta lokal terserap; produktivitas dan kualitas produk naik konsisten



Tabel 6.5. Arah Kebijakan Sektor Kota Cerdas (*Smart City*) dan Pusat Layanan Investasi Digital (Misi 5)

Tujuan	Kecamatan	Sektor Potensi	2025–2029 (Periode 1)	2030–2034 (Periode 2)	2035–2039 (Periode 3)	2040–2045 (Periode 4)
Portal investasi terpadu	Telanaipura (pusat pemerintahan/MP P), Pasar Jambi (CBD), Jelutung	J (Informasi dan Komunikasi - Sektor <i>Enabler</i> Utama); M–N (Jasa Profesional & Perusahaan - Penyedia <i>helpdesk</i> /konsultasi); L (Real Estat - Penyedia data spasial); G (Perdagangan Besar dan Eceran - Sektor pengguna layanan dominan).	Bangun portal terpadu berisi informasi peluang, konsultasi, perizinan, monitoring, pelaporan; akun investor dan <i>helpdesk</i>	Integrasi penuh dengan OSS, RDTR, dan pelaporan LKPM; fitur appointment dan live-chat; API untuk integrasi OPD	Ekspansi fitur aftercare, dispute tracker, dan deal facilitation; multi-bahasa dan katalog proyek dinamis	Portal berstandar global, pengalaman pengguna prima, dan adopsi investor tinggi
Integrasi data spasial nonspasial	Jelutung (pusat utilitas/data), Telanaipura, Pasar Jambi	J (Informasi dan Komunikasi - Penyedia platform data); O (Administrasi Pemerintahan - Sektor Pelaksana/Pengelola data); L (Real Estat - Penyedia data spasial/RDTR).	Integrasikan data proyek, RDTR, utilitas, izin, tenaga kerja, dan indikator ekonomi ke dashboard daerah	Data interop lintas OPD; peta tematik peluang investasi per koridor; data quality rule	Federated data + data exchange; pembaruan mendekati real-time	Satu peta investasi kota yang akurat, mutakhir, dan dipakai untuk keputusan
Automasi layanan	Telanaipura, Pasar Jambi, Jambi Timur, Jambi Selatan	Semua Sektor Pengguna Layanan (terutama C Industri Pengolahan, G Perdagangan, I Akomodasi) - Sektor yang membutuhkan efisiensi perizinan dan automasi.	Terapkan workflow digital, fiktif-positif, TTE, pembayaran nontunai;	Automasi verifikasi dokumen dan penarikan data (once only principle)	Robotik proses (RPA) untuk layanan berulang; audit layanan berkala	Layanan end-to-end tanpa bottleneck, biaya transaksi



Tujuan	Kecamatan	Sektor Potensi	2025–2029 (Periode 1)	2030–2034 (Periode 2)	2035–2039 (Periode 3)	2040–2045 (Periode 4)
			notifikasi otomatis			rendah, dan transparan
Analitik kebijakan	Telanaipura (Bappeda/ PTSP), Jelutung	J (Informasi dan Komunikasi - Penyedia <i>software</i> /analitik); O (Administrasi Pemerintahan - Sektor Pelaksana/Pembuat kebijakan); K (Jasa Keuangan dan Asuransi - Penyedia data keuangan dan indikator makro).	Decision Support System (DSS) untuk perizinan & promosi: heatmap lokasi, analisis tren, dan early warning	Model proyeksi dampak investasi (PDRB, tenaga kerja, emisi); scoring proyek	Kebijakan adaptif berbasis policy-triggers pada dashboard	Pengambilan keputusan real-time dan berbasis bukti di seluruh siklus investasi
Layanan tanpa tatap muka	Seluruh kecamatan prioritas; fokus CBD, logistik, layanan publik	Semua Sektor - Fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kemudahan bisnis lintas sektor, didukung oleh J (Infokom) dan O (Administrasi Pemerintahan).	End-to-end online untuk izin risiko rendah–tinggi; tanda terima digital dan tracking status publik	Standardisasi SLA lintas layanan; kanal konsultasi video	Layanan 24/7 dengan antrian virtual; integrasi tandatangan lintas instansi	Rasio layanan online mendekati 100%, kepuasan pengguna sangat tinggi
Keamanan siber	Jelutung (pusat data/utilitas), Telanaipura	J (Informasi dan Komunikasi - Penyedia keamanan siber); D (Pengadaan Listrik dan Gas - Utilitas kritis/target pengamanan siber); E (Pengadaan Air, Sampah,	Dirikan SOC, kebijakan backup & recovery, inventory aset TI, dan pelatihan keamanan	Uji penetrasi dan audit keamanan berkala; SIEM terintegrasi	Zero trust architecture; simulasi insiden lintas OPD	Keandalan tinggi (uptime), waktu pemulihan cepat, insiden



Tujuan	Kecamatan	Sektor Potensi	2025–2029 (Periode 1)	2030–2034 (Periode 2)	2035–2039 (Periode 3)	2040–2045 (Periode 4)
		Limbah - Utilitas kritis/ <i>Smart Environment</i>).				siber turun tajam
Kematangan smart city	Koridor prioritas: CBD–Angso Duo, Waterfront–Heritage, Civic–Utility, Logistics–Light Industry	Smart Governance/Economy/Mobility/Environment/Living/People (Didukung oleh J (Informasi dan Komunikasi), O (Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib), H (Transportasi dan Pergudangan), E (Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang), L (Real Estat), dan I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) sebagai <i>enabler</i> dan pengguna utama).	Cetak biru smart city; quick wins: e-permit, e-payment, e-complaint, e-parking	Integrasi domain: tiket/event, mobilitas (integrasi Trans Bahagia), lingkungan (sensor air/banjir)	Skala-up sensor/IoT, command center berbasis data; layanan proaktif	Kematangan smart city tinggi; layanan publik cerdas, inklusif, dan tangguh



Tabel 6.6. Arah Kebijakan Kolaborasi dan Promosi Investasi Daerah (Misi 6)

Tujuan	Kecamatan	Sektor Potensi	2025–2029 (Periode 1)	2030–2034 (Periode 2)	2035–2039 (Periode 3)	2040–2045 (Periode 4)
Forum quadruple helix aktif	Telanaipura (pemerintahan/akademik), Pasar Jambi (bisnis), Kota Baru & Jambi Selatan (komunitas/UMKM)	I (Akomodasi–F&B); J (Informasi dan Komunikasi - <i>Enabler</i> Inovasi); M–N (Jasa Profesional & Perusahaan - Konsultasi & Riset); Q (Jasa Kesehatan); C (Industri Pengolahan); R–S–T–U (Jasa Kreatif & Lainnya).	Bentuk forum kuartalan pemerintah–bisnis–akademia–komunitas; susun pipeline proyek dan kebutuhan kompetensi	Forum tematik per klaster; MoU riset terapan dan talent pipeline	Inkubasi kolaboratif lintas helix; dukungan riset–teknologi untuk proyek prioritas	Ekosistem kolaborasi mapan; deal dan inovasi lahir rutin dari forum
Materi promosi standar	Telanaipura (sekretariat), Pasar Jambi (showroom), Jambi Timur (grosir/logistik)	Semua Sektor Prioritas: C (Industri Pengolahan/Manufaktur); D (Penyediaan Listrik dan Gas); E (Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang); F (Konstruksi); G (Perdagangan Besar dan Eceran); H (Transportasi dan pergudangan); I (Akomodasi F&B/Pariwisata); J (Informasi dan Komunikasi); K (Jasa Keuangan); L (Real Estate, Ruang Publik, dan	Produksi opportunity profile, teaser, pra-FS, paket insentif; template standar	Pembaruan berkala berbasis data; versi bilingual; kit investor digital	Bank materi promosi sektoral/kawasan; integrasi ke portal investasi	Perpustakaan promosi dinamis; materi selalu siap untuk roadshow global



Tujuan	Kecamatan	Sektor Potensi	2025–2029 (Periode 1)	2030–2034 (Periode 2)	2035–2039 (Periode 3)	2040–2045 (Periode 4)
		Hunian); M–N (Jasa Profesional & Perusahaan); O (Administrasi Pemerintahan); P (Pendidikan);Q (Kesehatan);nR–S–T–U (Ekonomi Kreatif).				
Promosi terarah	CBD Pasar Jambi, Waterfront, Logistics (Alam Barajo– Kotabaru), Knowledge– Health (Telanaipura)	C (Industri Pengolahan / Manufaktur), G (Perdagangan Besar dan Eceran), H(Transportasi dan Pergudangan), I(Akomodasi, Makanan dan Minuman (F&B) / Pariwisata) J (Informasi dan Komunikasi (TIK & Digital), M–N (Jasa Profesional, Ilmiah, Teknis, dan Jasa Perusahaan) Q (Kesehatan dan Aktivitas Sosial), R–S–T–U (Ekonomi Kreatif: Seni, Budaya, Hiburan, Komunitas, Perbaikan & Jasa Lainnya)	Roadshow sector-focused & investor-specific; business matching triwulanan	Misi dagang bersama provinsi/kota tetangga; kurasi buyer–seller	Partisipasi pameran/mar ketplace internasional; kanal ekspor rutin	Kalender promosi global; jejaring investor terjaga dan produktif



Tujuan	Kecamatan	Sektor Potensi	2025–2029 (Periode 1)	2030–2034 (Periode 2)	2035–2039 (Periode 3)	2040–2045 (Periode 4)
Deal facilitation	Telanaipura (helpdesk), Jelutung (utilitas), lokasi proyek prioritas	Semua Sektor (Didukung oleh M–N Jasa Profesional sebagai konsultan, J Infokom untuk portal, O Administrasi untuk perizinan).	Helpdesk investor; pendampingan due diligence, perizinan, lahan, utilitas	Task force financial close; daftar konsultan/penjaminan; SOP lintas OPD	Pusat fasilitasi deal permanen; dashboard kemajuan proyek	Waktu deal→financial close pendek; tingkat realisasi investasi tinggi
Integrasi rantai pasok regional	Koridor logistik (Alam Barajo–Kotabaru), Jambi Timur–waterfront, akses ke bandara/pelabuhan regional	G–H (Perdagangan & Transportasi/Logistik); C (Industri Pengolahan - Hilirisasi); I (Akomodasi–F&B - Sektor pengguna produk olahan); E (Pengadaan Air & Limbah - Dukungan <i>cold chain</i>).	Pemetaan pemasok–pembeli; kesepakatan antar daerah Sumatera Tengah	Kontrak pasok lintas wilayah; konsolidasi volume; cold chain terintegrasi	Hub komoditas dan distribusi; platform data pasok–permintaan	Rantai pasok regional tangguh; biaya logistik turun; daya saing naik
Kemitraan besar–UMKM	Pasar Jambi, Jambi Selatan, Kota Baru, Telanaipura	G–I (Perdagangan & F&B/Ritel); C/I (Industri Pengolahan F&B); R–S–T–U (Jasa Kreatif); K (Jasa Keuangan - Pembiayaan UMKM).	Kontrak payung lokal; target pengadaan daerah; kurasi & standardisasi	Pembiayaan invoice/PO; pendampingan kualitas & sertifikasi	Ekspansi kemitraan ke ritel modern dan B2B nasional	Porsi pengadaan lokal meningkat; UMKM naik kelas berkelanjutan



Tujuan	Kecamatan	Sektor Potensi	2025–2029 (Periode 1)	2030–2034 (Periode 2)	2035–2039 (Periode 3)	2040–2045 (Periode 4)
Branding investasi kota	CBD & Creative Hub: Pasar Jambi, Jelutung; Waterfront–Heritage: Jambi Timur, Pelayangan, Danau Teluk; Logistics–Light Industry Corridor: Alam Barajo, Kotabaru; Knowledge–Health Corridor: Telanaipura (pemerintahan, MICE, pendidikan, kesehatan).	Sesuai Klaster Koridor: I (Akomodasi dan Makan Minum), J (Informasi dan Komunikasi), M–N (Jasa Profesional & Perusahaan), Q (Jasa Kesehatan); G (Perdagangan Besar dan Eceran), H (Transportasi dan Pergudangan); R–S–T–U (Jasa Lain-lain/Kreatif).	Kampanye identitas klaster; microsite/portal; pelaporan konversi leads→MoU→realisasi	Aktivasi brand melalui event unggulan; publikasi success stories	Co-branding dengan investor/anchor; pengukuran brand awareness	Brand investasi kota kuat; tingkat konversi tinggi dan konsisten



6.2. Strategi Kebijakan

Strategi Kebijakan dalam Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Jambi 2025–2045 disusun sebagai respons terstruktur dan terukur terhadap tuntutan transformasi ekonomi yang termuat dalam RPJPD. Strategi ini merupakan hasil sintesis komprehensif dari Analisis SWOT dan PESTEL, yang memastikan kebijakan mampu memanfaatkan Kekuatan status PKW dan Peluang dari konektivitas tol serta Investasi Hijau (ESG), sekaligus secara tegas mengatasi Kelemahan kritis seperti defisit utilitas (NRW) dan kesenjangan SDM. Strategi ini dikristalisasi menjadi empat pilar inti, yang secara terpadu mengarahkan modal masuk: Transformasi Sektoral (memfokuskan pada Logistik/TIK dan Hilirisasi Pangan), Infrastruktur Kritis (memandatkan skema KPBU untuk utilitas), Modal Manusia Inklusif (mendorong *link & match* Vokasi), dan Iklim Usaha & Tata Ruang (menjamin penegakan RTRW dan kepastian hukum). Melalui penetapan pilar-pilar ini, Strategi Kebijakan RUPM Kota Jambi dirancang untuk mengoptimalkan efisiensi, memitigasi risiko, dan menciptakan investasi yang berdampak ganda maksimal bagi pertumbuhan kota dalam dua puluh tahun ke depan.



Tabel 6.7. Strategi Iklim investasi kondusif & berdaya saing (Misi 1)

Tujuan	Kecamatan	Potensi Bidang	2025–2029 (Periode 1)		2030–2034 (Periode 2)		2035–2039 (Periode 3)		2040–2045 (Periode 4)	
			Sasaran Kebijakan	Strategi	Sasaran Kebijakan	Strategi	Sasaran Kebijakan	Strategi	Sasaran Kebijakan	Strategi
Kepastian regulasi	Telanaipura, Pasar Jambi, Jelutung, Jambi Timur, Pelayangan	I (Akomodasi–F&B), J (Informasi dan Komunikasi), M–N (Jasa Profesional & Perusahaan), Q (Jasa Kesehatan), P (Jasa Pendidikan), G (Perdagangan Besar dan Eceran)	Terbitnya paket simplifikasi dan harmonisasi perda/perkada pro-investasi; kalender regulasi tahunan berjalan	Penyisiran regulasi, konsolidasi izin/retribusi, meja harmonisasi lintas OPD–kanwil hukum; panduan zonasi ringkas per koridor	Regulasi sinkron dengan RDTR–OSS; kepastian prosedur lintas layanan	Integrasi regulasi ke sistem perizinan; penerapan fiktif-positif terukur	Regulasi adaptif berbasis data kinerja investasi	Uji coba regulatory sandbox untuk model usaha/teknologi baru	Tata kelola regulasi setara praktik global; kepastian hukum tinggi	Manajemen kinerja regulasi real-time, evaluasi eksternal tahunan, policy triggers otomatis



Tujuan	Kecamatan	Potensi Bidang	2025–2029 (Periode 1)		2030–2034 (Periode 2)		2035–2039 (Periode 3)		2040–2045 (Periode 4)	
			Sasaran Kebijakan	Strategi	Sasaran Kebijakan	Strategi	Sasaran Kebijakan	Strategi	Sasaran Kebijakan	Strategi
Kepastian lahan	Waterfront (Jambi Timur–Pelayangan–Danau Teluk), Alam Barajo–Kotabaru, Kenali Asam Bawah, Telanaipura	L (Real Estat), C (Industri Pengolahan Ringan), I (Akomodasi–F&B), Q (Jasa Kesehatan), E (Pengadaan Air, Limbah, dan Daur Ulang)	Tersedia daftar kavling “clear and clean” (CnC) untuk proyek prioritas	Task force CnC dengan SLA, integrasi data pertanahan ke perizinan, awal bank tanah	Suplai lahan siap bangun bertambah di koridor prioritas	Integrasi bank tanah ke perizinan; skema land readjustment	Sengketa berkurang drastis; proses penyelesaian cepat	Mediasi/arbitrase terstandar; digital cadastre kawasan	Zero backlog lahan strategis; kesinambungan suplai kavling CnC	Penjaminan ketersediaan lahan berbasis proyeksi permintaan, kontrak lahan jangka panjang
Perizinan cepat–transparan	Telanaipura (MPP), Pasar Jambi–Angso Duo, Jambi Selatan, Jambi Timur, Kota Baru	I (Akomodasi–F&B), G (Perdagangan/Ritel), Q (Jasa Kesehatan), P (Jasa Pendidikan), J (Informasi dan Komunikasi), C/I (Produksi Pangan/Manufaktur F&B)	SLA izin tercapai di layanan prioritas; antrean menurun	Layanan end-to-end berbasis risiko, pelacakan real-time, helpdesk OSS keliling	Otomasi verifikasi dokumen; once-only data sharing	Integrasi penuh OSS–RDTR; kontrak kinerja SLA lintas OPD	Layanan minim kontak, stabil, dan konsisten	RPA/otomasi proses berulang; audit layanan berkala	Layanan tanpa tatap muka menyeluruh; pengalaman pengguna prima	Sertifikasi mutu layanan internasional; continuous improvement berbasis analitik



Tujuan	Kecamatan	Potensi Bidang	2025–2029 (Periode 1)		2030–2034 (Periode 2)		2035–2039 (Periode 3)		2040–2045 (Periode 4)	
			Sasaran Kebijakan	Strategi	Sasaran Kebijakan	Strategi	Sasaran Kebijakan	Strategi	Sasaran Kebijakan	Strategi
Biaya transaksi rendah	Seluruh koridor (prioritas CBD, logistik, layanan publik)	I (Akomodasi–F&B), G (Perdagangan Besar dan Eceran), C (Industri Pengolahan), H (Transportasi dan Pergudangan), L (Real Estat), Q (Jasa Kesehatan)	Biaya layanan standar dan transparan; nol pungutan nonresmi	Nontunai, TTE, satu tarif resmi, kanal pengaduan; reuse data antar-layanan	Biaya turun untuk izin berulang dan massal	Integrasi pembayaran, e-invoice, bundling layanan	Efisiensi biaya terjaga saat volume naik	Shared services dan one-fee policy; penataan alur dokumen	Biaya kompetitif setara kota besar	Benchmarking tarif global; skema insentif berbasis kinerja kepatuhan
Stabilitas hubungan industrial	Alam Barajo–Kotabaru (logistik/industri), Pasar Jambi–Jambi Selatan (ritel/F&B), Kenali Asam Bawah (kesehatan)	C (Industri Pengolahan), G (Perdagangan Besar dan Eceran), I (Akomodasi–F&B), Q (Jasa Kesehatan)	Penurunan sengketa; penyelesaian cepat	Forum tripartit rutin; SOP mediasi ≤14 hari; early warning system (EWS)	Ketersesuaian skill–kebutuhan meningkat	Link and match vokasi; sertifikasi kompetensi, penempatan	Hubungan industrial matang dan produktif	Data-driven dispute resolution; program retensi tenaga kerja	Insiden rendah berkelanjutan	Perjanjian kerja kolektif sehat; indikator produktivitas meningkat



Tujuan	Kecamatan	Potensi Bidang	2025–2029 (Periode 1)		2030–2034 (Periode 2)		2035–2039 (Periode 3)		2040–2045 (Periode 4)	
			Sasaran Kebijakan	Strategi	Sasaran Kebijakan	Strategi	Sasaran Kebijakan	Strategi	Sasaran Kebijakan	Strategi
Kepastian keamanan usaha	Angso Duo–waterfront, Telanaipura (MICE), Alam Barajo–Kotabaru (logistik)	I (Akomodasi/F&B), G (Perdagangan Besar dan Eceran), H (Transportasi dan Pergudangan), Q (Jasa Kesehatan)	Persepsi keamanan naik; waktu respons insiden menurun	Pengamanan kawasan, patroli terpadu, CCTV/panic button, hotline 24/7	Keamanan terstandar per koridor	Standar keamanan berbasis risiko; crowd management event	Keandalan tinggi saat puncak aktivitas	Integrasi manajemen insiden dengan command center	Keamanan fisik–siber terintegrasi	Zero-downtime kritikal; simulasi berkala lintas instansi
Daya saing lokasi	Paket koridor: CBD & Creative Hub (Pasar Jambi), Knowledge–Health (Telanaipura), Logistics–Light Industry (Alam Barajo–Kotabaru),	Sesuai Paket Koridor: Unggulan Utama: I (Akomodasi dan Makan Minum), J (Informasi dan Komunikasi), M–N (Jasa Profesional & Perusahaan), Q (Jasa Kesehatan). Strategis: C (Industri Pengolahan), G	Nilai jual koridor jelas dan terkomunikasi	Benchmarking KURD; paket “lokasi siap investasi” (utilitas, akses, talent, izin cepat)	Daya tarik meningkat di pasar nasional	Sertifikasi mutu PTSP/MPP; studi komparatif; kampanye reputasi	Peringkat daerah membaik; investor repeat	Penawaran nilai spesifik (value proposition) per koridor; program aftercare	Brand pro-investor kuat secara global	Penguatan citra berkelanjutan; kemitraan flagship sebagai duta lokasi



Tujuan	Kecamatan	Potensi Bidang	2025–2029 (Periode 1)		2030–2034 (Periode 2)		2035–2039 (Periode 3)		2040–2045 (Periode 4)	
			Sasaran Kebijakan	Strategi	Sasaran Kebijakan	Strategi	Sasaran Kebijakan	Strategi	Sasaran Kebijakan	Strategi
	Riverfront Tourism (Jambi Timur–Pelayangan–Danau Teluk)	(Perdagangan), H (Transportasi dan Pergudangan. Kreatif: R–S–T–U (Seni, Hiburan, dan Jasa Lain-lain).								

Tabel 6.8. Strategi Pemerataan dan Keadilan Investasi Antar Wilayah (Misi 2)

Tujuan	Kecamatan	Potensi Bidang	2025–2029 (Periode 1)		2030–2034 (Periode 2)		2035–2039 (Periode 3)		2040–2045 (Periode 4)	
			Sasaran Kebijakan	Strategi	Sasaran Kebijakan	Strategi	Sasaran Kebijakan	Strategi	Sasaran Kebijakan	Strategi
Kepastian regulasi	Telanaipura, Pasar Jambi, Jelutung, Jambi Timur, Pelayangan	I – Akomodasi & Makan Minum (F&B); J – Informasi & Komunikasi (TIK); M–N – Jasa Perusahaan (Business/Professional Services); Q – Kesehatan; P – Pendidikan; G – Perdagangan Besar & Eceran	Terbitnya paket simplifikasi dan harmonisasi perda/perkada pro-investasi; kalender regulasi tahunan berjalan	Penyisiran regulasi, konsolidasi izin/retribusi, meja harmonisasi lintas OPD–kanwil hukum; panduan zonasi ringkas per koridor	Regulasi sinkron dengan RDTR–OSS; kepastian prosedur lintas layanan	Integrasi regulasi ke sistem perizinan; penerapan fiktif-positif terukur	Regulasi adaptif berbasis data kinerja investasi	Uji coba regulatory sandbox untuk model usaha/teknologi baru	Tata kelola regulasi setara praktik global; kepastian hukum tinggi	Manajemen kinerja regulasi real-time, evaluasi eksternal tahunan, policy triggers otomatis
Kepastian lahan	Waterfront (Jambi Timur–Pelayangan–Danau Teluk), Alam Barajo–Kotabaru, Kenali Asam Bawah, Telanaipura	L – Real Estate; C – Industri Pengolahan (Manufaktur Ringan); I – Akomodasi/F&B; Q – Kesehatan; E – Pengadaan Air &	Tersedia daftar kavling “clear and clean” (CnC) untuk	Task force CnC dengan SLA, integrasi data pertanahan ke perizinan, awal bank tanah	Suplai lahan siap bangun bertambah di koridor prioritas	Integrasi bank tanah ke perizinan; skema land readjustment	Sengketa berkurang drastis; proses penyelesaian cepat	Mediasi/arbitrase terstandar; digital cadastre kawasan	Zero backlog lahan strategis; kesinambungan suplai kavling CnC	Penjaminan ketersediaan lahan berbasis proyeksi permintaan, kontrak lahan



Tujuan	Kecamatan	Potensi Bidang	2025–2029 (Periode 1)		2030–2034 (Periode 2)		2035–2039 (Periode 3)		2040–2045 (Periode 4)	
			Sasaran Kebijakan	Strategi	Sasaran Kebijakan	Strategi	Sasaran Kebijakan	Strategi	Sasaran Kebijakan	Strategi
		Pengelolaan Limbah (Utilitas)	proyek prioritas							jangka panjang
Perizinan cepat–transparan	Telanaipura (MPP), Pasar Jambi–Angso Duo, Jambi Selatan, Jambi Timur, Kota Baru	I – Akomodasi/F&B; G – Perdagangan (ritel/grosir); Q – Kesehatan; P – Pendidikan; J – TIK/Infokom; C/I – Produksi Pangan (Manufaktur + F&B)	SLA izin tercapai di layanan prioritas; antrean menurun	Layanan end-to-end berbasis risiko, pelacakan real-time, helpdesk OSS keliling	Otomasi verifikasi dokumen; once-only data sharing	Integrasi penuh OSS–RDTR; kontrak kinerja SLA lintas OPD	Layanan minim kontak, stabil, dan konsisten	RPA/otomasi proses berulang; audit layanan berkala	Layanan tanpa tatap muka menyeluruh; pengalaman pengguna prima	Sertifikasi mutu layanan internasional; continuous improvement berbasis analitik
Biaya transaksi rendah	Seluruh koridor (prioritas CBD, logistik, layanan publik)	I – Akomodasi/F&B; G – Perdagangan; C – Industri Pengolahan; H – Transportasi & Pergudangan; L – Real Estate; Q – Kesehatan	Biaya layanan standar dan transparan; nol pungutan nonresmi	Nontunai, TTE, satu tarif resmi, kanal pengaduan; reuse data antar-layanan	Biaya turun untuk izin berulang dan massal	Integrasi pembayaran, e-invoice, bundling layanan	Efisiensi biaya terjaga saat volume naik	Shared services dan one-fee policy; penataan alur dokumen	Biaya kompetitif setara kota besar	Benchmarking tarif global; skema insentif berbasis kinerja kepatuhan



Tujuan	Kecamatan	Potensi Bidang	2025–2029 (Periode 1)		2030–2034 (Periode 2)		2035–2039 (Periode 3)		2040–2045 (Periode 4)	
			Sasaran Kebijakan	Strategi	Sasaran Kebijakan	Strategi	Sasaran Kebijakan	Strategi	Sasaran Kebijakan	Strategi
Stabilitas hubungan industrial	Alam Barajo–Kotabaru (logistik/industri), Pasar Jambi–Jambi Selatan (ritel/F&B), Kenali Asam Bawah (kesehatan)	C – Industri Pengolahan; G – Perdagangan; I – Akomodasi/F&B; Q – Kesehatan	Penurunan sengketa; penyelesaian cepat	Forum tripartit rutin; SOP mediasi ≤14 hari; early warning system (EWS)	Ketersesuaian skill–kebutuhan meningkat	Link and match vokasi; sertifikasi kompetensi, penempatan	Hubungan industrial matang dan produktif	Data-driven dispute resolution ; program retensi tenaga kerja	Insiden rendah berkelanjutan	Perjanjian kerja kolektif sehat; indikator produktivitas meningkat
Kepastian keamanan usaha	Angso Duo–waterfront, Telanaipura (MICE), Alam Barajo–Kotabaru (logistik)	I – Pariwisata/F&B; G – Perdagangan; H – Transportasi & Pergudangan; Q – Kesehatan	Persepsi keamanan naik; waktu respons insiden menurun	Pengamanan kawasan, patroli terpadu, CCTV/panic button, hotline 24/7	Keamanan terstandar per koridor	Standar keamanan berbasis risiko; crowd management event	Keandalan tinggi saat puncak aktivitas	Integrasi manajemen insiden dengan command center	Keamanan fisik–siber terintegrasi	Zero-downtime kritikal; simulasi berkala lintas instansi
Daya saing lokasi	Paket koridor: CBD & Creative Hub (Pasar Jambi), Knowledge–	I – Akomodasi/F&B; J – TIK/Infokom; M–N – Jasa Perusahaan; Q –	Nilai jual koridor jelas dan terkomunikasi	Benchmarking KURD; paket “lokasi siap investasi”	Daya tarik meningkat di pasar nasional	Sertifikasi mutu PTSP/MP P; studi komparati	Peringkat daerah membaik; investor repeat	Penawaran nilai spesifik (value proposition)	Brand pro-investor kuat secara global	Penguatan citra berkelanjutan; kemitraan flagship



Tujuan	Kecamatan	Potensi Bidang	2025–2029 (Periode 1)		2030–2034 (Periode 2)		2035–2039 (Periode 3)		2040–2045 (Periode 4)	
			Sasaran Kebijakan	Strategi	Sasaran Kebijakan	Strategi	Sasaran Kebijakan	Strategi	Sasaran Kebijakan	Strategi
	Health (Telanaipura), Logistics–Light Industry (Alam Barajo–Kotabaru), Riverfront Tourism (Jambi Timur–Pelayangan–Danau Teluk)	Kesehatan; C – Industri Pengolahan; G – Perdagangan; H – Transportasi & Pergudangan; R–S–T–U – Jasa Lainnya (kreatif, hiburan, layanan komunitas)		(utilitas, akses, talent, izin cepat)		f; kampanye reputasi		n) per koridor; program aftercare		sebagai duta lokasi



Tabel 6.9. Strategi Investasi Hijau dan Ekonomi Berkelanjutan (Misi 3)

Tujuan	Kecamatan	Potensi Bidang	2025–2029 (Periode 1)		2030–2034 (Periode 2)		2035–2039 (Periode 3)		2040–2045 (Periode 4)	
			Strategi	Sasaran Kebijakan	Strategi	Sasaran Kebijakan	Strategi	Sasaran Kebijakan	Strategi	Sasaran Kebijakan
Mainstream ESG	Telanaipura, Pasar Jambi, Jelutung, Jambi Timur, Alam Barajo, Kotabaru	I (Akomodasi–Makan Minum – Penyediaan Akomodasi dan F&B); J (Informasi & Komunikasi); M–N (Jasa Perusahaan – Professional & Administrative Services); Q (Kesehatan – Jasa Kesehatan & Sosial); C (Industri Pengolahan); L (Real Estate)	ESG menjadi syarat seleksi proyek dan kontrak; baseline audit kepatuhan per sektor	Checklist ESG pada seleksi; audit berkala; publikasi skor kepatuhan; pendampingan penerapan	Penilaian ESG terintegrasi perizinan/in sentif; pelaporan emisi–limbah rutin	Integrasi data ESG ke dashboard; coaching compliance	Intensitas emisi/limbah sektor prioritas turun signifikan	Insentif/koreksi berbasis kinerja ESG (policy triggers)	ESG menjadi norma seluruh proyek; disclosure publik tahunan	Sertifikasi/ratings ESG kawasan; pengawasan berkelanjutan
Efisiensi energi–air	Telanaipura, Jelutung, Kenali Asam	Q (Rumah Sakit); P (Kampus – Pendidikan); L (Gedung/Real	Penerapan standar minimum kinerja energi–	Audit energi–air; retrofit awal; smart	Program manajemen energi–air meluas;	Insentif kinerja; pengadaan hijau	Efisiensi kawasan (district cooling/gr	Demand response; pemanfaatan air hujan	Kota efisien energi–air; biaya	Standardisasi efisiensi pada bangunan



Tujuan	Kecamatan	Potensi Bidang	2025–2029 (Periode 1)		2030–2034 (Periode 2)		2035–2039 (Periode 3)		2040–2045 (Periode 4)	
			Strategi	Sasaran Kebijakan	Strategi	Sasaran Kebijakan	Strategi	Sasaran Kebijakan	Strategi	Sasaran Kebijakan
	Bawah, Pasar Jambi	Estate); I (F&B); M–N (Jasa Perusahaan)	air (MEPS) untuk bangunan/indu stri	metering gedung publik	kontrak ESCO	peralatan efisien	eywater reuse)		operasi turun	baru/renov asi
Ekonomi sirkular	Jambi Selatan, Danau Teluk, Pelayangan, Jambi Timur, Kota Baru	E (Air–Sampah– Limbah–Daur Ulang); C/I (Industri Pangan & F&B); R–S–T– U (Jasa Kreatif & Sosial)	3R & EPR berjalan; fasilitas kompos/WtE pilot; bank sampah produksi	Skema EPR; TPS3R; kontrak off-take material daur ulang	Skala fasilitas kompos/Wt E; pasar material daur ulang tumbuh	Standardis asi mutu; integrasi UMKM daur ulang	Ekosiste m sirkular terpadu kota	Pusat sirkular + marketplace material; insentif produk daur ulang	Pengaliha n dari TPA tinggi; nilai tambah sirkular naik	Kewajiban porsi material daur ulang di pengadaan/ pembangun an
Energi terbarukan terpasang	Telanaipura, Jelutung, Pasar Jambi, koridor komersial	J (Data Center/TIK); Q (RS); L (Mall/Hotel/Kant or); M–N (Jasa Perusahaan)	PLTS atap quick wins di aset publik/RS/sek olah/kantor; fasilitasi net-metering	SOP izin cepat; katalog vendor; pembiayaan ringan; showcase	Perluasan PLTS atap ke pusat belanja, hotel, perkantoran	Insentif pajak/retrib usi lokal; agregator proyek PLTS	Integrasi PLTS+sto rage dan manajeme n beban	Skema PPA retail/komu nitas; REC lokal	Bauran EBT kota signifikan; biaya energi turun	Standar PLTS atap bangunan baru; target kapasitas tahunan
Infrastrukt ur biru–hijau	Pelayangan, Danau	L (Tata Ruang/Real	RTH prioritas; kolam	Nature-base d solutions;	Jaringan biru–hijau	Green street;	Ketahana n	Pemelihara an adaptif	Kota resilien;	Standar koefisien



Tujuan	Kecamatan	Potensi Bidang	2025–2029 (Periode 1)		2030–2034 (Periode 2)		2035–2039 (Periode 3)		2040–2045 (Periode 4)	
			Strategi	Sasaran Kebijakan	Strategi	Sasaran Kebijakan	Strategi	Sasaran Kebijakan	Strategi	Sasaran Kebijakan
	Teluk, Jambi Timur, Telanaipura	Estate); E (Drainase/SPAL D); I (Pariwisata Sungai/Heritage	retensi/danau; drainase ramah lingkungan; penataan sempadan	koridor hijau; desain waterfront–heritage adaptif	menghubungkan kawasan kunci	taman linear; sensor banjir & kualitas air	banjir/kekeringan membaik	berbasis data; perlindungan ekosistem	kualitas lingkungan meningkat	ruang hijau & retensi di RDTR
KPBU utilitas & data	Jelutung, Telanaipura, Alam Barajo, Kotabaru	D (Listrik/Gas); E (SPAM & Sampah); J (TIK/Ducting); C (Cold Chain Pangan–Perikanan)	Pipeline KPBU: SPAM (turunkan NRW), WtE/kompos, ducting TIK, cold chain pangan–perikanan	FS/pa-FS; market sounding; penjaminan; daftar proyek siap tawar	Penutupan pembiayaan & operasi awal	SLA utilitas; monitoring NRW & efisiensi energi	Skala-up kapasitas; integrasi data utilitas	SCADA & dashboard utilitas; optimasi energi	Utilitas andal; NRW & loss rantai dingin turun	Re-financing & replikasi; tarif berbasis kinerja
Transportasi listrik & TOD (Trans Bahagia)	Telanaipura–Pasar Jambi–Jambi Timur (koridor utama)	H (Transportasi); I (Pariwisata/F&B); L (Real Estate/TOD)	Operasi koridor bus listrik Trans Bahagia (5 unit eksisting) dengan jadwal stabil; SPKLU	Penetapan rute prioritas; park & ride; integrasi halte dengan	Perluasan armada & rute; integrasi tiket–jadwal; SPKLU di	Standard layanan; prioritas pejalan–sepeda; insentif	Dominasi armada listrik di koridor inti	Manajemen lalu lintas cerdas; tarif terintegrasi multimoda	Mobilitas rendah emisi mapan	Jaringan TOD matang; standar pengadaan nol emisi



Tujuan	Kecamatan	Potensi Bidang	2025–2029 (Periode 1)		2030–2034 (Periode 2)		2035–2039 (Periode 3)		2040–2045 (Periode 4)	
			Strategi	Sasaran Kebijakan	Strategi	Sasaran Kebijakan	Strategi	Sasaran Kebijakan	Strategi	Sasaran Kebijakan
			pilot di titik strategis	kawasan; lokasi SPKLU publik/privat gelombang I	pusat belanja/hotel/perkantoran	elektrifikasi armada				
Sertifikasi hijau	Telanaipura, Pasar Jambi, Kenali Asam Bawah, Jambi Timur	L. Real Estate – Sektor Prospektif	Program pendampingan & subsidi biaya sertifikasi	Audit pra-sertifikasi; pilot kawasan bersertifikat	Ekspansi sertifikasi ke kawasan terpadu & parkir rindang	Diskon PBB/retribusi untuk bangunan bersertifikat	Mayoritas bangunan publik & komersial tersertifikasi	Roadmap wajib minimal standar hijau	Sertifikasi jadi norma; nilai aset meningkat	Persyaratan sertifikasi pada bangunan baru/renovasi
Pembiayaan hijau	Seluruh kecamatan sesuai proyek	K (Keuangan/Green Finance); L (Real Estate); C (Industri); E (Utilitas); J (TIK)	Pipeline KPBU hijau, green bond/loan, blended finance	Penjajakan investor; skema penjaminan; escrow lingkungan	Penutupan pembiayaan & replikasi	Marketplace teknologi hijau; pembayaran berbasis kinerja	Arus pembiayaan hijau stabil	Re-financing & portofolio hijau daerah	Pendanaan berkelanjutan melembaga	Integrasi ke kebijakan fiskal daerah (insentif pajak/retribusi hijau)



Tabel 6.10. Strategi Sektor Unggulan dan Ekonomi Kreatif (Misi 4)

Tujuan	Kecamatan	Potensi Bidang	2025–2029 (Periode 1)		2030–2034 (Periode 2)		2035–2039 (Periode 3)		2040–2045 (Periode 4)	
			Sasaran Kebijakan	Strategi	Sasaran Kebijakan	Strategi	Sasaran Kebijakan	Strategi	Sasaran Kebijakan	Strategi
Hilirisasi agro–perikanan–hasil hutan	Kota Baru (Kenali Besar/Mayang Mangurai), Jambi Selatan, Alam Barajo, Kotabaru	C – Industri Pengolahan (agroindustri, hasil hutan, perikanan, pangan olahan); I – F&B (kuliner, makanan-minuman kemasan); E – Utilitas & Daur Ulang (cold chain, gudang dingin, logistik segar, daur ulang)	Sentra pengolahan berjalan; standar QC dasar; rantai dingin tahap awal	Bangun sentra/rumah produksi klaster; QC & lab sederhana; gudang dingin pilot dan armada reefer	Kapasitas sentra naik; QC terpadu; jaringan cold chain meluas	Kemitraan bahan baku, SOP HACCP/CPP OB; integrasi dengan koridor logistik	Klaster hilir terkoneksi pasar nasional	Konsolidasi pasokan; kontrak jangka menengah; perluasan varian produk	Klaster hilir berorientasi ekspor	Pusat logistik dingin kota; standard mutu kelas ekspor; promosi perdagangan luar negeri
Kenaikan nilai tambah F&B	Pasar Jambi–CBD, Telanaipura, Jambi Selatan, Kota Baru	I – F&B (kuliner, makanan kemasan, minuman olahan); C – Industri Pengolahan Pangan (UMKM–IKM); K – Jasa	Nilai tambah naik melalui produksi bersama & legalitas	Rumah produksi bersama; NIB/PIRT kolektif; sertifikasi halal &	Skala produksi menengah; akses ritel modern	Pembiayaan invoice/PO; kurasi produk; perjanjian listing ritel	Penetrasi e-commerce nasional & private label	Co-manufacturing; jaminan pasokan & mutu	Merek kota untuk F&B unggulan	Ekspansi ekspor; program brand kota untuk kategori F&B



Tujuan	Kecamatan	Potensi Bidang	2025–2029 (Periode 1)		2030–2034 (Periode 2)		2035–2039 (Periode 3)		2040–2045 (Periode 4)	
			Sasaran Kebijakan	Strategi	Sasaran Kebijakan	Strategi	Sasaran Kebijakan	Strategi	Sasaran Kebijakan	Strategi
		Keuangan (pembiayaan, PO/invoice financing, modal kerja); L – Real Estate & Ritel Modern (akses pasar retail, mal, supermarket)		SNI; desain kemasan						
Penguatan pariwisata kota	Jambi Timur–Pelayangan–Danau Teluk (waterfront/heritage), Telanaipura (MICE)	I – Pariwisata & F&B (hotel, kuliner, MICE, destinasi wisata); R–S–T–U – Ekonomi Kreatif (event, seni budaya, pertunjukan, museum, hiburan); L – Real Estate & Ruang Publik (waterfront,	Koridor waterfront–heritage aktif; kalender event MICE dimulai	Penataan sempadan, city walk, signage; kurasi acara; paket walking tour–kuliner	Kunjungan tumbuh; belanja wisatawan meningkat	Kemitraan hotel/EO; bundling tiket–transport; event signature	Event skala nasional; rute wisata tematik mapan	Pengembangan venue; integrasi kanal tiket & data	Destinasi kota berdaya saing tinggi	Co-branding dengan pelaku industri; promosi global berkelanjutan



Tujuan	Kecamatan	Potensi Bidang	2025–2029 (Periode 1)		2030–2034 (Periode 2)		2035–2039 (Periode 3)		2040–2045 (Periode 4)	
			Sasaran Kebijakan	Strategi	Sasaran Kebijakan	Strategi	Sasaran Kebijakan	Strategi	Sasaran Kebijakan	Strategi
		heritage, ruang publik)								
Skala UMKM & kreatif	Pasar Jambi, Jambi Selatan, Kota Baru, Telanaipura	R–S–T–U – Ekonomi Kreatif (desain, kerajinan, media, seni, animasi, fesyen); I – F&B (UMKM kuliner); J – Informasi & Komunikasi (digital, marketplace, konten, studio)	UMKM naik kelas; literasi digital & keuangan membaik	Inkubasi–akselerasi; akses pembiayaan mikro–kecil; onboarding marketplace; fulfillment dasar	Omzet median naik; kontrak B2B awal	Aggregator logistik; kemitraan B2B; studio kolaboratif	Jaringan distribusi multichannel mapan	Lisensi IP; kemitraan platform digital	Ekosistem kreatif berkelanjutan	Dana bergulir kreatif; skema revenue-sharing; perluasan pasar regional–global
HKI & branding	Telanaipura (layanan), Pasar Jambi (showcase), Pelayanga	M–N – Jasa Profesional/Perusahaan (konsultan HKI, branding, desain, legal bisnis); R–S–T–U – Ekonomi Kreatif (storytelling,	Perlindungan HKI dasar & identitas produk	Klinik merek & desain; pendaftaran merek/hak cipta; identifikasi	Penguatan identitas dan storytelling	Kurasi berkala; katalog ekspor; kampanye city brand	Monetisasi IP & kolaborasi desainer	Lisensi, franchise, dan co-branding	Brand kota kreatif kuat	Standar brand untuk ekspor; dukungan promosi internasional



Tujuan	Kecamatan	Potensi Bidang	2025–2029 (Periode 1)		2030–2034 (Periode 2)		2035–2039 (Periode 3)		2040–2045 (Periode 4)	
			Sasaran Kebijakan	Strategi	Sasaran Kebijakan	Strategi	Sasaran Kebijakan	Strategi	Sasaran Kebijakan	Strategi
	n (heritage)	desain produk, identitas kota); I – F&B (branding kuliner khas)		IG produk khas						
Akses pasar	Pasar Jambi–CBD, Telanaipura, Jambi Timur, Kota Baru	G – Perdagangan (ritel, grosir, ekspor–impor, buyer list); I – F&B; R–S–T–U – Ekraf; K – Keuangan (pembiayaan ekspor, pembayaran internasional)	Terbentuk kanal penjualan & buyer list	Business matching rutin; booth permanen “House of Jambi”	Kontrak berulang dengan buyer nasional	Konsorsium ekspor; perantara logistik & pembayaran	Portofolio buyer internasional; stabilitas permintaan	Pusat fulfillment & quality gate ekspor	Akses pasar domestik & ekspor stabil	Perluasan ke marketplace global; penguatan standar kepatuhan pasar tujuan
Talenta & vokasi	Telanaipura (BLK/rumah talenta), Kota Baru,	P – Pendidikan (vokasi, BLK, sertifikasi profesi); J – Digital (konten, editing, coding); R–S–T–U – Ekraf (desain, fotografi,	Talenta tersertifikasi untuk subsektor prioritas	Program vokasi terapan (barista, baker, konten, desain,	Ketersediaan talenta sesuai permintaan	Link & match berkelanjutan; beasiswa talenta; sertifikasi	Talenta unggul untuk ekspansi pasar	Akademi kota kreatif; kompetisi & festival talenta	Pipeline talenta berkelanjutan	Penempatan kerja lintas kota/negara; jejaring alumni industri



Tujuan	Kecamatan	Potensi Bidang	2025–2029 (Periode 1)		2030–2034 (Periode 2)		2035–2039 (Periode 3)		2040–2045 (Periode 4)	
			Sasaran Kebijakan	Strategi	Sasaran Kebijakan	Strategi	Sasaran Kebijakan	Strategi	Sasaran Kebijakan	Strategi
	Jambi Selatan, Pasar Jambi	musik); C/I – Industri Pengolahan & F&B (baker, barista, QC)		QC); skema magang industri		profesi massal				



Tabel 6.11. Strategi Kota Jambi sebagai Kota Cerdas (*Smart City*) dan Pusat Layanan Investasi Digital (Misi 5)

Tujuan	Kecamatan	Potensi Bidang	2025–2029 (Periode 1)		2030–2034 (Periode 2)		2035–2039 (Periode 3)		2040–2045 (Periode 4)	
			Sasaran Kebijakan	Strategi	Sasaran Kebijakan	Strategi	Sasaran Kebijakan	Strategi	Sasaran Kebijakan	Strategi
Portal investasi terpadu	Telanaipura (pemerintahan/MPP), Pasar Jambi (CBD), Jelutung	J – Informasi dan Komunikasi (TIK, aplikasi, data center, integrasi sistem); M–N – Jasa Profesional/Perusahaan (konsultasi, layanan bisnis, legal, manajemen); L – Real Estate (ruang usaha, properti komersial, MPP); G – Perdagangan (interaksi pasar, transaksi bisnis, investasi)	Portal satu pintu berisi informasi peluang, konsultasi, perizinan, monitoring, pelaporan aktif digunakan investor	Bangun modul informasi peluang, akun investor, helpdesk, pelacakan izin/LKPM; SOP layanan portal	Portal terintegrasi OSS, RDTR, data proyek; fitur appointment, live chat, dan pelaporan otomatis	API integrasi antar-OPD; sinkronisasi data izin–pelaporan; manajemen pengguna multi-peran	Aftercare dan deal-tracker berjalan; dukungan multibahasa	Tambah modul aftercare, dispute tracker, pipeline proyek dinamis	Portal berstandar global dan sangat andal	UX berkelanjutan, SLA digital ketat, pusat bantuan 24/7
Integrasi data spasial–nonspasial	Jelutung (utilitas/data), Telanaipura, Pasar Jambi	J – Informasi & Komunikasi (GIS, data spasial–nonspasial, data warehouse); O – Administrasi Pemerintahan (tata kelola data, perencanaan, regulasi)	Dashboard daerah memuat peta proyek, RDTR, utilitas, indikator ekonomi	Integrasikan basis data proyek, tata ruang, utilitas, tenaga kerja; tata kelola	Data lintas OPD interoperabel dan mutakhir	Data exchange, validasi otomatis, peta tematik peluang per koridor	Federated data dan near real-time update	Master data & referensi spasial tunggal; audit kualitas data	Satu peta investasi kota yang akurat dan dipakai untuk keputusan	Standarisasi data, SLA pembaruan, dan audit berkala



Tujuan	Kecamatan	Potensi Bidang	2025–2029 (Periode 1)		2030–2034 (Periode 2)		2035–2039 (Periode 3)		2040–2045 (Periode 4)	
			Sasaran Kebijakan	Strategi	Sasaran Kebijakan	Strategi	Sasaran Kebijakan	Strategi	Sasaran Kebijakan	Strategi
		data); L – Real Estate (RDTR, zonasi, pemetaan ruang)		data & metadata						
Automasi layanan	Telanaipura, Pasar Jambi, Jambi Timur, Jambi Selatan	Semua sektor pengguna layanan (cross-sector)	Workflow digital, fiktif-positif, tanda tangan elektronik, e-pembayaran nontunai berjalan	Automasi alur izin, notifikasi otomatis, e-payment, e-receipt	Verifikasi dokumen otomatis dan prinsip once-only data	Integrasi register kependudukan, legalitas usaha, dan data pajak/utility	Layanan minim interaksi manual	RPA untuk proses berulang; audit layanan berkala	Layanan tanpa bottleneck dan transparan secara penuh	Optimasi berkelanjutan berbasis metrik dan umpan balik pengguna
Analitik kebijakan	Telanaipura (Bappeda/P TSP), Jelutung	J – Informasi & Komunikasi (data analytics, DSS, geospatial analytics); O – Administrasi Pemerintahan (perencanaan, evaluasi); K – Jasa Keuangan (analisis dampak ekonomi, fiskal, PDRB, tenaga kerja)	Decision Support System (DSS) untuk perizinan & promosi aktif	Heatmap lokasi, analisis tren izin/investasi, early warning deviasi SLA	Model dampak investasi (PDRB, tenaga kerja, emisi) dipakai rutin	Skor prioritas proyek, simulasi kebijakan, dan rekomendasi lokasi	Kebijakan adaptif berbasis data	Policy triggers pada dashboard; evaluasi triwulanan	Keputusan real-time untuk seluruh siklus investasi	Pembelajaran mesin untuk prediksi hambatan & peluang



Tujuan	Kecamatan	Potensi Bidang	2025–2029 (Periode 1)		2030–2034 (Periode 2)		2035–2039 (Periode 3)		2040–2045 (Periode 4)	
			Sasaran Kebijakan	Strategi	Sasaran Kebijakan	Strategi	Sasaran Kebijakan	Strategi	Sasaran Kebijakan	Strategi
Layanan tanpa tatap muka	Seluruh kecamatan (prioritas CBD, logistik, layanan publik)	Semua sektor (end-to-end digital services)	End-to-end online untuk izin risiko rendah–tinggi; tanda terima digital; tracking publik	Kanal konsultasi video, antrian virtual, layanan 24/7 untuk izin prioritas	Standar SLA lintas layanan tercapai konsisten	Standardisasi berkas & prasyarat; evaluasi SLA per kuartal	Adopsi online mendekati penuh	Omnichannel (web, mobile, kiosk); dukungan multi-bahasa	Layanan 100% digital-ready dengan opsi inklusif	Continuous improvement berbasis survei kepuasan dan analytics
Keamanan siber	Jelutung (pusat data/utilitas), Telanaipura	J – Informasi & Komunikasi (keamanan siber, SOC, SIEM, jaringan); D – Listrik/Gas (keamanan infrastruktur energi & jaringan); E – Air–Sampah–SPAM (keamanan layanan utilitas & infrastruktur publik)	SOC dasar, kebijakan backup & recovery, inventaris aset TI, pelatihan keamanan	Implementasi SIEM, hardening, awareness; uji pemulihan berkala	Uji penetrasi dan audit keamanan rutin	Penerapan segmentasi jaringan, pemantauan anomali	Arsitektur zero-trust diterapkan bertahap	Red team–blue team exercise; simulasi insiden lintas OPD	Keandalan layanan tinggi, MTTR rendah, risiko siber minim	Sertifikasi keamanan, perjanjian tingkat layanan, dan asuransi siber
Kemajuan smart city	Koridor prioritas: CBD–Angso Duo,	J – Informasi & Komunikasi; O – Administrasi Pemerintahan;	Cetak biru smart city dan quick wins (e-	Implementasi domain awal; tata kelola data	Integrasi domain (tiket/event, mobilitas—	Command center operasional,	Skala-IoT & layanan proaktif	Data marketplace internal;	Kemajuan smart city tinggi dan inklusif	Model pendanaan berkelanjutan, standar



Tujuan	Kecamatan	Potensi Bidang	2025–2029 (Periode 1)		2030–2034 (Periode 2)		2035–2039 (Periode 3)		2040–2045 (Periode 4)	
			Sasaran Kebijakan	Strategi	Sasaran Kebijakan	Strategi	Sasaran Kebijakan	Strategi	Sasaran Kebijakan	Strategi
	Waterfront– Heritage, Civic– Utility, Logistics– Light Industry	M–N – Jasa Perusahaan/Profesional ; G – Perdagangan; I – F&B / Pariwisata; R–S–T–U – Ekonomi Kreatif; K – Jasa Keuangan; H – Transportasi; D – Energi / Energi Listrik & Gas; E – Air, Sampah, SPAM, Daur Ulang; L – Real Estate/Ruang Publik & Hunian; Q – Kesehatan; P – Pendidikan.	permit, e- payment, e- complaint, e- parking)	& komite pengarah	integrasi Trans Bahagia, lingkungan sensor banjir/air)	integrasi IoT lintas domain		ekosistem startup/so lusi lokal		layanan cerdas, dan audit kematanga n tahunan

Tabel 6.12. Strategi Kolaborasi dan Promosi Investasi Daerah (Misi 6)

Tujuan	Kecamatan	Potensi Bidang	2025–2029 (Periode 1)		2030–2034 (Periode 2)		2035–2039 (Periode 3)		2040–2045 (Periode 4)	
			Sasaran Kebijakan	Strategi	Sasaran Kebijakan	Strategi	Sasaran Kebijakan	Strategi	Sasaran Kebijakan	Strategi
Forum quadruple helix aktif	Telanaipura (pemerintahan/akademik), Pasar Jambi (bisnis), Kota Baru & Jambi Selatan (komunitas/UMKM)	I – Akomodasi & F&B; J – Informasi & Komunikasi; M – N – Jasa Perusahaan/Profesional; Q – Kesehatan; C – Manufaktur; R – S – T – U – Ekonomi Kreatif	Forum kuartalan terbentuk dengan rencana aksi dan pipeline proyek prioritas	Bentuk sekretariat forum; agenda tematik per klaster; peta kebutuhan kompetensi dan riset terapan	Forum tematik berjalan konsisten dan menghasilkan MoU kolaborasi	Laboratorium kebijakan dan riset bersama; program magang dan talent pipeline	Inkubasi kolaboratif lintas helix dan hilirisasi riset	Dana kolaborasi dan kemitraan R&D; percontohan teknologi	Ekosistem kolaborasi mapan melahirkan proyek dan inovasi rutin	Endowment/CSR berkelanjutan; tata kelola forum profesional
Materi promosi standar	Telanaipura (sekretariat), Pasar Jambi (showroom), Jambi Timur (grosir/logisti)	J – Informasi & Komunikasi; M – N – Jasa Perusahaan/Profesional; G – Perdagangan; L – Real Estate/Ruang Publik	Paket promosi standar tersedia (opportunity profile, teaser, pra-FS, paket insentif)	Template baku, foto/data teknis, peta lokasi, estimasi CAPEX/OPEX, model bisnis	Materi bilingual dan diperbarui berkala	Integrasi materi ke portal; kurasi konten sektor/kawasan	Bank materi promosi sektoral dan koridor	Editorial kalender promosi; quality assurance konten	Perpustakaan promosi dinamis dan siap roadshow global	Versi interaktif, data real-time, dan studi kasus sukses (success stories)



Tujuan	Kecamatan	Potensi Bidang	2025–2029 (Periode 1)		2030–2034 (Periode 2)		2035–2039 (Periode 3)		2040–2045 (Periode 4)	
			Sasaran Kebijakan	Strategi	Sasaran Kebijakan	Strategi	Sasaran Kebijakan	Strategi	Sasaran Kebijakan	Strategi
Promosi terarah	CBD Pasar Jambi, Waterfront–Heritage, Logistics (Alam Barajo–Kotabaru), Knowledge–Health (Telanaipura)	I – F&B/Pariwisata; J – Infokom; M–N – Jasa Perusahaan; Q – Kesehatan; C – Manufaktur; G–H – Perdagangan & Transportasi; R–S–T–U – Ekonomi Kreatif	Roadshow sector-focused & investor-specific; business matching triwulanan	Segmentasi target investor; daftar buyer; jadwal misi dagang; KPI konversi	Misi dagang bersama lintas daerah/negara; kanal ekspor prioritas	Ko-promosi dengan asosiasi/ke dutaan; market intelligence	Partisipasi pameran/marketplace internasional berulang	Booth tetap “House of Jambi”; kampanye digital	Kalender promosi global berkelanjutan	Co-branding dengan anchor investor; kontrak jangka panjang
Deal facilitation	Telanaipura (helpdesk), Jelutung (utilitas), lokasi proyek prioritas	O – Administrasi Pemerintahan; M–N – Jasa Perusahaan/Profesional; J – Informasi & Komunikasi; D – Energi; E – Air & Utilitas; H – Transportasi	Helpdesk investor berfungsi; SOP due diligence dan lintas OPD	Daftar konsultan/penjaminan; timeline izin–lahan–utilitas; checklists	Waktu dari leads MoU financial close menurun	Task force financial close; escrow isu krusial; review mingguan	Rasio realisasi investasi meningkat	Pusat fasilitasi deal permanen; pelaporan progres transparan	Siklus deal cepat dan predictable	Service level agreement antar-instansi; penghargaan kinerja



Tujuan	Kecamatan	Potensi Bidang	2025–2029 (Periode 1)		2030–2034 (Periode 2)		2035–2039 (Periode 3)		2040–2045 (Periode 4)	
			Sasaran Kebijakan	Strategi	Sasaran Kebijakan	Strategi	Sasaran Kebijakan	Strategi	Sasaran Kebijakan	Strategi
Integrasi rantai pasok regional	Koridor logistik (Alam Barajo–Kotabaru), Jambi Timur–waterfront, akses bandara/pelabuhan regional	G–H – Perdagangan & Transportasi; C – Manufaktur; I – F&B; E – Cold Cin	Pemetaan pemasok–pembeli regional Sumatera Teh	Workshop supply–demand; katalog pemasok; konsolidasi volume	Kontrak pasok lintas wilayah berjalan	Fasilitasi agregasi, standarisasi kualitas, dan skema harga	Hub komoditas & distribusi kota berfungsi	Platform data pasok–permintaan; integrasi cold chain	Rantai pasok regional tangguh dan efisien	Perjanjian jangka panjang; indikator biaya/logistik standar
Kemitraan besar–UMKM	Pasar Jambi, Jambi Selatan, Kota Baru, Telanaipura	G–I – Ritel & F&B; C/I – Olah Pangan; R–S–T–U – Kreatif; K – Keuangan	Kontrak payung lokal aktif; target pengadaan daerah	Katalog pengadaan lokal; kurasi & standarisasi; pendampingan kualitas	Rantai pasok lokal terdalam	Pembiayaan invoice/PO; skema vendor development	Ekspansi kemitraan ke ritel modern dan B2B nasional	Konsorsium pemasok lokal; SLA kualitas & ketepatan waktu	Porsi pengadaan lokal tinggi dan berkelanjutan	Preferensi lokal berbasis kinerja; audit pemasok periodik
Branding investasi kota	Semua koridor unggulan: CBD & Creative Hub; Waterfront–Heritage; Logistics–Light Industry; Knowledge–Health	J – Informasi & Komunikasi; R–S–T–U – Ekonomi Kreatif; M–N – Jasa Perusahaan/Profesional; G – Perdagangan	Identitas brand investasi kota diluncurkan	Microsite/multimedia; narasi value proposition; kampanye digital	Brand aktif di event nasional; konversi leads tercatat	Success stories; media partnership; PR agenda	Brand diakui nasional; top-of-mind sektor unggulan	Duta/ambasador brand dari investor besar	Brand kota kuat di tingkat global	Pengukuran brand awareness & conversion; penyegaran brand berkala

BAB 7

SASARAN PEMBANGUNAN RUPM KOTA JAMBI 2025-2045

Sasaran pembangunan RUPM Kota Jambi 2025–2045 dirancang untuk memperkuat struktur ekonomi daerah melalui peningkatan produktivitas, diversifikasi sektor unggulan, serta ekspansi kapasitas investasi yang berkelanjutan. Arah pembangunan ini harus selaras dengan target makro RPJPD, terutama peningkatan pendapatan per kapita, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, peningkatan daya saing daerah, penguatan sumber daya manusia, dan penurunan emisi gas rumah kaca menuju pembangunan hijau. Dalam konteks peningkatan pendapatan per kapita, RPJPD menargetkan kenaikan signifikan dari Rp 75,73 juta pada tahun 2025 menjadi Rp 450–465 juta pada tahun 2045. Pencapaian ini tidak dapat dilepaskan dari strategi RUPM dalam mendorong pertumbuhan sektor produktif seperti logistik terpadu, industri pengolahan berbasis pangan dan perkebunan, ekonomi digital, pariwisata perkotaan, serta jasa kesehatan dan pendidikan. Keberlanjutan pertumbuhan sektor tersier menjadi krusial, mengingat kontribusinya diproyeksikan meningkat dari 78,64% pada 2025 menjadi 79,00–79,80% pada 2045.

Sementara itu, target kontribusi industri pengolahan yang meningkat dari 10,25% menjadi 10,40–10,50% pada 2045 mencerminkan agenda industrialisasi yang bersifat moderat tetapi strategis. Untuk mendukung target tersebut, RUPM menekankan pentingnya penyediaan lahan industri yang terencana, insentif fiskal dan non-fiskal, integrasi rantai pasok UMKM–industri, serta peningkatan kapasitas produksi melalui teknologi pengolahan modern. Transformasi struktur ekonomi ini juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang ditargetkan mencapai 7,1–7,2% pada tahun 2045. Dalam konteks ini, keberhasilan RUPM sangat ditentukan oleh kemampuan menarik investasi skala menengah dan besar, mengingat aktivitas usaha saat ini masih didominasi oleh UMK dengan risiko rendah. Oleh karena itu, peningkatan kualitas tata kelola perizinan, pemetaan peluang investasi strategis, dan percepatan pembangunan infrastruktur logistik menjadi prioritas untuk memastikan tercapainya target pertumbuhan ekonomi tersebut.

Selanjutnya, sasaran pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan menjadi komponen penting dalam arah pembangunan RUPM. RPJPD menargetkan



penurunan tingkat kemiskinan dari 7,25–7,50% pada 2025 menjadi hanya 0,55–1,50% pada 2045, serta penurunan rasio gini dari 0,275 menjadi 0,20. Dalam konteks ini, investasi berperan sebagai motor penciptaan lapangan kerja berkualitas. RUPM diarahkan untuk meningkatkan investasi pada sektor padat karya modern, memperkuat inkubasi UMKM, mengembangkan pasar rakyat yang produktif, memperluas akses pembiayaan inklusif, serta meningkatkan pemerataan ekonomi antar-kecamatan. Data NIB 2025 menunjukkan konsentrasi usaha baru di koridor barat–tengah seperti Alam Barajo, Paal Merah, dan Kotabaru, sementara wilayah timur dan pusat tertentu tertinggal. Kondisi ini mengindikasikan perlunya strategi pemerataan investasi melalui penyediaan ruang usaha terjangkau, fasilitasi OSS yang lebih intensif, serta peningkatan konektivitas transportasi dan logistik last-mile. Selain itu, peningkatan kontribusi PDRB Kota Jambi terhadap Provinsi Jambi dari 13,08% pada 2025 menjadi 15,8% pada 2045 menuntut optimalisasi peran Kota Jambi sebagai pusat perdagangan, jasa, dan logistik regional.

Sasaran peningkatan daya saing daerah dalam RUPM Kota Jambi menuntut penguatan kelembagaan investasi, percepatan layanan perizinan, digitalisasi proses, serta kepastian tata ruang. Upaya ini diperlukan untuk mencapai target peningkatan Indeks Daya Saing Daerah dari 3,9 pada 2025 menjadi 4,62–4,93 pada 2045. Peningkatan kualitas infrastruktur strategis seperti jalan arteri, pusat logistik, kawasan komersial, dan infrastruktur digital juga menjadi faktor kunci untuk menarik investasi jangka panjang.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia mendapat perhatian melalui target kenaikan IPM dari 82,59 menjadi 88,5 pada 2045. RUPM berperan dalam mendorong investasi pada pendidikan vokasi, pelatihan kerja, fasilitas kesehatan modern, dan layanan kesehatan berbasis teknologi. Kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan diperlukan agar kompetensi tenaga kerja selaras dengan kebutuhan industri. Selanjutnya, penurunan emisi gas rumah kaca menjadi agenda strategis dengan target penurunan dari 12,4 juta ton CO₂e pada 2025 menjadi 1 juta ton CO₂e pada 2045. RUPM mendukung capaian ini melalui prioritas investasi hijau, energi terbarukan, pengelolaan sampah modern, transportasi rendah emisi, serta penguatan instrumen perizinan lingkungan. Secara keseluruhan, integrasi sasaran RUPM dan RPJPD memastikan arah pembangunan Kota Jambi lebih berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan.



Tabel 7.1. Target Sasaran Pokok Pembangunan Tahun 2029-2045

No	Sasaran		Baseline 2025	2029	2034	2039	2045
1.	Peningkatan Pendapatan Per Kapita						
	a	PDRB per kapita (juta Rp)	75,73	120–125	185–190	290–295	450–465
	b	Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	10,25	10,3	10,35	10,4	10,40–10,50
	c	Kontribusi PDRB Sektor Tersier (%)	78,64	78,75	78,85	78,9	79,00–79,80
2.	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan						
	2a	Tingkat Kemiskinan (%)	7,50–7,25	6,25–5,75	4,50–4,00	2,50–2,00	1,50–0,55
	2b	Rasio Gini (indeks)	0,275	0,25	0,23	0,22	0,2
	2c	Kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi (%)	13,08	13,4	14,64	15,19	15,8
	2d	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,73	6,85–6,90	6,95	7,1	7,1–7,2
3.	Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional						
	3a	Indeks Daya Saing Daerah	3,9	4,12	4,35	4,57	4,62–4,93
4.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia						
	4	Indeks Pembangunan Manusia	82,59	83,3	84,75	86,5	88,5
5.	Penurunan Emisi GRK Menuju Net Zero Emission						
	5a	Intensitas Emisi GRK (ton CO2e)	12,4 Juta	6,8 Juta	3,6 Juta	1,8 Juta	1 Juta
	5b	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	58,78	59,63	60,51	61,25	62,1

Sumber: RPJPD Kota Jambi 2025-2045

Kemampuan fiskal daerah diperkuat melalui kenaikan rasio pajak terhadap PDRB, sementara keberlanjutan investasi didorong melalui peningkatan Indeks Ekonomi Hijau. Seluruh indikator ini menggambarkan fondasi yang diperlukan untuk menarik investasi berkualitas dan menjaga produktivitas ekonomi Kota Jambi secara jangka panjang.

Tabel 7.2. Sasaran Iklim investasi kondusif & berdaya saing (Misi 1)

No	Sasaran	Baseline 2025	Sasaran 2029	Sasaran 2034	Sasaran 2039	Sasaran 2045
1	Indeks Reformasi Hukum	73	78	83	88	93
2	Penegakan Hukum Peraturan Daerah (%)	100	100	100	100	100
3	Indeks SPBE (digitalisasi layanan)	4,27	4,34	4,41 (A-)	4,40 (A-)	4,75–5,00
4	Indeks Pelayanan Publik	73,91	74,57	74,45	75,9	76,34
5	Indeks Integritas Nasional (anti-pungli/etika layanan)	74,57	75,01	74,45	75,9	76,34
6	Indeks Daya Saing Daerah	3,9	4,12	4,35	4,57	4,62–4,93
7	Tingkat Inflasi (%)	3,27	3,24	3,21	3,18	2,5 ± 1
8	Angka Kriminalitas (indeks/tingkat)	30	27,5	25	22,5	20
9	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,47	2,52	3,57	4,62	5,67–7,00
10	Indeks Penerapan Ekonomi Hijau (dukungan ESG & kepastian lahan)	73,61	77,81	82,31	87,31	92,8

Sumber: RPJPD Kota Jambi 2025-2045

Berdasarkan Tabel 7.2 menunjukkan sasaran pada Misi 1 berfokus pada terciptanya lingkungan investasi yang stabil, transparan, aman, dan kompetitif hingga 2045. Arah pencapaiannya tercermin dari peningkatan kualitas regulasi, digitalisasi layanan, integritas birokrasi, dan daya saing ekonomi daerah. Indikator kuncinya menunjukkan tren penguatan tata kelola melalui peningkatan Indeks Reformasi Hukum, SPBE, pelayanan publik, serta integritas layanan. Stabilitas ekonomi dijaga melalui pengendalian inflasi dan penurunan tingkat kriminalitas.

Tabel 7.3. Sasaran Pemerataan dan Keadilan Investasi Antar Wilayah (Misi 2)

No	Sasaran	Baseline 2025	Sasaran 2029	Sasaran 2034	Sasaran 2039	Sasaran 2045
1	Indeks Daya Saing Daerah (daya tarik lokasi di berbagai koridor)	3,90	4,12	4,35	4,57	4,62– 4,93
2	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) — kapasitas fiskal untuk layanan/infrastruktur kawasan	1,47	2,52	3,57	4,62	5,67– 7,00
3	Tingkat Inflasi (%) — biaya logistik & distribusi antarkawasan	3,27	3,24	3,21	3,18	2,5 ± 1
4	Angka Kriminalitas (menurun = keamanan pusat pertumbuhan baru)	30	27,5	25	22,5	20
5	Indeks SPBE (integrasi data spasial–nonspasial & layanan daring lintas kecamatan)	4,27	4,34	4,41 (A–)	4,40 (A–)	4,75– 5,00
6	Indeks Pelayanan Publik (mutu layanan perizinan & nonperizinan lintas lokasi)	73,91	74,57	74,45	75,90	76,34
7	Indeks Reformasi Hukum (kepastian regulasi RDTR/penataan ruang per koridor)	73	78	83	88	93
8	Indeks Penerapan Ekonomi Hijau (dukungan lahan siap investasi & kepatuhan lingkungan kawasan)	73,61	77,81	82,31	87,31	92,80
9	Proporsi Ekonomi Hijau Primer (%) — penguatan basis produksi di luar CBD	27,30	40,80	55,30	70,30	86,47



No	Sasaran	Baseline 2025	Sasaran 2029	Sasaran 2034	Sasaran 2039	Sasaran 2045
10	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%) — serapan kerja lokal	43	53	64	75	85
11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) — inklusi pasar kerja di koridor baru	52,54	54,67	57,80	60,93	62–65
12	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%) — kemitraan lokal & UMKM	0,25	0,17	0,65	1,10	1,19
13	Proporsi Usaha Kecil–Menengah Non-Pertanian (%) — skala UMKM di pusat pertumbuhan	68,29	70,10	72,85	75,85	79,35
14	Proporsi Industri Kecil & Menengah (%) — hilirisasi & sebaran basis industri ringan	47,25	48,35	49,00	51,00	52,45
15	Rasio PDRB Akomodasi Makan Minum (%) — penguatan pariwisata koridor waterfront/heritage	2,45	2,65	2,90	3,20	3,45
16	Konsumsi Listrik per Kapita (kWh) — proksi konektivitas/aktivitas ekonomi wilayah	1.293	1.693	2.143	2.643	3.080
17	Akses RT Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan (%) — utilitas dasar kawasan	78	80	85	92	95–100
18	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas (%)	17	35	60	75	85



No	Sasaran	Baseline 2025	Sasaran 2029	Sasaran 2034	Sasaran 2039	Sasaran 2045
	— layanan kota untuk pusat non-CBD					
19	RT dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%) — kualitas layanan di pinggiran	24,89	43,67	62,45	81,22	100
20	Kapasitas Air Baku (m3/detik) — dukungan utilitas bagi kawasan baru	1,1	2,05	3,1	4,4	5,3
21	Indeks Risiko Bencana (IRB) — ketahanan kawasan logistik/waterfront	123,24	122,31	121,14	114,96	108,79
22	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup — kualitas ruang untuk investasi sebaran	58,78	59,63	60,51	61,25	62,10
23	Kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi (%) — posisi Jambi sebagai motor wilayah	13,08	13,40	14,64	15,19	15,80
24	Pertumbuhan Ekonomi (%) — hasil agregat dari pusat pertumbuhan multi-koridor	6,73	6,85– 6,90	6,95	7,10	7,10– 7,20
25	Tingkat Kemiskinan (%) — proksi penurunan disparitas antarkawasan	7,50– 7,25	6,25– 5,75	4,50– 4,00	2,50– 2,00	1,50– 0,55
26	Rasio Gini (ketimpangan)	0,275	0,250	0,230	0,220	0,200

Sumber: RPJPD Kota Jambi 2025-2045

Berdasarkan Tabel 7.3 menunjukkan Sasaran pada Misi 2 menekankan terciptanya sebaran investasi yang lebih merata di seluruh kecamatan melalui penguatan daya saing

lokasi, peningkatan layanan dasar kawasan, dan pengembangan pusat ekonomi baru di luar CBD. Indikator RPJPD menunjukkan bahwa pemerataan investasi diarahkan melalui peningkatan daya saing daerah, kapasitas fiskal, keamanan, serta efisiensi logistik—tercermin dari target inflasi yang terus turun dan kriminalitas yang menurun.

Perbaikan layanan publik, integrasi data SPBE, dan kepastian hukum tata ruang menjadi fondasi agar seluruh koridor investasi memiliki standar kemudahan berusaha yang sama. Pada saat yang sama, pertumbuhan ekonomi hijau primer, peningkatan serapan kerja formal, partisipasi kerja perempuan, serta ekspansi UMKM dan industri kecil-menengah menunjukkan dorongan kuat untuk pemerataan manfaat investasi hingga level komunitas.

Upaya pemerataan juga diperkuat dengan penyediaan utilitas dasar seperti air minum, listrik, pengelolaan sampah, serta peningkatan kapasitas air baku yang menyokong kawasan baru. Indikator lingkungan, risiko bencana yang menurun, dan kualitas ruang yang membaik memastikan setiap wilayah tumbuh secara aman dan berkelanjutan. Pada akhirnya, target kemiskinan dan ketimpangan yang terus menurun hingga 2045 menjadi cerminan bahwa investasi tidak hanya tumbuh, tetapi meningkatkan kesejahteraan secara adil di seluruh wilayah Kota Jambi.

Tabel 7.4. Sasaran Investasi Hijau dan Ekonomi Berkelanjutan (Misi 3)

No	Sasaran	Baseline 2025	Sasaran			
			2029	2034	2039	2045
1	Indeks Penerapan Ekonomi Hijau (tingkat adopsi praktik hijau lintas sektor)	73,61	77,81	82,31	87,31	92,80
2	Proporsi Ekonomi Hijau Primer (%) (kontribusi kegiatan hijau pada perekonomian)	27,30	40,80	55,30	70,30	86,47
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	58,78	59,63	60,51	61,25	62,10
4	Intensitas Emisi GRK Tahunan (ton CO ₂ e)	12,4 juta	6,8 juta	3,6 juta	1,8 juta	1 juta



No	Sasaran	Baseline 2025	Sasaran			
			2029	2034	2039	2045
5	Emisi GRK Kumulatif (ton CO ₂ e)	131 juta	69 juta	35 juta	17 juta	8 juta
6	Konsumsi Listrik per Kapita (kWh) — efisiensi dan elektrifikasi (energi bersih mendukung)	1.293	1.693	2.143	2.643	3.080
7	Kapasitas Air Baku (m ³ /detik) — dukungan efisiensi & ketahanan air	1,1	2,05	3,1	4,4	5,3
8	Akses RT Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan (%)	78	80	85	92	95–100
9	RT dengan Akses Sanitasi Aman (%)	12	21,5	31	40,5	50
10	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas (%) dukungan 3R/WtE/kompos	17	35	60	75	85
11	RT dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%)	24,89	43,67	62,45	81,22	100
12	Indeks Risiko Bencana (IRB) ketahanan iklim/kawasan	123,24	122,31	121,14	114,96	108,79
13	Indeks SPBE (mendukung automasi pemantauan ESG/energi-air)	4,27	4,34	4,41 (A–)	4,40 (A–)	4,75–5,00
14	Indeks Pelayanan Publik (standar layanan hijau & perizinan lingkungan)	73,91	74,57	74,45	75,90	76,34

Sumber: RPJPD Kota Jambi 2025-2045

Berdasarkan Tabel 7.4 menunjukkan Sasaran pada Misi 3 berfokus pada transformasi Kota Jambi menuju ekonomi rendah karbon melalui peningkatan penerapan

ekonomi hijau, penguatan kualitas lingkungan, dan penurunan signifikan emisi GRK. Indikatornya menunjukkan tren peningkatan kontribusi ekonomi hijau, perbaikan indeks lingkungan hidup, serta penurunan emisi tahunan dan kumulatif secara bertahap hingga 2045. Upaya ini didukung oleh peningkatan efisiensi energi melalui kenaikan konsumsi listrik per kapita yang terarah pada elektrifikasi bersih, perluasan kapasitas air baku, serta kenaikan akses air minum perpipaan dan sanitasi aman.

Selain itu, sistem pengelolaan sampah ditargetkan semakin optimal melalui peningkatan porsi sampah terolah dan cakupan layanan pengumpulan. Ketahanan iklim kawasan juga diperkuat dengan penurunan Indeks Risiko Bencana. Penerapan SPBE dan peningkatan standar pelayanan publik diarahkan untuk mendukung monitoring ESG, efisiensi sumber daya, serta perizinan lingkungan yang lebih transparan. Keseluruhan sasaran ini menegaskan komitmen Kota Jambi menuju kota berketahanan, rendah emisi, dan berorientasi pembangunan hijau pada tahun 2045.

Tabel 7.5. Sasaran Sektor Unggulan dan Ekonomi Kreatif (Misi 4)

No	Sasaran	Baseline 2025	Sasaran			
			2029	2034	2039	2045
1	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) hilirisasi agro/perikanan/hasil hutan	10,25	10,30	10,35	10,40	10,40–10,50
2	Rasio PDRB Akomodasi Makan Minum (%) sektor F&B dan pariwisata	2,45	2,65	2,90	3,20	3,45
3	Jumlah Tamu Wisman (orang) daya tarik destinasi/event MICE	6.163	6.286	6.409	6.532	6.656
4	Kontribusi PDRB Sektor Tersier (%) jasa pariwisata/kreatif	78,64	78,70	78,85	78,90	79,00–79,30
5	Proporsi Usaha Kecil–Menengah	68,29	70,10	72,85	75,85	79,35



No	Sasaran	Baseline 2025	Sasaran			
			2029	2034	2039	2045
	Non-Pertanian (%) basis UMKM kreatif					
6	Proporsi Industri Kecil & Menengah (%) rumah produksi/olah pangan	47,25	48,35	49,00	51,00	52,45
7	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%) kemitraan & agregasi UMKM	0,25	0,17	0,65	1,10	1,19
8	Indeks Inovasi Daerah	64,16	65,96	67,76	69,56	70,12–75,20
9	Dana riset & inovasi dibanding APBD (%) dukungan R&D produk & proses	8,07	9–10	11–12	13–14	15–16
10	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%) skala usaha naik kelas	43	53	64	75	85
11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) inklusi talenta kreatif/F&B	52,54	54,67	57,80	60,93	62–65
12	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) (%) fondasi branding/ekosistem kreatif	60,16– 60,23	62–63	64–66	66–68	69–70
13	Indeks Kota Toleran kenyamanan berkarya & hosting event	5,00	5,25	5,50	5,75	6,05
14	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) onboarding	4,27	4,34	4,41 (A–)	4,40 (A–)	4,75–5,00

No	Sasaran	Baseline 2025	Sasaran			
			2029	2034	2039	2045
	marketplace/layanan digital					
15	Indeks Pelayanan Publik kemudahan perizinan event, F&B, rumah produksi	73,91	74,57	74,45	75,90	76,34

Sumber: RPJPD Kota Jambi 2025-2045

Berdasarkan Tabel 7.5 menunjukkan Indikator Misi 4 menunjukkan bahwa pengembangan sektor unggulan dan ekonomi kreatif Kota Jambi diarahkan pada peningkatan hilirisasi industri, penguatan sektor F&B dan pariwisata, serta ekspansi UMKM–kreatif. Porsi industri pengolahan, IKM, dan sektor akomodasi–makan minum meningkat stabil, diikuti pertumbuhan wisatawan dan sektor tersier. Skala UMKM naik melalui peningkatan usaha non-pertanian, penguatan koperasi, dan melonjaknya kerja formal. Transformasi ini ditopang oleh penguatan inovasi, digitalisasi layanan, serta tata kelola perizinan yang semakin baik. Keseluruhan proses diperkuat oleh meningkatnya partisipasi perempuan, pembangunan kebudayaan, dan tingginya toleransi kota, menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang inklusif dan berdaya saing hingga 2045.

Tabel 7.6. Sasaran sebagai Kota Cerdas (Smart City) dan Pusat Layanan Investasi Digital (Misi 5)

No	Sasaran	Baseline 2025	Sasaran 2029	Sasaran 2034	Sasaran 2039	Sasaran 2045
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) fondasi portal terpadu, integrasi data, automasi, layanan online	4,27	4,34	4,41 (A–)	4,40 (A–)	4,75–5,00
2	Indeks Pelayanan Publik mutu perizinan end-to-end,	73,91	74,57	74,45	75,90	76,34



No	Sasaran	Baseline 2025	Sasaran 2029	Sasaran 2034	Sasaran 2039	Sasaran 2045
	pelacakan status, kepuasan pengguna					
3	Indeks Reformasi Hukum keseragaman prosedur digital, fiktif-positif, dasar regulasi layanan	73	78	83	88	93
4	Indeks Daya Saing Daerah outcome portal investasi, promosi digital, aftercare	3,90	4,12	4,35	4,57	4,62–4,93
5	Indeks Integritas Nasional transparansi biaya, nontunai, akuntabilitas layanan daring	74,57	75,01	74,45	75,90	76,34
6	Tingkat Inflasi (%) stabilitas biaya layanan/logistik digital	3,27	3,24	3,21	3,18	2,5 ± 1
7	Angka Kriminalitas lingkungan aman untuk layanan digital, pusat data, dan aktivitas usaha	30	27,5	25	22,5	20
8	Konsumsi Listrik per Kapita (kWh) kesiapan elektrifikasi layanan/ pusat data/transportasi cerdas	1.293	1.693	2.143	2.643	3.080



No	Sasaran	Baseline 2025	Sasaran 2029	Sasaran 2034	Sasaran 2039	Sasaran 2045
9	Kapasitas Air Baku (m3/detik) prasyarat utilitas kota cerdas dan koridor pertumbuhan	1,1	2,05	3,1	4,4	5,3
10	RT dengan Akses Air Minum Perpipaan (%) layanan dasar terintegrasi dashboard	78	80	85	92	95–100
11	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas (%) dukungan smart environment dan pelaporan digital	17	35	60	75	85
12	RT dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%) cakupan layanan perkotaan berbasis data	24,89	43,67	62,45	81,22	100
13	Indeks Risiko Bencana (IRB) ketahanan infrastruktur TIK/command center	123,24	122,31	121,14	114,96	108,79
14	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) outcome smart environment & waterfront	58,78	59,63	60,51	61,25	62,10

Sumber: RPJPD Kota Jambi 2025-2045

Berdasarkan Tabel 7.6 menunjukkan Indikator sasaran pada Misi 5 menunjukkan arah transformasi Kota Jambi menuju kota cerdas dan pusat layanan investasi digital

melalui penguatan fondasi SPBE, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan penataan regulasi yang menopang layanan terpadu, automasi proses, serta keamanan transaksi daring. Kenaikan daya saing daerah menegaskan berfungsinya portal investasi dan promosi berbasis data, sementara stabilitas inflasi dan menurunnya kriminalitas menciptakan lingkungan yang aman dan efisien bagi aktivitas digital serta pusat data. Peningkatan kapasitas energi dan air baku, serta meluasnya akses air minum dan layanan persampahan, menjadi prasyarat penting bagi infrastruktur smart city dan pemantauan layanan secara real time. Pada saat yang sama, ketahanan kota terhadap bencana dan kualitas lingkungan terus membaik sehingga mendukung operasional command center, smart environment, dan pengembangan waterfront city. Secara keseluruhan, indikator-indikator ini memperlihatkan kesiapan Kota Jambi membangun pemerintahan digital yang terintegrasi, layanan publik tanpa tatap muka, serta ekosistem investasi yang transparan, adaptif, dan berdaya saing menuju 2045.

Tabel 7.7. Sasaran Kolaborasi dan Promosi Investasi Daerah (Misi 6)

No	Sasaran	Baseline 2025	Sasaran 2029	Sasaran 2034	Sasaran 2039	Sasaran 2045
1	Indeks Daya Saing Daerah (proxy branding dan daya tarik investasi)	3,90	4,12	4,35	4,57	4,62–4,93
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) fondasi portal promosi, pipeline proyek, helpdesk investor	4,27	4,34	4,41 (A–)	4,40 (A–)	4,75–5,00
3	Indeks Pelayanan Publik kualitas layanan front/back office untuk fasilitasi deal	73,91	74,57	74,45	75,90	76,34
4	Indeks Reformasi Hukum kepastian regulasi untuk MoU financial close	73	78	83	88	93



No	Sasaran	Baseline 2025	Sasaran 2029	Sasaran 2034	Sasaran 2039	Sasaran 2045
5	Indeks Integritas Nasional transparansi biaya, tatakelola promosi & kemitraan	74,57	75,01	74,45	75,90	76,34
6	Pertumbuhan Ekonomi (%) outcome agregat promosi/realization	6,73	6,85–6,90	6,95	7,10	7,10–7,20
7	Kontribusi PDRB Kota thd Provinsi (%) posisi Kota Jambi di jejaring regional	13,08	13,40	14,64	15,19	15,80
8	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) ruang fiskal untuk promosi & fasilitasi	1,47	2,52	3,57	4,62	5,67–7,00
9	Rasio PDRB Akomodasi–Makan Minum (%) dukungan event/roadshow/MIC E	2,45	2,65	2,90	3,20	3,45
10	Proporsi Usaha Kecil Menengah Non-Pertanian (%) basis kemitraan lokal	68,29	70,10	72,85	75,85	79,35
11	Proporsi Industri Kecil & Menengah (%) supply domestik untuk rantai pasok	47,25	48,35	49,00	51,00	52,45
12	Rasio Volume Usaha Koperasi thd PDRB (%) konsolidasi dan agregasi pesanan	0,25	0,17	0,65	1,10	1,19



No	Sasaran	Baseline 2025	Sasaran 2029	Sasaran 2034	Sasaran 2039	Sasaran 2045
13	Proporsi Penciptaan Kerja Formal (%) outcome kemitraan & investasi	43	53	64	75	85
14	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) inklusi dalam kemitraan & supply chain	52,54	54,67	57,80	60,93	62–65
15	Konsumsi Listrik per Kapita (kWh) kapasitas utilitas untuk ekspansi investasi	1.293	1.693	2.143	2.643	3.080
16	Kapasitas Air Baku (m3/detik) dukungan utilitas kawasan promosi	1,1	2,05	3,1	4,4	5,3
17	Akses RT Perkotaan ke Air Perpipaan (%) kualitas layanan dasar kawasan	78	80	85	92	95–100
18	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas (%) kesiapan layanan untuk investasi/ekraf	17	35	60	75	85
19	RT dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%) standar pelayanan kota	24,89	43,67	62,45	81,22	100
20	Angka Kriminalitas keamanan ekosistem deal & event promosi	30	27,5	25	22,5	20

No	Sasaran	Baseline 2025	Sasaran 2029	Sasaran 2034	Sasaran 2039	Sasaran 2045
21	Indeks Risiko Bencana (IRB) ketahanan kawasan/venue promosi & rantai pasok	123,24	122,31	121,14	114,96	108,79
22	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) daya tarik lokasi & branding hijau	58,78	59,63	60,51	61,25	62,10

Sumber: RPJPD Kota Jambi 2025-2045

Berdasarkan Tabel 7.7 menunjukkan Indikator sasaran pada Misi 6 menunjukkan bagaimana Kota Jambi membangun ekosistem kolaborasi dan promosi investasi yang kuat melalui peningkatan daya saing daerah, digitalisasi layanan pemerintahan, dan kepastian regulasi yang mempermudah proses MoU hingga financial close. Peningkatan SPBE dan kualitas pelayanan publik memperkuat portal promosi, pipeline proyek, dan fasilitasi investor, sementara reformasi hukum dan integritas nasional menjamin transparansi biaya serta tata kelola kemitraan yang akuntabel. Dampak ekonomi dari promosi investasi tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang stabil, meningkatnya kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi, serta penguatan ruang fiskal melalui kenaikan rasio pajak terhadap PDRB. Basis kemitraan lokal juga diperkuat melalui pertumbuhan UMKM non-pertanian, IKM, koperasi sebagai agregator, dan peningkatan penciptaan kerja formal.

Selain itu, kesiapan infrastruktur pendukung investasi turut ditingkatkan, termasuk kapasitas listrik, air baku, akses air minum perpipaan, dan layanan persampahan, yang memastikan utilitas kota siap mendukung ekspansi usaha dan kawasan promosi. Penurunan angka kriminalitas, peningkatan ketahanan bencana, dan membaiknya kualitas lingkungan semakin memperkuat daya tarik lokasi serta keberlanjutan rantai pasok dan venue promosi. Secara keseluruhan, indikator-indikator ini menegaskan bahwa Kota Jambi menyiapkan iklim investasi yang lebih kolaboratif, terintegrasi, aman, dan kompetitif, dengan standar internasional, menuju 2045.

BAB 8

PENUTUP

8.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap struktur ekonomi (SLQ/DLQ), keunggulan sektoral, kajian spasial (Orde Kegiatan), serta tantangan dan peluang (SWOT dan PESTEL), Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Jambi Tahun 2025–2045 dirumuskan sebagai pedoman strategis yang terintegrasi. Adapun kesimpulan dalam RUPM Kota Jambi 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1. RUPM Kota Jambi 2025–2045 memfokuskan investasi pada penguatan Sektor Unggulan Utama (Jasa Kesehatan, TIK, Pariwisata) yang memiliki daya saing tinggi, didukung oleh strategi KPBU untuk mengatasi defisit Utilitas Kritis (menekan NRW). Secara spasial, investasi diarahkan ke Kawasan Prioritas berdasarkan klusterisasi Orde Kegiatan: Orde I (Telanaipura, Pasar Jambi) dikembangkan sebagai Pusat Jasa Premier dan CBD; Orde II (Kota Baru, Jambi Timur) didorong sebagai Zona Ekspansi untuk Ekonomi Kreatif dan Vokasi; dan Orde III (Pelayangan, Jambi Selatan) dikunci sebagai klaster Pariwisata *Heritage* dan Ketahanan Lingkungan (KPBU TPS3R). Keberhasilan implementasi didukung oleh reformasi tata kelola melalui Digitalisasi Perizinan (OSS-RBA) dan integrasi prinsip ESG secara wajib, menjamin pembangunan yang kompetitif dan berkelanjutan hingga 2045.
2. Kesimpulan analisis SWOT dan PESTEL RUPM Kota Jambi menegaskan perlunya strategi investasi yang agresif dan korektif. Secara PESTEL, Kota Jambi berada di persimpangan peluang besar dari konektivitas regional (Tol Trans-Sumatera) dan adopsi teknologi (Digitalisasi), namun harus merespons tekanan kuat dari aspek lingkungan (ESG) dan tuntutan efisiensi tata kelola. Oleh karena itu, strategi kunci RUPM adalah memanfaatkan Kekuatan Sektor Jasa Unggulan (Kesehatan, TIK, Pariwisata) untuk menangkap Peluang Logistik dan Digitalisasi melalui proyek *Logistic Hub* dan *Smart City*. Secara simultan, RUPM wajib menerapkan solusi korektif (Strategi W-T) untuk mengatasi Kelemahan Defisit Utilitas (NRW) dan Regulasi yang belum efisien dengan mengimplementasikan KPBU dan reformasi OSS-RBA secara masif. Integrasi ini memastikan bahwa Kota Jambi tidak hanya

meningkatkan daya saing ekonomi, tetapi juga mencapai status metropolitan yang tangguh dan berkelanjutan.

3. RUPM Kota Jambi 2025–2045 secara konsisten dan optimis mengadopsi Visi "Pusat Investasi Hijau, Inklusif, dan Berdaya Saing", dengan fokus utama pada Sektor Jasa Tersier Unggulan (Kesehatan, TIK) yang didukung strategi KPBU untuk mengatasi kelemahan infrastruktur kritis. Strategi implementasi berfokus pada Kepatuhan ESG dan Digitalisasi OSS-RBA untuk menciptakan iklim investasi transparan, sementara investasi diarahkan secara spasial melalui klasterisasi Orde Kegiatan. Hal ini memastikan Revitalisasi CBD di pusat kota selaras dengan pengembangan Ekonomi Kreatif/Vokasi di Orde II dan Ketahanan Lingkungan/Budaya di Orde III (Kawasan Prioritas), mengikat seluruh pertumbuhan menjadi satu kesatuan yang tangguh, inklusif, dan adaptif menuju Kota Cerdas dan Berkelanjutan
4. RUPM yang diperbarui menyediakan basis proyek investasi siap tawar (*investment-ready projects*) yang dilengkapi kebutuhan lahan, infrastruktur pendukung, aspek regulasi, dan skema pembiayaan. Hal ini akan mempercepat proses *match making* antara peluang proyek daerah dan calon investor, sehingga mendorong peningkatan realisasi investasi secara lebih efisien dan berbasis data.

8.2. Rekomendasi

Sebagai tindak lanjut dari hasil analisis potensi, strategi, dan evaluasi pelaksanaan investasi, Pemerintah Kota Jambi perlu menyiapkan langkah-langkah strategis yang berorientasi pada penguatan daya saing investasi daerah, peningkatan iklim usaha yang kondusif, serta optimalisasi pemanfaatan potensi ekonomi lokal. Rekomendasi ini disusun sebagai panduan bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan kebijakan investasi secara terarah, berkelanjutan, dan inklusif.

1. Penguatan Kebijakan dan Regulasi Daerah

Pemerintah Kota Jambi disarankan untuk memperkuat kebijakan dan regulasi daerah yang mendukung kemudahan berusaha, termasuk penyederhanaan prosedur perizinan dan pemberian insentif bagi investor strategis. Penyesuaian Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Wali Kota (Perwali) yang relevan perlu dilakukan agar selaras dengan kebijakan nasional di bawah koordinasi Kementerian

Investasi/BKPM, serta mendukung implementasi *Online Single Submission (OSS)* berbasis risiko.

2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas.

Diperlukan Upaya berkelanjutan untuk meningkatkan infrastruktur dasar seperti jaringan jalan, transportasi publik, akses logistik, serta infrastruktur digital yang mendukung ekonomi modern. Peningkatan kualitas infrastruktur ini akan memperkuat konektivitas antarwilayah dan mempermudah distribusi barang, jasa, dan wisatawan. Kolaborasi dengan sektor swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dapat menjadi alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur strategis.

3. Optimalisasi Promosi Investasi Terintegrasi

Pemerintah daerah perlu melaksanakan promosi investasi secara terencana dan terintegrasi, memanfaatkan *platform digital*, media sosial, serta partisipasi aktif dalam pameran dan forum investasi nasional maupun internasional. Selain itu, penyusunan profil proyek investasi unggulan (*investment project profile*) yang menarik dan berbasis data terkini harus terus diperbarui agar informasi yang disampaikan kepada calon investor relevan dan kredibel.

4. Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan

Untuk menjaga daya saing daerah, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah, terutama di lingkungan DPMPTSP, menjadi prioritas. Aparatur harus memiliki kompetensi dalam analisis ekonomi, pelayanan investasi, dan komunikasi lintas budaya. Di sisi lain, peningkatan kualitas tenaga kerja lokal melalui pelatihan vokasional, sertifikasi kompetensi, serta kerja sama dengan perguruan tinggi dan dunia usaha juga perlu diperluas agar selaras dengan kebutuhan sektor unggulan.

5. Penguatan Kolaborasi dan Kemitraan Strategis

Pemerintah Kota Jambi perlu memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pelaku usaha, lembaga keuangan, dan mitra internasional. Pendekatan kolaboratif ini penting untuk membuka akses pasar yang lebih luas, memperkuat kepercayaan investor, dan mempercepat transfer teknologi serta pengetahuan. Kerja sama antar daerah (*inter-regional cooperation*) di wilayah Sumatera juga dapat dikembangkan untuk menciptakan rantai nilai ekonomi yang saling menguntungkan.



6. Perencanaan Investasi yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan

Setiap kebijakan investasi perlu diarahkan agar sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Pemerintah Kota Jambi perlu memastikan bahwa proyek investasi yang masuk memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik (*Environmental, Social, and Governance/ESG*). Potensi investasi hijau seperti energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan pariwisata berbasis ekologi perlu menjadi fokus pengembangan masa depan.

7. Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan

Implementasi RUPM perlu didukung oleh sistem pemantauan dan evaluasi yang terstruktur untuk mengukur capaian, mengidentifikasi hambatan, serta menyesuaikan kebijakan sesuai dengan dinamika ekonomi dan teknologi. DPMPPTSP bersama instansi terkait perlu memperkuat basis data investasi dan menyusun dashboard investasi daerah sebagai alat analisis berbasis real-time untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat.



DAFTAR PUSTAKA

- Achinas, S., Horjus, J., Achinas, V., & Euverink, G. J. W. (2019). A PESTLE Analysis of Biofuels Energy Industry in Europe. *Sustainability*, 11(21), 5981. <https://doi.org/10.3390/su11215981>
- Alimin, E., Eddy, D., Afriani, D., Agusfianto, N. P., Octavia, Y. F., Mulyaningsih, T., Satriawan, S., Yusuf, S. Y. M., Irwansyah, R., Moonti, A., Sudarni, A. A. C., Endrawati, B. F., Suhadarliyah, A., Armiani, A., Andayani, S. U., & Tabun, M. A. (2022). *Manajemen pemasaran: Kajian pengantar di era bisnis modern* (SEVAL Lite). SEVAL Literindo Kreasi.
- Almizan, Santo, & Irsadunas. (2024). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 6, 234–239. <https://doi.org/10.37034/infeb.v6i1.838>
- Antomi, Y. (2019). The Dynamics of Land Use Change in Padang City for Hydrological Modeling. *International Journal of Geomate*, 17(64). <https://doi.org/10.21660/2019.64.33056>
- Bloom, N., Schankerman, M., & Reenen, J. Van. (2007). *Identifying Technology Spillovers and Product Market Rivalry*. <https://doi.org/10.3386/w13060>
- Dhenabayu, R., Kamila, F. A. C., Wahyuni, D., Armawadin, I. D., & Akbar, M. F. (2022). Perkembangan Strategi Bisnis Pt Unilever (Tinjauan Analisis Pestel Dan Swot). *Journal of Digital Business and Innovation Management*, 1(1), 1–21. <https://doi.org/10.26740/jdbim.v1i1.48683>
- Heryadi, D. Y., Rofatin, B., Tedjaningsih, T., & Nurcahya, I. (2024). Implementasi Diversifikasi Konsumsi Pangan Lokal Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Dalam Menu Keluarga Untuk Menunjang Ketahanan Pangan. *Mimbar Agribisnis Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 10(1), 843. <https://doi.org/10.25157/ma.v10i1.12612>
- Isaeva, É. L., Dasuyev, M. L., & Makhtieva, A. B. (2023). The Role and Prospects of Sustainable Development in Economics. *SHS Web of Conferences*, 172, 2002. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202317202002>
- Kazançoğlu, İ., Sağnak, M., Mangla, S. K., & Kazançoğlu, Y. (2020). Circular Economy and the Policy: A Framework for Improving the Corporate Environmental



- Management in Supply Chains. *Business Strategy and the Environment*, 30(1), 590–608. <https://doi.org/10.1002/bse.2641>
- Mahendra, D. W., & Hanifa, N. (2022). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur. *Independent Journal of Economics*, 2(1), 31–46. <https://doi.org/10.26740/independent.v2i1.43626>
- Mubarok, A. (2022). Investasi Etis (Ethical Investment) (Konsep, Dasar Pertimbangan Dan Pendekatan). *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 5(1), 766–783. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.646>
- Niu, Z. (2024). Risk and Opportunity of Diageo: PESTEL and SWOT Analysis. *Finance & Economics*, 1(9). <https://doi.org/10.61173/wdw94h39>
- Paramita, R., & Christianingrum, R. (2022). Pengaruh Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja. *Jurnal Budget Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, 2(1), 32–50. <https://doi.org/10.22212/jbudget.v2i1.36>
- Rasn, K. H., Nsaif, Q. A., Al-Obaidi, M. A., & John, Y. M. (2021). Designation of Flood Risk Zones Using the Geographic Information System Technique and Remote Sensing Data in Wasit, Iraq. *Geomatics and Environmental Engineering*, 15(3), 129–140. <https://doi.org/10.7494/geom.2021.15.3.129>
- Ristianawati, Y., & Hartono, S. B. (2022). Determinasi Tantangan FI, Manfaat FI, Dan Realisasi FI Pada Strategi Agility Diversifikasi Investasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 699. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4676>
- Rita, R., Saputri, H., & Mira, M. (2024). Green Accounting :“Dampak Transformasi Energi Hijau Dalam Pengelolaan Lingkungan Yang Berkelanjutan”. *Jurnal Ekualisasi*, 6(1), 1–9. <https://doi.org/10.60023/bmvsbr61>
- Sigcha, E., Moscoso, A. M., Siguenza-Guzman, L., & Jadán, D. (2020). *PESTEL Analysis as a Baseline to Support Decision-Making in the Local Textile Industry*. 144–156. https://doi.org/10.1007/978-3-030-59194-6_13
- Sugiatni, E. (2022). *Kewirausahaan Dalam Sistem Perkoperasian*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/zjc9a>
- Thannoun, R., & Ismaeel, O. A. (2024). Flood Risk Vulnerability Detection Based on the Developing Topographic Wetness Index Tool in Geographic Information System. *Iop Conference Series Earth and Environmental Science*, 1300(1), 12012. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1300/1/012012>



- Wahyudi, H., & Zapita, J. (2022). Efek Infrastruktur Jalan, Listrik, PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) Bagi Pertumbuhan PDRB Di Pulau Sumatera. *Jurnal Studi Pemerintahan Dan Akuntabilitas*, 1(2), 139–149.
<https://doi.org/10.35912/jastaka.v1i2.1420>
- Zhang, R., Luo, L., & Du, J. (2023). The Influence of Fiscal Policy Uncertainty on Corporate Total Factor Productivity: Evidence From Chinese Public Companies. *Contemporary Economic Policy*, 41(3), 532–554.
<https://doi.org/10.1111/coep.12606>



LAMPIRAN



Lampiran 1. Misi RUPM Kota Jambi 2025-2045

MISI RUPM KOTA JAMBI 2025-2045

Misi 1: Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif dan Berdaya Saing
Misi 2: Mendorong Pemerataan dan Keadilan Investasi Antar Wilayah
Misi 3: Mengembangkan Investasi Hijau dan Ekonomi Berkelanjutan
Misi 4: Memperkuat Sektor Unggulan dan Ekonomi Kreatif
Misi 5: Mewujudkan Kota Jambi sebagai Kota Cerdas (Smart City) dan Pusat Layanan Investasi Digital
Misi 6: Meningkatkan Kolaborasi dan Promosi Investasi Daerah

Misi 1 RUPM: Iklim investasi kondusif & berdaya saing

- RPJPD yang sejalan: Misi 3 (Transformasi tata kelola), Misi 4 (Penegakan hukum, ketenteraman, ketertiban umum, stabilitas ekonomi makro).
- RPJMD yang sejalan: Misi 3 (Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik), Misi 2 (Penguatan kapasitas ekonomi perkotaan), Misi 4 (Penguatan ketertiban dan ketenteraman lingkungan serta partisipasi masyarakat).

Misi 2 RUPM: Pemerataan & keadilan investasi antarkawasan

- RPJPD yang sejalan: Misi 6 (Pembangunan kota yang merata dan berkeadilan), Misi 2 (Transformasi ekonomi inklusif, sejahtera, adil, merata, berkelanjutan).
- RPJMD yang sejalan: Misi 2 (Penguatan kapasitas ekonomi perkotaan), Misi 5 (Penguatan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan hidup yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan).

Misi 3 RUPM: Investasi hijau & ekonomi berkelanjutan

- RPJPD yang sejalan: Misi 5 (Ketahanan sosial budaya dan sumber daya ekologi yang berkelanjutan), Misi 2 (Transformasi ekonomi berkelanjutan).
- RPJMD yang sejalan: Misi 5 (Penguatan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan hidup yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan).

Misi 4 RUPM: Penguatan sektor unggulan & ekonomi kreatif

- RPJPD yang sejalan: Misi 2 (Transformasi ekonomi menuju nilai tambah dan daya saing), Misi 5 (Ketahanan sosial budaya/heritage).
- RPJMD yang sejalan: Misi 2 (Penguatan kapasitas ekonomi perkotaan), Misi 1 (Penguatan kualitas sumber daya manusia).

Misi 5 RUPM: Kota cerdas & layanan investasi digital

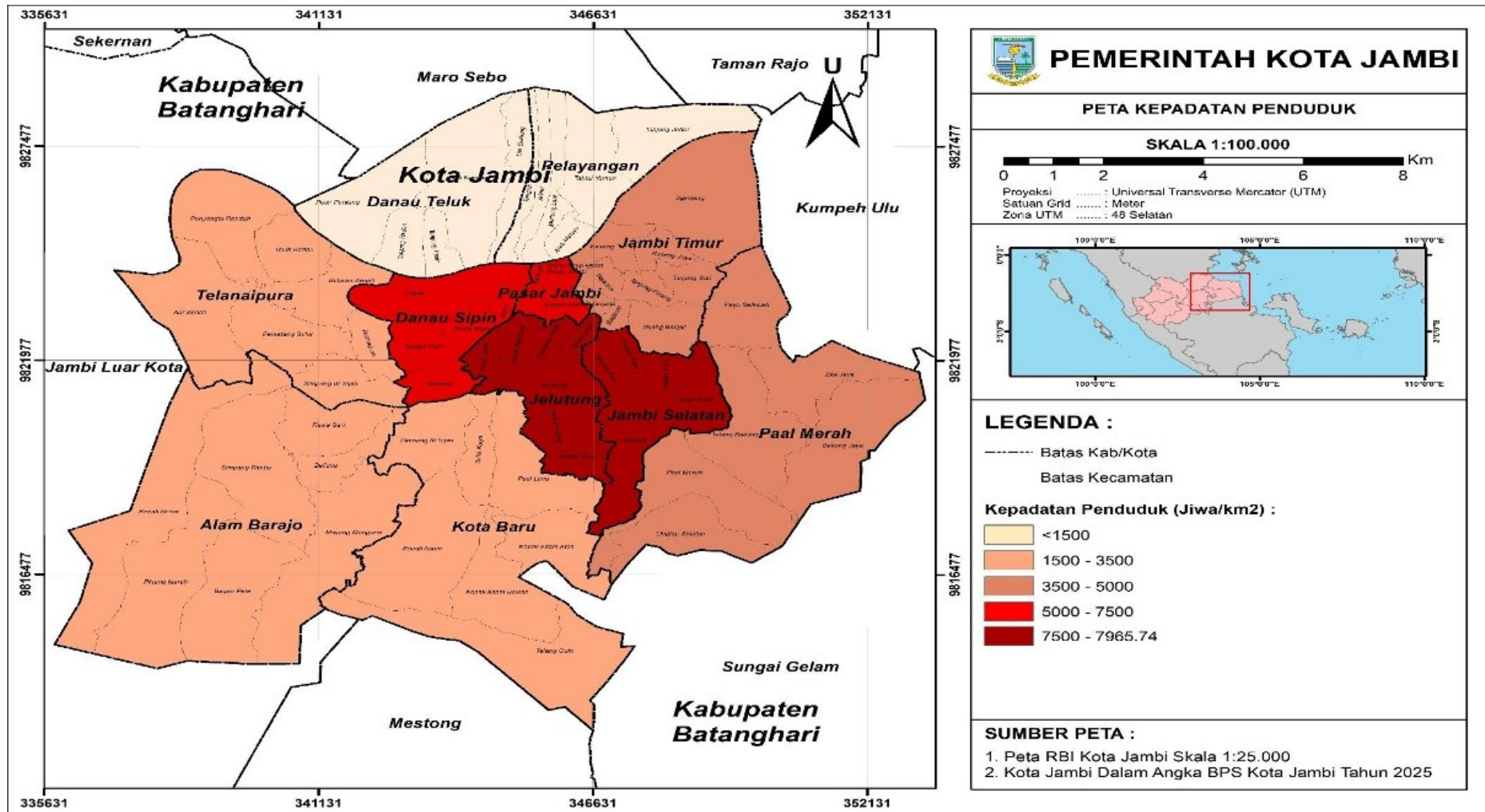
- RPJPD yang sejalan: Misi 3 (Transformasi tata kelola modern), Misi 7 (Penyediaan sarana-prasarana pelayanan publik yang berkualitas dan ramah lingkungan).
- RPJMD yang sejalan: Misi 3 (Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik), Misi 5 (Pengelolaan infrastruktur dan lingkungan hidup, termasuk smart utility).

Misi 6 RUPM: Kolaborasi & promosi investasi

- RPJPD yang sejalan: Misi 4 (Penegakan hukum, ketenteraman, partisipasi, stabilitas), Misi 8 (Kesinambungan pembangunan daerah).
- RPJMD yang sejalan: Misi 4 (Ketertiban-ketenteraman & partisipasi masyarakat), Misi 1 (Penguatan kualitas SDM).

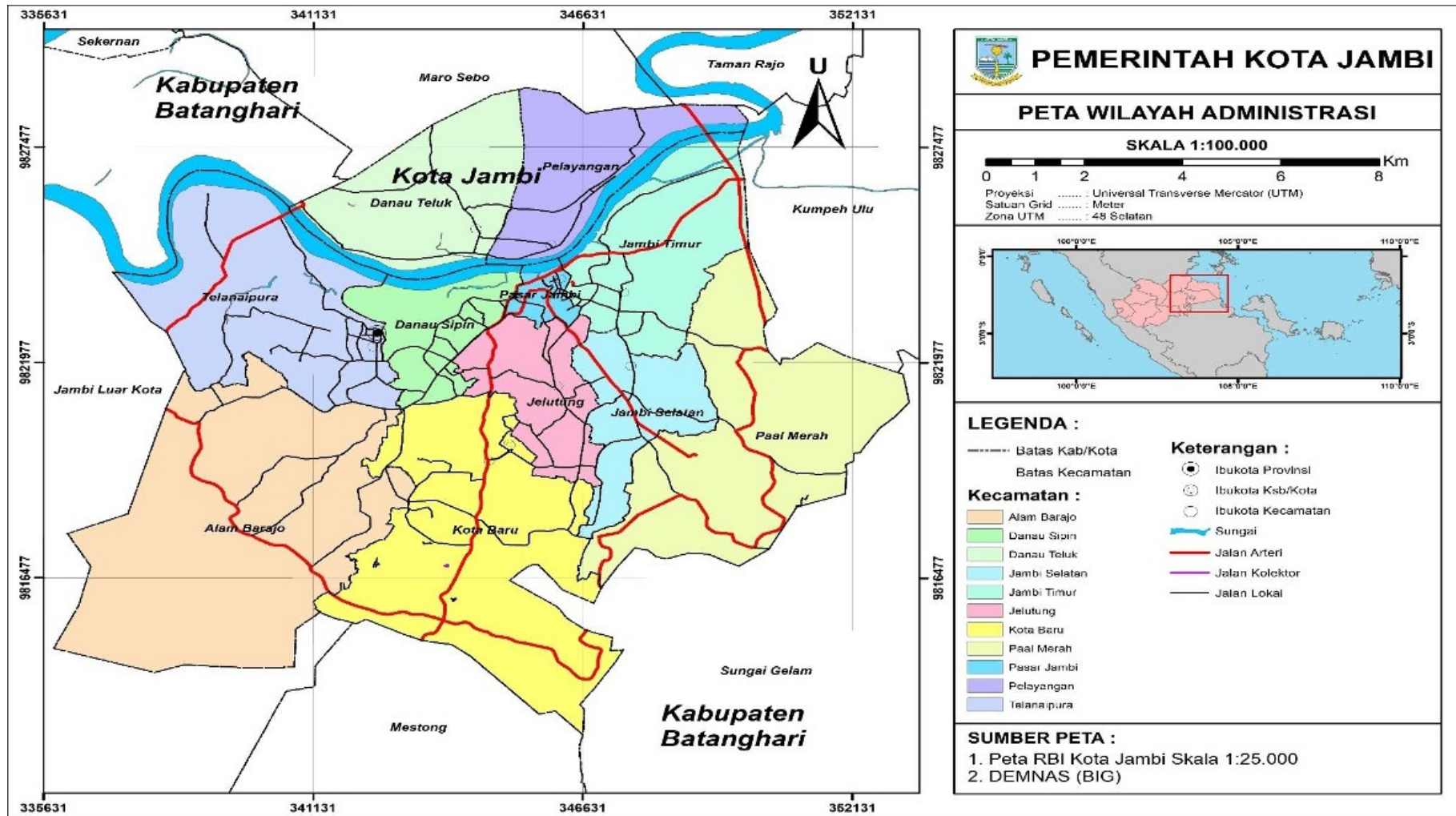


Lampiran 2. Peta Kepadatan Penduduk





Lampiran 3. Peta Administrasi





Lampiran 4. Realisasi Investasi Kota Jambi Periode 2018-2025 (Satuan Rp Juta)

Tahun	PMA (Rp miliar)	PMDN (Rp miliar)	Total (Rp miliar)	Pertumbuhan Total Investasi (%)
2018	338,062	153,869	491,931	—
2019	425,926	192,908	618,834	+25,8
2020	62,271	106,291	168,562	-72,8
2021	105,285	547,898	653,182	+287,5
2022	91,735	653,053	744,788	+14,0
2023	254,914	1.103,057	1.357,972	+82,3
2024	240,674	1.210,073	1.450,747	+6,8
2025*	163,729	663,501	827,230	-43,0

Sumber : <https://data.bkpm.go.id>



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI

Jl. H. Zainir Haviz, Komplek Perkantoran Walikota, Kec. Kota Baru, Kota Jambi – 36128

